



Pemerintah Daerah
Provinsi Papua
2024

Peraturan Daerah Provinsi Papua
Nomor 2 Tahun 2025

RPJPD

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah

**PROVINSI
PAPUA
2025-2045**





GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Papua perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- b. bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

c. bahwa/2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang/3

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan/4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan/5

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
PAPUA TAHUN 2025-2045.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua.

5. Badan/6

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Papua periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua dan memperhatikan RPJPN Nasional.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Provinsi Papua dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dalam kerangka dan tujuan nasional.
- (2) Penyusunan RPJPD bertujuan untuk:
 - a. memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diinginkan pada tahun 2025;
 - b. menjabarkan indikasi dari gambaran umum yang diinginkan dan bagaimana mencapainya;
 - c. memberikan pedoman umum bagaimana mencapai sasaran pembangunan yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan berbentuk arah kebijakan;
 - d. merupakan pedoman bagi calon Gubernur dalam menyusun visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan;
 - e. merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD;
 - f. RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyusunan RPJPD, meliputi:
 - a. penjabaran visi, misi dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok disetiap tahap pembangunan 5 (lima) tahunan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan memuat sekurang-kurangnya: latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat sekurang-kurangnya: aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi, kebutuhan sarasa prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis memuat sekurang-kurangnya: Permasalahan dan isu strategis daerah;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah memuat sekurang-kurangnya: Visi Daerah Tahun 2025-2045, dan Misi Daerah Tahun 2025-2045;
 - e. Bab V Arah kebijakan dan Sasaran Pokok memuat sekurang-kurangnya 1. Arah kebijakan per-Lima tahun, 2. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045: 17 Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 Indikator Utama Pembangunan;
 - f. Bab VI memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
VISI DAN MISI
Pasal 5

- (1) Visi Provinsi Papua yaitu Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru dan agro *industry*.
- (2) Misi Provinsi Papua adalah:
 1. transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan inklusif;
 2. transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan produktif;
 3. transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi;
 4. keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
 5. pembangunan masyarakat yang berketahanan dari sisi sosial budaya dan ekologi;
 6. pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 7. pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan mudah diakses, serta kemandirian pangan; dan
 8. peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJPD.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Papua.
- (2) Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD menurut Visi, Misi dan Program Gubernur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dapat digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD dalam hal RPJMD periode berkenaan belum ditetapkan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya dan/atau masa Pemerintahan Pejabat Gubernur.

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD sesuai dengan arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD dalam hal RPJPD periode berkenaan belum ditetapkan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Gubernur yang sedang menjabat pada periode tahun terakhir RPJPD (Tahun 2044) diwajibkan menyusun rancangan RPJPD periode berikutnya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 23 Januari 2025
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
YOHANES WALILO, S. Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM


NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum
NIP. 19741205 200212 1 007



VISI PROVINSI PAPUA 2025-2045

*"Provinsi Papua Maju dan Berkelanjutan
Berkbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan
Ekonomi Kreatif"*



KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. Penyusunan RPJPD adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan Provinsi Papua yang optimal dan diinginkan pada akhir tahun 2045, sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah. Karena itu, dokumen ini memberikan gambaran perkembangan kondisi pembangunan dan kondisi saat ini sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan isu strategis daerah 20 tahun ke depan. Dalam hal ini, dokumen RPJPD ini juga menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua termasuk indikator utama pembangunan dan strategi untuk mencapainya dalam 20 tahun ke depan.

Sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional, penyusunan RPJPD Provinsi Papua juga merupakan langkah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Provinsi Papua. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan Provinsi Papua untuk: (i) **memenuhi kebutuhan dasar** yaitu pendidikan yang mudah dan berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah dan murah, peningkatan perekonomian masyarakat secara mandiri, pelayanan sosial yang berkualitas, peningkatan pelayanan Keagamaan, pemenuhan Infrastruktur dasar; (ii) **menumbuhkan kebebasan**, yaitu bebas dari rasa takut, bebas berpendapat, bebas beraktivitas sesuai talenta yang Tuhan berikan, yang diseimbangkan dengan menghormati dengan hak-hak orang lain; serta (iii) **menumbuhkan kepercayaan diri** yaitu meningkatnya harkat dan martabat serta kepercayaan diri seluruh orang Papua.

Semoga dokumen RPJPD ini menjadi rujukan dan pegangan utama bagi seluruh stakeholders di Provinsi Papua, untuk bersama-sama mewujudkan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Papua yaitu “**Provinsi Papua yang Maju dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan Ekonomi Kreatif**”. Visi pembangunan jangka panjang ini, hanya dapat terwujud apabila Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan dukungan luas dari seluruh pelaku pembangunan, baik Pemerintah Pusat, lembaga keagamaan, lembaga adat, MRP, DPRP, TNI, POLRI, mitra kerja pembangunan daerah, sektor swasta, BUMN, instansi vertikal dan seluruh masyarakat Papua.

Saya sebagai Gubernur mengajak kepada semua aparaturnya daerah untuk bekerja menjalankan RPJPD Provinsi Papua secara sungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen RPJPD ini kita susun, akan benar-benar berarti apabila dapat diwujudkan untuk kebangkitan, kemandirian, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua.



Sekian dan terima kasih semoga Tuhan Maha Kasih melindungi dan memberkati kita semua.

Jayapura, _____ 2024

Pj. Gubernur Papua



Ramses Limbong, S.IP., M.Si.

Mayjen TNI. (Purn)





DAFTAR ISI



BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2	DASAR HUKUM.....	I-3
1.3	KETERKAITAN ANTARDOKUMEN.....	I-6
1.3.1.	Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041I-6	
1.3.2.	Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	I-7
1.3.3.	Keterkaitan RPJPD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD	I-7
1.3.4.	Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .I-9	
1.4	TUJUAN PENYUSUNAN RPJPD.....	I-9
1.5	TAHAP PENYUSUNAN RPJPD.....	I-9
1.6	SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-3
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-3
2.1.1	Aspek Geografi	II-3
2.1.2	Kondisi Fisik Wilayah Kajian	II-37
2.1.3	Kondisi (Status) Lingkungan Hidup.....	II-56
2.1.4	Potensi Pengembangan Wilayah	II-62
2.1.5	Aspek Demografi.....	II-64
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-81
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-81
2.2.1.2	Indeks Gini	II-82
2.2.1.3	Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal	II-84
2.2.2	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-89



2.2.3	Angka Harapan Hidup	II-91
2.2.4	Harapan Lama Sekolah	II-93
2.2.5	Rata-rata Lama Sekolah	II-94
2.2.6	Prevalensi Stunting	II-96
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	II-97
2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-97
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-111
2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-139
2.4	ASPEK DAYA SAING	II-144
2.4.1	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-144
2.4.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-146
2.4.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-149
2.4.4	Daya Saing Iklim Investasi	II-151
2.5	EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025	II-153
2.5.1	Rekomendasi Tentang Peningkatan Kesejahteraan	II-156
2.5.2	Rekomendasi Tentang Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah	II-157
2.5.3	Rekomendasi Tentang Peningkatan Pelayanan Umum	II-159
2.5.4	Rekomendasi Tentang Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-162
2.5.5	Rekomendasi Tentang Peningkatan Iklim Berinvestasi	II-165
2.6	PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH	II-165
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1	PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN	III-1
3.1.1	Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah	III-1
3.1.2	Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya	III-3
3.1.3	Penanganan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum Belum Optimal	III-5
3.1.4	Tingkat Kerawanan Politik dan Demokrasi yang Patut Diwaspadai	III-5
3.1.5	Sarana Prasarana dan Konektivitas yang Belum Memadai	III-6
3.1.6	Kualitas Lingkungan Hidup yang Belum Maksimal	III-8
3.1.7	Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	III-8
3.2	ISU STRATEGIS	III-10
3.2.1	Isu Internasional	III-10
3.2.2	Isu Nasional	III-13
3.2.3	Isu Strategis Domestik Papua	III-18
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1	VISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045	IV-1
4.2	MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045	IV-5
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1	ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1.1	Tahap Pertama (2025-2029)	V-2
5.1.2	Tahap Kedua (2030-2034)	V-3
5.1.3	Tahap Ketiga (2034-2039)	V-3
5.1.4	Tahap Keempat (2040-2045)	V-4
5.2	SASARAN POKOK	V-6
5.2.1	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Daerah	V-6
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi	V-19
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1	KAIDAH PELAKSANAAN	VI-1

6.2	<i>PENGENDALIAN DAN EVALUASI</i>	VI-3
6.2.1	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RPJPD Provinsi.....	VI-3
6.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi.....	VI-4
6.2.3	Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD	VI-4

LAMPIRAN	1
1. Kemantapan Jalan Provinsi Papua Tahun 2024	1
2. Ring Road Jayapura – Sentani (lingkar dalam)	2
3. Peta Lampiran SK Jaringan Jalan Provinsi Papua	3



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jadwal Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045.....	I-10
Tabel II.1 Luas Wilayah Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	II-4
Tabel II.2 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Geografi dan Topografi Wilayah di Provinsi Papua Tahun 2014-2021	II-5
Tabel II.3 Sebaran Luas Jenis Ekoregion Provinsi Papua.....	II-9
Tabel II.4 Luas Sebaran Wilayah Ekoregion Laut.....	II-11
Tabel II.5 Luas Sebaran DAS berdasarkan Batas Fungsional	II-13
Tabel II.6 Luas Daerah Aliran Sungai berdasarkan Kategori di Provinsi Papua.....	II-26
Tabel II.7 Sebaran luas Topografi per Kabupaten di Provinsi Papua	II-39
Tabel II.8 Wilayah Sungai dan Water District di Provinsi Papua.....	II-44
Tabel II.9 Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua	II-47
Tabel II.10 Curah Hujan Rata-Rata Provinsi Papua	II-47
Tabel II.11 Luas Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2020 s/d 2022	II-49
Tabel II.12 Persentase luas bentang alam di Provinsi Papua	II-50
Tabel II.13 Presentase luas vegetasi alami di Provinsi Papua	II-52
Tabel II.14 Nilai ketersediaan, kebutuhan, selisih pangan di Provinsi Papua tahun 2022	II-56
Tabel II.15 Nilai kebutuhan air lahan dan air domestik di Provinsi Papua tahun 2022.....	II-60

Tabel II.16 Nilai ketersediaan, kebutuhan, selisih air di Provinsi Papua tahun 2022.....	II-61
Tabel II.17 Hasil Perhitungan <i>Location Quotient Analysis</i> Provinsi Papua Terhadap Indonesia Berdasarkan PDRB-ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.18 Hasil Perhitungan <i>Export Employment Analysis</i> Provinsi Papua Terhadap Indonesia Berdasarkan PDRB-ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.19 Hasil Perhitungan <i>Economic Base Multiplier Analysis</i> Indonesia Terhadap Provinsi Papua Berdasarkan PDRB-ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2023.	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.20 Perhitungan Shift-Share Analysis Indonesia Terhadap Provinsi Papua Berdasarkan PDRB-ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.21 Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2022.....	II-64
Tabel II.22 Beberapa Parameter Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045.....	II-65
Tabel II. 23 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua (Ribu Jiwa)	II-65
Tabel II.24 Laju Pertumbuhan Penduduk Dari Tahun 2020 Sampai Tahun 2035.....	II-66
Tabel II.25 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 (Ribu Jiwa).....	II-66
Tabel II.26 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Laki-Laki (L) dan Perempuan (P)) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 (Ribu Jiwa).....	II-67
Tabel II.27 Sex Ratio Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 (Persen)	II-68
Tabel II.28 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua (Persen).....	II-69
Tabel II.29 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua (Persen).....	II-70
Tabel II.30 Total Fertility Rate (TFR) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045	II-70
Tabel II. 31 Infant Mortality Rate (IMR) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045	II-71
Tabel II.32 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2020	II-72
Tabel II.33 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2025	II-73
Tabel II.34 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2030	II-73
Tabel II.35 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2035	II-74
Tabel II.36 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2040	II-74
Tabel II.37 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2045	II-74
Tabel II.38 Migrasi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020	II-75



Tabel II.39 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Migrasi Masuk dan Keluar	II-77
Tabel II.40 Angka Beban Tanggung (Dependency Ratio) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 (Persen)	II-81
Tabel II.41 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.42 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (%).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.43 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.44 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (%).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.45 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.46 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua.....	II-85
Tabel II.47 Kampung Prioritas Sasaran Pembangunan Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	II-86
Tabel II.48 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua.....	II-89
Tabel II.49 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua Tahun Ajaran 2021/2022.....	II-98
Tabel II.50 Angka Kematian Bayi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021... II-	98
Tabel II.51 Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021. II-	99
Tabel II. 52 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022.....	II-99
Tabel II.53 Jumlah Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022.....	II-100
Tabel II.54 Panjang Jalan di Provinsi Papua (km).....	II-100
Tabel II. 55 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2022	II-101
Tabel II.56 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II-103
Tabel II.57 Karakteristik Penduduk Papua Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II-104
Tabel II.58 Capaian IDI Provinsi Papua Berdasarkan Aspek dan Indikator Penyusunnya 2021-2023	II-108
Tabel II.59 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua Tahun 2020 (Jiwa).....	II-108
Tabel II.60 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial di Provinsi Papua Tahun 2019-2023	II-110

Tabel II.61 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Menurut Jenis Kredit di Provinsi Papua Tahun 2019-2023	II-110
Tabel II.62 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Papua Tahun 2023	II-111
Tabel II.63 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2023.....	II-112
Tabel II.64 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – Agustus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021-2023	II-112
Tabel II.65 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022	II-114
Tabel II.66 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Papua Tahun 2019-2023	II-116
Tabel II.67 Konsumsi Setara Kedelai (Tahu, Tempe, Kecap) di Provinsi Papua Tahun 2020... II-116	
Tabel II.68 Konsumsi Setara Kedelai di Provinsi Papua Tahun 2018-2020	II-116
Tabel II.69 Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2022.....	II-119
Tabel II.70 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022	II-120
Tabel II.71 Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha).....	II-121
Tabel II.72 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya Berdasarkan Metode Perhitungan di Provinsi Papua Tahun 2023	II-122
Tabel II.73 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya Berdasarkan Metode Perhitungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023	II-122
Tabel II.74 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Tipe Daerah di Provinsi Papua Tahun 2020-2023	II-123
Tabel II.75 Persentase Kepemilikan NIK Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020	II-124
Tabel II.76 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar)	II-125
Tabel II.77 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa).....	II-126
Tabel II.78 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Juta US\$).....	II-131
Tabel II.79 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Miliar Rupiah).....	II-132
Tabel II.80 Perkembangan Nilai IPP dan Domain Penyusun IPP Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-133



Tabel II.81 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2021	II-134
Tabel II.82 Perkembangan Warisan Tak Benda Papua.....	II-135
Tabel II.83 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua.....	II-139
Tabel II.84 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021.....	II-141
Tabel II.85 Produksi Komoditas Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021	II-141
Tabel II.86 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Tahun 2022.....	II-142
Tabel II.87 Produksi Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.....	II-142
Tabel II.88 Jumlah Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020.....	II-143
Tabel II.89 PDRB Per Kapita Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2022 (Rupiah)	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.90 PDRB Per Kapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2022 (Rupiah)	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.91 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023	II-148
Tabel II.92 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum.....	II-149
Tabel II.93 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet Telepon Seluler	II-150
Tabel II.94 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi.....	II-151
Tabel II.95 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2021-2023.....	II-151
Tabel II.96 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek di Provinsi Papua, 2016-2020	II-152
Tabel II.97 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek Berdasarkan Metode Baru di Provinsi Papua, 2021-2022	II-152
Tabel II.98 Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021.....	II-152
Tabel II.99 Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021	II-153
Tabel II.100 Rekomendasi Tentang Peningkatan Kesejahteraan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025.....	II-156
Tabel II.101 Rekomendasi Tentang Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025.....	II-157
Tabel II.102 Rekomendasi Tentang Peningkatan Pelayanan Umum Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025	II-159

Tabel II.103 Rekomendasi Tentang Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025	II-162
Tabel II.104 Rekomendasi Tentang Peningkatan Iklim Berinvestasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025	II-165
Tabel II.105 Pengembangan Sistem Pusat Permukiman dan Kawasan Strategis di Provinsi Papua II-169	
Tabel III.1 Permasalahan Pokok 1: Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah	III-2
Tabel III.2 Permasalahan Pokok 2: Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya ..	III-4
Tabel III.3 Permasalahan Pembangunan Sarana Prasarana dan Konektivitas di Provinsi Papua..	III-6
Tabel III.4 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua Tahun 2018-2022	III-8
Tabel III.5 Isu Strategis Internasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045	III-11
Tabel III.6 Isu Strategis Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.....	III-13
Tabel IV.1 Sasaran Visi dan Indikator Pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Papua 2025-2045	IV-3
Tabel V.1 Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045 V-5	
Tabel V.2 Sasaran Pokok Pembangunan Daerah.....	V-14
Tabel V.3 Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045	V-20



DAFTAR GAMBAR



Gambar II.1	Peta Batas Administrasi Provinsi Papua	II-5
Gambar II.2	Peta Wilayah Adat Provinsi Papua.....	II-6
Gambar II.3	Peta Ekoregion Darat dan Laut Provinsi Papua.....	II-8
Gambar II.4	Peta Batas Fungsional Daerah Aliran Sungai.....	II-13
Gambar II.5	Peta Topografi Provinsi Papua.....	II-38
Gambar II.6	Peta Topografi Provinsi Papua.....	II-39
Gambar II.7	Persebaran Jenis Tanah di Provinsi Papua	II-41
Gambar II.8	Persebaran Jenis Batuan di Provinsi Papua.....	II-43
Gambar II.9	Sebaran Wilayah Sungai di Provinsi Papua.....	II-44
Gambar II.10	Sebaran <i>Water District</i> di Provinsi Papua	II-45
Gambar II.11	Sebaran Sungai dan Danau di Provinsi Papua.....	II-45
Gambar II.12	Sebaran akuifer di Provinsi Papua	II-46
Gambar II.13	Peta CAT di Provinsi Papua (sebelum pemekaran).....	II-46
Gambar II.14	Perubahan Penutupan Lahan Tahun 2020 s/d 2022	II-49
Gambar II.15	Sebaran karakteristik bentang alam di Provinsi Papua.....	II-52
Gambar II.16	Karakteristik vegetasi di Provinsi Papua	II-54
Gambar II.17	Selisih ketersediaan bahan pangan di Provinsi Papua tahun 2022	II-58
Gambar II.18	Status daya dukung penyedia bahan pangan di Provinsi Papua tahun 2022	II-58

Gambar II.19 Ketersediaan air bersih di Provinsi Papua tahun 2022.....	II-59
Gambar II.20 Kebutuhan air bersih di Provinsi Papua tahun 2022	II-60
Gambar II.21 Selisih ketersediaan air bersih di Provinsi Papua tahun 2022.....	II-61
Gambar II.22 Status daya dukung penyedia air di Provinsi Papua tahun 2022	II-62
Gambar II.23 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua.....	II-64
Gambar II.24 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2021-2045	II-68
Gambar II.25 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2020 (Persen).....	II-78
Gambar II.26 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2025 (Persen).....	II-78
Gambar II.27 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2030 (Persen).....	II-79
Gambar II.28 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2035 (Persen).....	II-79
Gambar II.29 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2040 (Persen).....	II-80
Gambar II.30 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2045 (Persen).....	II-80
Gambar II.31 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2019-2023 *).....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar II.32 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2023	Error! Bookmark not defined.
Gambar II.33 Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Tahun 2020-2040	II-88
Gambar II.34 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2023	II-90
Gambar II.35 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi Papua Tahun 2019-2023	II-91
Gambar II.36 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Tahun 2019-2023	II-91
Gambar II.37 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2019-2023	II-92
Gambar II.38 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023	II-92
Gambar II.39 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2023	II-93

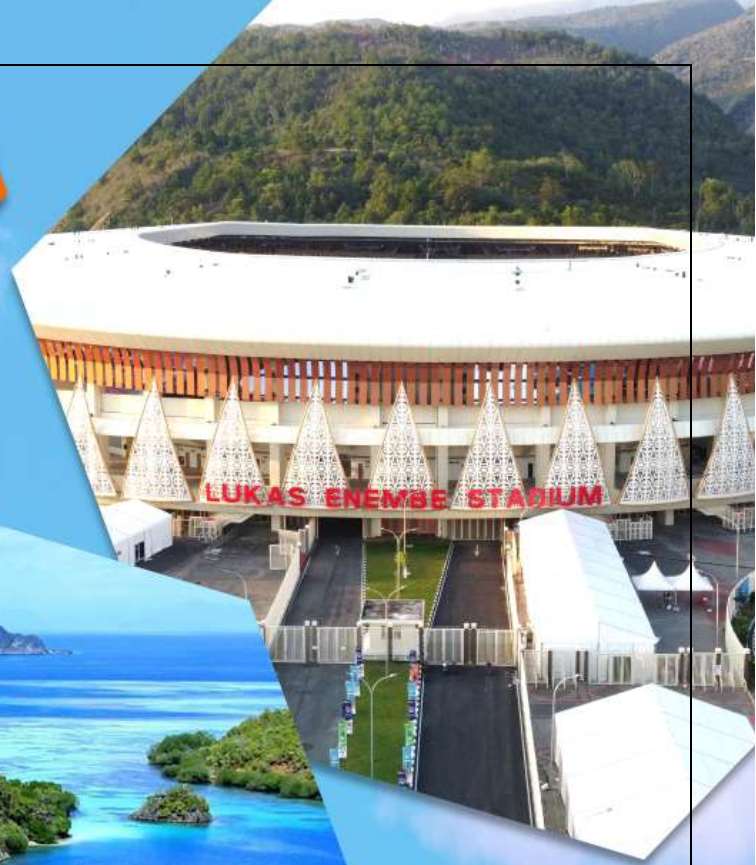
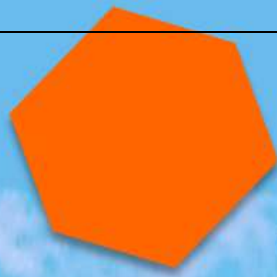


Gambar II.40 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023	II-94
Gambar II.41 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023	II-95
Gambar II.42 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2022	II-95
Gambar II.43 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023.....	II-96
Gambar II.44 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022	II-96
Gambar II.45 Angka Partisipasi Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021	II-97
Gambar II.46 Rasio Dokter Umum per 1.000 Penduduk Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022.....	II-100
Gambar II.47 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II-102
Gambar II.48 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II-103
Gambar II.49 Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Papua Tahun 2014-2020	II-105
Gambar II.50 Rasio Penduduk Terhadap Personil Polisi di Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II-106
Gambar II.51 Jumlah Sarana Keamanan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II-106
Gambar II.52 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Tahun 2009-2023	II-107
Gambar II.53 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar Menurut Jenis PIP di Provinsi Papua Tahun 2021	II-109
Gambar II.54 Persentase Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) - Agustus di Provinsi Papua Tahun 2022	II-113
Gambar II.55 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023.....	II-113
Gambar II.56 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Agustus di Provinsi Papua 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II.57 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023 (Sebelum Pemekaran Provinsi)	Error! Bookmark not defined.

Gambar II.58 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II-115
Gambar II.59 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 kkal/Kapita/Hari di Provinsi Papua Tahun 2016-2020	II-115
Gambar II.60 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen).....	II-117
Gambar II.61 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen).....	II-117
Gambar II.62 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022	II-118
Gambar II.63 Persentase Penerima BPNT dan Bantuan Sembako Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023	II-120
Gambar II.64 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Papua Tahun 2019-2022.....	II-121
Gambar II.65 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020.....	II-123
Gambar II.66 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun di Provinsi Papua Tahun 2015-2022	II-124
Gambar II.67 Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua 2020-2022	II-125
Gambar II.68 Indeks Desa Membangun Provinsi Papua	II-125
Gambar II.69 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) ...	II-126
Gambar II.70 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang).....	II-127
Gambar II.71 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit).....	II-128
Gambar II.72 Persentase Penumpang Datang dan Berangkat Dalam Negeri Menurut Pelabuhan Provinsi Papua Tahun 2022	II-128
Gambar II.73 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Pesawat Menurut Bandara di Provinsi Papua Tahun 2023	II-130
Gambar II.74 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Menurut Bandara di Provinsi Papua Tahun 2022	II-130
Gambar II.75 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Provinsi Papua Tahun 2016-2023	II-131
Gambar II.76 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	II-132



Gambar II.77 Jumlah Organisasi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi Papua Tahun 2016-2019 (Unit).....	II-133
Gambar II.78 Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019	II-136
Gambar II.79 Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori Dari IFLA/UNESCO pada 34 Provinsi Di Indonesia Dan Secara Nasional.....	II-137
Gambar II.80 Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Keseluruhan Koleksi Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional.....	II-137
Gambar II.81 Sebaran Perpustakaan Dalam Peta Secara Nasional	II-138
Gambar II.82 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016	II-138
Gambar II.83 Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2017-2023	II-140
Gambar II.84 Komponen Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2017-2023.....	II-140
Gambar II.85 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah).....	II-145
Gambar II.86 Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2021	II-149
Gambar II.87 Refleksi Pembangunan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025	II-155
Gambar II.88 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Papua Tahun 2023-2042.....	II-167
Gambar II.89 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Papua Tahun 2023-2042... ..	II-168
Gambar III.1 Megatren Global 2045.....	III-10
Gambar III.2 Isu-Isu Strategis Super Prioritas Domestik dalam Transformasi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2045	III-18
Gambar IV.1 Penyelarasan RPJPN 2025-2045 dan RIPP 2022-2041 dalam RPJPD Papua 2025-2045.....	IV-6
Gambar V.1 Tahapan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045.....	V-2



RPJPD
Provinsi Papua
2025-2045



BAB I

Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum dalam penyusunan RPJPD; keterkaitan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; tujuan penyusunan RPJPD; serta sistematika penulisan dokumen RPJPD.



***PLBN SKOUW,
Distrik Muara Tami,
Jayapura***

*menghubungkan langsung
Provinsi Papua dengan Negara
Papua Nugini, yang diresmikan
pada 9 Mei 2017*





URGENSI RPJPD

01

Akan berakhirnya RPJPD 2005-2025 dan bertepatan dengan momen Pilkada 2024 secara serentak maka perlu adanya kesepakatan agar RPJPN dan RPJPD 2025-2045 akan menjadi pedoman untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi dan misi pembangunan 5 tahunan

04

Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Papua jangka panjang, termasuk strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya dalam 4 tahapan pembangunan

02

Musyawarah RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan (UU 25/2004 Pasal 11 ayat (3))

05

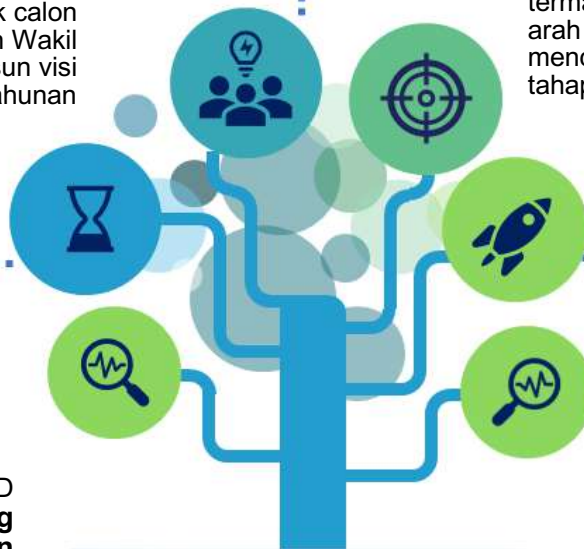
Mendorong pembangunan Provinsi Papua jangka panjang yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional

03

Memberikan gambaran umum tentang kondisi pembangunan Provinsi Papua yang optimal dan diinginkan pada akhir tahun 2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah

06

Mewujudkan Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah





BAB I

Pendahuluan



1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Berakhirnya dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Untuk itu perlu segera disusun dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045 agar dapat menjadi pedoman bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan menyusun visi dan misi pembangunan untuk lima tahun ke depan. Ketika dokumen RPJPD telah ditetapkan, juga akan menjadi pedoman bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam menyusun dan menetapkan dokumen RPJMD Provinsi Papua tahun 2025-2029 (tahap 1 pembangunan lima tahunan).

Penyusunan dokumen RPJPD merupakan mandat undang-undang. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Musyawarah RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum periode RPJPD yang sedang berjalan. Karena RPJPD Provinsi Papua akan berakhir tahun 2025, maka musyawarah RPJPD harus dilaksanakan pada tahun 2024. Tentu saja musyawarah RPJPD harus sudah dilaksanakan ketika rancangan awal dokumen RPJPD telah disusun. Selanjutnya hasil musyawarah RPJPD akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan RPJPD untuk diajukan ke DPRPD dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dokumen RPJPD memberikan gambaran umum tentang kondisi pembangunan Provinsi Papua yang optimal dan diinginkan pada akhir tahun 2045 sesuai dengan karakteristik,



inovasi dan pengembangan daerah. Karena itu dokumen ini memberikan gambaran perkembangan kondisi pembangunan dan kondisi saat ini sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan isu strategis daerah.

Dokumen RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 juga menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua termasuk indikator utama pembangunan dan strategi untuk mencapainya dalam empat tahap pembangunan. Karena itu dokumen RPJPD memuat mengenai kondisi pembangunan saat ini, isu dan persoalan strategis dan visi, misi dan kebijakan pembangunan beserta targetnya yang akan dicapai pada akhir tahun 2045.

Dalam era Pembangunan saat ini berpusat pada Pembangunan Manusia (people centered development), yaitu peningkatan kualitas Pembangunan yang berorientasi pada kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan Masyarakat serta lingkungan hidup yang lestari sebagai perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik. Guna mencapai Tingkat Pembangunan yang berkualitas, maka dilakukan perencanaan Pembangunan disusun berdasarkan wilayah maupun berjangka. Pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Papua akan berakhir tahun 2024 dan akan dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode 2025-2045 yang berisi penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan daerah selama 20 tahun. Penyusunan RPJPD saat ini agak Istimewa, karena disusun untuk dipedomani oleh calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serempak. Menarik dicermati pula, bahwa pada periode ini dokumen RPJPD tidak hanya disusun berdasarkan RPJPD Teknokratik tahun 2025-2030, tetapi harus disusun berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai arahan Permendagri 86 tahun 2017 dan mengikuti pedoman Permendagri 7 tahun 2018, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8754/Bangda tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD, dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.54/Menlhk/PKTL/Pla.1.1/B/3/2024 perihal Percepatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan yang berlaku dan membangun Masyarakat dan wilayah yang lebih baik di Provinsi Papua, maka dibuat KLHS untuk dokumen RPJPD dengan pendekatan *ex ante*, berorientasi pada pencapaian tujuan dan pelaksanaan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan, serta memperhatikan kondisi sosial budaya, ekonomi dan tantangan daerah ke depan. Melalui dokumen KLHS RPJPD ini, Pembangunan di Provinsi Papua akan mencapai tingkat berkelanjutan yang memperhatikan proses dan fungsi lingkungan hidup, keselamatan, kualitas kehidupan dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Dokumen RPJPD Provinsi Papua merupakan pedoman pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional. Penjabaran visi, misi, arah kebijakan, strategi pembangunan dan indikator dalam dokumen RPJPD 2025-2045 **bersifat imperatif**,

mengacu pada visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indikator yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu, RPJPD ini juga mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) 2022-2041 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025-2045 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



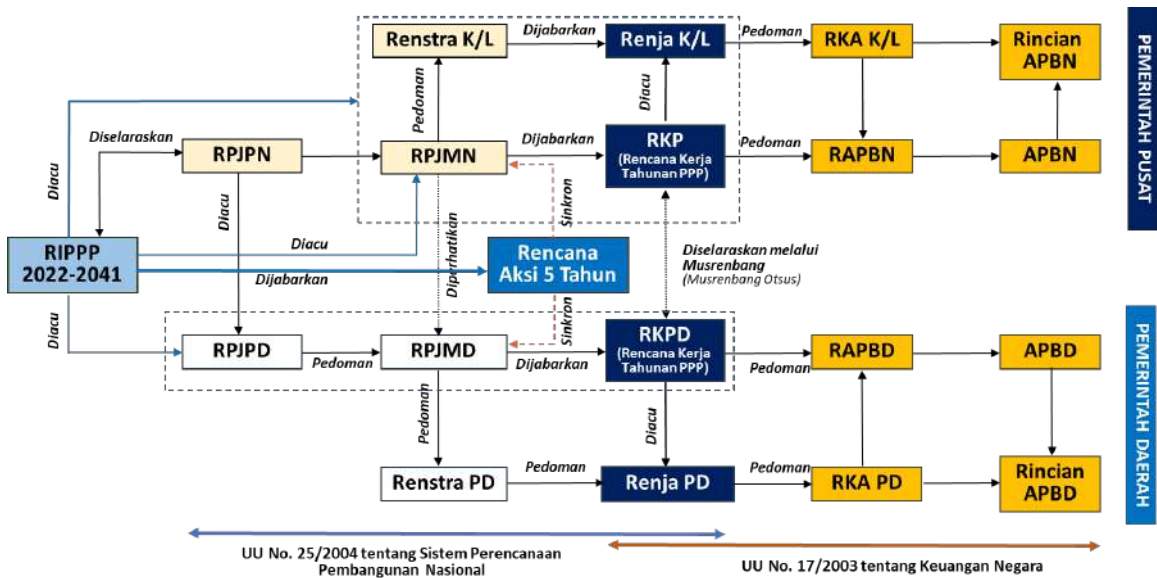
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 20) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
- 21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 29) Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 660/5112 /Bangda perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan RPJPD tanggal 6 Juli 2022.
- 30) Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8754/Bangda perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD. Tanggal 7 Agustus 2023.
- 31) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.54/Menlhk/PKTL/Pla.1.1/B/3/2024 perihal Percepatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 32) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 33) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9).

1.3 KETERKAITAN ANTARDOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022 – 2041, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Papua 2023-2042. Selanjutnya RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen dapat dilihat dalam Gambar I.1.

Gambar I.1 Keterkaitan RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



Sumber: Imendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

1.3.1. Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041 adalah dokumen rencana yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2023. Dokumen ini merupakan mandat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dokumen RIPPP memuat uraian visi dan misi percepatan pembangunan Papua, indikator sasaran percepatan pembangunan Papua, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Papua, kondisi perlu, pengarusutamaan, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan tiap wilayah adat, serta tahapan percepatan pembangunan Papua. Dokumen RIPPP juga memuat uraian prioritas dan fokus pembangunan selama tahun 2022-2041 dalam rangka mencapai sasaran Papua Sehat,

Papua Cerdas, dan Papua Produktif (termasuk kondisi perlu), dan lokasi prioritas pembangunan wilayah adat.

Untuk memastikan rencana pembangunan di Provinsi Papua selaras dengan pembangunan nasional, RIPP memuat uraian sinergi perencanaan dan pendanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di Papua untuk tahun 2022-2041. Juga memuat uraian mekanisme pelaksanaan, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, mekanisme pengawasan serta penghargaan dan sanksi pada RIPP Tahun 2022-2041.

1.3.2. Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

RPJPD memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan di tingkat daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Di sisi lain, RPJPN 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menetapkan visi dan tujuan Indonesia hingga tahun 2045.

Keterkaitan antara RPJPD dan RPJPN sangat penting agar kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah sejalan dengan visi nasional. Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Selain SEB, terdapat Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman penyusunan RPJPD agar selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045.

RPJPD harus menjaga sinkronisasi kerangka logis dengan RPJPN 2025-2045. Forum Konsultasi Publik Penyusunan RPJPD berperan sebagai panduan dalam mengarahkan pembangunan di tingkat daerah, dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Dengan demikian, keselarasan antara RPJPD dan RPJPN menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan visi dan tujuan nasional.

1.3.3. Keterkaitan RPJPD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Papua dimaksudkan sebagai input dalam menyusun dokumen Rancangan Awal (RANWAL) RPJPD Papua tahun 2025-2045. Keterkaitan substansi RPJPD dengan KLHS RPJPD Provinsi Papua ditampilkan dalam Gambar 1.2. Dengan adanya keterkaitan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan KLHS RPJPD adalah:

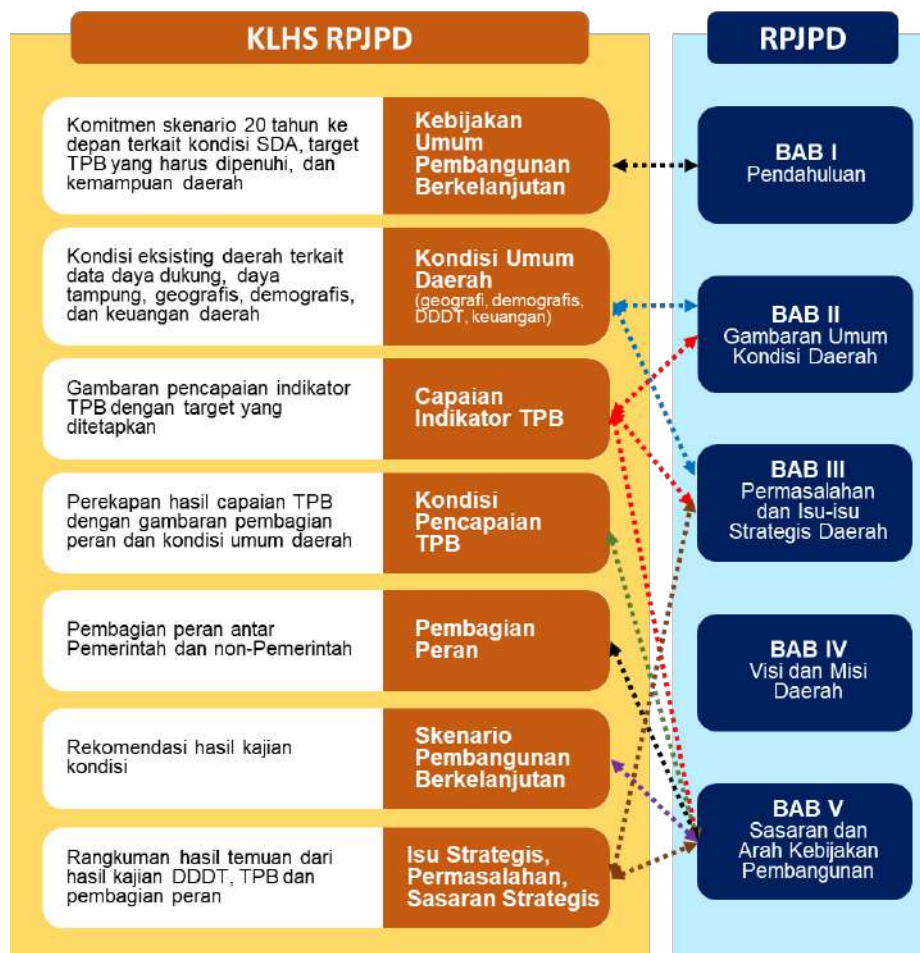
- a. menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah (RPJPD);
- b. mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam penyusunan RPJPD;

- c. memperkuat proses pengambilan keputusan atas kebijakan, rencana, dan program (KRP); serta
- d. mengarahkan dan memberikan rekomendasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam RPJPD.

Adapun sasaran penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Papua adalah:

- a. tersusunnya pengkajian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua;
- b. tersusunnya perumusan skenario pembangunan berkelanjutan di Papua;
- c. tersusunnya permasalahan dan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan capaian indikator pembangunan di Papua;
- d. dirumuskannya rekomendasi penyempurnaan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang tertuang dalam rancangan awal RPJPD Provinsi Papua;
- e. tersusunnya arah kebijakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 20 tahun yang dicapai dalam target pembangunan daerah.

Gambar I.2 Keterkaitan RPJPD dengan KLHS RPJPD Provinsi Papua



Sumber: Paparan Kemendagri, 22 April 2018

1.3.4. Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJPD dan RPJMD adalah dua dokumen perencanaan yang memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan di tingkat daerah. RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. Di sisi lain, RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup periode 5 tahun.

Keterkaitan antara RPJPD dan RPJMD sangat penting agar kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan efektif dan sesuai dengan rencana jangka panjang. RPJMD berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan dari RPJPD, di mana program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD harus mendukung pencapaian visi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

1.4 TUJUAN PENYUSUNAN RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan tujuan:

- a. sebagai arah pembangunan jangka panjang Provinsi Papua pada tahun 2025-2045;
- b. menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan;
- c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta
- d. sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Papua selama tahun 2025-2045.

1.5 TAHAP PENYUSUNAN RPJPD

Berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 secara umum melalui 4 tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir RPJPD; serta
- d. penetapan dokumen rencana.

Mengingat dokumen RPJPD harus selaras dengan RPJPN, maka dalam penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045 pemerintah daerah Provinsi Papua melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, serta mendapatkan pelatihan dari Bappenas. Adapun tahap penyusunan RPJPD secara detail ditampilkan dalam Tabel I.1 berikut.

Tabel I.1 Jadwal Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045

	KEGIATAN	2023			2024								
		OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJPD 	1 Penyusunan Rancangan Awal	■	■	■									
	2 Konsultasi Publik				■ 31								
	3 Konsultasi Ranwal ke Kemendagri					■ 7							
	4 Penyusunan rancangan					■*	■	■					
	5 Musrenbang							■	■				
	6 Penyusunan Rancangan Akhir								■	■			
	7 Reviu APIP									■	■		
PENETAPAN RPJPD 	1 Penyampaian Rancangan Akhir								■	■			
	2 Pembahasan dengan DPRD									■	■		
	3 Persetujuan bersama										■	■	
	4 Evaluasi Ranperda RPJPD											■	■
	5 Penetapan Perda RPJPD												■

Ket: *Pemilu

Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 (dengan adanya penyesuaian berdasarkan konsultasi Pemprov dengan Bappenas dan Kemendagri)

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 disusun menurut sistematika yang di tetapkan berdasarkan peraturan, yang terdiri dari 6 (enam) Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum dalam penyusunan RPJPD; keterkaitan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; tujuan penyusunan RPJPD; serta sistematika penulisan dokumen RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi Papua sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: (1) aspek geografi dan demografi; (2) aspek kesejahteraan masyarakat; (3) aspek daya saing daerah; (4) aspek pelayanan umum; (5) evaluasi capaian pembangunan tahun 2005-2025; (6) tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan (7) pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan utama dan isu strategis pembangunan daerah Papua yang dirumuskan dan disimpulkan berdasarkan kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal pembangunan Papua.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan daerah Papua yang akan dicapai pada tahun 2025-2045, yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045, serta sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat arah kebijakan sebagai kerangka kerja pembangunan dalam 4 tahapan pembangunan untuk mencapai visi daerah. Selain itu, bab ini juga memuat sasaran pokok yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi Papua sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: (1) aspek geografi dan demografi; (2) aspek kesejahteraan masyarakat; (3) aspek daya saing daerah; (4) aspek pelayanan umum; (5) evaluasi capaian pembangunan tahun 2005-2025; (6) tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan (7) pengembangan pusat pertumbuhan wilayah

Kuburan Tua Padwa, Distrik Yendidori, Biak Numfor

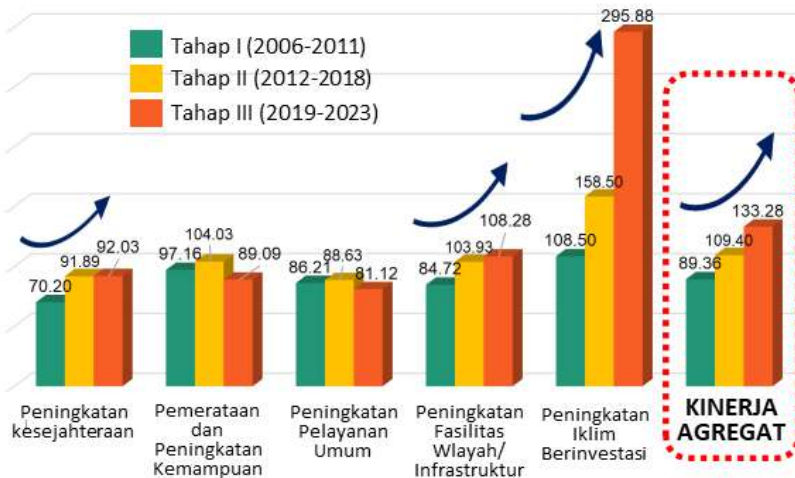
Merupakan objek wisata yang memiliki daya tarik tebing-tebing batu kapur, di mana pada masanya digunakan oleh nenek moyang Suku Padwa sebagai makam / kuburan

Retrospektif dan Prospektif Pembangunan Papua

Selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJPD 2005-2025, Provinsi Papua telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik yang begitu tinggi. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi Provinsi Papua untuk menjadi wilayah maju dan berkelanjutan masih sangat besar.



Refleksi Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025



- Capaian kinerja agregat jangka panjang Provinsi Papua termasuk kategori sangat tinggi. Terdapat peningkatan capaian kinerja agregat dari 89,36% pada 2006-2011 menjadi 109,40% pada 2012-2018, kemudian terjadi peningkatan kembali menjadi 133% pada 2019-2023.
- Terdapat trend peningkatan signifikan pada capaian kinerja peningkatan iklim berinvestasi (sasaran 5), peningkatan Fasilitas wilayah (sasaran 4) serta peningkatan kesejahteraan (sasaran 1) di Provinsi Papua.
- Capaian kinerja pemerataan dan peningkatan kemampuan ekonomi daerah (sasaran 2) dan Peningkatan pelayanan umum (sasaran 3) mengalami trend penurunan sehingga kedepannya perlu dikaji kembali dalam penentuan target pembangunan maupun perumusan strategi pembangunan.
- Capaian peningkatan peningkatan iklim berinvestasi, peningkatan Fasilitas wilayah, dan peningkatan kesejahteraan yang telah dilakukan dalam 20 tahun terakhir perlu dipertahankan untuk menjadi enabling environment dalam mencapai target percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua pada periode RPJPD 2025-2045

Highlight Kondisi Pembangunan Provinsi Papua:



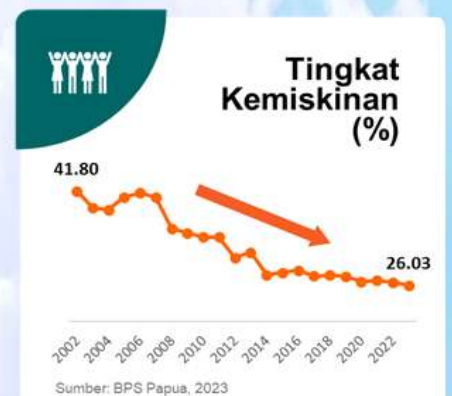
IPM Prov. Papua terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2022 dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 1,01 per tahunnya.

Pada saat ini Prov. Papua masuk dalam wilayah dengan klasifikasi IPM "SEDANG".



Laju pertumbuhan PDRB dengan tambang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 15,11%, walaupun di tahun 2022 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan menjadi 8,97%.

Sedangkan, laju pertumbuhan PDRB tanpa tambang mengalami penurunan pada 2010-2020 hingga mencapai -3,40% dan mengalami peningkatan pada 2020-2022 menjadi 4,14%



Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mengalami penurunan dari 41,80% pada 2002 menjadi 26,03% pada tahun 2022.

*data agregat yang tersedia adalah data agregat provinsi dengan cakupan 29 kab/kota





BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah



2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Luas wilayah Provinsi Papua kurang lebih 131.582,85 Km² yang terdiri atas wilayah darat seluas 82.688,37 Km² atau 62,84 % yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dan wilayah laut yang merupakan wilayah sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi seluas kurang lebih 48.894,48 Km² atau 37,16% yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota Secara administrasi wilayah Provinsi Papua berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Samudra Pasifik;
- Sebelah Selatan : Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
- Sebelah Barat : Provinsi Papua Tengah dan Teluk Cenderawasih; dan
- Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea.

Secara administrasi Provinsi Papua terdiri atas 9 Kabupaten/Kota (8 Kabupaten dan 1 Kota) dan mempunyai 115 Distrik serta 1.032 Kelurahan/Kampung. Kabupaten/Kota yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Mamberamo Raya yakni seluas 28.043,47 Km² atau 33,91 persen dari luas total Provinsi Papua, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kabupaten Supiori yakni 660,69 Km² setara 0,80 persen dari luas Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi memiliki distrik terbanyak yaitu 19 distrik. Kabupaten Biak Numfor juga



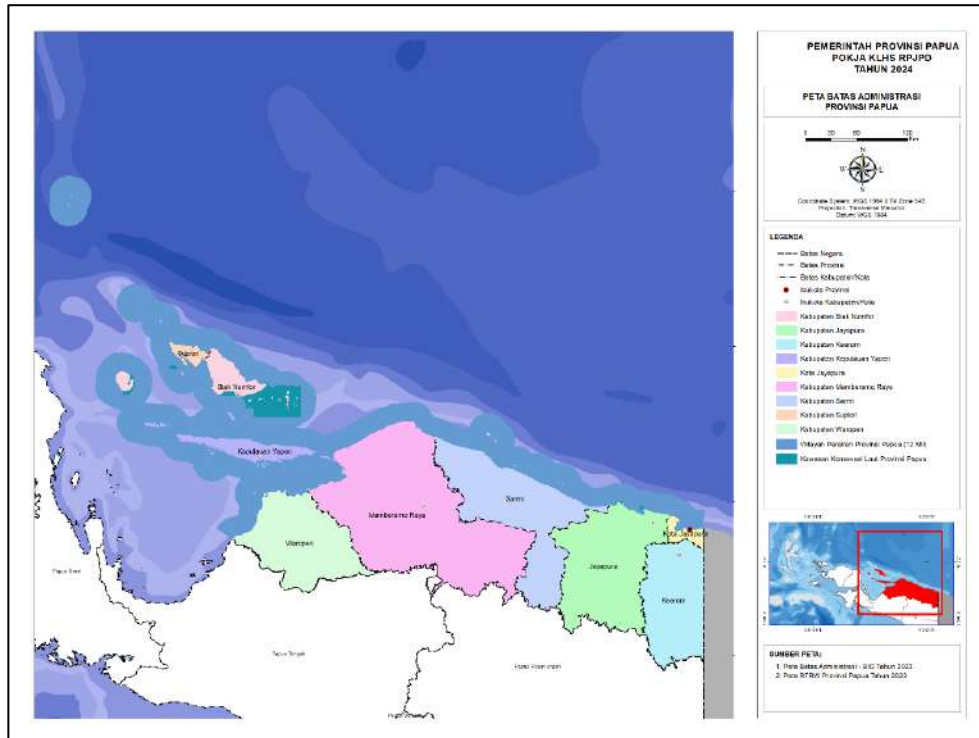
menjadi kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki kampung/kelurahan terbanyak yaitu 268 kampung sedangkan Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura memiliki distrik/kecamatan paling sedikit yaitu 5 kecamatan. Kabupaten Biak Numfor memiliki kampung paling terbanyak yaitu 268 kampung Kabupaten Supiori menjadi kabupaten dengan jumlah kampung/kelurahan paling sedikit yaitu berjumlah 38 kampung/kelurahan. Untuk lebih jelasnya yang dapat dilihat pada tabel II.1 yang menyajikan luas Wilayah Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota. Sedangkan pada gambar II.1 menampilkan peta batas administrasi Provinsi Papua. Adapun pada tabel II.2 menyajikan data jumlah kampung/kelurahan menurut kabupaten/kota berdasarkan geografi dan topografi wilayah di Provinsi Papua.

Tabel II.1 Luas Wilayah Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Persentase (%)	Distrik	Kampung	Jumlah Pulau
1	Jayapura	Sentani	14.082,62	17,03	19	144	58
2	Kepulauan Yapen	Serui	2.428,42	2,94	16	165	142
3	Biak Numfor	Biak	2.260,02	2,73	19	268	126
4	Sarmi	Sarmi	14.069,02	17,01	19	111	-
5	Keerom	Waris	9.526,32	11,52	11	91	15
6	Waropen	Botawa	10.782,13	13,04	12	117	1
7	Supiori	Sorendiweri	660,69	0,80	5	38	164
8	Mamberamo Raya	Burmeso	28.043,47	33,91	9	59	2
9	Kota Jayapura	Jayapura	835,69	1,01	9	39	19
Provinsi Papua		Kota Jayapura	82.688,37	100,00	115	1.032	527

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Gambar II.1 **Peta Batas Administrasi Provinsi Papua**



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Tabel II.2 **Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Geografi dan Topografi Wilayah di Provinsi Papua Tahun 2014-2021**

Kabupaten	Letak Geografi						Topografi Wilayah								
	Tepi Laut			Bukan Tepi Laut			Lembah			Lereng/Puncak			Dataran		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021
Jayapura	24	24	25	120	120	119	30	22	6	23	28	95	91	94	43
Kepulauan Yapen	142	142	115	23	23	50	12	21	2	38	4	130	115	140	33
Sarmi	64	64	59	46	46	52	5	5	2	1	1	39	104	104	70
Keerom	-	-	-	61	91	91	9	13	5	2	4	40	50	74	46
Waropen	39	53	19	41	64	92	17	-	1	-	26	37	63	91	73
Supiori	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	31	38	38	7
Mamberamo Raya	3	3	9	56	56	50	9	9	-	6	6	7	44	44	52
Kota Jayapura	21	22	23	18	17	16	3	3	-	1	2	28	35	34	11
Provinsi Papua	646	662	590	4.225	4.890	4.965	551	644	162	2.452	2.638	3.836	1.868	2.270	1.557

*Catatan : Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di Provinsi Sumatera Barat, Data citra satelit yang sudah dikonfirmasi oleh aparat desa. Kategori Lereng/Puncak termasuk juga Tebing. Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes) dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Wilayah adat mencakup 2 wilayah yang berada di ruang darat dan maupun laut yaitu Wilayah adat Mamta/TABI dan wilayah adat Saireri yang ditunjukkan pada gambar II.2.

2.1.1.2 Batas Wilayah Fungsional

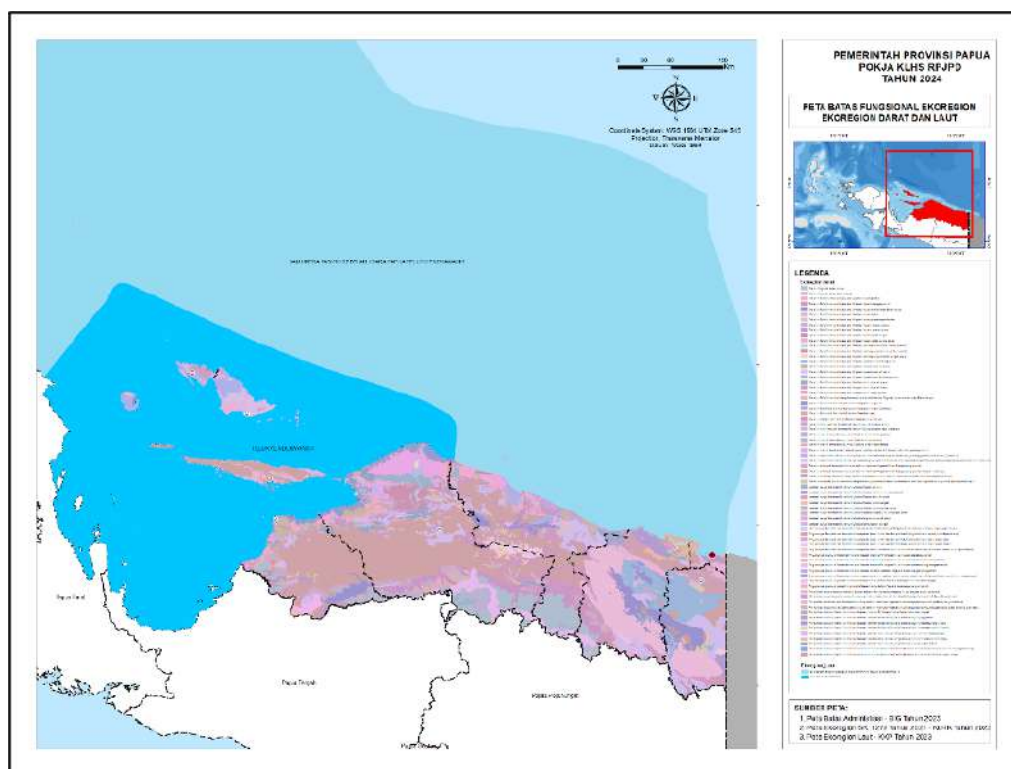
1) Batas Wilayah Berdasarkan Ekoregion

Berdasarkan Buku I Deskripsi Peta Ekoregion Pulau, Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: 1. karakteristik bentang alam; 2. Daerah Aliran Sungai; 3. Iklim; 4. Flora dan Fauna; 5. Sosial Budaya; 6. Ekonomi; 7. Kelembagaan Masyarakat; dan 8. Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup. Penetapan ekoregion memiliki peranan untuk melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Selain membahas Batas Fungsional Ekoregion Darat, dalam KLHS RPJPD ini juga di bahas terkait dengan Batas Fungsional Ekoregion Laut. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen, yang jelas berbeda dari sistem yang berdekatan (spalding et al., 2007). Faktor pembeda dalam mendefinisikan ekoregion bervariasi dari lokasi ke lokasi antara tingkar isolasi, upwelling, masukan nutrien, pengaruh air tawar, rezim suhu, morfostruktur, sedimen, arus, dan kompleksitas bathimetri atau tipe pantai. Secara umum tujuan pewilayahan ekoregion laut Indonesia adalah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ada sesuai dengan karakter wilayah ekoregion, termasuk karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Dengan dasar tersebut diharapkan dapat dicapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam untuk mengoptimalkan sumberdaya laut serta dicapai perlindungan lingkungan secara efektif, yang pada akhirnya dapat dicapai pembangunan berkelanjutan.



Gambar II.3 Peta Ekoregion Darat dan Laut Provinsi Papua



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

A. Ekoregion Darat

Berdasarkan SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000, dapat dilihat bahwa terdapat 70 jenis ekoregion Provinsi Papua, dan jenis ekoregion Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) merupakan jenis ekoregion terluas di daratan Provinsi Papua mencapai 2,095,220.17 hektar atau sekitar 25,30 persen dari luas Provinsi Papua. Jenis ekoregion Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) memiliki bentuk lahan pegunungan denudasional. Morfologi ini terbentuk karena aktivitas vulkanisme, yang kemudian aktivitas vulkanik ini sudah tidak berjalan lagi, sehingga agen yang lebih berperan disini adalah erosi dan pelapukan yang mempengaruhi morfologi pegunungan ini. Morfologi ini memiliki elevasi lebih dari 300 mdpl dan kemiringan lereng lebih dari 16%, jenis batuan pada ekosistem ini yaitu batuan beku dan batuan piroklastik hasil dari aktivitas vulkanisme pada masa lampau yang sudah mengalami pelapukan dan erosi. Vegetasi pada ekosistem ini adalah hutan pamah (non dipterokarpa), memiliki kondisi iklim tropika basah dengan suhu sejuk hingga dingin dan suhu rata-rata 18-22oC, curah hujan tahunan 1500-2500 mm. Hutan pamah non dipterokarpa memiliki tanah Podsolik Merah Kuning dan Latosol dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang dengan pH masam dan retensi hara rendah. Tanah Podzolik merah kuning merupakan tanah yang

kaya unsur mineral dan organik namun cepat larut oleh air hujan, sedangkan Latosol merupakan tanah yang kurang subur dan bersifat asam karena mengandung aluminium dan besi. Karakteristik yang demikian menyebabkan vegetasi ini mempunyai penggunaan lahan beragam, yaitu hutan, semak belukar, dan ladang. Pemanfaatan ekosistem diantaranya sebagai daerah resapan karena batuan atau lapukan piroklastik memiliki porositas yang baik sehingga dapat juga digunakan sebagai penyedia air bawah tanah dan pemanfaatan lahan untuk kebutuhan pertanian. Potensi bencana yang dapat terjadi pada ekosistem ini diantaranya longsor. Tabel berikut ini menunjukkan jenis ekoregion di wilayah Provinsi Papua berdasarkan SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021.

Tabel II.3 Sebaran Luas Jenis Ekoregion Provinsi Papua

No	Ekoregion Komplek	Luas (ha)	Luas (%)
1	Danau Vegetasi hutan danau	159,41	0,002
2	Danau Vegetasi terna tepian danau	9.155,05	0,111
3	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan gambut	248.559,28	3,001
4	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan kerangas pamah	27.759,47	0,335
5	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	333.593,02	4,028
6	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan pantai	35.139,56	0,424
7	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan pegunungan bawah	3.046,51	0,037
8	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan rawa air payau	2.934,08	0,035
9	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan rawa air tawar	24.270,78	0,293
10	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan tepian sungai	190.391,90	2,299
11	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan tepian sungai payau	146.439,24	1,768
12	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	511,30	0,006
13	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	21.753,23	0,263
14	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	4.427,35	0,053
15	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi savana lahan kering pamah	557,00	0,007
16	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi savana rawa air payau	107.441,55	1,297
17	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi savana rawa air tawar	177.086,81	2,138
18	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi savana rawa gambut pamah	1.071,02	0,013
19	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi terna rawa air payau	40.543,23	0,490
20	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi terna rawa air tawar	129.698,50	1,566
21	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi terna tepian sungai	16.413,29	0,198
22	Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	16.702,97	0,202
23	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium Vegetasi mangrove	183.012,16	2,210
24	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium Vegetasi mangrove monsun	130,19	0,002
25	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium Vegetasi sagu	1.070,40	0,013
26	Dataran lakustrin bermaterial aluvium Vegetasi hutan danau	224.552,09	2,711
27	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium Vegetasi hutan pantai	43.733,39	0,528
28	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium Vegetasi hutan rawa air payau	179,42	0,002
29	Dataran organik bermaterial gambut Vegetasi hutan danau gambut	98.273,71	1,187
30	Dataran organik bermaterial gambut Vegetasi hutan gambut	465.716,69	5,623
31	Dataran organik bermaterial gambut Vegetasi terna tepian danau	57.208,16	0,691



No	Ekoregion Komplek	Luas (ha)	Luas (%)
32	Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	31.499,61	0,380
33	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	1.670,79	0,020
34	Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	71.179,53	0,859
35	Dataran struktural bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	254.732,62	3,076
36	Dataran struktural bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	1.052,96	0,013
37	Dataran struktural berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	44.376,33	0,536
38	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	25.014,77	0,302
39	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan gambut	102.116,96	1,233
40	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	3.621,35	0,044
41	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan rawa air tawar	3.600,44	0,043
42	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan tepian sungai	119.608,60	1,444
43	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan tepian sungai payau	61.752,00	0,746
44	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	34.130,26	0,412
45	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi savana rawa air tawar	8.719,05	0,105
46	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi terna tepian sungai	8.809,83	0,106
47	Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa) Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	8.084,73	0,098
48	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	2.095.220,17	25,299
49	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik Vegetasi hutan pegunungan atas	572,72	0,007
50	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik Vegetasi hutan pegunungan bawah	64.202,62	0,775
51	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	7.484,13	0,090
52	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	576.886,68	6,966
53	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	5.721,63	0,069
54	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	47.160,71	0,569
55	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	140.527,18	1,697
56	Pegunungan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	76.559,05	0,924
57	Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	7.221,41	0,087
58	Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam Vegetasi hutan pegunungan bawah	10.617,31	0,128
59	Perbukitan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa) Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	38.831,39	0,469
60	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	7.187,50	0,087
61	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	235.903,30	2,848
62	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	5.863,75	0,071
63	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	364.433,22	4,400
64	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	543.928,28	6,568
65	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	40,70	0,000

No	Ekoregion Komplek	Luas (ha)	Luas (%)
66	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	21.302,19	0,257
67	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	554.688,67	6,698
68	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	1.440,83	0,017
69	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat Vegetasi hutan pegunungan bawah	1.334,78	0,016
70	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	83.245,68	1,005

Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

B. Ekoregion Laut

Saat ini, Indonesia memiliki 18 ekoregion laut yang mencerminkan keanekaragaman ekosistem lautnya yang berisi spesies-spesies, komunitas alam, dan kondisi lingkungan yang bersatu dalam sebuah lingkup geografis, (Priyanto dan Setyawan dalam Atlas Tematik Kelautan Indonesia Tahun 2013), dan wilayah laut Provinsi Papua masuk dalam 2 ekoregion laut Indonesia yaitu Ekoregion Laut 16 (Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua) dan Ekoregion Laut 17 (Teluk Cenderawasih), dengan luas kurang lebih 553,226 km² sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.4 Luas Sebaran Wilayah Ekoregion Laut

No	Ekoregion Laut	Kode	Luas (km ²)
1	Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua	E.L.16	459.857
2	Teluk Cenderawasih	E.L.17	93.369

Sumber: Buku 2 Ekoregion Laut Indonesia

Ekoregion Laut 16 berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717, yang meliputi seluruh perairan di sebelah utara Pulau Papua kecuali Teluk Cenderawasih. Ekoregion ini memiliki luas 459.857 km², dengan ciri khasnya yaitu memiliki fenomena arus *Halmahera Eddy*, yang terbentuk akibat struktur batimetri dan topografi Papua Utara hingga Kepulauan Halmahera, yakni arus putar balik kearah barat kemudian kembali ke Samudera Pasifik, yang semula berasal dari arus susur tepian Papua Utara yang menuju ke barat. Selain itu, fenomena kolam air hangat yang terdapat di Samudera Pasifik Barat juga berimbas pada ekoregion ini, dimana area ini adalah sangat disenangi oleh populasi ikan tuna. Bagian wilayah Kabupaten Supiori yang masuk dalam Wilayah Ekoregion 16 ini adalah Kepulauan Mapia.

Ekoregion Laut 17 juga berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717, yang meliputi Teluk Cenderawasih dan sebagian kecil perairan di utara Papua. Ekoregion ini memiliki luas 93.369 km², dengan ciri khas yaitu massa airnya sangat dipengaruhi oleh massa air Samudera Pasifik Barat dengan kecerahan yang tinggi (lebih dari 30 meter). Ekoregion 17 merupakan habitat yang sangat mendukung berbagai biota lainnya seperti kerang raksasa yang masih hidup dan berumur ratusan tahun. Ekoregion 17 memiliki batas dengan ekoregion Samudera Pasifik sebelah utara Papua karena perbedaan batimetri, keanekaragaman hayati karang dan pola temperatur dan salinitas permukaan air laut.



Karakteristik utama ekoregion 17 adalah terumbu karang dengan sejumlah biota laut endemic, dan dapat dikatakan ekoregion ini masih berstatus tertutup sehingga menyebabkan tingkat keragaman biota endemiknya tinggi. Sebagian ekoregion ini berstatus sebagai Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) dengan luas 1.453.500 hektar, terbagi atas perairan/laut seluas 1.305.300 hektar dan daratan 68.200 hektar.

2) Batas Wilayah Berdasarkan Daerah Aliran Sungai

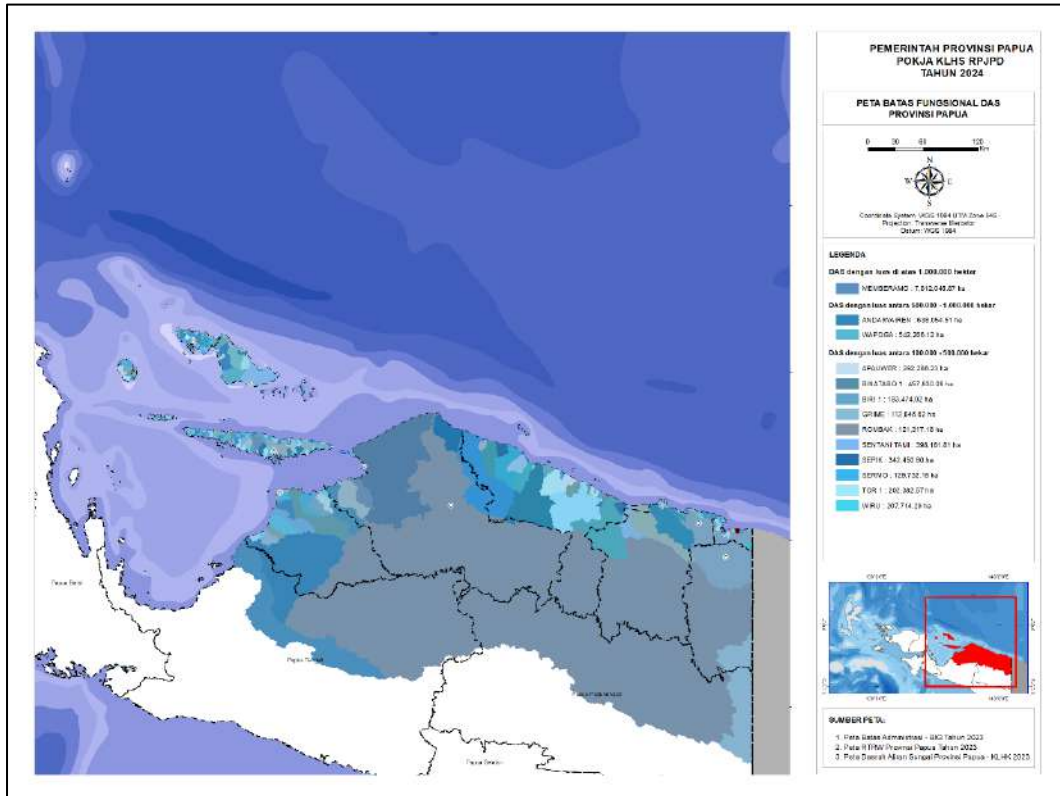
Penentuan batas wilayah kajian selain berdasarkan batas ekologi, juga didasarkan pada batas fungsional. Pada kajian ini batas fungsional merujuk batas Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagai sebuah ekosistem, DAS merupakan sebuah sistem fungsional yang terbentuk pada wilayah yang dikelilingi dan dibatasi oleh topografi berupa punggung bukit, pegunungan, atau pemisah alami lainnya. DAS juga dikenal dengan sebutan watershed atau daerah tangkapan (*catchment area*) dan merupakan unit analisis yang mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan batas DAS didasarkan pada batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan, serta mempertimbangkan karakteristik ekologis dan geografis.

DAS memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta dalam menentukan pola aliran sungai dan fungsi hulu, tengah, dan hilir. Selain itu, DAS juga menjadi unit pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan pembangunan wilayah. Oleh karena itu sangat penting meninjau batas kajian berdasarkan batas DAS. Batas wilayah kajian yang didasarkan pada batas DAS dibuat berdasarkan wilayah DAS yang menjadi bagian dari wilayah perencanaan. Untuk itu batas wilayah kajian akan menjadi lebih luas dari batas wilayah perencanaan karena meliputi seluruh wilayah DAS sebagai satu sistem fungsional, tidak dibatasi oleh batas administrasi.

Berdasarkan batas fungsional Daerah Aliran Sungai, wilayah Provinsi Papua berada pada 791 DAS dengan total luas wilayah fungsionalnya sebesar 12.960.773,84 ha yang membentang meliputi wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. DAS dengan kategori "Sangat Besar" yang berada di wilayah Provinsi Papua adalah DAS Memberamo dengan luas 7,812,046.87 ha, yang membentang melalui 5 kabupaten antara lain Kabupaten Jayapura seluas 905,259.00 ha, Kabupaten Sarmi seluas 382,186.00 ha, Kabupaten Keerom seluas 587,055.00, Kabupaten Waropen seluas 281,422.00 dan Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1,833,580.00 ha. DAS Mamberamo juga melintasi 4 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah dan 7 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Terdapat 2 DAS dengan kategori "Besar" yaitu 1). DAS Andaiwairan seluas 637,903.00 ha yang melintasi wilayah Kabupaten Mamberamo Raya; 2). DAS Wapoga seluas 542,266.40 yang melintasi Kabupaten Waropen Provinsi Papua dengan luas 386,409.00 ha, sementara sisa luasan DAS Wapoga masuk dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai yang merupakan wilayah Provinsi Papua Tengah.

Peta Wilayah Daerah Aliran Sungai yang menjadi bagian dari wilayah perencanaan di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar II.4 Peta Batas Fungsional Daerah Aliran Sungai



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Tabel II.5 Luas Sebaran DAS berdasarkan Batas Fungsional

Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Memberamo	Sangat Besar	Jayapura	Papua	905.259,00	7.812.007,58
		Keerom		587.055,00	
		Mamberamo Raya		1.833.580,00	
		Sarmi		382.186,00	
		Waropen	Papua Tengah	281.422,00	
		Intan Jaya		355.279,00	
		Puncak		636.828,00	
		Puncak Jaya	584.814,00		
		Paniai	54,06		
		Yahukimo	Papua Pegunungan	583.943,00	
		Yalimo		312.238,00	
		Tolikara		295.525,00	
		Pegunungan Bintang		638.151,00	
Mamberamo Tengah	408.263,00				
Lanny Jaya	64,41				
Jayawijaya	7.346,12				
Andaiwairan	Besar	Mamberamo Raya	Papua	637.903,00	637.903,00
Wapoga	Besar	Intan Jaya	Papua Tengah	84.744,80	542.266,40
		Nabire		54.534,40	
		Paniai	16.578,20		
		Waropen	Papua	386.409,00	
Binatabo 1	Sedang	Intan Jaya	Papua Tengah	95.646,60	457.930,71
		Mimika		517,96	
		Nabire		142.560,00	
		Paniai		185.613,00	



Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
		Puncak		31.075,50	
		Waropen	Papua	2.517,65	
Sentani Tami	Sedang	Jayapura	Papua	82.331,90	398.178,90
		Keerom		261.594,00	
		Kota Jayapura		54.253,00	
Sepik	Sedang	Keerom	Papua	97.829,70	342.450,70
		Pegunungan Bintang		Papua Pegunungan	
Apauwer	Sedang	Mamberamo Raya	Papua	103.345,00	292.287,00
		Sarmi		188.942,00	
Wiru	Sedang	Jayapura	Papua	116.766,00	207.676,50
		Sarmi		90.910,50	
Tor 1	Sedang	Mamberamo Raya	Papua	7.837,74	202.347,74
		Sarmi		194.510,00	
Biri 1	Sedang	Mamberamo Raya	Papua	45,90	183.473,90
		Sarmi		183.428,00	
Sermo	Sedang	Jayapura	Papua	113.051,00	129.731,89
		Keerom		3.805,49	
		Sarmi		12.875,40	
Rombak	Sedang	Waropen	Papua	121.317,00	121.317,00
Grime	Sedang	Jayapura	Papua	112.815,00	112.842,20
		Keerom		27,20	
Adadikam	Kecil	Biak Numfor	Papua	16.226,90	16.226,90
Adoki	Kecil	Biak Numfor	Papua	31.587,30	31.587,30
Ambaidiru	Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	12.086,00	12.086,00
Aruswar	Kecil	Sarmi	Papua	15.867,80	15.867,80
Bier	Kecil	Sarmi	Papua	50.397,70	50.397,70
Binatabo 2	Kecil	Waropen	Papua	37.244,40	37.244,40
Boi 1	Kecil	Waropen	Papua	14.916,50	14.916,50
Demba	Kecil	Waropen	Papua	26.367,10	26.367,10
Erakereo	Kecil	Mamberamo Raya	Papua	43.284,10	43.284,10
Ingrisau	Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	10.631,30	10.631,30
Kwanton	Kecil	Sarmi	Papua	18.680,10	18.680,10
Mansubu	Kecil	Mamberamo Raya	Papua	70.068,70	70.509,88
		Sarmi		441,18	
Manswam	Kecil	Biak Numfor	Papua	11.181,20	11.181,20
Muwar	Kecil	Sarmi	Papua	49.126,60	49.126,60
Nadubuai	Kecil	Mamberamo Raya	Papua	40.286,80	81.339,80
		Waropen		41.053,00	
Napi	Kecil	Biak Numfor	Papua	10.276,10	10.276,10
Orai	Kecil	Sarmi	Papua	27.647,40	27.647,40
Risai	Kecil	Waropen	Papua	25.416,80	25.416,80
Samares	Kecil	Biak Numfor	Papua	60.313,70	60.313,70
Sanoringga	Kecil	Waropen	Papua	46.293,00	46.293,00
Sepaseri	Kecil	Waropen	Papua	19.238,70	19.238,70
Sobia	Kecil	Waropen	Papua	22.964,60	22.964,60
Tamar	Kecil	Jayapura	Papua	19,76	11.850,66
		Sarmi		11.830,90	
Toarim	Kecil	Jayapura	Papua	37.110,00	44.112,55
		Sarmi		7.002,55	
Tor 2	Kecil	Sarmi	Papua	11.108,10	11.108,10
Urwo	Kecil	Waropen	Papua	21.339,10	21.339,10
Wadadi 1	Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	19.715,50	19.715,50
Wafor 1	Kecil	Biak Numfor	Papua	27.153,90	27.153,90
Wankai	Kecil	Mamberamo Raya	Papua	72.507,80	72.507,80
Wirmake	Kecil	Sarmi	Papua	71.172,50	71.172,50
Woske	Kecil	Sarmi	Papua	36.524,20	36.524,20
Ababiadi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	2.361,93	2.361,93
Abe Pantai 1	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	221,05	221,05
Abe Pantai 2	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	536,18	536,18
Abiaibaba	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	338,91	338,91
Abumamborbi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,86	0,86
Acai	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	4.034,53	4.034,53
Adiwipi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	22,78	22,78
Adiwipi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	6,33	6,33
Adiwipi 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,74	1,74
Aibai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	3,06	3,06
Aibondeni	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.557,58	1.557,58
Aiborabondi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,27	0,27
Aisau 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.080,14	1.080,14
Aisau 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	711,36	711,36

Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Aisau 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.036,91	1.036,91
Aiwapi Besar	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,16	0,16
Aiwapi Kecil	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,08	0,08
Akerinda	Sangat Kecil	Keerom	Papua	1.590,38	1.590,38
Amal 1	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	1.879,51	1.879,51
Amal 2	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	974,10	974,10
Amal 3	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	913,57	913,57
Amal 4	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	174,39	174,39
Amal 5	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	261,39	261,39
Ambai 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	7,20	7,20
Ambai 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	80,44	80,44
Ambai 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	299,94	299,94
Ambai 4	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,39	1,39
Ambai 5	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,75	0,75
Ambora	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	461,44	461,44
Amoi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	655,45	655,45
Ampimoi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	530,84	530,84
Ampimoi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	5.706,16	5.706,16
Ampimoi 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	107,57	107,57
Anafree	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	1.675,10	1.675,10
Anawipi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	259,06	259,06
Andei	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	5.407,21	5.407,21
Angkeisera 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,28	0,28
Angkeisera 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,07	0,07
Anian	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	92,17	92,17
Ansamanuar	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	11,17	11,17
Ansus 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.245,53	1.245,53
Ansus 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	218,67	218,67
Ansus 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	7,76	7,76
Antunai 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	485,23	485,23
Antunai 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	463,67	463,67
Antunai 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	302,56	302,56
Anun Weri	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1.689,32	1.689,32
Anus	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	92,60	92,60
Apo	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	521,37	521,37
Aribi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	632,43	632,43
Aribi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	293,00	293,00
Aribi 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	246,32	246,32
Aribi 4	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	163,10	163,10
Aribi 5	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	265,91	265,91
Arisai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	420,66	420,66
Ariyabu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	223,20	223,20
Aromarea 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	6.468,08	6.468,08
Aromarea 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	283,04	283,04
Aromarea 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	639,65	639,65
Aronai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.474,40	1.474,40
Arowarea	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	220,47	220,47
Arowesi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,60	1,60
Aroya	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,20	0,20
Arur 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	3,28	3,28
Arur 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	8,96	8,96
Arur 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,40	1,40
Arur 4	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,66	0,66
Arur 5	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,43	0,43
Aruri 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1.349,99	1.349,99
Aruri 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	344,28	344,28
Aruri 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	972,97	972,97
Aruri 4	Sangat Kecil	Supiori	Papua	301,69	301,69
Aruri 5	Sangat Kecil	Supiori	Papua	537,35	537,35
Arwai	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	4.648,75	7.634,28
		Supiori		2.985,53	
Asai 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	285,75	285,75
Asur	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2,65	2,65
Auki	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	755,98	755,98
Awadoh	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	230,61	230,61
Awahanuap	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,18	0,18
Awai 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,72	1,72
Awai 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,31	1,31
Awai 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,51	0,51
Awai 4	Sangat Kecil	Supiori	Papua	3,30	3,30
Awaki	Sangat Kecil	Supiori	Papua	343,37	343,37



Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Awaso	Sangat Kecil	Waropen	Papua	2.339,93	2.339,93
Ayari 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	4.406,87	4.406,87
Ayari 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.161,83	1.161,83
Ayari 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	228,70	228,70
Ayawi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	6,52	6,52
Babonjaya	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	3.975,16	3.975,16
Baisore	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	210,14	210,14
Baiwana	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,92	1,92
Barawa 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	588,41	588,41
Barawa 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	755,50	755,50
Bareraidi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	4.238,92	4.238,92
Bareraidi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	220,30	220,30
Bareraipi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	192,88	192,88
Baruki	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	7.652,88	7.652,88
Batu Pendeta	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,20	0,20
Bawei 4	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	5.809,90	5.809,90
Bayami	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.133,53	1.133,53
Be	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.054,34	1.054,34
Berpa	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	2.550,10	2.550,10
Beruki	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.192,71	1.192,71
Bhayangkara	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	346,53	346,53
Biniki	Sangat Kecil	Supiori	Papua	2.243,42	2.243,42
Bogenvile	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	509,66	509,66
Bokakotu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,59	1,59
Bondifur	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,67	0,67
Bonsup	Sangat Kecil	Supiori	Papua	2.820,19	2.820,19
Bosensbari	Sangat Kecil	Supiori	Papua	2.178,51	2.178,51
Bosfori	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,32	1,32
Bromsi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.197,96	1.197,96
Brugai	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1,47	1,47
Bukit Kowetarurui	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	473,78	473,78
Bum Bebe	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,60	0,60
Butunukaifui	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,20	0,20
Cycloop 1	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	490,02	490,02
Cycloop 10	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	1.706,05	1.706,05
Cycloop 11	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	261,05	261,05
Cycloop 12	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	365,91	365,91
Cycloop 13	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	327,81	327,81
Cycloop 14	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	308,53	308,53
Cycloop 2	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	271,20	271,20
Cycloop 3	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	392,89	392,89
Cycloop 4	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	452,25	452,25
Cycloop 5	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	43,83	555,54
		Kota Jayapura		511,71	
Cycloop 6	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	232,29	232,29
Cycloop 7	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	895,15	895,15
Cycloop 8	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	3.567,38	3.567,38
Cycloop 9	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	291,19	291,19
Dafi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2.562,23	2.562,23
Danau Teun	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	2.207,40	2.207,40
Dapapen	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	5.127,89	5.127,89
Dawai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	988,16	988,16
Dawi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	28,51	28,51
Dawoiro	Sangat Kecil	Waropen	Papua	2.409,91	2.409,91
Delta Mantabori	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	18,27	18,27
Delta Waita	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	5,71	5,71
Demta	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	2.275,16	2.275,16
Desawa	Sangat Kecil	Waropen	Papua	2.621,51	2.621,51
Didiabololo	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1.292,10	1.292,10
Dom	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	247,46	247,46
Dombo	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	677,95	677,95
Dorawi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2.059,30	2.059,30
Dormena	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	1.100,32	1.111,02
		Kota Jayapura		10,70	
Dosasewa	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	390,05	390,05
Doubo 1	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2.258,77	2.320,85
		Supiori		62,08	
Doubo 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	183,39	268,80
		Supiori		85,41	
Drakes	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	438,20	438,20
Duai	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	540,60	540,60

Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Duma	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2,17	2,17
Dumani	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	372,06	372,06
Dwanduru	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,15	0,15
Ebram 1	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	1.062,99	1.062,99
Ebram 2	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	1.383,69	1.383,69
Ehram	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	379,55	379,55
Emrekang	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	4.353,60	4.353,60
Entrop	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	1.309,53	1.309,53
Eraempi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	916,88	916,88
Erfok	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	1.680,57	1.680,57
Erpo 1	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	1.010,87	1.010,87
Erpo 2	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	1.340,93	1.340,93
Faknik Dori 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	300,03	300,03
Faknik Dori 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1.330,17	1.330,17
Fanindi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	501,32	501,32
Gito	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	48,24	48,24
Gunung Jambe	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	1.940,01	1.940,01
Gunung Kaibang	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	321,81	321,81
Gunung Maryowi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	200,83	200,83
Gunung Rawa	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	407,68	407,68
Gunung Seruai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	335,58	335,58
Gunung Tata	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	184,41	184,41
Hohar	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	320,94	320,94
Imbieri 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	707,16	707,16
Imbieri 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	343,39	343,39
Imbieri 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	197,70	197,70
Impurmi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,02	0,02
Inasi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2.109,46	2.109,46
Indi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	60,71	60,71
Inkakeri	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,99	0,99
Inmasyari 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	2.384,08	2.384,08
Inmasyari 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	335,07	335,07
Inmasyari 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	148,34	148,34
Inmasyari 4	Sangat Kecil	Supiori	Papua	142,65	142,65
Inmasyari 5	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1.458,15	1.458,15
Inmasyari 6	Sangat Kecil	Supiori	Papua	826,75	826,75
Inmasyari 7	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,31	0,31
Inmasyari 8	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,34	0,34
Insumrabi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	17,02	17,02
Inswambesi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	4.708,35	4.708,35
Janim 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1.481,60	1.481,60
Janim 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	408,16	408,16
Janim 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	399,10	399,10
Janma 1	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	109,24	109,24
Janma 2	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	14,11	14,11
Jar	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	1.147,38	1.147,38
Jerurempei	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,24	0,24
Kaboaena	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	3.967,60	3.967,60
Kabuena	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	108,42	108,42
Kainui	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2.396,35	2.396,35
Kairawi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	120,02	120,02
Kaitjebo	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	2,79	2,79
Kamanap 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	788,04	788,04
Kamanap 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	8.192,06	8.192,06
Kamayun	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	6,10	6,10
Kamuniri	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,20	0,20
Kanaki	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	538,41	538,41
Kanawa	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2.619,84	2.619,84
Kandibundi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2.758,82	2.758,82
Kantum Meina	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	412,24	412,24
Kanua	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	630,82	630,82
Karariri	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	371,23	371,23
Karawi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.923,80	1.923,80
Karawi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.660,60	1.660,60
Karfis	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	7.921,82	7.921,82
Karia	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,20	0,20
Kariori	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	12,31	12,31
Karmon	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	583,24	583,24
Karoupi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,14	0,14
Karuati	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	4,31	4,31
Kasuari 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	306,86	306,86



Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Kauaki	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	239,34	239,34
Kawai	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2,42	2,42
Kawipi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,94	0,94
Kawipi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,49	1,49
Kayu Pulo Dua	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	3,04	3,04
Kedi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	3,50	3,50
Kelapa	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	0,19	0,19
Kendate	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	410,54	410,54
Kepulauan Enggros 1	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	0,66	0,66
Kepulauan Enggros 2	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	0,53	0,53
Kepulauan Enggros 3	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	1,95	1,95
Kepulauan Manikenaki 1	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	8,18	8,18
Kepulauan Manikenaki 2	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	28,88	28,88
Kepulauan Manikenaki 3	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	21,52	21,52
Kepulauan Manikenaki 4	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	57,36	57,36
Kepulauan Manikenaki 5	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	80,74	80,74
Kepulauan Manikenaki 6	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	23,82	23,82
Kepulauan Tujuh 1	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	0,09	0,09
Kepulauan Tujuh 2	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	0,01	0,01
Keriari 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	279,20	279,20
Keriari 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	87,32	87,32
Kiriyau 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	189,80	189,80
Kiriyau 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	770,49	770,49
Kiriyau 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	948,65	948,65
Klausu	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	10,45	507,11
		Kota Jayapura		496,66	
Kohari	Sangat Kecil	Keerom	Papua	5,93	4.388,20
		Kota Jayapura		4.382,27	
Komarai 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	284,90	284,90
Komarai 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	262,54	262,54
Komarai 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	206,52	206,52
Komarai 4	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	181,18	181,18
Komarai 5	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	137,90	137,90
Komarai 6	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	122,84	122,84
Komarai 7	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	110,67	110,67
Konori	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2,20	2,20
Kor Marsrip	Sangat Kecil	Supiori	Papua	6,59	6,59
Kor Sawempdi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	7,91	7,91
Korido	Sangat Kecil	Supiori	Papua	459,04	459,04
Kororompui 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	256,50	256,50
Kororompui 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	368,37	368,37
Kororompui 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	226,19	226,19
Kri	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,42	1,42
Kumamba	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	12,58	12,58
Kupai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	687,22	687,22
Kuran	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	37,12	37,12
Kurudu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2.154,15	2.154,15
Lachoiroi 1	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	421,24	421,24
Lachoiroi 2	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	260,58	260,58
Liki	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	1.324,19	1.324,19
Machatawa Tua	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	431,96	431,96
Mainu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,52	0,52
Maipuri	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	131,87	131,87
Makiroan	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,09	1,09
Mambawi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	475,67	475,67
Mambawi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,15	1,15
Manaema	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	284,96	284,96
Manahumi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	880,53	880,53
Manaunya	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	223,50	223,50
Mandena	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,28	0,28
Mandui	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,06	0,06
Manggari	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.031,29	1.031,29

Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Mangonswan	Sangat Kecil	Supiori	Papua	940,33	940,33
Mangui	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	313,95	313,95
Mansurbabo	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	6,97	6,97
Mantembu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	4.002,06	4.002,06
Manupampi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	326,06	326,06
Manupampi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	233,81	233,81
Manupampi 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	246,39	246,39
Manupuri	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	11,45	11,45
Maondi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,61	0,61
Mara Timur 1	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	9.995,98	9.995,98
Mara Timur 2	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	409,77	409,77
Marabolte	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	519,33	519,33
Maraiware	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	536,01	536,01
Marapa	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.844,42	1.844,42
Mararema	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	727,70	727,70
Marau	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	4.649,12	4.649,12
Marei 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	3,02	3,02
Marei 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	3,46	3,46
Mareni 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.606,15	1.606,15
Mareni 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	399,47	399,47
Mariadei	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	157,95	157,95
Mariaidori	Sangat Kecil	Supiori	Papua	812,17	812,17
Mariarotu 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.811,27	1.811,27
Mariarotu 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	5.803,67	5.803,67
Marim	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	30,82	30,82
Marupi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	54,78	54,78
Marupi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,22	1,22
Masi Masi	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	75,69	75,69
Masiasmati	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	210,70	210,70
Masyai	Sangat Kecil	Supiori	Papua	219,49	219,49
Masyarah	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	599,16	599,16
Masyram	Sangat Kecil	Supiori	Papua	418,27	418,27
Maudori 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	406,62	406,62
Maudori 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	226,09	226,09
Meiwani	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,16	0,16
Menawi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	828,43	828,43
Mengge	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	9,85	9,85
Menona	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	173,84	173,84
Meos Inumberi Kasun	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,31	0,31
Meos 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,50	0,50
Meos Abumduai	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	6,47	6,47
Meos Abummansarman 1	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,17	0,17
Meos Abummansarman 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,65	0,65
Meos Abummansarman 3	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,00	0,00
Meos Abummansarman 4	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	4,28	4,28
Meos Abummansarman 5	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,74	0,74
Meos Abummansarman 6	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,07	0,07
Meos Abummansarman 7	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,39	0,39
Meos Arimi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1,04	1,04
Meos Aruri	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,87	0,87
Meos Arwai Kecil	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,21	0,21
Meos Bapam Pam Fandu	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,23	0,23
Meos Bawasuru	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,08	0,08
Meos Bawekasun	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,23	0,23
Meos Befrefi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,25	0,25
Meos Bemgir	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,28	0,28
Meos Bendi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,70	1,70
Meos Biri	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,28	1,28
Meos Bobyar	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,38	0,38
Meos Bruyandori	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,07	0,07
Meos Burua	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,48	0,48
Meos Fandas	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,74	0,74



Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Meos Fandus	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,82	0,82
Meos Homamb	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,52	1,52
Meos Ineki	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1.252,19	1.252,19
Meos Insumekem	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,52	0,52
Meos Jouwindi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,96	0,96
Meos Karwar Oser	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,28	0,28
Meos Krisiro	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,70	0,70
Meos Kunori	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,16	0,16
Meos Kurrofski	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,25	0,25
Meos Mandun 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,63	0,63
Meos Mandun 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,33	0,33
Meos Mangkubuy	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,74	0,74
Meos Mawoni	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,35	0,35
Meos Mrap Kasun	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,21	0,21
Meos Numfor Bepon	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,32	0,32
Meos Obsiburi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,43	0,43
Meos Sanwori Bebe	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,76	0,76
Meos Sariasi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,77	0,77
Meos Wandarwa Kasum	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,79	0,79
Meos-Ayedi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,40	0,40
Meos-Karui	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2,51	2,51
Meos-Mangguandi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	546,70	546,70
Meos-Warek	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	53,94	53,94
Merau	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	163,76	163,76
Mereruni	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	946,45	946,45
Merway	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	1.338,67	1.338,67
Migasai 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	218,16	218,16
Migasai 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	236,89	236,89
Migasai 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	189,25	189,25
Mios	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.158,73	1.158,73
Mios Faknik	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,74	0,74
Mios Saviak	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,58	1,58
Miosnum 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	337,55	337,55
Miosnum 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	412,36	412,36
Mipos Bosen	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,54	1,54
Mirap Beda	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,44	0,44
Mnudu	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,76	1,76
Muara Tami	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	384,11	384,11
Mundi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	72,64	72,64
Mundoung 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,87	0,87
Mundoung 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,63	0,63
Munggui 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2.397,00	2.397,00
Munggui 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	205,26	205,26
Munsak Bonde	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,60	0,60
Munsaki 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,77	1,77
Munsaki 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,42	0,42
Murui	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	4.392,55	4.392,55
Myos Faknik 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	2,14	2,14
Myos Faknik 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,85	0,85
Myos Imbresieri	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,84	0,84
Myos Kapapu	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,71	0,71
Myos Kunef	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,53	1,53
Nachata	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	302,80	302,80
Nafri	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	538,42	538,42
Naiwari	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.850,57	1.850,57
Naiweri 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	967,38	967,38
Naiweri 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	690,31	690,31
Napido 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	213,83	213,83
Napido 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	316,61	316,61
Napindotu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,05	0,05
Napisdi 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,43	0,43
Napisdi 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,08	0,08
Napisdi 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,25	0,25
Nau	Sangat Kecil	Waropen	Papua	278,95	278,95
Niri	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	223,38	223,38
Nirumoar	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	453,65	453,65
Npiesndi 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	3.420,56	3.420,56
Npiesndi 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	299,83	299,83
Npiesndi 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	319,91	319,91
Nuadiataf	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,04	0,04

Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Nufiawow	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,13	0,13
Nuhanana	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,22	0,22
Nuharang	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,14	0,14
Nukaifui	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,07	0,07
Nukandari	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,66	0,66
Nukatora	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,35	0,35
Nukori 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	9,40	9,40
Nukori 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	108,33	108,33
Nukori 3	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1,09	1,09
Nukori 4	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,70	0,70
Nukutu Domp	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,05	0,05
Nukutuaf	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,14	0,14
Num 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	593,22	593,22
Num 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	242,42	242,42
Numani Barat	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,25	0,25
Numani Timur	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,05	0,05
Numateru	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,24	0,24
Nunsembai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	599,91	599,91
Nunsiari	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	5.161,47	5.161,47
Nupapari	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,11	0,11
Nusi Babaruk	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	98,56	98,56
Nusowi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,42	0,42
Nutawa	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,11	0,11
Nutoroa	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,07	0,07
Nuwiyoi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,13	0,13
Nuwowa	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,24	1,24
Nyambarai	Sangat Kecil	Supiori	Papua	41,47	41,47
Nyari	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	247,77	247,77
Odori	Sangat Kecil	Supiori	Papua	497,40	497,40
Oipasano	Sangat Kecil	Waropen	Papua	4.842,39	4.842,39
Orek	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2.456,76	2.456,76
Orimbori	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1.602,25	1.602,25
Ormu Besar	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	1.891,81	1.891,81
Owi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	874,13	874,13
Pabepa	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	748,49	748,49
Padaido	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	747,23	747,23
Pai 1	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	440,96	440,96
Pai 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	468,47	468,47
Pakemi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,13	0,13
Pakriki 1	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2.597,28	2.597,28
Pakriki 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	515,78	515,78
Palau Nn 1	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	0,11	0,11
Palau Nn 2	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	0,34	0,34
Palau Nn 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,15	0,15
Palau Nn 4	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,18	0,18
Palau Nn 5	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	0,15	0,15
Palau Nn 6	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	0,15	0,15
Pamai 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	286,21	286,21
Pamai 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	3,60	3,60
Pamdi 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	340,53	340,53
Pamdi 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	886,61	886,61
Pamdori	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	172,64	172,64
Pami	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	303,92	303,92
Pandi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	71,44	71,44
Pangkahani	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,57	0,57
Papia 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	8,68	8,68
Papia 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,62	0,62
Papia 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,95	1,95
Papuma	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	3,29	3,29
Papuma Sasawa	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	4.419,60	4.419,60
Paryen	Sangat Kecil	Supiori	Papua	214,77	214,77
Paryeri 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	12,37	12,37
Paryeri 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,46	0,46
Pasi 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	575,29	575,29
Pasibui	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,17	0,17
Pianfon	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	1.382,80	1.382,80
Pm	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	3,21	175,69
		Jayapura		1,63	
		Kepulauan Yapen		6,33	
		Kota Jayapura		0,02	
		Mamberamo Raya		5,35	



Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
		Supiori		27,98	
		Waropen		131,18	
Podena	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	63,08	63,08
Pom	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	542,98	542,98
Ponokabai 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	68,75	68,75
Ponokabai 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	59,93	59,93
Ponokabai 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	78,58	78,58
Poom Dua	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	102,77	102,77
Popotrempi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	544,94	544,94
Popuma	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	222,27	222,27
Prap	Sangat Kecil	Supiori	Papua	23,61	23,61
Pulau Ayari	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,06	0,06
Pulau Musampi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,24	0,24
Pulau Nufara Kecil	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,29	0,29
Pulau Num	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	860,53	860,53
Pulau Nuremoipi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,79	0,79
Pulau Nusbiru 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,36	0,36
Pulau Nusbiru 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,34	1,34
Pulau Nusirif	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,37	0,37
Pulau Nuwonawai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,40	0,40
Pulau Sebari	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,29	0,29
Pulau Tanjung Bayaiworeng	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,26	1,26
Pulau Teluk Ampmoi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,98	0,98
Pulau Teluk Bruyadori	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,13	0,13
Pulau Tomai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,29	0,29
Pulau Tuborosaki	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,28	0,28
Pulau Tujuh 1	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	0,24	0,24
Pulau Tujuh 2	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	0,39	0,39
Pulau Tujuh 3	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	0,01	0,01
Pulau Tujuh 4	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	0,01	0,01
Pulau Urepi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,34	0,34
Pulau Wandos	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	0,73	0,73
Pulau Wonden	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,43	0,43
Puri	Sangat Kecil	Supiori	Papua	108,16	108,16
Puso	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	53,03	7.571,97
		Waropen		7.518,94	
Ramdori	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.315,38	1.315,38
Randowayaipi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	318,46	318,46
Rani	Sangat Kecil	Supiori	Papua	371,12	371,12
Rasi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	33,39	33,39
Rasii	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	485,46	485,46
Rawa	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	140,79	140,79
Rayori 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	5,06	5,06
Rayori 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	2,69	2,69
Rayori 3	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,00	1,00
Rayori 4	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,63	1,63
Resbari	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,25	0,25
Revenirara	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	1.346,47	1.346,47
Roai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	302,74	302,74
Rori 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	278,43	278,43
Rosbori 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.198,09	1.198,09
Rosbori 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.163,68	1.163,68
Roswari 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	497,30	497,30
Roswari 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	511,16	511,16
Roswari 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	360,96	360,96
Ruadung	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	472,20	472,20
Runi 1	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	15,02	15,02
Runi 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	13,22	13,22
Rurbasbeba	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	37,05	37,05
Rurbasbedar	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	10,98	10,98
Rusweri	Sangat Kecil	Supiori	Papua	859,22	859,22
Ruwai	Sangat Kecil	Mamberamo Raya	Papua	231,02	231,02
Sabai 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,44	0,44
Sabarmikre	Sangat Kecil	Supiori	Papua	370,00	370,00
Saempdi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	2,03	2,03
Sambrawai 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	626,49	626,49
Sambrawai 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.829,40	1.829,40
Sambrawai 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	680,28	680,28
Sanggei	Sangat Kecil	Waropen	Papua	1.963,75	1.963,75

Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Saruman 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	219,17	219,17
Saruman 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	253,87	253,87
Sarwandori	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	373,45	373,45
Sasawa 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	550,17	550,17
Sasawa 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	3.696,46	3.696,46
Sasawa 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	225,92	225,92
Satu	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	0,53	0,53
Saubeba 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	726,61	726,61
Saubeba 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.806,37	1.806,37
Saubeba 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	246,78	246,78
Saubeba 4	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.694,78	1.694,78
Saubeba 5	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.740,75	1.740,75
Saubeba 6	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	663,85	663,85
Sausina	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	714,52	714,52
Sawai	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	554,78	554,78
Sawangrei 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	490,15	490,15
Sawangrei 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	145,12	145,12
Sawangrei 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	117,46	117,46
Sawangrei 4	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	86,09	86,09
Sawangrei 5	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	87,19	87,19
Sawangrei 6	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	75,71	75,71
Sawempdi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	7,66	7,66
Sawendi 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,53	0,53
Sawendi 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,84	0,84
Sawenui	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	275,15	275,15
Saweru 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	562,27	562,27
Saweru 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	3,93	3,93
Sawor	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,28	0,28
Selat Yarori	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	98,03	98,03
Semni 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,45	1,45
Semni 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	1,02	1,02
Serbinwar	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.449,77	1.449,77
Seressi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2.726,50	2.726,50
Serewen	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.040,28	1.040,28
Sewanayomi	Sangat Kecil	Waropen	Papua	9.672,02	9.672,02
Sim Ajemo	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	409,64	409,64
Sir	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	3.457,99	3.457,99
Skow	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	1.818,84	1.818,84
Skow/Pawa	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	466,90	466,90
Soimiangga	Sangat Kecil	Waropen	Papua	711,80	711,80
Sombor	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	228,75	228,75
Sor	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	620,28	620,28
Sorendi 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	555,01	555,01
Sorendi 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	3,35	3,35
Sorendiwari 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	482,66	482,66
Sorendiwari 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	216,39	216,39
Soromasen 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.849,77	1.849,77
Soromasen 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	708,49	708,49
Suande 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2,62	2,62
Suande 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	27,81	27,81
Suande 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,14	1,14
Suande 4	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,10	1,10
Sundial	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	120,92	120,92
Supiori	Sangat Kecil	Supiori	Papua	0,28	0,28
Supiori Timur	Sangat Kecil	Supiori	Papua	589,84	589,84
Sur	Sangat Kecil	Supiori	Papua	3.579,66	3.579,66
Syoribo	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.828,06	1.828,06
Syurdori	Sangat Kecil	Supiori	Papua	648,14	648,14
Tadori	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,03	0,03
Tairi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	23,91	23,91
Tairi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	14,78	14,78
Tairi 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	10,52	10,52
Takar Dua	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	2.877,55	2.877,55
Tanah Merah	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	898,44	898,44
Tanggah	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	10,68	10,68
Tangko	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	109,38	109,38
Tanjung 1	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	0,35	0,35
Tanjung 2	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	0,36	0,36
Tanjung 3	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	0,92	0,92
Tanjung Aborawi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	254,77	254,77
Tanjung Aborawi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	109,43	109,43



Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Tanjung Aborawi 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	221,63	221,63
Tanjung Ande	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	246,87	246,87
Tanjung Arrareni	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	163,99	163,99
Tanjung Bendera 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	75,70	75,70
Tanjung Bendera 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	66,96	66,96
Tanjung Cewer	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	620,56	620,56
Tanjung Hadimako	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	0,03	0,03
Tanjung Kamutu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	224,18	224,18
Tanjung Korong Wab	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	401,07	401,07
Tanjung Mamori	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	308,40	308,40
Tanjung Mantopa	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	139,80	139,80
Tanjung Musewani	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	314,85	314,85
Tanjung Numani	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	240,54	240,54
Tanjung Ormu	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	634,17	634,17
Tanjung Paipeai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	189,49	189,49
Tanjung Ria	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	565,98	565,98
Tanjung Seresi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	159,89	159,89
Tanjung Sims Ajemo	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	338,42	338,42
Tanjung Tumamuri	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	321,70	321,70
Tanjung Warsandai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	211,74	211,74
Tanjung Woda	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	245,87	245,87
Tanjung Woka 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	143,23	143,23
Tanjung Woka 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	60,42	60,42
Tanjung Wonendei	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	175,33	175,33
Tanjung Woraminggiri	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	219,60	219,60
Tanwato	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	285,46	285,46
Tarei	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.478,46	1.478,46
Tatui 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2.749,92	2.749,92
Tatui 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	157,39	157,39
Tawini	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	449,80	449,80
Tebu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,96	0,96
Telaga Embambon	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	432,47	432,47
Telaga Tenih	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	156,79	156,79
Teluk Ahawanuap	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	190,25	190,25
Teluk Ampimoi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	387,10	387,10
Teluk Ausen	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	274,20	274,20
Teluk Iris	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	499,05	499,05
Teluk Jendarna	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	134,61	134,61
Teluk Kumpang	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	560,54	560,54
Timiner	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	4.042,90	4.042,90
Tindaret	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	6.033,00	6.033,00
Tjoberi 1	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	2,62	2,62
Tjoberi 2	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	1,44	1,44
Tobati	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	571,87	571,87
Trikora	Sangat Kecil	Kota Jayapura	Papua	283,93	283,93
Tudu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2,55	2,55
Tumpapa	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,20	0,20
Turu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	133,24	133,24
Ukaner	Kecil	Sarmi	Papua	15.743,30	15.743,30
Urbihasi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	51,31	51,31
Urkdori	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	780,33	993,67
		Supiori		213,33	
Usauwer 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	74,65	74,65
Usauwer 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	55,83	55,83
Vandumoar	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	18,56	18,56
Wabudori 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	5.735,23	5.735,23
Wabudori 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	306,01	306,01
Wadadi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,63	0,63
Wade	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,53	0,53
Wafor 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	5.724,54	5.724,54
Waidorongrong	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	907,17	907,17
Waindu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	287,60	287,60
Waisani	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	584,81	584,81
Wakde 1	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	216,53	216,53
Wakde 2	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	14,05	14,05
Wakre 1	Sangat Kecil	Supiori	Papua	883,51	883,51
Wakre 2	Sangat Kecil	Supiori	Papua	251,81	251,81
Wamori 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	156,97	156,97
Wamori 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	29,25	29,25

Nama DAS	Kategori	Kabupaten	Provinsi	Luas (ha)	Luas Total DAS (ha)
Wamori 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1,41	1,41
Wamori 4	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,72	0,72
Wamori 5	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	6,52	6,52
Wamori 6	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	12,20	12,20
Wanaponoi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,15	0,15
Wandi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,89	0,89
Wandos	Sangat Kecil	Supiori	Papua	813,48	813,48
Wandu	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	398,35	398,35
Wansra	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.589,21	1.589,21
Wapiwore	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,40	0,40
Warari	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	707,23	707,23
Wari 1	Sangat Kecil	Jayapura	Papua	2.451,83	2.451,83
Wari 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.340,02	1.340,02
Wari 3	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	2.939,63	2.939,63
Warironi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	2.154,01	2.154,01
Warmuniapi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	224,06	224,06
Warobai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	500,43	500,43
Waronsus	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	14,84	14,84
Warpongasi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	441,25	441,25
Warsa 2	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	1.333,64	1.333,64
Wauren	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	179,67	179,67
Wawuti 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	314,48	314,48
Wawuti 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	807,58	807,58
Webi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	299,58	299,58
Webi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.083,58	1.083,58
Widiati	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	697,62	697,62
Woda 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	415,31	415,31
Woda 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	384,83	384,83
Woinap 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	1.988,62	1.988,62
Woinap 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	234,65	234,65
Woinap 3	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	188,39	188,39
Woka	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	431,01	431,01
Wombrisau	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	748,96	748,96
Wondaiwaring	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	460,54	460,54
Wonti	Sangat Kecil	Waropen	Papua	4.031,58	4.031,58
Wopi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	627,18	627,18
Wopi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	318,67	318,67
Worbondi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	164,51	164,51
Worondaudeni	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,09	0,09
Woryei	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,06	0,06
Wossalai	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	165,14	165,14
Wowoboi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	63,07	63,07
Wundi	Sangat Kecil	Supiori	Papua	20,77	20,77
Yaimana	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	211,88	211,88
Yaimaria	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	918,26	918,26
Yapen	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	271,88	271,88
Yarsun	Sangat Kecil	Sarmi	Papua	55,76	55,76
Yendoker	Sangat Kecil	Supiori	Papua	212,69	212,69
Yenusi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	55,95	55,95
Yenusi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	47,22	47,22
Yeri	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	25,40	25,40
Yeromi	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	0,06	0,06
Yobi 1	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	724,00	724,00
Yobi 2	Sangat Kecil	Kepulauan Yapen	Papua	491,03	491,03
Yumdi	Sangat Kecil	Biak Numfor	Papua	4,56	4,56

Sumber: Daerah Aliran Sungai Provinsi Papua – BPKH Tahun 2022

DAS dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan pembangunan, misalnya untuk areal pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman, pembangunan PLTA, pemanfaatan hasil hutan kayu dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut akhirnya adalah untuk memenuhi kepentingan manusia, khususnya peningkatan kesejahteraan. Namun demikian hal yang harus diperhatikan adalah berbagai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan penurunan tingkat produksi, baik produksi pada masing-masing sektor maupun pada tingkat DAS. Masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan DAS ini sangat beragam, rumit, dan berkaitan



dengan berbagai sektor. Peranan stakeholder dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah menentukan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan kegiatan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan serta evaluasi dan monitoring kegiatan. Peranan stakeholder juga berkolaborasi dan bersinergi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk mendapatkan korelasi yang baik. Tabel berikut ini menunjukkan luas Daerah Aliran Sungai besar di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Papua.

Tabel II.6 Luas Daerah Aliran Sungai berdasarkan Kategori di Provinsi Papua

No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
Kabupaten Biak Numfor			
1	Abumamborbi	Sangat Kecil	0,86
2	Adadikam	Kecil	16.226,90
3	Adoki	Kecil	31.587,30
4	Amoi	Sangat Kecil	655,45
5	Andei	Sangat Kecil	5.407,21
6	Anian	Sangat Kecil	92,17
7	Arwai	Sangat Kecil	4.648,75
8	Asur	Sangat Kecil	2,65
9	Auki	Sangat Kecil	755,98
10	Baruki	Sangat Kecil	7.652,88
11	Bawei 4	Sangat Kecil	5.809,90
12	Beruki	Sangat Kecil	1.192,71
13	Bromsi	Sangat Kecil	1.197,96
14	Brugei	Sangat Kecil	1,47
15	Dafi	Sangat Kecil	2.562,23
16	Dawi	Sangat Kecil	28,51
17	Doubo 1	Sangat Kecil	2.258,77
18	Doubo 2	Sangat Kecil	183,39
19	Duai	Sangat Kecil	540,60
20	Duma	Sangat Kecil	2,17
21	Gito	Sangat Kecil	48,24
22	Impurmi	Sangat Kecil	0,02
23	Inasi	Sangat Kecil	2.109,46
24	Inswambesi	Sangat Kecil	4.708,35
25	Kandibundi	Sangat Kecil	2.758,82
26	Karmon	Sangat Kecil	583,24
27	Kawai	Sangat Kecil	2,42
28	Konori	Sangat Kecil	2,20
29	Maipuri	Sangat Kecil	131,87
30	Manggari	Sangat Kecil	1.031,29
31	Mansurbabo	Sangat Kecil	6,97
32	Manswam	Kecil	11.181,20
33	Manupuri	Sangat Kecil	11,45
34	Marim	Sangat Kecil	30,82
35	Masyarah	Sangat Kecil	599,16
36	Meos 2	Sangat Kecil	0,50
37	Meos Abumduai	Sangat Kecil	6,47
38	Meos Abummansarman 1	Sangat Kecil	0,17
39	Meos Abummansarman 2	Sangat Kecil	0,65
40	Meos Abummansarman 3	Sangat Kecil	0,00
41	Meos Abummansarman 4	Sangat Kecil	4,28
42	Meos Abummansarman 5	Sangat Kecil	0,74
43	Meos Abummansarman 6	Sangat Kecil	0,07
44	Meos Abummansarman 7	Sangat Kecil	0,39
45	Meos Arimi	Sangat Kecil	1,04
46	Meos Bawasuru	Sangat Kecil	0,08
47	Meos Bawekasan	Sangat Kecil	0,23
48	Meos Bruyandori	Sangat Kecil	0,07
49	Meos Insumekem	Sangat Kecil	0,52
50	Meos Jouwindi	Sangat Kecil	0,96
51	Meos Karwar Oser	Sangat Kecil	0,28
52	Meos Krisiro	Sangat Kecil	0,70
53	Meos Kurrofki	Sangat Kecil	0,25
54	Meos Numfor Bepon	Sangat Kecil	0,32
55	Meos-Ayedi	Sangat Kecil	0,40
56	Meos-Karui	Sangat Kecil	2,51
57	Meos-Manguandi	Sangat Kecil	546,70

No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
58	Meos-Warek	Sangat Kecil	53,94
59	Mios	Sangat Kecil	1.158,73
60	Mundi	Sangat Kecil	72,64
61	Napi	Kecil	10.276,10
62	Nukori 2	Sangat Kecil	108,33
63	Nukori 3	Sangat Kecil	1,09
64	Nusi Babaruk	Sangat Kecil	98,56
65	Orek	Sangat Kecil	2.456,76
66	Owi	Sangat Kecil	874,13
67	Padaido	Sangat Kecil	747,23
68	Pai 2	Sangat Kecil	468,47
69	Pakriki 1	Sangat Kecil	2.597,28
70	Pakriki 2	Sangat Kecil	515,78
71	Pamdori	Sangat Kecil	172,64
72	Pasi 2	Sangat Kecil	575,29
73	Pm	Sangat Kecil	3,21
74	Pulau Teluk Bruyadori	Sangat Kecil	0,13
75	Pulau Wandos	Sangat Kecil	0,73
76	Ramdori	Sangat Kecil	1.315,38
77	Rasi	Sangat Kecil	33,39
78	Runi 1	Sangat Kecil	15,02
79	Runi 2	Sangat Kecil	13,22
80	Rurbasbeba	Sangat Kecil	37,05
81	Rurbasbedar	Sangat Kecil	10,98
82	Samares	Kecil	60.313,70
83	Sawai	Sangat Kecil	554,78
84	Serbinwar	Sangat Kecil	1.449,77
85	Sor	Sangat Kecil	620,28
86	Syoribo	Sangat Kecil	1.828,06
87	Tangah	Sangat Kecil	10,68
88	Tangko	Sangat Kecil	109,38
89	Urbihasi	Sangat Kecil	51,31
90	Urkdori	Sangat Kecil	780,33
91	Wafor 1	Kecil	27.153,90
92	Wansra	Sangat Kecil	1.589,21
93	Wari 2	Sangat Kecil	1.340,02
94	Wari 3	Sangat Kecil	2.939,63
95	Warsa 2	Sangat Kecil	1.333,64
96	Wombrisau	Sangat Kecil	748,96
97	Worbondi	Sangat Kecil	164,51
98	Yeri	Sangat Kecil	25,40
99	Yumdi	Sangat Kecil	4,56
Kabupaten Jayapura			
1	Amal 1	Sangat Kecil	1.879,51
2	Amal 2	Sangat Kecil	974,10
3	Amal 3	Sangat Kecil	913,57
4	Amal 4	Sangat Kecil	174,39
5	Amal 5	Sangat Kecil	261,39
6	Ambora	Sangat Kecil	461,44
7	Cycloop 10	Sangat Kecil	1.706,05
8	Cycloop 11	Sangat Kecil	261,05
9	Cycloop 12	Sangat Kecil	365,91
10	Cycloop 13	Sangat Kecil	327,81
11	Cycloop 14	Sangat Kecil	308,53
12	Cycloop 5	Sangat Kecil	43,83
13	Cycloop 6	Sangat Kecil	232,29
14	Cycloop 7	Sangat Kecil	895,15
15	Cycloop 8	Sangat Kecil	3.567,38
16	Cycloop 9	Sangat Kecil	291,19
17	Demta	Sangat Kecil	2.275,16
18	Dormena	Sangat Kecil	1.100,32
19	Drakes	Sangat Kecil	438,20
20	Grime	Sedang	112.815,00
21	Gunung Jambe	Sangat Kecil	1.940,01
22	Kantum Meina	Sangat Kecil	412,24
23	Kelapa	Sangat Kecil	0,19
24	Kendate	Sangat Kecil	410,54
25	Klausu	Sangat Kecil	10,45
26	Lachoiroi 1	Sangat Kecil	421,24
27	Lachoiroi 2	Sangat Kecil	260,58
28	Machatawa Tua	Sangat Kecil	431,96
29	Mara Timur 1	Sangat Kecil	9.995,98



No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
30	Mara Timur 2	Sangat Kecil	409,77
31	Memberamo	Sangat Besar	905.259,00
32	Nachata	Sangat Kecil	302,80
33	Ormu Besar	Sangat Kecil	1.891,81
34	Palau Nn 1	Sangat Kecil	0,11
35	Palau Nn 2	Sangat Kecil	0,34
36	Palau Nn 5	Sangat Kecil	0,15
37	Palau Nn 6	Sangat Kecil	0,15
38	Pm	Sangat Kecil	1,63
39	Revenirara	Sangat Kecil	1.346,47
40	Sentani Tami	Sedang	82.331,90
41	Sermo	Sedang	113.051,00
42	Sim Ajemo	Sangat Kecil	409,64
43	Tamar	Kecil	19,76
44	Tanah Merah	Sangat Kecil	898,44
45	Tanjung 1	Sangat Kecil	0,35
46	Tanjung 2	Sangat Kecil	0,36
47	Tanjung 3	Sangat Kecil	0,92
48	Tanjung Ande	Sangat Kecil	246,87
49	Tanjung Hadimako	Sangat Kecil	0,03
50	Tanjung Korong Wab	Sangat Kecil	401,07
51	Tanjung Ormu	Sangat Kecil	634,17
52	Tanjung Sims Ajemo	Sangat Kecil	338,42
53	Teluk Iris	Sangat Kecil	499,05
54	Toarim	Kecil	37.110,00
55	Wari 1	Sangat Kecil	2.451,83
56	Wiru	Sedang	116.766,00
Kabupaten Keerom			
1	Akerinda	Sangat Kecil	1.590,38
2	Grime	Sedang	27,20
3	Kohari	Sangat Kecil	5,93
4	Memberamo	Sangat Besar	587.055,00
5	Sentani Tami	Sedang	261.594,00
6	Sepik	Sedang	97.829,70
7	Sermo	Sedang	3.805,49
Kabupaten Kepulauan Yapen			
1	Abiaibaba	Sangat Kecil	338,91
2	Adiwipi 1	Sangat Kecil	22,78
3	Adiwipi 2	Sangat Kecil	6,33
4	Adiwipi 3	Sangat Kecil	1,74
5	Aibai	Sangat Kecil	3,06
6	Aibondeni	Sangat Kecil	1.557,58
7	Aisau 1	Sangat Kecil	1.080,14
8	Aisau 2	Sangat Kecil	711,36
9	Aisau 3	Sangat Kecil	1.036,91
10	Aiwapi Besar	Sangat Kecil	0,16
11	Aiwapi Kecil	Sangat Kecil	0,08
12	Ambai 1	Sangat Kecil	7,20
13	Ambai 2	Sangat Kecil	80,44
14	Ambai 3	Sangat Kecil	299,94
15	Ambai 4	Sangat Kecil	1,39
16	Ambai 5	Sangat Kecil	0,75
17	Ambaidiru	Kecil	12.086,00
18	Ampimoi 1	Sangat Kecil	530,84
19	Ampimoi 2	Sangat Kecil	5.706,16
20	Ampimoi 3	Sangat Kecil	107,57
21	Anawipi	Sangat Kecil	259,06
22	Angkeisera 1	Sangat Kecil	0,28
23	Ansus 1	Sangat Kecil	1.245,53
24	Ansus 2	Sangat Kecil	218,67
25	Ansus 3	Sangat Kecil	7,76
26	Antunai 1	Sangat Kecil	485,23
27	Antunai 2	Sangat Kecil	463,67
28	Antunai 3	Sangat Kecil	302,56
29	Aribi 1	Sangat Kecil	632,43
30	Aribi 2	Sangat Kecil	293,00
31	Aribi 3	Sangat Kecil	246,32
32	Aribi 4	Sangat Kecil	163,10
33	Aribi 5	Sangat Kecil	265,91
34	Arisai	Sangat Kecil	420,66
35	Ariyabu	Sangat Kecil	223,20
36	Aromarea 1	Sangat Kecil	6.468,08

No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
37	Aromarea 2	Sangat Kecil	283,04
38	Aromarea 3	Sangat Kecil	639,65
39	Aronai	Sangat Kecil	1.474,40
40	Arowarea	Sangat Kecil	220,47
41	Arowesi	Sangat Kecil	1,60
42	Aroya	Sangat Kecil	0,20
43	Asai 1	Sangat Kecil	285,75
44	Awadoh	Sangat Kecil	230,61
45	Awahanuap	Sangat Kecil	0,18
46	Ayari 1	Sangat Kecil	4.406,87
47	Ayari 2	Sangat Kecil	1.161,83
48	Ayari 3	Sangat Kecil	228,70
49	Baisore	Sangat Kecil	210,14
50	Baiwana	Sangat Kecil	1,92
51	Barawa 1	Sangat Kecil	588,41
52	Barawa 2	Sangat Kecil	755,50
53	Bareraidi 1	Sangat Kecil	4.238,92
54	Bareraidi 2	Sangat Kecil	220,30
55	Bareraipi	Sangat Kecil	192,88
56	Batu Pendeta	Sangat Kecil	0,20
57	Bayami	Sangat Kecil	1.133,53
58	Be	Sangat Kecil	1.054,34
59	Bokakotu	Sangat Kecil	1,59
60	Bukit Kowetarurui	Sangat Kecil	473,78
61	Butunukaifui	Sangat Kecil	0,20
62	Dapapen	Sangat Kecil	5.127,89
63	Dawai	Sangat Kecil	988,16
64	Delta Waita	Sangat Kecil	5,71
65	Dom	Sangat Kecil	247,46
66	Dorawi	Sangat Kecil	2.059,30
67	Dosasewa	Sangat Kecil	390,05
68	Dumani	Sangat Kecil	372,06
69	Dwandiru	Sangat Kecil	0,15
70	Eraempi	Sangat Kecil	916,88
71	Gunung Kaibang	Sangat Kecil	321,81
72	Gunung Maryowi	Sangat Kecil	200,83
73	Gunung Seruai	Sangat Kecil	335,58
74	Gunung Tata	Sangat Kecil	184,41
75	Hohar	Sangat Kecil	320,94
76	Indi	Sangat Kecil	60,71
77	Ingrisau	Kecil	10.631,30
78	Inkakeri	Sangat Kecil	0,99
79	Jerurempei	Sangat Kecil	0,24
80	Kaboena	Sangat Kecil	3.967,60
81	Kabuena	Sangat Kecil	108,42
82	Kainui	Sangat Kecil	2.396,35
83	Kairawi	Sangat Kecil	120,02
84	Kamanap 1	Sangat Kecil	788,04
85	Kamanap 2	Sangat Kecil	8.192,06
86	Kamayun	Sangat Kecil	6,10
87	Kamuniri	Sangat Kecil	0,20
88	Kanaki	Sangat Kecil	538,41
89	Kanawa	Sangat Kecil	2.619,84
90	Kanua	Sangat Kecil	630,82
91	Karariri	Sangat Kecil	371,23
92	Karawi 1	Sangat Kecil	1.923,80
93	Karawi 2	Sangat Kecil	1.660,60
94	Karia	Sangat Kecil	0,20
95	Kariori	Sangat Kecil	12,31
96	Karoupi	Sangat Kecil	0,14
97	Karuati	Sangat Kecil	4,31
98	Kasuari 2	Sangat Kecil	306,86
99	Kauaki	Sangat Kecil	239,34
100	Kawipi 1	Sangat Kecil	0,94
101	Kawipi 2	Sangat Kecil	1,49
102	Keriar 1	Sangat Kecil	279,20
103	Keriar 2	Sangat Kecil	87,32
104	Kiriyu 1	Sangat Kecil	189,80
105	Kiriyu 2	Sangat Kecil	770,49
106	Kiriyu 3	Sangat Kecil	948,65
107	Komarai 1	Sangat Kecil	284,90
108	Komarai 2	Sangat Kecil	262,54



No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
109	Komarai 3	Sangat Kecil	206,52
110	Komarai 4	Sangat Kecil	181,18
111	Komarai 5	Sangat Kecil	137,90
112	Komarai 6	Sangat Kecil	122,84
113	Komarai 7	Sangat Kecil	110,67
114	Kororompui 1	Sangat Kecil	256,50
115	Kororompui 2	Sangat Kecil	368,37
116	Kororompui 3	Sangat Kecil	226,19
117	Kupai	Sangat Kecil	687,22
118	Kuran	Sangat Kecil	37,12
119	Kurudu	Sangat Kecil	2.154,15
120	Mainu	Sangat Kecil	0,52
121	Makiroan	Sangat Kecil	1,09
122	Mambawi 1	Sangat Kecil	475,67
123	Mambawi 2	Sangat Kecil	1,15
124	Manaema	Sangat Kecil	284,96
125	Manahumi	Sangat Kecil	880,53
126	Manaunya	Sangat Kecil	223,50
127	Mandena	Sangat Kecil	0,28
128	Mandui	Sangat Kecil	0,06
129	Mangui	Sangat Kecil	313,95
130	Mantembu	Sangat Kecil	4.002,06
131	Manupampi 1	Sangat Kecil	326,06
132	Manupampi 2	Sangat Kecil	233,81
133	Manupampi 3	Sangat Kecil	246,39
134	Marabolte	Sangat Kecil	519,33
135	Maraiware	Sangat Kecil	536,01
136	Marapa	Sangat Kecil	1.844,42
137	Mararema	Sangat Kecil	727,70
138	Marau	Sangat Kecil	4.649,12
139	Marei 1	Sangat Kecil	3,02
140	Marei 2	Sangat Kecil	3,46
141	Mareni 1	Sangat Kecil	1.606,15
142	Mareni 2	Sangat Kecil	399,47
143	Mariadei	Sangat Kecil	157,95
144	Mariarotu 1	Sangat Kecil	1.811,27
145	Mariarotu 2	Sangat Kecil	5.803,67
146	Marupi 1	Sangat Kecil	54,78
147	Marupi 2	Sangat Kecil	1,22
148	Masiasmati	Sangat Kecil	210,70
149	Meiwani	Sangat Kecil	0,16
150	Menawi	Sangat Kecil	828,43
151	Menona	Sangat Kecil	173,84
152	Merau	Sangat Kecil	163,76
153	Mereruni	Sangat Kecil	946,45
154	Mios Saviak	Sangat Kecil	1,58
155	Miosnum 1	Sangat Kecil	337,55
156	Miosnum 2	Sangat Kecil	412,36
157	Mundoung 1	Sangat Kecil	0,87
158	Mundoung 2	Sangat Kecil	0,63
159	Munggui 1	Sangat Kecil	2.397,00
160	Munggui 2	Sangat Kecil	205,26
161	Murui	Sangat Kecil	4.392,55
162	Naiwari	Sangat Kecil	1.850,57
163	Naiwari 1	Sangat Kecil	967,38
164	Naiwari 2	Sangat Kecil	690,31
165	Napindotu	Sangat Kecil	0,05
166	Niri	Sangat Kecil	223,38
167	Nuadiataf	Sangat Kecil	0,04
168	Nufiawow	Sangat Kecil	0,13
169	Nuhanana	Sangat Kecil	0,22
170	Nuharang	Sangat Kecil	0,14
171	Nukaifui	Sangat Kecil	0,07
172	Nukandari	Sangat Kecil	0,66
173	Nukatora	Sangat Kecil	0,35
174	Nukutu Dompi	Sangat Kecil	0,05
175	Nukutuaf	Sangat Kecil	0,14
176	Num 1	Sangat Kecil	593,22
177	Num 2	Sangat Kecil	242,42
178	Numani Barat	Sangat Kecil	0,25
179	Numani Timur	Sangat Kecil	0,05
180	Numateru	Sangat Kecil	0,24

No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
181	Nunsembai	Sangat Kecil	599,91
182	Nunsiari	Sangat Kecil	5.161,47
183	Nupapari	Sangat Kecil	0,11
184	Nusowi	Sangat Kecil	0,42
185	Nutawa	Sangat Kecil	0,11
186	Nutoroa	Sangat Kecil	0,07
187	Nuwiyo	Sangat Kecil	0,13
188	Nuwowa	Sangat Kecil	1,24
189	Pakemi	Sangat Kecil	0,13
190	Pamai 1	Sangat Kecil	286,21
191	Pamai 2	Sangat Kecil	3,60
192	Pami	Sangat Kecil	303,92
193	Pangkahani	Sangat Kecil	0,57
194	Papia 1	Sangat Kecil	8,68
195	Papia 2	Sangat Kecil	0,62
196	Papia 3	Sangat Kecil	1,95
197	Papuma	Sangat Kecil	3,29
198	Papuma Sasawa	Sangat Kecil	4.419,60
199	Pasibui	Sangat Kecil	0,17
200	Pm	Sangat Kecil	6,33
201	Pom	Sangat Kecil	542,98
202	Ponokabai 1	Sangat Kecil	68,75
203	Ponokabai 2	Sangat Kecil	59,93
204	Ponokabai 3	Sangat Kecil	78,58
205	Poom Dua	Sangat Kecil	102,77
206	Popotrempi	Sangat Kecil	544,94
207	Popuma	Sangat Kecil	222,27
208	Pulau Ayari	Sangat Kecil	0,06
209	Pulau Musampi	Sangat Kecil	0,24
210	Pulau Nufara Kecil	Sangat Kecil	0,29
211	Pulau Num	Sangat Kecil	860,53
212	Pulau Nuremoipi	Sangat Kecil	0,79
213	Pulau Nusbiru 1	Sangat Kecil	0,36
214	Pulau Nusbiru 2	Sangat Kecil	1,34
215	Pulau Nusirif	Sangat Kecil	0,37
216	Pulau Nuwonawai	Sangat Kecil	0,40
217	Pulau Sebani	Sangat Kecil	0,29
218	Pulau Tanjung Bayaiworeng	Sangat Kecil	1,26
219	Pulau Teluk Ampmoi	Sangat Kecil	0,98
220	Pulau Tomai	Sangat Kecil	0,29
221	Pulau Tuborosaki	Sangat Kecil	0,28
222	Pulau Urepi	Sangat Kecil	0,34
223	Pulau Wonden	Sangat Kecil	0,43
224	Randowayaipi	Sangat Kecil	318,46
225	Rasih	Sangat Kecil	485,46
226	Resbari	Sangat Kecil	0,25
227	Roai	Sangat Kecil	302,74
228	Rori 1	Sangat Kecil	278,43
229	Rosbori 1	Sangat Kecil	1.198,09
230	Rosbori 2	Sangat Kecil	1.163,68
231	Roswari 1	Sangat Kecil	497,30
232	Roswari 2	Sangat Kecil	511,16
233	Roswari 3	Sangat Kecil	360,96
234	Ruadung	Sangat Kecil	472,20
235	Sambrawai 1	Sangat Kecil	626,49
236	Sambrawai 2	Sangat Kecil	1.829,40
237	Sambrawai 3	Sangat Kecil	680,28
238	Saruman 1	Sangat Kecil	219,17
239	Saruman 2	Sangat Kecil	253,87
240	Sarwandori	Sangat Kecil	373,45
241	Sasawa 1	Sangat Kecil	550,17
242	Sasawa 2	Sangat Kecil	3.696,46
243	Sasawa 3	Sangat Kecil	225,92
244	Saubeba 1	Sangat Kecil	726,61
245	Saubeba 2	Sangat Kecil	1.806,37
246	Saubeba 3	Sangat Kecil	246,78
247	Saubeba 4	Sangat Kecil	1.694,78
248	Saubeba 5	Sangat Kecil	1.740,75
249	Saubeba 6	Sangat Kecil	663,85
250	Sausina	Sangat Kecil	714,52
251	Sawangrei 1	Sangat Kecil	490,15
252	Sawangrei 2	Sangat Kecil	145,12



No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
253	Sawangrei 3	Sangat Kecil	117,46
254	Sawangrei 4	Sangat Kecil	86,09
255	Sawangrei 5	Sangat Kecil	87,19
256	Sawangrei 6	Sangat Kecil	75,71
257	Sawenui	Sangat Kecil	275,15
258	Saweru 1	Sangat Kecil	562,27
259	Saweru 2	Sangat Kecil	3,93
260	Selat Yarori	Sangat Kecil	98,03
261	Seressi	Sangat Kecil	2.726,50
262	Serewen	Sangat Kecil	1.040,28
263	Sombor	Sangat Kecil	228,75
264	Soromasen 1	Sangat Kecil	1.849,77
265	Soromasen 2	Sangat Kecil	708,49
266	Suande 1	Sangat Kecil	2,62
267	Suande 2	Sangat Kecil	27,81
268	Suande 3	Sangat Kecil	1,14
269	Suande 4	Sangat Kecil	1,10
270	Sundial	Sangat Kecil	120,92
271	Tadori	Sangat Kecil	0,03
272	Tairi 1	Sangat Kecil	23,91
273	Tairi 2	Sangat Kecil	14,78
274	Tairi 3	Sangat Kecil	10,52
275	Tanjung Aborawi 1	Sangat Kecil	254,77
276	Tanjung Aborawi 2	Sangat Kecil	109,43
277	Tanjung Aborawi 3	Sangat Kecil	221,63
278	Tanjung Arrareni	Sangat Kecil	163,99
279	Tanjung Bendera 1	Sangat Kecil	75,70
280	Tanjung Bendera 2	Sangat Kecil	66,96
281	Tanjung Kamutu	Sangat Kecil	224,18
282	Tanjung Mamori	Sangat Kecil	308,40
283	Tanjung Mantopa	Sangat Kecil	139,80
284	Tanjung Musewani	Sangat Kecil	314,85
285	Tanjung Numani	Sangat Kecil	240,54
286	Tanjung Paipeai	Sangat Kecil	189,49
287	Tanjung Seresi	Sangat Kecil	159,89
288	Tanjung Tumamuri	Sangat Kecil	321,70
289	Tanjung Warsandai	Sangat Kecil	211,74
290	Tanjung Woda	Sangat Kecil	245,87
291	Tanjung Woka 1	Sangat Kecil	143,23
292	Tanjung Woka 2	Sangat Kecil	60,42
293	Tanjung Wonendei	Sangat Kecil	175,33
294	Tanjung Woraminggiri	Sangat Kecil	219,60
295	Tarei	Sangat Kecil	1.478,46
296	Tatui 1	Sangat Kecil	2.749,92
297	Tatui 2	Sangat Kecil	157,39
298	Tawini	Sangat Kecil	449,80
299	Tebu	Sangat Kecil	0,96
300	Telaga Embambon	Sangat Kecil	432,47
301	Telaga Tenih	Sangat Kecil	156,79
302	Teluk Ahawanuap	Sangat Kecil	190,25
303	Teluk Ampimoi	Sangat Kecil	387,10
304	Teluk Ausen	Sangat Kecil	274,20
305	Teluk Jendarna	Sangat Kecil	134,61
306	Teluk Kumpang	Sangat Kecil	560,54
307	Tindaret	Sangat Kecil	6.033,00
308	Tudu	Sangat Kecil	2,55
309	Tumpapa	Sangat Kecil	0,20
310	Turu	Sangat Kecil	133,24
311	Usauwer 1	Sangat Kecil	74,65
312	Usauwer 2	Sangat Kecil	55,83
313	Wadadi 1	Kecil	19.715,50
314	Wadadi 2	Sangat Kecil	0,63
315	Wade	Sangat Kecil	0,53
316	Waidorongrong	Sangat Kecil	907,17
317	Waindu	Sangat Kecil	287,60
318	Waisani	Sangat Kecil	584,81
319	Wamori 1	Sangat Kecil	156,97
320	Wamori 2	Sangat Kecil	29,25
321	Wamori 3	Sangat Kecil	1,41
322	Wamori 4	Sangat Kecil	0,72
323	Wamori 5	Sangat Kecil	6,52
324	Wamori 6	Sangat Kecil	12,20

No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
325	Wanaponoi	Sangat Kecil	0,15
326	Wandi	Sangat Kecil	0,89
327	Wandu	Sangat Kecil	398,35
328	Wapiwore	Sangat Kecil	0,40
329	Warari	Sangat Kecil	707,23
330	Warironi	Sangat Kecil	2.154,01
331	Warmuniapi	Sangat Kecil	224,06
332	Warobai	Sangat Kecil	500,43
333	Waronsus	Sangat Kecil	14,84
334	Warponggas	Sangat Kecil	441,25
335	Wauren	Sangat Kecil	179,67
336	Wawuti 1	Sangat Kecil	314,48
337	Wawuti 2	Sangat Kecil	807,58
338	Webi 1	Sangat Kecil	299,58
339	Webi 2	Sangat Kecil	1.083,58
340	Widiati	Sangat Kecil	697,62
341	Woda 1	Sangat Kecil	415,31
342	Woda 2	Sangat Kecil	384,83
343	Woinap 1	Sangat Kecil	1.988,62
344	Woinap 2	Sangat Kecil	234,65
345	Woinap 3	Sangat Kecil	188,39
346	Woka	Sangat Kecil	431,01
347	Wondaiwaring	Sangat Kecil	460,54
348	Wopi 1	Sangat Kecil	627,18
349	Wopi 2	Sangat Kecil	318,67
350	Worondaudeni	Sangat Kecil	0,09
351	Woryei	Sangat Kecil	0,06
352	Wossalai	Sangat Kecil	165,14
353	Wowoboi	Sangat Kecil	63,07
354	Yaimana	Sangat Kecil	211,88
355	Yaimaria	Sangat Kecil	918,26
356	Yapen	Sangat Kecil	271,88
357	Yenusi 1	Sangat Kecil	55,95
358	Yenusi 2	Sangat Kecil	47,22
359	Yeromi	Sangat Kecil	0,06
360	Yobi 1	Sangat Kecil	724,00
361	Yobi 2	Sangat Kecil	491,03
Kota Jayapura			
1	Abe Pantai 1	Sangat Kecil	221,05
2	Abe Pantai 2	Sangat Kecil	536,18
3	Acai	Sangat Kecil	4.034,53
4	Anafree	Sangat Kecil	1.675,10
5	Apo	Sangat Kecil	521,37
6	Bhayangkara	Sangat Kecil	346,53
7	Bogenvile	Sangat Kecil	509,66
8	Cycloop 1	Sangat Kecil	490,02
9	Cycloop 2	Sangat Kecil	271,20
10	Cycloop 3	Sangat Kecil	392,89
11	Cycloop 4	Sangat Kecil	452,25
12	Cycloop 5	Sangat Kecil	511,71
13	Dormena	Sangat Kecil	10,70
14	Emrekang	Sangat Kecil	4.353,60
15	Entrop	Sangat Kecil	1.309,53
16	Gunung Rawa	Sangat Kecil	407,68
17	Jar	Sangat Kecil	1.147,38
18	Kayu Pulo Dua	Sangat Kecil	3,04
19	Kepulauan Enggros 1	Sangat Kecil	0,66
20	Kepulauan Enggros 2	Sangat Kecil	0,53
21	Kepulauan Enggros 3	Sangat Kecil	1,95
22	Kepulauan Tujuh 1	Sangat Kecil	0,09
23	Kepulauan Tujuh 2	Sangat Kecil	0,01
24	Klausu	Sangat Kecil	496,66
25	Kohari	Sangat Kecil	4.382,27
26	Muara Tami	Sangat Kecil	384,11
27	Nafri	Sangat Kecil	538,42
28	Nyari	Sangat Kecil	247,77
29	Pabepa	Sangat Kecil	748,49
30	Pai 1	Sangat Kecil	440,96
31	Pm	Sangat Kecil	0,02
32	Pulau Tujuh 1	Sangat Kecil	0,24
33	Pulau Tujuh 2	Sangat Kecil	0,39
34	Pulau Tujuh 3	Sangat Kecil	0,01



No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
35	Pulau Tujuh 4	Sangat Kecil	0,01
36	Rawa	Sangat Kecil	140,79
37	Satu	Sangat Kecil	0,53
38	Sentani Tami	Sedang	54.253,00
39	Skow	Sangat Kecil	1.818,84
40	Skow/Pawa	Sangat Kecil	466,90
41	Tanjung Cewer	Sangat Kecil	620,56
42	Tanjung Ria	Sangat Kecil	565,98
43	Tanwato	Sangat Kecil	285,46
44	Tjoberi 1	Sangat Kecil	2,62
45	Tjoberi 2	Sangat Kecil	1,44
46	Tobati	Sangat Kecil	571,87
47	Trikora	Sangat Kecil	283,93
Kabupaten Mamberamo Raya			
1	Andaiwairan	Besar	637.903,00
2	Apauwer	Sedang	103.345,00
3	Biri 1	Sedang	45,90
4	Delta Mantambori	Sangat Kecil	18,27
5	Dombo	Sangat Kecil	677,95
6	Erakereo	Kecil	43.284,10
7	Kepulauan Manikenaki 1	Sangat Kecil	8,18
8	Kepulauan Manikenaki 2	Sangat Kecil	28,88
9	Kepulauan Manikenaki 3	Sangat Kecil	21,52
10	Kepulauan Manikenaki 4	Sangat Kecil	57,36
11	Kepulauan Manikenaki 5	Sangat Kecil	80,74
12	Kepulauan Manikenaki 6	Sangat Kecil	23,82
13	Mansubu	Kecil	70.068,70
14	Memberamo	Sangat Besar	1.833.580,00
15	Nadubuai	Kecil	40.286,80
16	Pm	Sangat Kecil	5,35
17	Puso	Sangat Kecil	53,03
18	Ruwai	Sangat Kecil	231,02
19	Tor 1	Sedang	7.837,74
20	Wankai	Kecil	72.507,80
Kabupaten Sarmi			
1	Ansamanuar	Sangat Kecil	11,17
2	Anus	Sangat Kecil	92,60
3	Apauwer	Sedang	188.942,00
4	Aruswar	Kecil	15.867,80
5	Babonjaya	Sangat Kecil	3.975,16
6	Berpa	Sangat Kecil	2.550,10
7	Bier	Kecil	50.397,70
8	Biri 1	Sedang	183.428,00
9	Danau Teun	Sangat Kecil	2.207,40
10	Ebram 1	Sangat Kecil	1.062,99
11	Ebram 2	Sangat Kecil	1.383,69
12	Ehram	Sangat Kecil	379,55
13	Erfok	Sangat Kecil	1.680,57
14	Erpo 1	Sangat Kecil	1.010,87
15	Erpo 2	Sangat Kecil	1.340,93
16	Janma 1	Sangat Kecil	109,24
17	Janma 2	Sangat Kecil	14,11
18	Kaitjebo	Sangat Kecil	2,79
19	Karfis	Sangat Kecil	7.921,82
20	Kumamba	Sangat Kecil	12,58
21	Kwanton	Kecil	18.680,10
22	Liki	Sangat Kecil	1.324,19
23	Mansubu	Kecil	441,18
24	Masi Masi	Sangat Kecil	75,69
25	Memberamo	Sangat Besar	382.186,00
26	Mengge	Sangat Kecil	9,85
27	Merway	Sangat Kecil	1.338,67
28	Muwar	Kecil	49.126,60
29	Nirumoar	Sangat Kecil	453,65
30	Orai	Kecil	27.647,40
31	Pianfon	Sangat Kecil	1.382,80
32	Podena	Sangat Kecil	63,08
33	Sermo	Sedang	12.875,40
34	Sir	Sangat Kecil	3.457,99
35	Takar Dua	Sangat Kecil	2.877,55
36	Tamar	Kecil	11.830,90
37	Timiner	Sangat Kecil	4.042,90

No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
38	Toarim	Kecil	7.002,55
39	Tor 1	Sedang	194.510,00
40	Tor 2	Kecil	11.108,10
41	Ukaner	Kecil	15.743,30
42	Vandumoar	Sangat Kecil	18,56
43	Wakde 1	Sangat Kecil	216,53
44	Wakde 2	Sangat Kecil	14,05
45	Wirmake	Kecil	71.172,50
46	Wiru	Sedang	90.910,50
47	Woske	Kecil	36.524,20
48	Yarsun	Sangat Kecil	55,76
Kabupaten Supiori			
1	Ababiadi	Sangat Kecil	2.361,93
2	Aiborabondi	Sangat Kecil	0,27
3	Angkeisera 2	Sangat Kecil	0,07
4	Anun Weri	Sangat Kecil	1.689,32
5	Arur 1	Sangat Kecil	3,28
6	Arur 2	Sangat Kecil	8,96
7	Arur 3	Sangat Kecil	1,40
8	Arur 4	Sangat Kecil	0,66
9	Arur 5	Sangat Kecil	0,43
10	Aruri 1	Sangat Kecil	1.349,99
11	Aruri 2	Sangat Kecil	344,28
12	Aruri 3	Sangat Kecil	972,97
13	Aruri 4	Sangat Kecil	301,69
14	Aruri 5	Sangat Kecil	537,35
15	Arwai	Sangat Kecil	2.985,53
16	Awai 1	Sangat Kecil	1,72
17	Awai 2	Sangat Kecil	1,31
18	Awai 3	Sangat Kecil	0,51
19	Awai 4	Sangat Kecil	3,30
20	Awaki	Sangat Kecil	343,37
21	Ayawi	Sangat Kecil	6,52
22	Biniki	Sangat Kecil	2.243,42
23	Bondifur	Sangat Kecil	0,67
24	Bonsup	Sangat Kecil	2.820,19
25	Bosensbari	Sangat Kecil	2.178,51
26	Bosfori	Sangat Kecil	1,32
27	Bum Bebe	Sangat Kecil	0,60
28	Didiabolo	Sangat Kecil	1.292,10
29	Doubo 1	Sangat Kecil	62,08
30	Doubo 2	Sangat Kecil	85,41
31	Faknik Dori 1	Sangat Kecil	300,03
32	Faknik Dori 2	Sangat Kecil	1.330,17
33	Fanindi	Sangat Kecil	501,32
34	Imbieri 1	Sangat Kecil	707,16
35	Imbieri 2	Sangat Kecil	343,39
36	Imbieri 3	Sangat Kecil	197,70
37	Inmasyari 1	Sangat Kecil	2.384,08
38	Inmasyari 2	Sangat Kecil	335,07
39	Inmasyari 3	Sangat Kecil	148,34
40	Inmasyari 4	Sangat Kecil	142,65
41	Inmasyari 5	Sangat Kecil	1.458,15
42	Inmasyari 6	Sangat Kecil	826,75
43	Inmasyari 7	Sangat Kecil	0,31
44	Inmasyari 8	Sangat Kecil	0,34
45	Insumrabi	Sangat Kecil	17,02
46	Janim 1	Sangat Kecil	1.481,60
47	Janim 2	Sangat Kecil	408,16
48	Janim 3	Sangat Kecil	399,10
49	Kedi	Sangat Kecil	3,50
50	Kor Marsrip	Sangat Kecil	6,59
51	Kor Sawempdi	Sangat Kecil	7,91
52	Korido	Sangat Kecil	459,04
53	Kri	Sangat Kecil	1,42
54	Mangonswan	Sangat Kecil	940,33
55	Maondi	Sangat Kecil	0,61
56	Mariaidori	Sangat Kecil	812,17
57	Masyai	Sangat Kecil	219,49
58	Masyram	Sangat Kecil	418,27
59	Maudori 1	Sangat Kecil	406,62
60	Maudori 2	Sangat Kecil	226,09



No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
61	Meos Inumberi Kasun	Sangat Kecil	0,31
62	Meos Aruri	Sangat Kecil	0,87
63	Meos Arwai Kecil	Sangat Kecil	0,21
64	Meos Bapam Pam Fandu	Sangat Kecil	0,23
65	Meos Befrefi	Sangat Kecil	0,25
66	Meos Bemgir	Sangat Kecil	0,28
67	Meos Bendi	Sangat Kecil	1,70
68	Meos Biri	Sangat Kecil	1,28
69	Meos Bobyar	Sangat Kecil	0,38
70	Meos Burua	Sangat Kecil	0,48
71	Meos Fandas	Sangat Kecil	0,74
72	Meos Fandus	Sangat Kecil	0,82
73	Meos Homamb	Sangat Kecil	1,52
74	Meos Ineki	Sangat Kecil	1.252,19
75	Meos Kunori	Sangat Kecil	0,16
76	Meos Mandun 1	Sangat Kecil	0,63
77	Meos Mandun 2	Sangat Kecil	0,33
78	Meos Mangkubuy	Sangat Kecil	0,74
79	Meos Mawoni	Sangat Kecil	0,35
80	Meos Mrap Kasun	Sangat Kecil	0,21
81	Meos Obsiburi	Sangat Kecil	0,43
82	Meos Sanwori Bebe	Sangat Kecil	0,76
83	Meos Sariasi	Sangat Kecil	0,77
84	Meos Wandarwa Kasum	Sangat Kecil	0,79
85	Migasai 1	Sangat Kecil	218,16
86	Migasai 2	Sangat Kecil	236,89
87	Migasai 3	Sangat Kecil	189,25
88	Mios Faknik	Sangat Kecil	0,74
89	Mipos Bosen	Sangat Kecil	1,54
90	Mirap Beda	Sangat Kecil	0,44
91	Mnudu	Sangat Kecil	1,76
92	Munsak Bonde	Sangat Kecil	0,60
93	Munsaki 1	Sangat Kecil	1,77
94	Munsaki 2	Sangat Kecil	0,42
95	Myos Faknik 1	Sangat Kecil	2,14
96	Myos Faknik 2	Sangat Kecil	0,85
97	Myos Imbresieri	Sangat Kecil	0,84
98	Myos Kapapu	Sangat Kecil	0,71
99	Myos Kunef	Sangat Kecil	1,53
100	Napido 1	Sangat Kecil	213,83
101	Napido 2	Sangat Kecil	316,61
102	Napisdi 1	Sangat Kecil	0,43
103	Napisdi 2	Sangat Kecil	0,08
104	Napisdi 3	Sangat Kecil	0,25
105	Npiesndi 1	Sangat Kecil	3.420,56
106	Npiesndi 2	Sangat Kecil	299,83
107	Npiesndi 3	Sangat Kecil	319,91
108	Nukori 1	Sangat Kecil	9,40
109	Nukori 4	Sangat Kecil	0,70
110	Nyambarai	Sangat Kecil	41,47
111	Odori	Sangat Kecil	497,40
112	Orimbori	Sangat Kecil	1.602,25
113	Palau Nn 3	Sangat Kecil	0,15
114	Palau Nn 4	Sangat Kecil	0,18
115	Pamdi 1	Sangat Kecil	340,53
116	Pamdi 2	Sangat Kecil	886,61
117	Pandi	Sangat Kecil	71,44
118	Paryen	Sangat Kecil	214,77
119	Paryeri 1	Sangat Kecil	12,37
120	Paryeri 2	Sangat Kecil	0,46
121	Pm	Sangat Kecil	27,98
122	Prap	Sangat Kecil	23,61
123	Puri	Sangat Kecil	108,16
124	Rani	Sangat Kecil	371,12
125	Rayori 1	Sangat Kecil	5,06
126	Rayori 2	Sangat Kecil	2,69
127	Rayori 3	Sangat Kecil	1,00
128	Rayori 4	Sangat Kecil	1,63
129	Rusweri	Sangat Kecil	859,22
130	Sabai 2	Sangat Kecil	0,44
131	Sabarmikre	Sangat Kecil	370,00
132	Saempdi	Sangat Kecil	2,03

No	Nama DAS	Kategori	Luas (ha)
133	Sawempdi	Sangat Kecil	7,66
134	Sawendi 1	Sangat Kecil	0,53
135	Sawendi 2	Sangat Kecil	0,84
136	Sawor	Sangat Kecil	0,28
137	Semni 1	Sangat Kecil	1,45
138	Semni 2	Sangat Kecil	1,02
139	Sorendi 1	Sangat Kecil	555,01
140	Sorendi 2	Sangat Kecil	3,35
141	Sorendiwari 1	Sangat Kecil	482,66
142	Sorendiwari 2	Sangat Kecil	216,39
143	Supiori	Sangat Kecil	0,28
144	Supiori Timur	Sangat Kecil	589,84
145	Sur	Sangat Kecil	3.579,66
146	Syurdori	Sangat Kecil	648,14
147	Urkdori	Sangat Kecil	213,33
148	Wabudori 1	Sangat Kecil	5.735,23
149	Wabudori 2	Sangat Kecil	306,01
150	Wafor 2	Sangat Kecil	5.724,54
151	Wakre 1	Sangat Kecil	883,51
152	Wakre 2	Sangat Kecil	251,81
153	Wandos	Sangat Kecil	813,48
154	Wundi	Sangat Kecil	20,77
155	Yendoker	Sangat Kecil	212,69
Kabupaten Waropen			
1	Awaso	Sangat Kecil	2.339,93
2	Binatabo 1	Sedang	2.517,65
3	Binatabo 2	Kecil	37.244,40
4	Boi 1	Kecil	14.916,50
5	Dawoiro	Sangat Kecil	2.409,91
6	Demba	Kecil	26.367,10
7	Desawa	Sangat Kecil	2.621,51
8	Memberamo	Sangat Besar	281.422,00
9	Nadubuai	Kecil	41.053,00
10	Nau	Sangat Kecil	278,95
11	Oipasano	Sangat Kecil	4.842,39
12	Pm	Sangat Kecil	131,18
13	Puso	Sangat Kecil	7.518,94
14	Risai	Kecil	25.416,80
15	Rombak	Sedang	121.317,00
16	Sanggei	Sangat Kecil	1.963,75
17	Sanoringga	Kecil	46.293,00
18	Sepaseri	Kecil	19.238,70
19	Sewanayomi	Sangat Kecil	9.672,02
20	Sobia	Kecil	22.964,60
21	Soimiangga	Sangat Kecil	711,80
22	Urwo	Kecil	21.339,10
23	Wapoga	Besar	386.409,00
24	Wonti	Sangat Kecil	4.031,58

Sumber: Daerah Aliran Sungai Provinsi Papua – BPKH Tahun 2022

2.1.2 Kondisi Fisik Wilayah Kajian

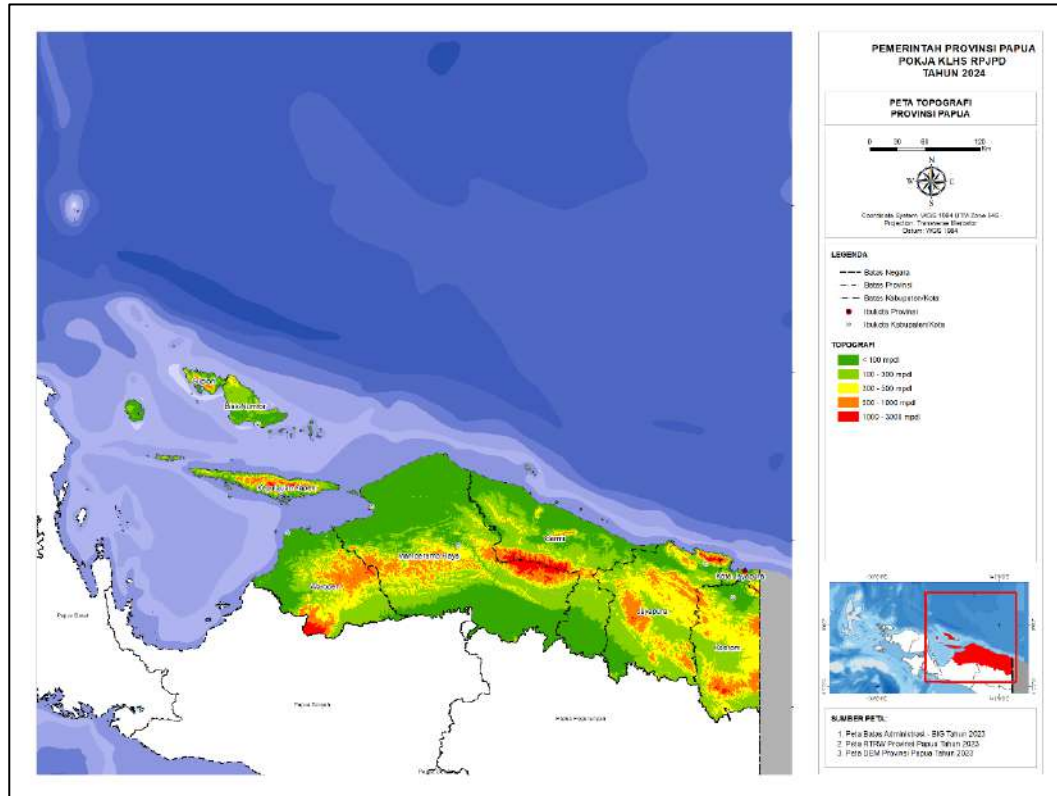
2.1.2.1 Topografi

Keadaan topografi Provinsi Papua sangat bervariasi, baik dari ketinggian/elevasi maupun dari kemiringannya. Elevasinya berkisar antara 0 m hingga lebih dari 3.000 m di atas permukaan laut. Terdapat wilayah berupa daerah pantai yang merupakan dataran rendah; rawa; dataran tinggi; perbukitan terjal; hingga daerah pegunungan. Topografi dataran umumnya terletak di utara, yang merupakan daerah pesisir/pantai; dan selatan yang dipisahkan oleh Pegunungan Foja dan Rouffaer. Dataran utara merupakan dataran rendah yang terletak antara garis pantai dan pegunungan tersebut yang membentang di bagian tengah dengan pola memanjang timur barat, sementara dataran selatan terletak di suatu



cekungan antar pegunungan, yaitu antara Pegunungan Foya dan Pegunungan Nassau hingga Pegunungan Jayawijaya.

Gambar II.5 Peta Topografi Provinsi Papua



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Luas jenis Topografi yang mendominasi dataran Provinsi Papua adalah Topografi dengan elevasi < 100 mpdl seluas kurang lebih 2,998,469.16 hektar atau sekitar 35,26 persen dan Topografi dengan elevasi 100 – 300 mpdl seluas kurang lebih 2,660,001.35 hektar atau sekitar 32,17 persen. Gambar dan tabel berikut ini menunjukkan sebaran luas topografi berdasarkan elevasinya per kabupaten di Provinsi Papua.

Tabel II.1 Sebaran luas Topografi per Kabupaten di Provinsi Papua

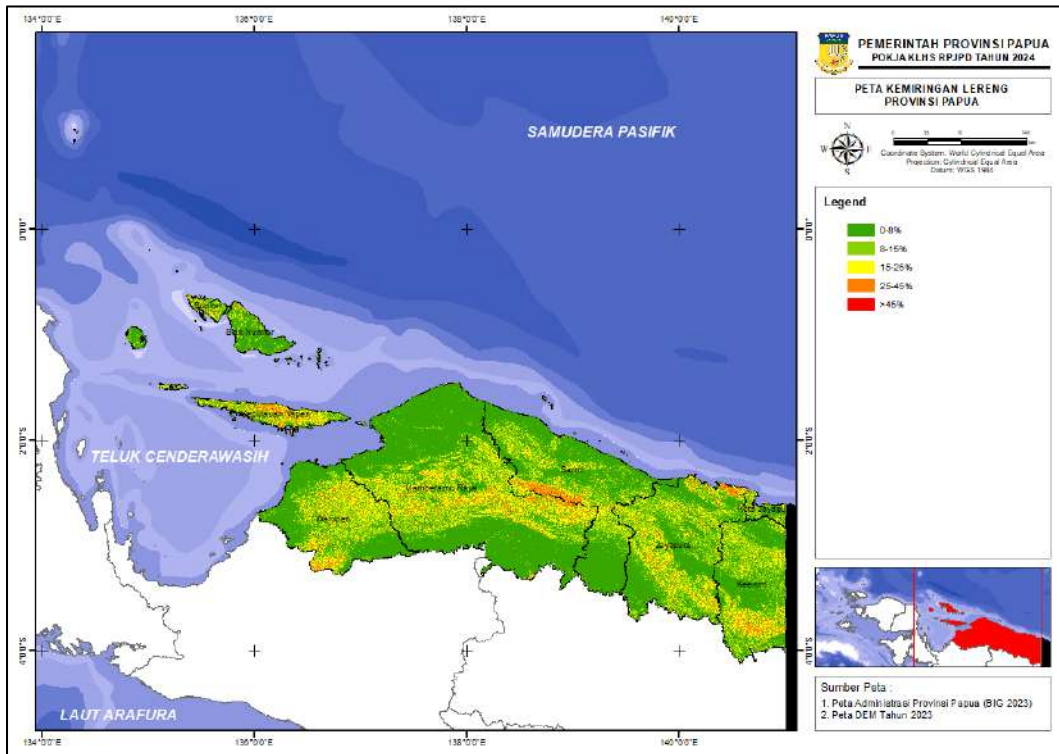
Kabupaten/Kota	< 100	100 - 300	300 - 500	500 - 1000	1000 - 3000	Luas (ha)
Biak Numfor	116,178.44	101,547.50	7,529.55	746.21		226,001.70
Jayapura	197,544.35	554,864.24	447,879.53	199,469.07	8,504.45	1,408,261.64
Keerom	77,670.67	351,732.72	386,250.59	131,567.61	5,409.94	952,631.54
Kepulauan Yapen	67,565.37	78,109.73	40,292.95	50,329.06	6,545.09	242,842.21
Kota Jayapura	36,121.75	27,759.40	11,053.92	7,851.22	782.70	83,568.99
Mamberamo Raya	1,498,365.81	642,954.22	384,030.04	228,000.58	50,996.49	2,804,347.13
Sarmi	670,251.22	532,963.31	94,129.49	73,612.44	35,945.54	1,406,901.99
Supiori	24,383.21	24,896.32	7,949.34	8,840.46		66,069.33
Waropen	310,388.35	345,173.90	219,051.72	175,081.80	28,517.13	1,078,212.89
Luas Total (ha)	2,998,469.16	2,660,001.35	1,598,167.14	875,498.46	136,701.32	8,268,837.42
Luas Total (%)	36.26	32.17	19.33	10.59	1.65	100.00

Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

2.1.2.2 Kelerengan

Wilayah Provinsi Papua memiliki klasifikasi kemiringan lereng yaitu 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% dan >45%. Kelerengan wilayah di Provinsi Papua dengan kemiringan lereng 0-8% seluas 3,849,082.03 hektar, kemiringan lereng 8-15% seluas 1,034,503.65 hektar, kemiringan lereng 15-25% seluas 1,531,173.89 hektar, kemiringan lereng 25-45% seluas 1,013,710.94 hektar dan kemiringan lereng >45% seluas 134,759.41 hektar.

Gambar II.6 Peta Topografi Provinsi Papua



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Kabupaten dengan kemiringan lereng 0-8% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1,517,691.61 hektar, kemiringan lereng 8-15% terluas berada di Kabupaten Jayapura seluas 295,881.08 hektar, kemiringan lereng 15-25% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 484,150.73 hektar, kemiringan lereng 25-45% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 310,648.06 hektar dan kemiringan lereng >45% terluas berada di Kabupaten Sarmi seluas 57,217.56 hektar.

Tabel II.7 Sebaran luas Topografi per Kabupaten di Provinsi Papua

Kemiringan Lereng	Kabupaten	Area (Ha)
Datar (0-8%)	Kabupaten Mamberamo Raya	1.517.691,61
	Kabupaten Sarmi	790.719,55
	Kabupaten Jayapura	575.385,47
	Kabupaten Keerom	423.272,53
	Kabupaten Waropen	258.693,64



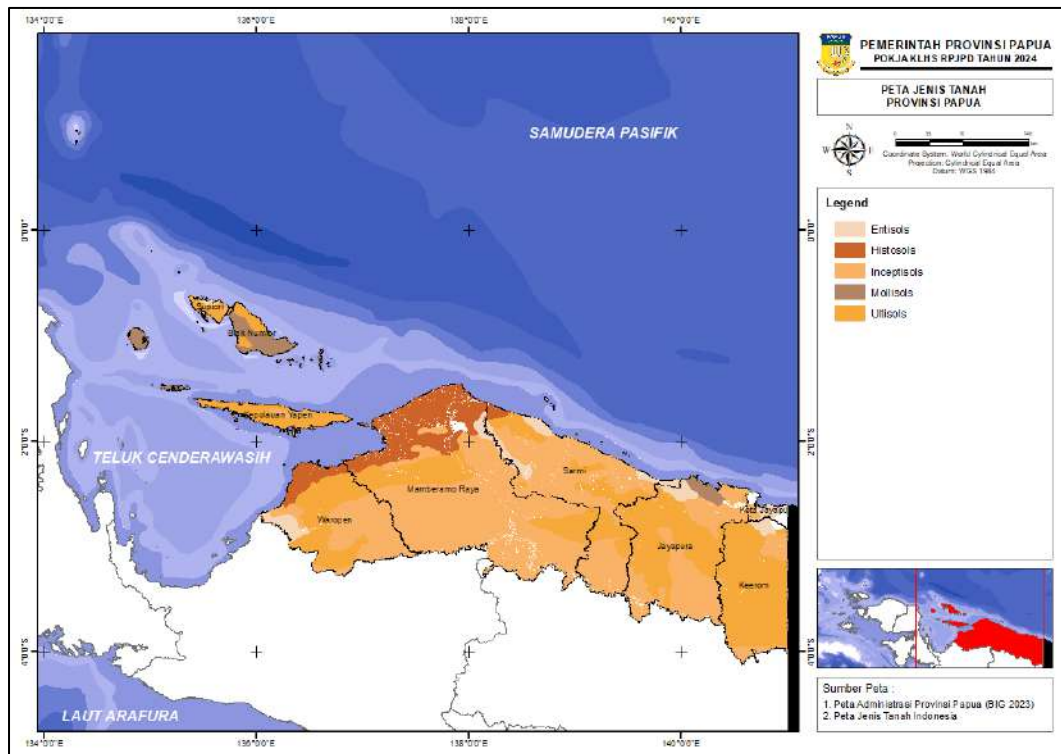
Kemiringan Lereng	Kabupaten	Area (Ha)
	Kabupaten Biak Numfor	186.343,61
	Kota Jayapura	39.056,23
	Kabupaten Kepulauan Yapen	36.910,74
	Kabupaten Supiori	21.008,65
Total Luas 0-8%		3,849,082.03
Landai (8-15%)	Kabupaten Jayapura	295.881,08
	Kabupaten Mamberamo Raya	238.162,30
	Kabupaten Sarmi	191.828,18
	Kabupaten Keerom	178.852,63
	Kabupaten Waropen	57.370,93
	Kabupaten Kepulauan Yapen	26.625,90
	Kabupaten Biak Numfor	18.831,22
	Kota Jayapura	13.741,82
	Kabupaten Supiori	13.209,59
Luas Total 8-15%		1,034,503.65
Agak Curam (15-25%)	Kabupaten Mamberamo Raya	484.150,73
	Kabupaten Jayapura	360.181,45
	Kabupaten Sarmi	215.357,06
	Kabupaten Keerom	194.529,88
	Kabupaten Waropen	166.735,02
	Kabupaten Kepulauan Yapen	60.503,87
	Kabupaten Supiori	19.902,39
	Kota Jayapura	17.129,85
	Kabupaten Biak Numfor	12.683,64
Luas Total 15-25%		1,531,173.89
Curam (25-45%)	Kabupaten Mamberamo Raya	310.648,06
	Kabupaten Jayapura	188.532,54
	Kabupaten Sarmi	155.670,20
	Kabupaten Keerom	129.997,55
	Kabupaten Waropen	101.890,17
	Kabupaten Kepulauan Yapen	96.899,04
	Kota Jayapura	12.037,50
	Kabupaten Supiori	11.410,49
	Kabupaten Biak Numfor	6.625,39
Luas Total 25-45%		1,013,710.94
Sangat Curam (>45%)	Kabupaten Sarmi	57.217,56
	Kabupaten Jayapura	23.331,11
	Kabupaten Kepulauan Yapen	20.041,33
	Kabupaten Keerom	15.264,83
	Kabupaten Mamberamo Ray	13.195,94
	Kabupaten Waropen	2.097,18
	Kabupaten Supiori	1.575,01
	Kota Jayapura	1.067,61
	Kabupaten Biak Numfor	968,84
>45% Total		134,759.41
Grand Total		8.268.837,32

Sumber: Hasil olahan POKJA KLHS RPJPD Provinsi Papua Tahun 2023

2.1.2.3 Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Provinsi Papua terdiri dari 5 jenis tanah dengan persebaran setiap jenis tanah dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.7 Persebaran Jenis Tanah di Provinsi Papua



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

2.1.2.4 Geologi

Kondisi Geologi suatu wilayah adalah kondisi struktur batuan pada permukaan bumi di wilayah tersebut. Kondisi Struktur Batuan di Provinsi Papua didominasi oleh Jenis batuan Aluvium seluas kurang lebih 2,409,806.00 hektar atau sekitar 29,15 persen dan formasi Unk seluas 1,707,766.17 hektar atau sekitar 20,65 persen.

1) Inceptisols/Gleysols

Jenis tanah inceptisol merupakan jenis tanah dengan luasan terbesar seluas kurang lebih 3,838,653.56 hektar Tanah ini memiliki bahan organik rendah dengan tingkat kesuburan yang rendah pula. Inceptisols berkembang dari bahan induk batuan beku, sedimen, dan metamorf. Tanah ini merupakan tanah muda dengan tahap perkembangan lebih lanjut namun belum matang. Tanah ini memiliki pH tanah yang tergolong masam sampai netral dengan kadar hara yang rendah, sehingga untuk meningkatkan produktivitasnya diperlukan penambahan unsur hara.



2) Ultisols / Acrisols

Jenis tanah ultisol memiliki luas kurang lebih 2,947,954.32 hektar. Ultisol merupakan tanah dengan aktivitas lempung rendah sehingga membatasi produktivitas. Tanah ini memiliki ciri kemerahan, kaya liat, dan asam yang mendukung vegetasi hutan campuran sebelum dibudidayakan. Tanah ini secara alami cocok dan berada pada kawasan hutan dan dapat dibuat produktif untuk pertanian dengan cara penambahan kapur dan pupuk. Pada bagian atas tanah ini kaya humus dengan lapisan lempung dengan kandungan nutrisi rendah.

3) Histosols/Organosols

Jenis tanah Histosols memiliki luas kurang lebih 754,665.92 hektar. Histosol terbentuk pada kondisi tergenang air rawa, gambut, tegalan, dan rawa. Tanah ini memiliki kandungan organik tinggi karena terdapat akumulasi jaringan tanaman dan hewan yang mati dan produk dekomposisinya mengendap. Pada tanah ini rentan terhadap kebakaran dan penurunan permukaan tanah setelah dilakukan drainase karena bahan organik rentan terhadap oksidasi. Pada area di daerah ini digunakan sebagai pengendalian banjir, pemurnian air, dan pelestarian satwa liar. Tanah ini memiliki ciri 12-18% karbon organik berdasarkan massa jika tergenang air atau 20% karbon organik apabila tidak tergenang air. Secara umum, lapisan tanah ini berserat, hemik, atau saprik, dan merupakan tanah organik dengan kesuburan tinggi ketika dikeringkan.

4) Entisols/Aluvial/Fluvisols

Jenis tanah Entisols seluas kurang lebih 338,617.98 hektar. Entisol terbentuk dari bahan induk yang sulit lapuk (pasir kuarsa/batuan keras yang sulit larut seperti batu gamping) atau terdapat pada kemiringan yang tinggi sehingga kecepatan erosinya melebihi pembentukan horizon pedogenik. Tanah ini baru mulai terbentuk dan tidak mengalami perkembangan. Ciri tanah ini adalah pelapukan baru dimulai sehingga bahan mineral belum membentuk horizon pedogenik. Tanah ini memiliki tekstur kasar dengan kadar bahan organik dan nitrogen yang lebih rendah. Tanah ini cocok untuk lahan pertanian baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Penggunaan tanah secara berturut-turut dapat membuat kualitas menurun karena ketersediaan unsur hara dan bahan organik tanah yang menurun.

5) Mollisols

Jenis tanah mollisols memiliki luas kurang lebih 233,278.18 hektar. Mollisols adalah jenis tanah yang memiliki kedalaman antara 60 sampai 80 cm, bahan organik tinggi, tanah permukaan yang kaya nutrisi (horizon). Mollisol dicirikan dengan horizon permukaan yang tebal dan gelap. Mollisol yang mempunyai kejenuhan basa dan karbon organik yang tinggi serta berstruktur granular atau remah. Horizon bawahnya antara lain kambik, argillik, albik, natrik, gipsik ataupun duripan tetapi tidak mungkin memiliki horizon oksik ataupun spodik permukaan yang subur ini, yang disebut epipedon molik, adalah ciri diagnostik yang menentukan dari mollisol. Epipedon molik dibuat dengan penambahan jangka panjang bahan organik yang berasal dari akar tanaman dan biasanya memiliki struktur tanah granular yang lembut.

6) Alluvium

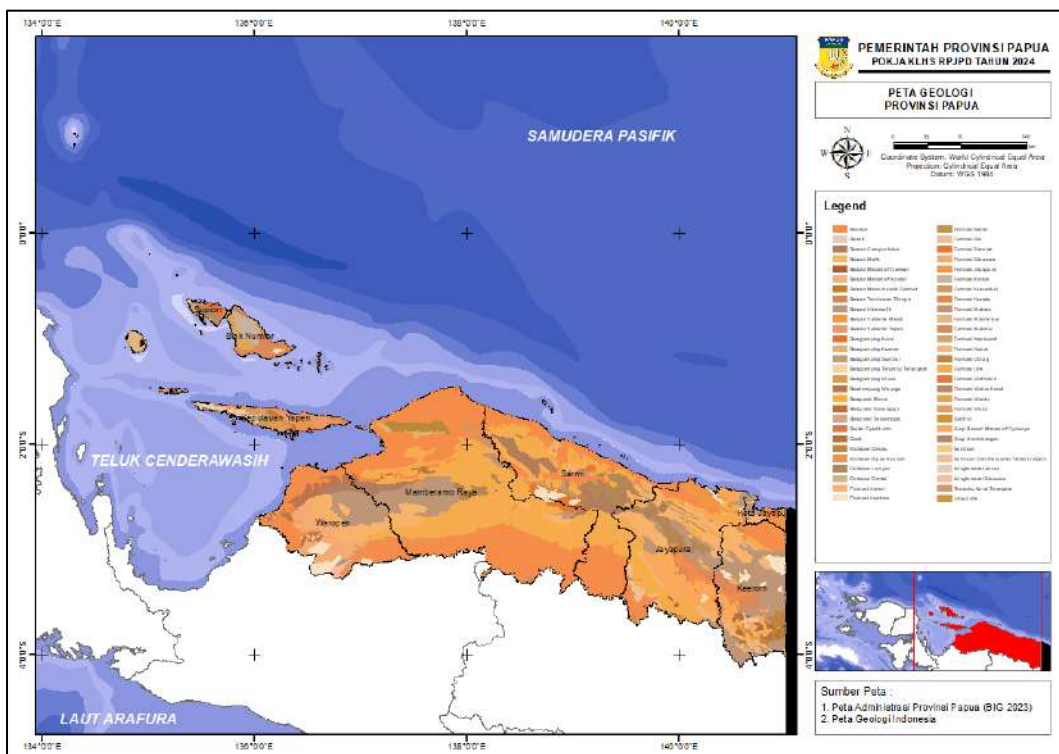
Alluvium (dari bahasa Latin alluvius, dari alluere, "untuk membasuh") adalah tanah liat lepas, lanau, pasir, atau kerikil yang telah diendapkan oleh air yang mengalir di dasar sungai, di dataran banjir, di kipas aluvial atau pantai, atau dalam pengaturan serupa. Aluvium juga kadang-kadang disebut endapan aluvial. Alluvium pada umumnya mempunyai umur skala geologis muda dan tidak terkonsolidasi menjadi batuan padat. Sedimen yang diendapkan di bawah air, di laut, muara, danau, atau kolam, tidak disebut sebagai alluvium. Ciri-ciri jenis tanah Aluvial sendiri memiliki warna kelabu dengan tekstur yang sedikit terlepas dan peka akan erosi. Kadar kesuburannya sedang mencapai tinggi bergantung pada bagian induk dan iklim. Di Indonesia sendiri tanah aluvial ini merupakan tanah yang baik serta telah dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan juga palawija) musiman hingga tahunan.

7) Formasi Unik

Formasi Unk. Susunan batuan Formasi Unk terdiri dari batupasir greywacke, batulanau, batulempung dan sisipan lignit. Formasi ini diperkirakan berumur Pliosen Akhir sampai Plistosen (Banner & Blow), (Takayanagi & Saito), dan (Kadar, 1978). Lingkungan pengendapan satuan batuan Formasi Unk Kelompok Mamberamo adalah laut dangkal sampai laut dalam.

Adapun persebaran jenis batuan di provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar II.8 Persebaran Jenis Batuan di Provinsi Papua



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042



2.1.2.5 Hidrologi

Sumber daya air atau hidrologi terdiri dari dua (2) klasifikasi yaitu air permukaan dan air bawah permukaan tanah (air tanah). Potensi ketersediaan air permukaan dapat dilihat dari Wilayah Sungai (WS). Dalam satu wilayah sungai terdapat kesatuan wilayah pengelolaan Sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara itu, wilayah sungai yang luas tersebut dibagi lagi menjadi *water district* (WD). Potensi ketersediaan air pada WS dan WD di Provinsi Papua dapat dilihat tabel berikut ini.

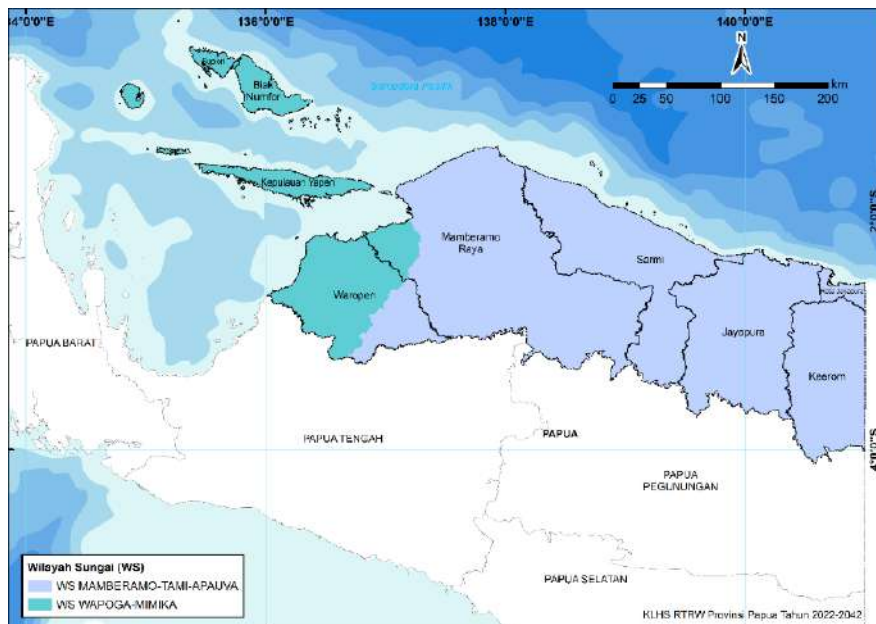
Tabel II.8 Wilayah Sungai dan Water District di Provinsi Papua

Wilayah Sungai (WS)	Water District (WD)	Provinsi	Luas (km ²)	Potensi Ketersediaan (juta m ³ /tahun)	Status
WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVA	WD Apauvar	Papua	8.654,85	368,67	Lintas Negara
	WD Mamberamo	Papua	88.225,75	4.404,55	Lintas Negara
	WD Tami	Papua	12.008,73	388,21	Lintas Negara
WS WAPOGA-MIMIKA	WD Kepulauan Yapen	Papua	2.404,96	95,38	Lintas Kab/Kota
	WD Biak Numfor	Papua	2.293,50	73,37	Lintas Kab/Kota
	WD Supiori	Papua	624,88	19,20	Lintas Kab/Kota
	WD Wapoga	Papua	23.716,23	1.500,36	Lintas Kab/Kota
Total			137.928,90	6.849,74	

Sumber: KLHS RTRW Provinsi Papua Tahun 2023

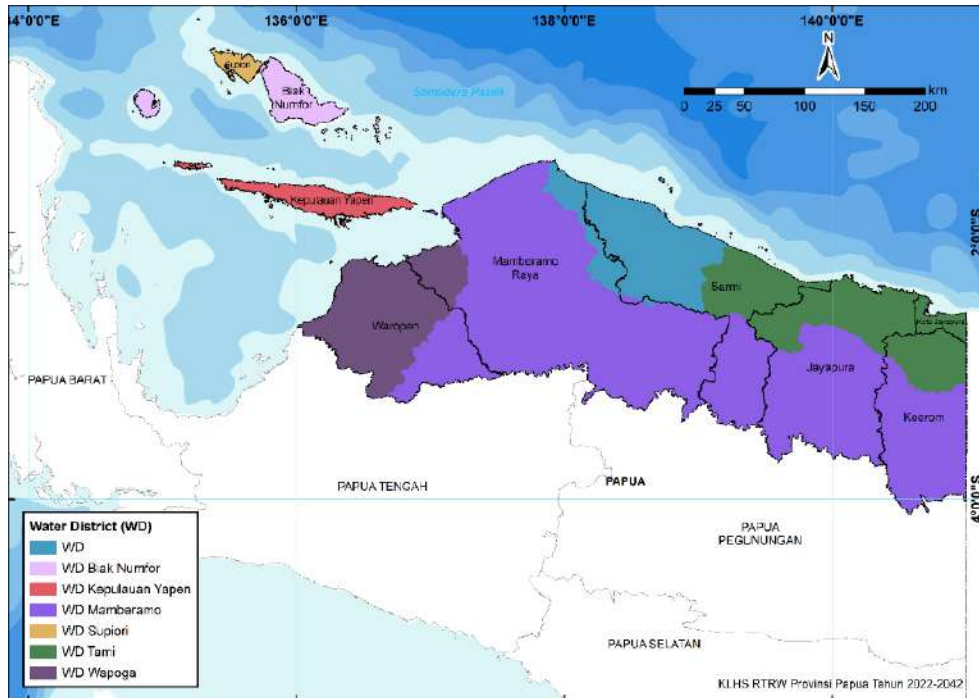
Persebaran wilayah sungai, *water district*, sungai dan danau, serta akuifer di Provinsi Papua secara berturut-turut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar II.9 Sebaran Wilayah Sungai di Provinsi Papua



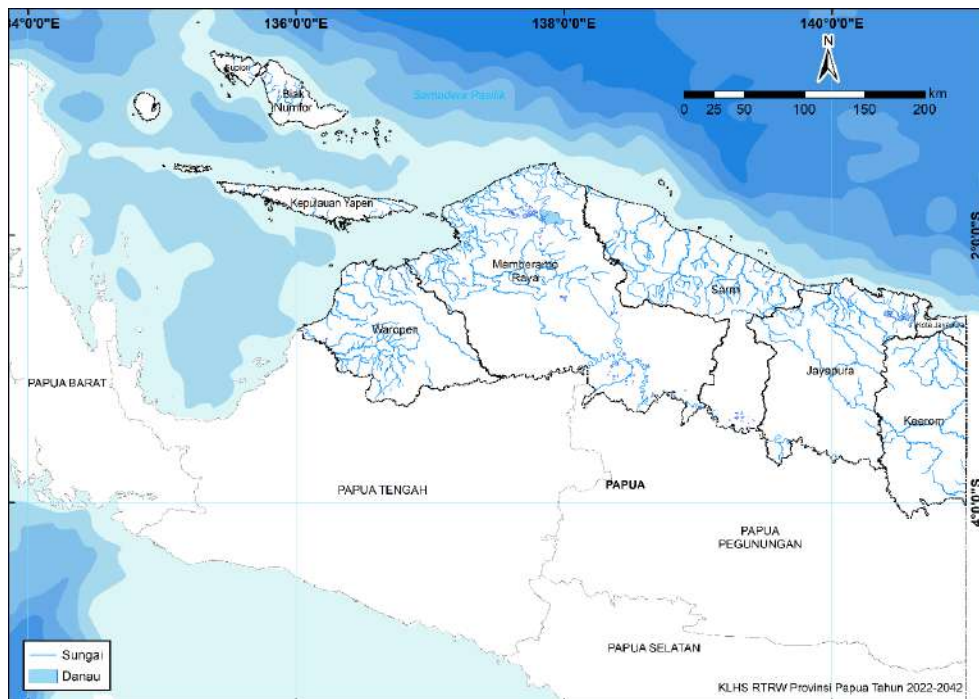
Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Gambar II.10 Sebaran Water District di Provinsi Papua



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Gambar II.11 Sebaran Sungai dan Danau di Provinsi Papua



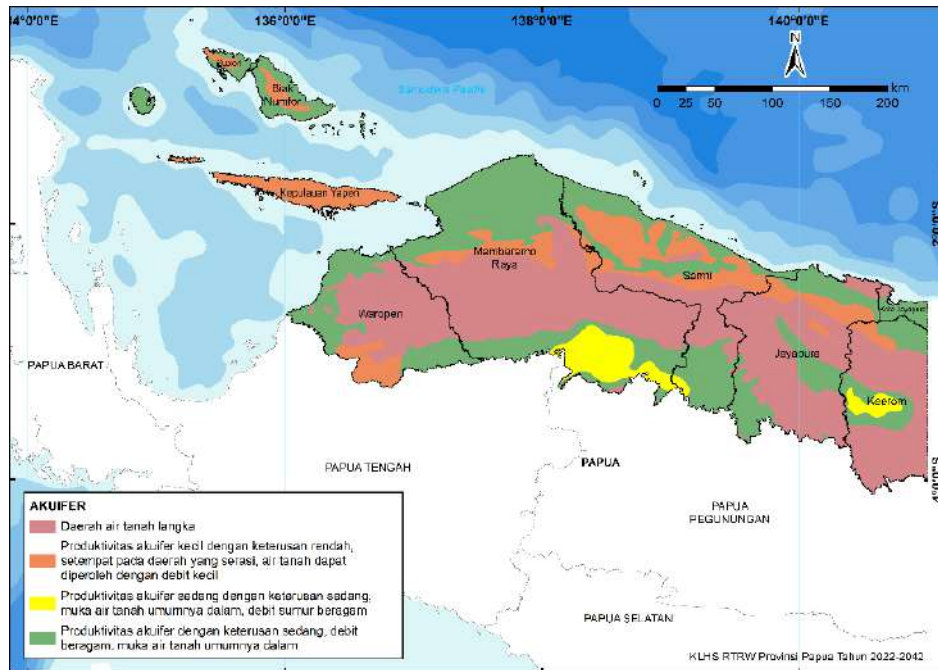
Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Sementara itu, pada bagian bawah permukaan tanah (air tanah) atau cekungan air tanah (CAT) dengan akuifer yang dapat menampung dan meloloskan air. Pada Provinsi Papua terdapat empat (4) jenis akuifer meliputi: daerah air tanah langka, produktivitas akuifer kecil



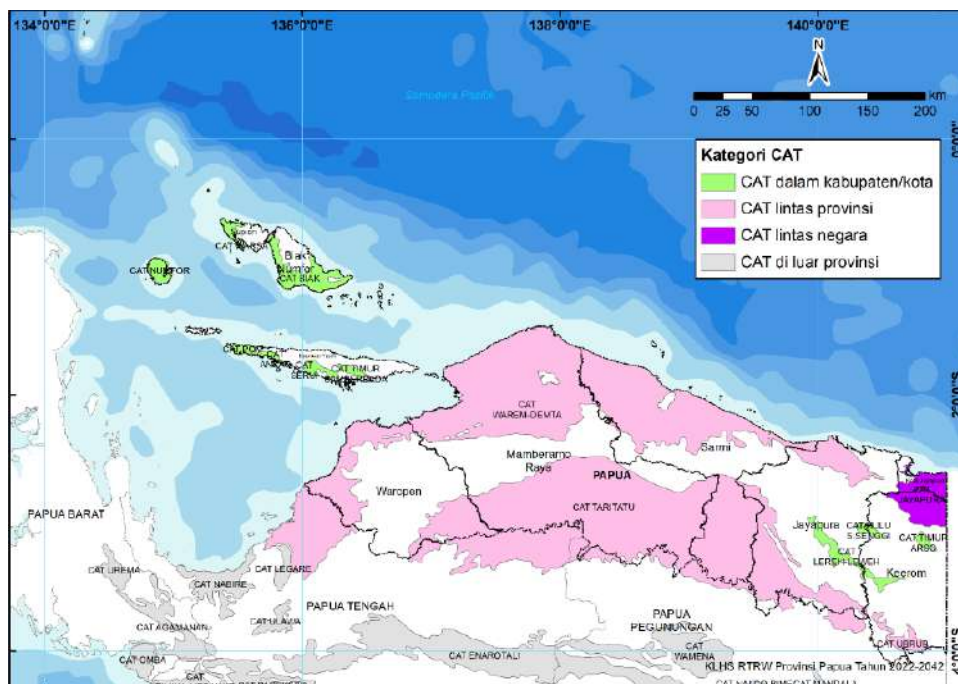
dengan keterusan rendah dengan air tanah dapat diperoleh dengan debit kecil, produktivitas akuifer sedang dengan muka air tanah umumnya dalam, dan produktivitas akuifer dengan keterusan sedang dengan muka air tanah umumnya dalam sebagaimana pada gambar II.12.

Gambar II.12 Sebaran akuifer di Provinsi Papua



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Gambar II.13 Peta CAT di Provinsi Papua (sebelum pemekaran)



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 14 Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Papua. Tiga diantaranya merupakan CAT lintas provinsi (Warem-Demta, Taritatu, dan Ubrub) satu lainnya merupakan CAT lintas negara (Jayapura), dan sisanya merupakan CAT dalam provinsi. Total luasan 14 CAT tersebut adalah sekitar 60.399 km². Gambar dan Tabel berikut ini merupakan daftar nama, luas, dan sebaran lokasi CAT di Provinsi Papua.

Tabel II.9 Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua

No	Nama CAT	Luas CAT (km ²)	Lokasi
1	Numfor	431	Kab. Biak Numfor
2	Warsa	208	Kab. Biak Numfor
3	Biak	1.214	Kab. Biak Numfor
4	Pom	155	Kab. Yapen Waropen
5	Ansas	110	Kab. Yapen Waropen
6	Serui	293	Kab. Yapen Waropen
7	Timur Samberbada	140	Kab. Kepulauan Yapen
8	Warem-Demta	22.630	Kab. Nabire, Kab. Waropen, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura
9	Taritatu	25.380	Kab. Waropen, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Paniai, Kab. Keerom, Kab. Pegunungan Bintang
10	Hulu S.Senggi	180	Kab. Keroom
11	Jayapura	1.685	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Papua Nugini
12	Timur Arso	165	Kab. Keerom
13	Lereh-Leweh	7.235	Kab. Keerom, Kab. Jayapura
14	Ubrub	573	Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Keerom

Sumber: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia

2.1.2.6 Klimatologi

Pengukuran iklim di Provinsi Papua, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua mengamati di 9 kabupaten/kota. Pada tahun 2019, secara rata-rata suhu di seluruh stasiun pengamatan berkisar antara 27.7° - 34.8° C.

Tabel II.10 Curah Hujan Rata-Rata Provinsi Papua

Curah Hujan Rata-Rata (mm/hari)		Kabupaten	Area (ha)
	Klasifikasi		
13.6 - 20.7	rendah	Kabupaten Mamberamo Raya	2,061,000.76
		Kabupaten Jayapura	231,827.70
		Kabupaten Waropen	207,620.64
		Kabupaten Biak Numfor	142,571.76
		Kabupaten Sarmi	80,590.06
		Kabupaten Kepulauan Yapen	68,595.16
Total			2,792,206.08
20.7 - 27.7	sedang	Kabupaten Sarmi	1,330,202.49
		Kabupaten Jayapura	1,190,545.22
		Kabupaten Mamberamo Raya	502,847.89
		Kabupaten Waropen	379,166.30
		Kabupaten Keerom	177,789.34
		Kabupaten Kepulauan Yapen	172,385.71
		Kabupaten Biak Numfor	82,880.94
		Kabupaten Supiori	67,106.13



Curah Hujan Rata-Rata (mm/hari)		Kabupaten	Area (ha)
	Klasifikasi		
		Kota Jayapura	29,463.52
Total			3,932,387.54
27.7 - 34.8	tinggi	Kabupaten Keerom	764,128.08
		Kota Jayapura	53,569.50
		Kabupaten Jayapura	20,938.73
Total			9,270,633.44
Grand Total			8.268.837,32

Sumber: KLHS RTRW Provinsi Papua Tahun 2023

2.1.2.7 Penutupan Lahan

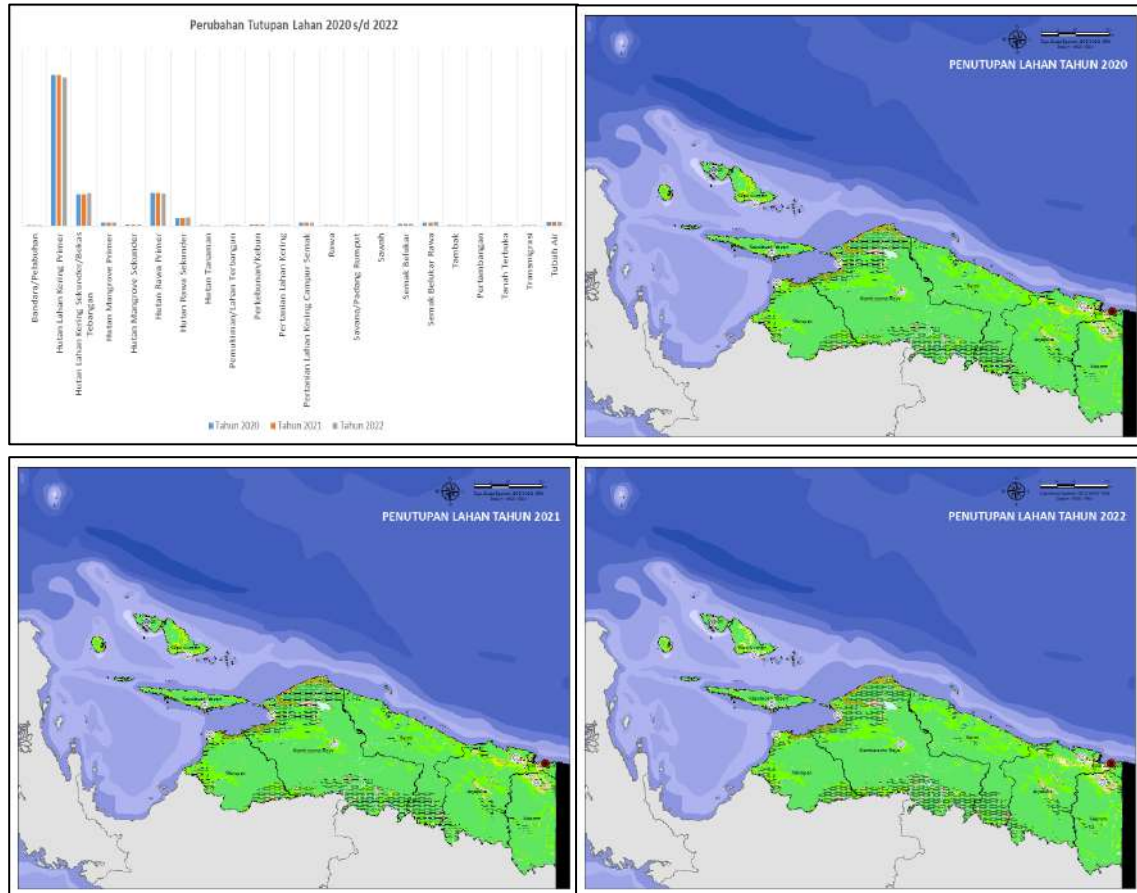
Tutupan atau penutup lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis tutupan lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada tutupan lahan tersebut. Tutupan lahan dan penggunaan lahan memiliki beberapa perbedaan mendasar. Menurut penjelasan, penggunaan lahan mengacu pada tujuan dari fungsi lahan, misalnya tempat rekreasi, habitat satwa liar atau pertanian sedangkan tutupan lahan mengacu pada kenampakan fisik permukaan bumi seperti badan air, bebatuan, lahan terbangun, dan lain-lain (Syahbana, 2013). Artinya, tutupan lahan mengindikasikan tipe lahan fisik sementara penggunaan lahan mendokumentasikan bagaimana masyarakat menggunakan lahan tersebut.

Klasifikasi penutupan lahan adalah penggolongan objek penutupan lahan ke dalam kelas-kelas menurut batasan dan kriteria tertentu (KLHK, 2020). Standar klasifikasi tutupan lahan yang ada di Indonesia dikembangkan dari sistem klasifikasi tutupan lahan United Nations Food and Agriculture Organization (UNFAO). Penggunaan sistem klasifikasi tutupan lahan memungkinkan terjadinya pemantauan dan pelaporan perubahan tutupan lahan pada suatu negara yang dapat diterima di tingkat internasional. Pada umumnya, kelas tutupan lahan dibagi menjadi dua bagian besar yakni daerah bervegetasi dan daerah tak bervegetasi. Daerah bervegetasi diturunkan dari pendekatan konseptual struktur fisiognomi yang konsisten bersumber dari bentuk tumbuhan, bentuk tutupan, tinggi tumbuhan, dan distribusi spasialnya. Sementara pada daerah tak bervegetasi, pendetailan kelas mengacu pada aspek permukaan tutupan, distribusi, atau kepadatan, dan ketinggian atau kedalaman objek. Tutupan lahan punya kelas-kelas berbeda yang mengacu pada skala peta tutupan lahan (BSN, 2010).

Dari 23 Kelas Penutupan Lahan di Indonesia, terdapat 22 Kelas Penutupan Lahan di Provinsi Papua, yang didominasi oleh Kelas Penutupan Lahan Hutan Lahan Kering Primer mencapai 60 persen, diikuti kelas Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan dan Hutan Rawa Primer. Berdasarkan data penutupan lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kelas penutupan lahan yang mengalami perubahan cukup besar selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah kelas penutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer seluas 78.382,58 hektar, seiring dengan terjadinya penambahan luas di kelas Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas

Tebangan Hutan Rawa sekunder, semak belukar dan semak belukar rawa. Lihat gambar dan tabel berikut ini.

Gambar II.14 Perubahan Penutupan Lahan Tahun 2020 s/d 2022



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2023

Tabel II.11 Luas Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2020 s/d 2022

No	Kelas Penutupan	Luas Penutupan Lahan (ha)			Perubahan Tutupan dalam 3 Tahun (ha)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Bandara/Pelabuhan	555,71	555,71	685,63	129,92
2	Hutan Lahan Kering Primer	5.106.244,81	5.106.250,00	5.029.862,23	-76.382,58
3	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	1.070.043,18	1.070.047,20	1.111.482,47	41.439,29
4	Hutan Mangrove Primer	100.753,77	100.754,00	102.931,15	2.177,37
5	Hutan Mangrove Sekunder	51.558,41	51.558,44	52.181,44	623,03
6	Hutan Rawa Primer	1.101.832,29	1.101.830,00	1.093.044,87	-8.787,42
7	Hutan Rawa Sekunder	269.584,16	269.584,52	293.158,72	23.574,56
8	Hutan Tanaman	51,50	51,50	0,00	-51,50
9	Pemukiman/Lahan Terbangun	24.563,65	24.563,68	28.370,06	3.806,41
10	Perkebunan/Kebun	45.444,29	45.444,24	44.004,58	-1.439,71
11	Pertanian Lahan Kering	25.285,87	25.285,92	26.770,88	1.485,00
12	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	115.703,93	115.704,04	107.383,88	-8.320,05
13	Rawa	7.660,18	7.660,18	16.116,03	8.455,85



No	Kelas Penutupan	Luas Penutupan Lahan (ha)			Perubahan Tutupan dalam 3 Tahun (ha)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
14	Savana/Padang Rumput	12.286,71	12.286,67	12.188,40	-98,30
15	Sawah	4.820,22	4.820,22	4.177,48	-642,74
16	Semak Belukar	66.167,35	66.166,90	74.113,70	7.946,35
17	Semak Belukar Rawa	110.357,56	110.358,00	117.021,94	6.664,38
18	Tambak	9,43	9,43	703,48	694,05
19	Pertambangan	4,12	4,12	0,00	-4,12
20	Tanah Terbuka	10.523,51	10.523,49	10.562,25	38,74
21	Transmigrasi	15.040,84	15.040,79	13.374,83	-1.666,01
22	Tubuh Air	129.407,73	129.408,02	129.771,88	364,15
Luas Total		8.268.837,32	8.268.837,32	8.268.837,32	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2023

2.1.2.8 Karakteristik Bentang Alam

Dalam SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000, dilakukan pendetailan untuk memperkuat aspek perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendetailan ini terdapat pada karakteristik bentang alam dan vegetasi alami pada skala 1:250.000. Karakteristik bentang alam merepresentasikan secara indikatif tipe-tipe morfologi dan morfogenesis. Sebaran karakteristik bentang alam dan luasannya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel II.12 Persentase luas bentang alam di Provinsi Papua

Karakteristik Bentang Alam	Luas	
	hektar	%
Danau	9.340,49	0,11%
Dataran fluvial bermaterial aluvium	1.512.431,13	18,25%
Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	16.748,74	0,20%
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	183.660,12	2,22%
Dataran lakustrin bermaterial aluvium	225.003,42	2,72%
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	43.990,14	0,53%
Dataran organik bermaterial gambut	622.049,61	7,51%
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	31.398,18	0,38%
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	1.676,38	0,02%
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	70.824,67	0,85%
Dataran struktural bermaterial batuan sedimen karbonat	255.759,69	3,09%
Dataran struktural berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	44.335,12	0,54%
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	25.119,43	0,30%
Lembah sungai bermaterial aluvium	342.286,36	4,13%
Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa)	8.105,96	0,10%
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2.158.560,31	26,05%

Karakteristik Bentang Alam	Luas	
	hektar	%
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	7.519,89	0,09%
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	631.828,17	7,62%
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	139.804,80	1,69%
Pegunungan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	76.811,23	0,93%
Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	17.916,61	0,22%
Perbukitan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa)	38.969,74	0,47%
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	7.182,57	0,09%
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	241.324,92	2,91%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	365.714,62	4,41%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	566.022,04	6,83%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	558.633,65	6,74%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	83.283,01	1,01%

Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

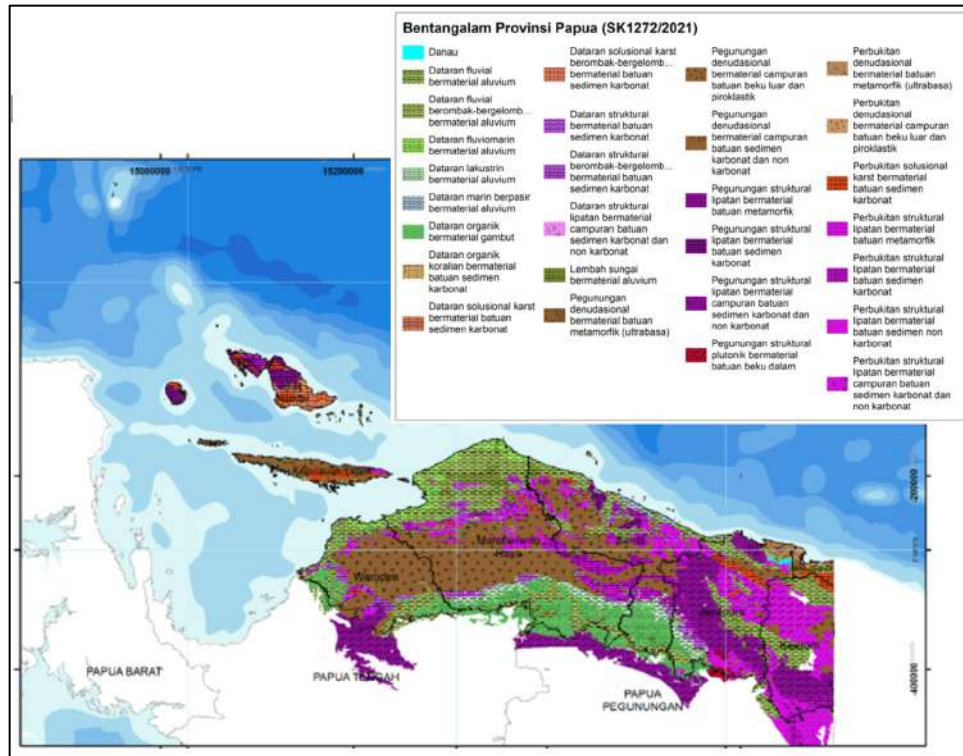
Berdasarkan pendetailan pada SK 1272/2021, terdapat dua jenis bentang alam yang mendominasi di Provinsi Papua, antara lain:

1. Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik seluas 26,05 persen dari luas total Provinsi Papua. Pegunungan denudasional merupakan bentuk lahan dengan relief pegunungan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga terjal, tersusun atas material vulkanik yaitu persilangan antara aliran lava dan endapan piroklastik. Proses denudasional (pelapukan, erosi, longsor) telah berjalan lanjut dan menghasilkan morfologi denudasional dimana bentuk vulkanik sebelumnya (seperti kerucut vulkanik stratovulkano) tidak tampak lagi sebagai penciri utama bentuklahan. Pegunungan denudasional ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air permukaan dari mata air dan sungai kecil, sebagai daerah tangkapan hujan, sebagai penyedia material bahan galian, sebagai pengatur aliran udara (iklim) melalui elevasinya (perubahan tekanan dan suhu udara), sebagai tempat wisata alam, dan penyedia lahan subur.
2. Dataran fluvial bermaterial alluvium seluas 18,25 persen. Dataran fluvial bermaterial alluvium merupakan bentuk lahan yang mempunyai relief dataran rata (flat) dengan kemiringan lereng datar hingga landai, tersusun atas material aluvium hasil proses deposisi fluvial (aliran permukaan atau sungai). Dataran ini memiliki fungsi lingkungan sebagai penyedia air bersih di permukaan yang bersumber dari air tanah



dan sungai, lahan yang subur untuk dimanfaatkan pertanian dan perkebunan, serta sebagai pembentuk lapisan tanah baru hasil sedimentasi fluvial.

Gambar II.15 Sebaran karakteristik bentang alam di Provinsi Papua



Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

2.1.2.9 Karakteristik Vegetasi Alami

Dalam SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000, dilakukan pendetailan untuk memperkuat aspek perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendetailan ini terdapat pada karakteristik bentang alam dan vegetasi alami pada skala 1:250.000. Karakteristik vegetasi alami merepresentasikan secara indikatif tipe-tipe ekosistem.

Sebaran karakteristik vegetasi alami dan luasannya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel II.13 Presentase luas vegetasi alami di Provinsi Papua

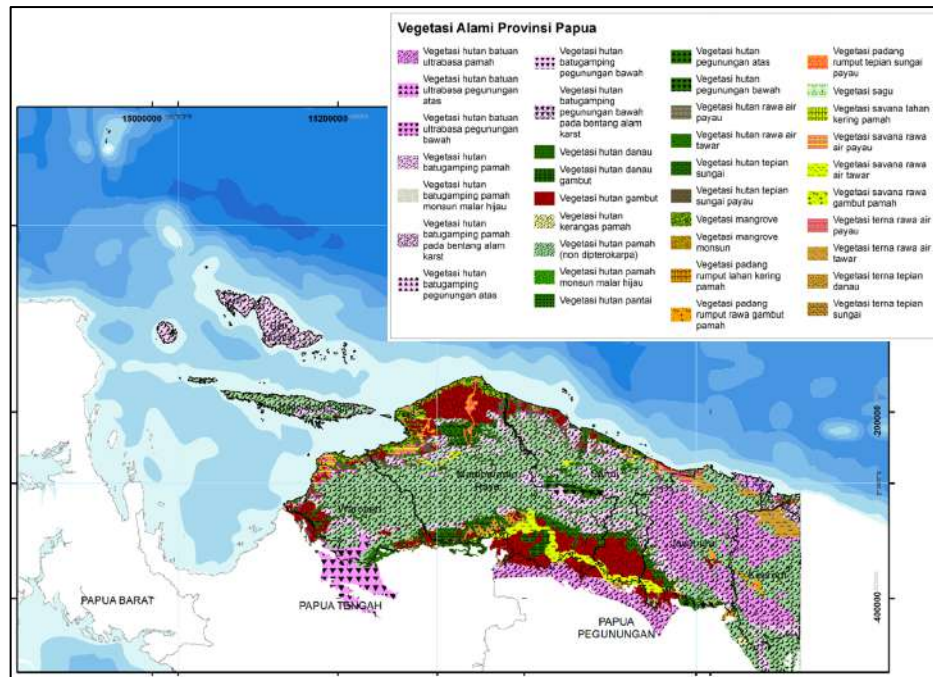
Vegetasi Alami	Luas	
	hektar	%
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	983.693,39	11,87%
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	5.712,37	0,07%
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	55.212,73	0,67%

Vegetasi Alami	Luas	
	hektar	%
Vegetasi hutan batugamping pamah	1.014.897,06	12,25%
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	1.052,48	0,01%
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	307.990,07	3,72%
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	40,74	0,00%
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	21.329,53	0,26%
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	5.835,90	0,07%
Vegetasi hutan danau	225.163,28	2,72%
Vegetasi hutan danau gambut	98.352,55	1,19%
Vegetasi hutan gambut	816.713,94	9,86%
Vegetasi hutan kerangas pamah	27.825,49	0,34%
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	3.211.525,12	38,76%
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	1.440,06	0,02%
Vegetasi hutan pantai	78.814,81	0,95%
Vegetasi hutan pegunungan atas	573,62	0,01%
Vegetasi hutan pegunungan bawah	79.347,91	0,96%
Vegetasi hutan rawa air payau	3.126,77	0,04%
Vegetasi hutan rawa air tawar	27.865,88	0,34%
Vegetasi hutan tepian sungai	309.922,80	3,74%
Vegetasi hutan tepian sungai payau	207.914,15	2,51%
Vegetasi mangrove	182.464,92	2,20%
Vegetasi mangrove monsun	130,09	0,00%
Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	513,81	0,01%
Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	21.845,44	0,26%
Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	38.501,94	0,46%
Vegetasi sagu	1.065,11	0,01%
Vegetasi savana lahan kering pamah	555,15	0,01%
Vegetasi savana rawa air payau	107.227,36	1,29%
Vegetasi savana rawa air tawar	186.167,70	2,25%
Vegetasi savana rawa gambut pamah	1.071,25	0,01%
Vegetasi terna rawa air payau	40.616,58	0,49%
Vegetasi terna rawa air tawar	130.097,25	1,57%
Vegetasi terna tepian danau	66.446,64	0,80%
Vegetasi terna tepian sungai	25.247,11	0,30%

Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021



Gambar II.16 Karakteristik vegetasi di Provinsi Papua



Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

Jenis Vegetasi Alami yang mendominasi wilayah Provinsi Papua diantaranya antara lain:

1. Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) seluas 38,76 persen dari luas Provinsi Papua. Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) adalah komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada berbagai tipe tanah dengan variasi tingkat kesuburannya pada elevasi 0 - 1000 m. Bergantung kepada wilayah dan iklimnya dominasi spesies pada komunitas ini adalah bukan dari kelompok Dipterocarpaceae, umumnya banyak ditemukan berbagai spesies pohon penghasil buah-buahan, penghasil getah dan minyak atsiri, dan penghasil komoditas tanaman perkebunan (kopi, kakao, minyak nabati, serat dll.). Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) fungsinya sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada di bawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung oleh keberadaan hutan pamah (non dipterokarpa). Berbagai unsur hara tanah juga menjadi terjaga kelestariannya oleh vegetasi hutan pamah ini. Keragaman spesies hutan pamah dengan tajuk yang beragam bentuknya berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Tajuk pohon yang sangat beragam mampu untuk menarik uap air menghasilkan tetesan kondensasi karena adanya perbedaan suhu. Pohonnya

menghasilkan serasah organik yang cukup banyak, dan bersama dengan bahan organik lain yang mati melalui proses dekomposisi oleh organisme tanah membentuk humus. Tajuk pohon dengan dedaunan yang beragam akan mengurangi terpaan air hujan dan angin. Air hujan akan langsung terserap oleh humus yang berpengaruh kepada kondisi kelembaban di dalam hutan. Air hujan yang jatuh pada permukaan tanah selain diserap oleh humus, laju aliran air permukaan terkendali kecepatannya sehingga permukaan tanah tidak tererosi. Air yang terserap oleh humus akan dilepas secara perlahan, sehingga ketersediaan air dapat tercukupi meski pada musim kemarau. Humus yang kaya akan bahan organik (N,P,K), akan memperkaya unsur hara tanah menjadi lebih subur.

2. Vegetasi hutan batugamping pamah seluas 12,25 persen. Vegetasi hutan batugamping pamah adalah komunitas vegetasi berupa varian dari tipe hutan dipterokarpa pamah dan hutan non dipterokarpa pamah yang tumbuh pada habitat tanah batu gamping. Tidak banyak spesies yang mampu tumbuh beradaptasi di wilayah yang berbatu gamping, sehingga banyak ditemukan spesies endemik dan langka. Keragamannya bergantung kepada tingkat kesuburan dan ketebalan tanah dan iklim setempat, umumnya didominasi oleh vegetasi perdu semak (pioner). Kerapatan tegakan pohon hutan relative jarang dengan diameter batang yang relatif kecil serta tajuknya tidak melebar. Vegetasi hutan batugamping pamah berfungsi sebagai penutup permukaan lahan yang morfologi berupa batuan batugamping. Lapisan tanahnya secara fisik tergolong sangat tipis dan miskin hara. Pada wilayah ini vegetasinya terdiri atas rumpun-rumpun rumput, bamboo dan semak serta perdu pioner. Secara alami serasah kering dan percabangan semak yang mati tertumpuk di lantai dasar hutan akan terdekomposisi menjadi humus yang menyerap air sehingga terasa lebih lembab oleh kandungan air. Pada saat ada hujan sebagian besar air permukaan, akan diserap diikat oleh humus sehingga mengurangi laju derasnya aliran permukaan pada lereng perbukitan. Air yang diikat oleh humus akan dilepas secara bertahap sebagai cadangan air. Selain itu air akan bereaksi dengan batugamping sehingga terurai karbonatnya menjadi batuan gamping yang lapuk (melunak). Humus yang sifat relatif lebih asam dengan karbonat yang lebih basa menjadikan batuan karbonat melapuk bersama humus menjadi lebih netral keasamannya. Bahan ini menjadi tanah yang relatif lebih kaya haranya, sehingga beberapa spesies tumbuh dapat tumbuh.
3. Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah seluas 11,87 persen. Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah adalah komunitas vegetasi yang tumbuh pada elevasi di



bawah 1000 mdpl dengan substrat tanah yang berasal dari serpentinit dengan kandungan besi dan magnesium tinggi, kandungan silika rendah, serta dicirikan oleh kandungan tinggi unsur-unsur yang beracun bagi tumbuhan (phytotoxins), terutama kobal dan krom. Vegetasi pada habitat ini dapat berupa padang rumput, vegetasi semak terbuka hingga ke hutan dengan tegakan pohon lebat dan tinggi dengan komposisi floristik yang kaya spesies. Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah ini berfungsi sebagai penutup permukaan pada lahan pamah yang komposisinya berupa batuan beku yang mengandung besi, magnesium, silika, kobal dan krom yang miskin hara. Serasah yang dihasilkan terdekomposisi menjadi humus hara tanah serta humus berperan dalam menyerap sebagian air hujan sehingga laju air permukaan tanah dapat diperlambat.

2.1.3 Kondisi (Status) Lingkungan Hidup

2.1.3.1 Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Dalam konteks daya dukung dan daya tampung ini akan digunakan 2 jenis daya dukung yaitu Daya Dukung Penyediaan Pangan dan Daya Dukung Penyediaan Air Bersih. Pemodelan spasial yang digunakan untuk menghitung kapasitas daya dukung pangan dan air adalah dengan menggunakan sistem grid sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2019, dengan skala 30" x 30". Pendekatan dengan sistem grid skala ragam memungkinkan dilakukannya analisis spasial yang melibatkan banyak jenis data dengan berbagai skala/resolusi berbeda (Mashita, 2012). Selain itu, system grid juga memungkinkan mengubah data tabular menjadi sebaran (spasial). Dalam penentuan kecukupan JLH sebagai penyedia air, data spasial hasil penentuan kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air disiapkan dengan konsep sistem grid.

1) Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

Ketersediaan jasa ekosistem untuk bahan pangan dihitung dari jumlah produksi bahan pangan pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Nilai produksi ini didistribusikan dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPPB). Sementara nilai kebutuhan pangan bergantung pada jumlah populasi dan dihitung dari Angka Kecukupan Energi (AKE) per kapita.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai ketersediaan energi bahan pangan di Provinsi Papua cukup merata di semua kabupaten dan kota.

Tabel II.14 Nilai ketersediaan, kebutuhan, selisih pangan di Provinsi Papua tahun 2022

Kabupaten/Kota	Energi Bahan Pangan (miliar kkal)			Ambang Batas Populasi (jiwa)	Persentase Luas Wilayah yang Berstatus Belum Melampaui
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih Ketersediaan		
Biak Numfor	14,49	105,67	(91,19)	18.614,00	67,53%

Kabupaten/Kota	Energi Bahan Pangan (miliar kkal)			Ambang Batas Populasi (jiwa)	Persentase Luas Wilayah yang Berstatus Belum Melampaui
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih Ketersediaan		
Jayapura	48,87	130,38	(81,51)	63.371,00	88,62%
Keerom	21,50	48,40	(26,90)	27.478,00	89,05%
Kepulauan Yapen	2,99	88,40	(85,41)	3.365,00	85,58%
Kota Jayapura	37,76	312,66	(274,90)	48.077,00	52,88%
Mamberamo Raya	2,50	28,68	(26,18)	-	95,15%
Sarmi	12,65	32,87	(20,21)	16.694,00	91,13%
Supiori	1,69	17,70	(16,01)	1.908,00	76,28%
Waropen	5,90	26,57	(20,68)	12.129,00	96,15%
Provinsi Papua	148,35	791,33	(642,99)	191.636,0	82,04%

Sumber: Data diolah pokja KLHS RPJPD Provinsi Papua Tahun 2024

Selisih ketersediaan dengan kebutuhan bahan pangan dihitung untuk melakukan analisis daya dukungnya. Pada tabel II.14 selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan menunjukkan bahwa secara keseluruhan wilayah Provinsi Papua masih memiliki selisih ketersediaan yang negatif. Namun, apabila nilai selisih ini disajikan dalam bentuk peta spasial berdasarkan sebaran penduduk per grid maka terlihat bahwa masih terdapat sebagian besar persentase luas wilayah yang berstatus belum melampaui di setiap kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemodelan sistem grid yang digunakan, nilai kebutuhan pangan setiap kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan pangan yang ada, sementara kapasitas lingkungan dalam penyediaan pangan masih cukup besar di daerah khususnya yang tidak “berpopulasi” (populasi berdasarkan model).

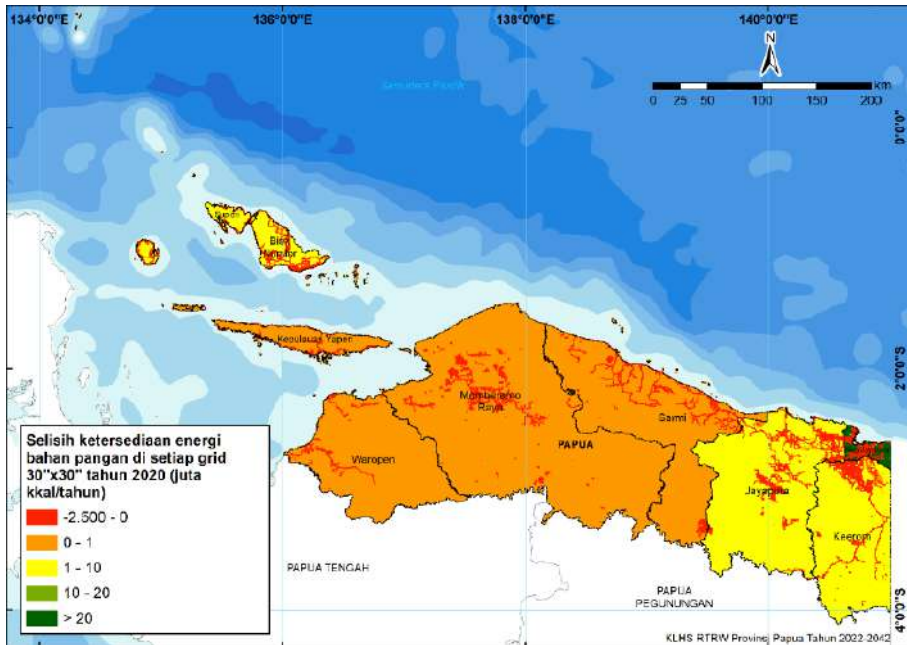
Penentuan status daya dukung terhadap penyedia pangan dilakukan dengan menghitung selisih ambang batas penduduk yang dapat didukung oleh wilayah tersebut terhadap jumlah penduduknya. Apabila jumlah penduduk lebih besar dibandingkan ambang batas, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut memiliki status daya dukung penyedia pangan yang telah melampaui batas, dan sebaliknya. Selisih ketersediaan energi penyedia pangan ditunjukkan oleh peta pada gambar berikut ini. Dari peta tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa wilayah dengan status daya dukung telah melampaui batas. Beberapa wilayah ini ditunjukkan oleh gambar berwarna merah, yaitu seperti Jayapura dan Keerom.

Terdapat dua catatan terhadap pendekatan/model yang digunakan untuk menentukan status daya dukung penyediaan pangan ini. Pertama, model ini bersifat “*closed system*”/tertutup dalam sistem grid; artinya hasil perhitungan dan penentuan status adalah untuk satuan grid 30”x30” dengan berbasiskan pendistribusian berdasarkan kabupaten/kota masing-masing. Implikasinya, pendistribusian dapat menjadi bias terhadap luas wilayah, dimana dengan potensi ketersediaan yang sama, grid pada daerah dengan luasan yang lebih besar akan memiliki ketersediaan yang lebih kecil. Kedua, model ini



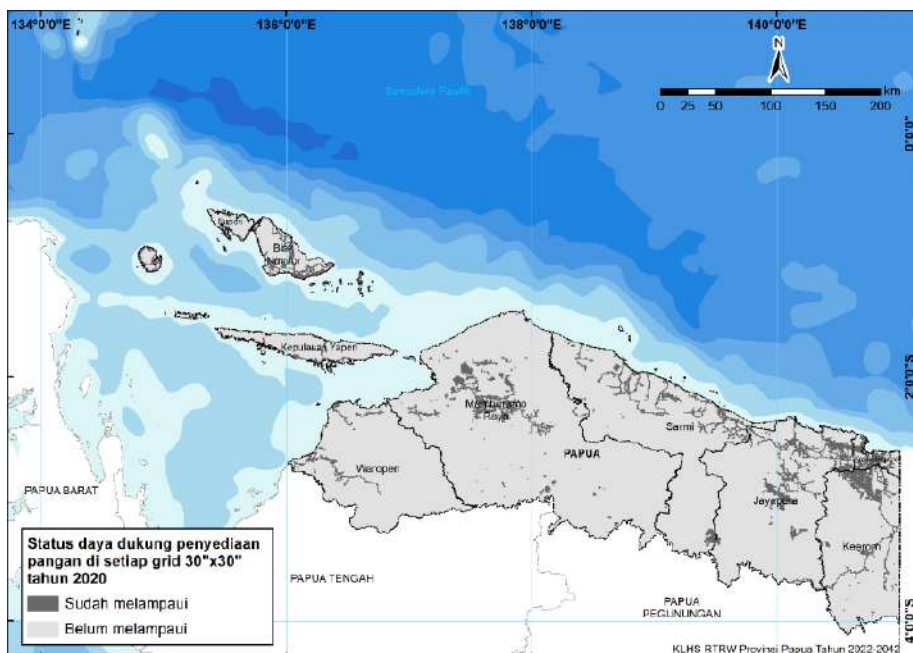
sangat dipengaruhi oleh data masukan yang digunakan, terutama ketersediaan bahan pangan.

Gambar II.17 Selisih ketersediaan bahan pangan di Provinsi Papua tahun 2022



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Gambar II.18 Status daya dukung penyedia bahan pangan di Provinsi Papua tahun 2022



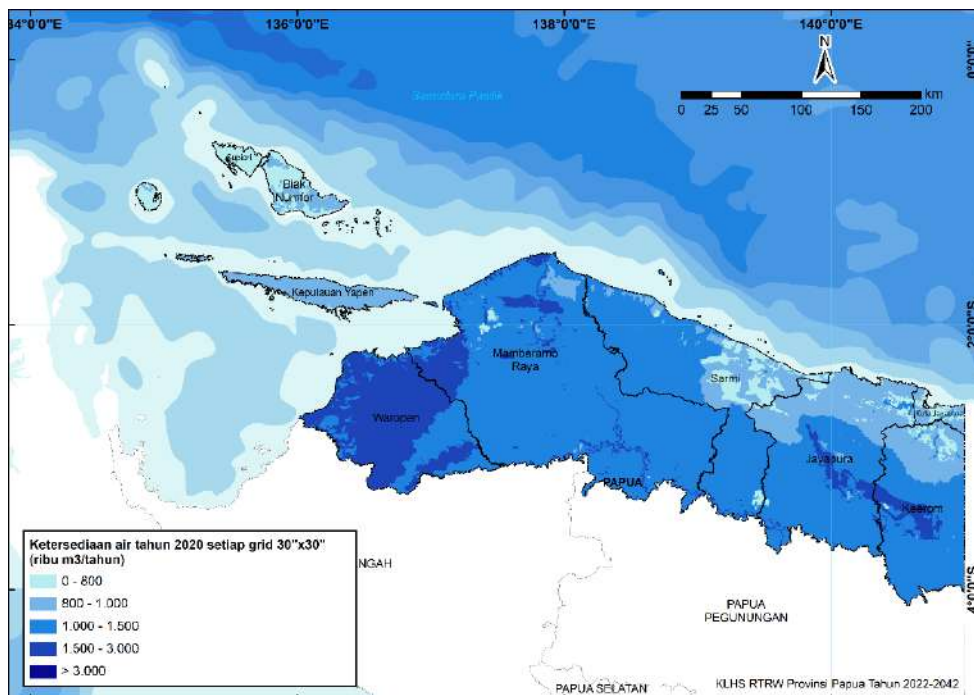
Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Data ketersediaan bahan pangan yang digunakan berasal dari statistik dalam angka Provinsi Papua tahun 2023 (menunjukkan hasil produksi 2022). Bahan pangan yang diperhitungkan merupakan bahan pangan yang produksinya terdapat pada data tersebut. Dalam hal ini, hasil perhitungan akumulatif yang menunjukkan bahwa Provinsi Papua telah mengalami defisit pangan, dapat mengindikasikan perlunya pendataan produksi pangan yang lebih memperhatikan pangan lokal daerah Provinsi Papua, misalnya sugu dan perikanan tangkap, serta dapat juga dari bahan pangan yang diperoleh dari hutan.

2) Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air Bersih

Ketersediaan air di Provinsi Papua dihitung menggunakan data volume air per wilayah distrik dan disebarakan dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air. Sementara nilai kebutuhan untuk air dihitung berdasarkan kebutuhan air bersih untuk domestik per kapita dan tutupan lahan. Secara umum, ketersediaan air di Provinsi Papua cukup melimpah dan tersebar merata, kecuali untuk beberapa daerah seperti pada bagian timur Kab. Sarmi, bagian utara Kab. Jayapura dan Kab. Keerom, serta pada Kota Jayapura yang memiliki jumlah ketersediaan air lebih sedikit, lihat gambar berikut ini.

Gambar II.19 Ketersediaan air bersih di Provinsi Papua tahun 2022



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Kebutuhan air yang tinggi berada pada bagian utara Kab. Jayapura dan Kab. Keerom, serta pada Kota Jayapura. Kebutuhan air secara lebih rinci baik kebutuhan air domestik, kebutuhan air lahan, serta kebutuhan air total dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

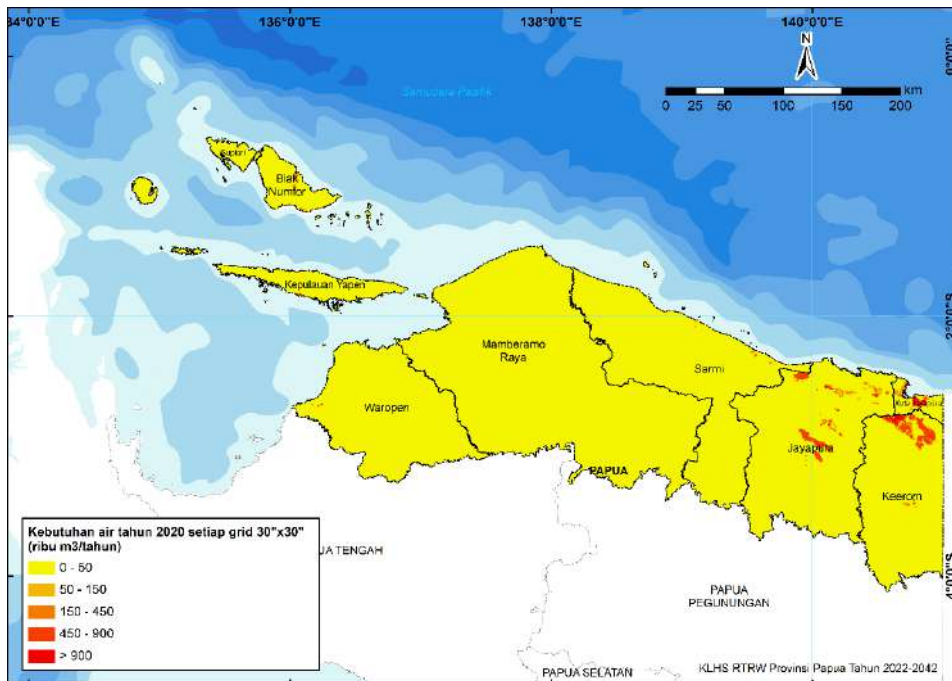


Tabel II.15 Nilai kebutuhan air lahan dan air domestik di Provinsi Papua tahun 2022

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Air Lahan (m ³)	Kebutuhan Air Domestik (m ³)	Kebutuhan Total
Biak Numfor	11.235.328,29	11.634.278,40	22.869.606,69
Jayapura	280.995.826,44	14.354.323,20	295.350.149,64
Keerom	398.863.655,86	5.328.979,20	404.192.635,06
Kepulauan Yapen	4.528.736,78	9.732.873,60	14.261.610,38
Kota Jayapura	105.297.726,49	34.423.833,60	139.721.560,09
Mamberamo Raya	84.601,70	3.157.142,40	3.241.744,12
Sarmi	9.636.094,84	3.618.432,00	13.254.526,84
Supiori	1.801.904,78	1.948.838,40	3.750.743,18
Waropen	6.687.271,94	2.925.504,00	9.612.775,94
Provinsi Papua	819.131.147,12	87.124.204,80	906.255.351,92

Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

Gambar II.20 Kebutuhan air bersih di Provinsi Papua tahun 2022



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Pada penentuan daya dukung air, dibutuhkan nilai selisih antara ketersediaan dan kebutuhan. Apabila diakumulasi berdasarkan kabupaten/kota, tidak ada wilayah yang memiliki selisih negatif. Hal ini menunjukkan ketersediaan air yang melimpah di daerah tersebut dan juga kebutuhan air yang rendah. Nilai ketersediaan, kebutuhan, dan selisih air di Provinsi Papua dirangkum pada tabel II.16, terlihat bahwa selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air bersih paling besar berada di wilayah Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Waropen, hal ini karena kedua kabupaten tersebut memiliki ketersediaan air yang melimpah.

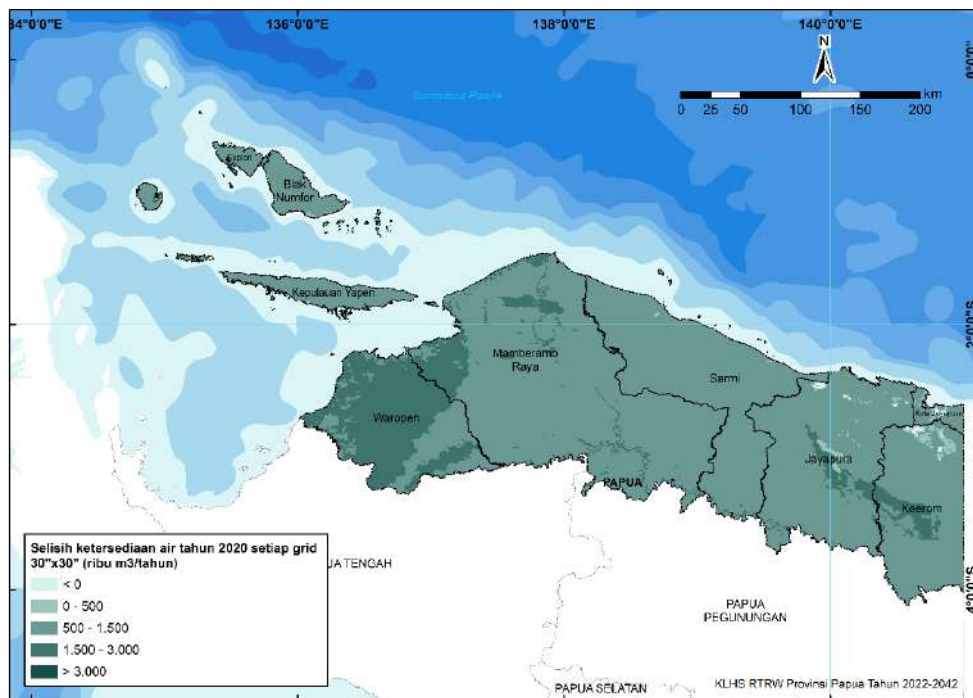
Tabel II.16 Nilai ketersediaan, kebutuhan, selisih air di Provinsi Papua tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Total (m ³)	Selisih Ketersediaan (m ³)	Ambang Batas (m ³)	Luas wilayah berstatus belum melampaui (%)
Biak Numfor	2.278.973.814,64	22.869.606,69	2.256.104.207,95	26.246.973,22	100,00
Jayapura	19.191.718.228,10	295.350.149,64	18.896.368.078,46	218.874.101,87	99,39
Keerom	13.882.505.884,90	504.192.635,06	13.378.313.249,84	156.060.673,95	99,15
Kepulauan Yapen	3.058.432.688,92	14.261.610,38	3.044.171.078,54	35.346.110,56	99,93
Kota Jayapura	831.085.245,54	139.721.560,09	691.363.685,45	8.400.318,51	94,50
Mamberamo Raya	44.059.418.196,60	3.241.744,12	44.056.176.452,48	509.945.990,68	100,00
Sarmi	18.086.869.743,80	13.254.526,84	18.073.615.216,96	209.227.241,31	99,99
Supiori	6.099.438.826,34	3.750.743,18	6.095.688.083,16	70.574.501,41	99,89
Waropen	20.850.504.692,20	9.612.775,94	20.840.891.916,26	251.247.886,81	99,98
Provinsi Papua	128.338.947.321,04	1.006.255.351,94	127.332.691.969,10		

Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

Sebaran selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan air dalam sistem grid ukuran 30"x30" terdapat pada gambar berikut ini

Gambar II.21 Selisih ketersediaan air bersih di Provinsi Papua tahun 2022



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

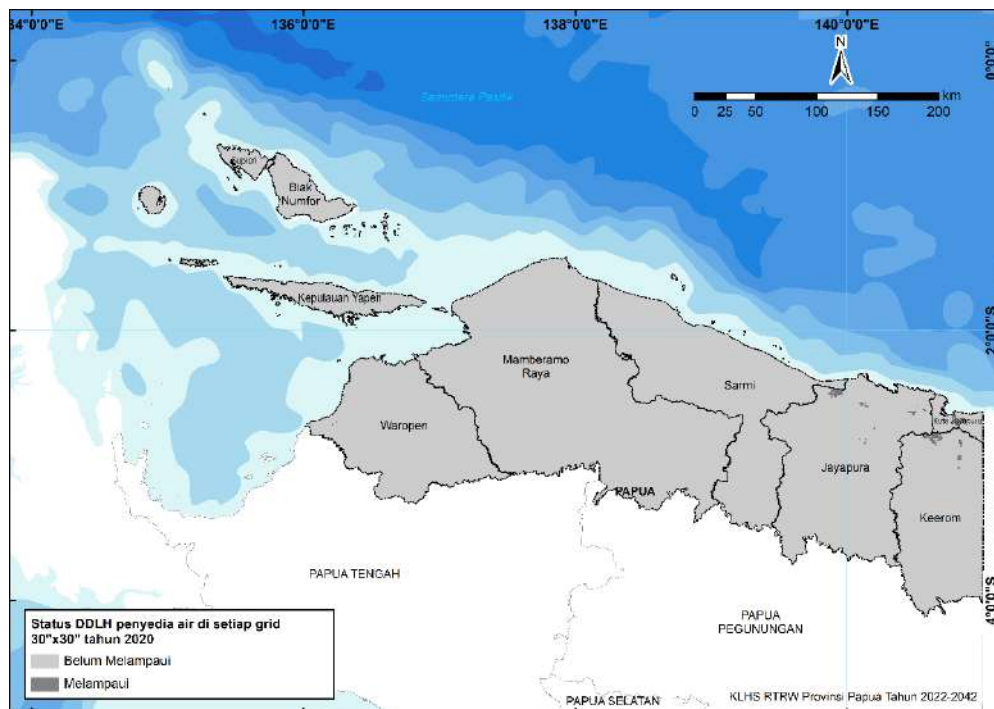
Penentuan status DLLH air dianalisis melalui nilai ambang batas yang dibandingkan dengan jumlah populasi di setiap grid. Apabila jumlah populasi pada grid tersebut lebih banyak dibandingkan nilai ambang batasnya, maka status DDLH daerah tersebut telah



melampaui ambang batas, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil penghitungan ambang batas pada tabel II.16 dapat disimpulkan bahwa daerah dengan ambang batas lebih rendah berada pada beberapa bagian di Provinsi Papua meliputi bagian utara, terutama di Kota Jayapura. Daerah-daerah dengan nilai ambang batas yang rendah merupakan daerah yang rentan terhadap kelangkaan air di masa mendatang, khususnya jika terdapat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang signifikan serta adanya dampak perubahan iklim.

Status daya dukung DDLH air dihitung berdasarkan selisih ambang batas dengan jumlah penduduk. Dari hasil perhitungan, diperoleh bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Papua memiliki status daya dukung air yang belum melampaui ambang batas (99,74%). Hanya sebagian kecil wilayah pada bagian utara Kab. Jayapura dan Kab. Keerom serta pada Kota Jayapura yang status daya dukung airnya telah melampaui. Hal tersebut ditunjukkan oleh blok abu-abu tua pada peta sebaran status daya dukung air di Provinsi Papua, lihat gambar berikut ini.

Gambar II.22 Status daya dukung penyedia air di Provinsi Papua tahun 2022



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Skenario pengembangan wilayah provinsi Papua, dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan, yang meliputi:

- a. **Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya, yaitu:
 - (1) Kabupaten Keerom sebagai PKW, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, jagung, kakao), sektor pariwisata (Telaga Cinta Yowong), sektor pertambangan, dan sektor Peternakan

dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian (food estate dan tanaman pangan, sektor perkebunan dan sektor pertambangan;

- (2) Kabupaten Sarmi sebagai PKW, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, kakao), sektor pertambangan (nikel), sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor pariwisata dengan fokus pengembangan pada sektor industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (PICHO/Papua Home industri Coconut Oil);
- (3) Kabupaten Jayapura sebagai PKN, memiliki potensi di sektor Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, kakao, sagu), sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pariwisata (kerajinan kapak batu Ormu Wari, Danau Sentani), sektor pertambangan, sektor industri dan sektor Kehutanan dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian dan industri; serta
- (4) Kota Jayapura sebagai PKN dan PKSN, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sektor jasa dengan fokus pengembangan sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata.

b. Wilayah pengembangan II, yaitu:

- (1) Kabupaten Biak Numfor sebagai PKW dan PKSN, memiliki potensi di sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor peternakan dengan fokus pengembangan sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari;
- (2) Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi di sektor pariwisata (Kampung wisata Alam), sektor perikanan (ikan dan rumput laut), sektor perkebunan (sagu, kakao), sektor kehutanan, sektor pertanian, dan sektor peternakan dengan fokus pengembangan pada sektor perikanan dan wisata bahari; serta
- (3) Kabupaten Supiori memiliki potensi pengembangan di sektor perikanan dan pariwisata; dan

c. Wilayah pengembangan III, yaitu:

- (1) Kabupaten Mamberamo Raya memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan rakyat, sektor pertambangan (batu bara), sektor perikanan, sektor pariwisata (pariwisata alam), dan sektor kehutanan dengan fokus pengembangan pada pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta
- (2) Kabupaten Waropen memiliki potensi di sektor pariwisata (Wisata Rohani Pulau Nau, Pantai Mangrove), sektor perikanan (ikan, udang, kepiting), sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (sagu), sektor kehutanan, dan sektor pertambangan dengan fokus pengembangan meliputi pariwisata, perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.



Gambar II.23 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

2.1.5 Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Provinsi Papua sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah sebanyak 823.494 jiwa dan meningkat menjadi 1.034.956 jiwa pada tahun 2022. Kota Jayapura mengalami peningkatan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua hingga tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan jumlah penduduk hingga tahun 2022. Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020. Meskipun begitu, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022.

Tabel II.17 Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2022

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jayapura	125.975	128.587	131.802	166.171	168.476	171.331
2	Kepulauan Yapen	95.007	97.412	101.204	112.676	114.210	116.107
3	Biak Numfor	144.697	148.404	152.401	134.650	135.231	135.796
4	Sarmi	38.210	39.406	40.515	41.515	41.849	42.233
5	Keerom	55.018	55.799	57.100	61.623	62.157	62.777
6	Waropen	29.480	30.612	31.514	33.943	34.414	34.997
7	Supiori	19.104	20.018	20.710	22.547	22.860	23.247
8	Mamberamo Raya	22.313	23.307	24.086	36.483	36.989	37.616
9	Kota Jayapura	293.690	297.775	300.192	398.478	404.004	410.852
Provinsi Papua		823.494	841.320	859.524	1.008.086	1.020.190	1.034.956

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Analisis bidang kependudukan mencakup empat hal, yaitu analisis mengenai pertumbuhan penduduk (meliputi komponen kelahiran, kematian dan migrasi), kemudian kepadatan penduduk kasar bruto untuk mengetahui kecenderungan kepadatan manusia. Karena keterbatasan data, maka migrasi penduduk tidak dapat diproyeksi tahun 2025-2045. Beberapa Parameter Demografi penduduk secara umum di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel II.22 di bawah ini.

Tabel II.18 Beberapa Parameter Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045

PENDUDUK	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
Laki-Laki (000)	528,54	560,93	589,68	617,88	672,52	742,24
Perempuan (000)	476,10	512,72	546,23	579,63	639,67	715,90
Total (000)	1.004,64	1.073,65	1.135,91	1.197,51	1.312,19	1.458,14
Sex Ratio (%)	111,01	109,40	107,95	106,60	105,14	103,68
Komposisi Umur (%)						
0-14	33,08	32,27	28,90	24,98	22,41	19,94
15-64	62,72	62,96	65,23	68,37	70,02	71,52
65+	4,20	4,77	5,86	6,65	7,57	8,55
Dependency Ratio (%)	59,43	58,83	53,29	46,26	42,81	39,83
FERTILITAS						
Total Fertility Rate (TFR)1	3,10	2,96	2,88	2,77	2,67	2,58
MORTALITAS						
Infant Mortality Rate (IMR) 1	30,84	30,02	27,12	24,02	22,12	20,38

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024* dan Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**

Keterangan : 1) data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk.

2.1.5.1 Analisis Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan suatu wilayah tidak lepas dari jumlah penduduk di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana jumlah penduduk yang akan datang mempengaruhi perkembangan maupun pertumbuhan suatu wilayah. Dengan memperkirakan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan dengan menggunakan jumlah penduduk tahun 2020 sebagai jumlah penduduk tahun dasar maka proyeksi penduduk dapat diketahui. Proyeksi penduduk suatu wilayah dapat mencerminkan keadaan serta perkembangan suatu wilayah dengan kondisi/daya dukung yang ada sekarang dengan jumlah penduduk wilayah tersebut mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya, proyeksi penduduk di Provinsi Papua Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel II.23 berikut ini.

Tabel II. 19 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua (Ribu Jiwa)

No.	Kabupaten/Kota	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
1	Kota Jayapura	396,80	426,11	451,58	475,02	525,11	590,40
2	Kab. Jayapura	166,37	174,85	182,34	190,54	206,92	228,22
3	Kab. Sarmi	41,37	43,48	45,22	47,05	51,55	57,53
4	Kab. Keerom	61,39	64,83	67,89	71,03	78,54	88,70
5	Kab. Membramo Raya	36,28	40,14	43,78	47,32	52,52	58,73
6	Kab. Kepulauan Yapen	112,19	120,12	127,77	135,62	146,39	158,97
7	Kab. Biak Numfor	134,10	142,79	151,08	159,46	170,65	183,41
8	Kab. Waropen	33,76	36,30	38,75	41,35	46,32	52,91



9	Kab. Supiori	22,38	25,03	27,50	30,12	34,19	39,27
	PAPUA	1.004,64	1.073,65	1.135,91	1.197,51	1.312,19	1.458,14

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024* dan Proyeksi BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**

Rata-rata pertumbuhan penduduk selama 15 tahun terakhir (2020-2035) adalah sebesar 1,18% per tahun atau terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1.312.190 jiwa pada tahun 2040 menjadi 1.458.140 jiwa pada tahun 2045 dari tahun 2020 sebesar 1.004.640 jiwa. Untuk pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota dapat dilihat bahwa Kabupaten Supiori mengalami laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebesar 2,00 % dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Sarmi sebesar 0,87%, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.24 di bawah ini.

Tabel II.20 Laju Pertumbuhan Penduduk Dari Tahun 2020 Sampai Tahun 2035

No.	Kabupaten/Kota	Perhitungan Laju Pertumbuhan Pertumbuhan (2020 - 2035)			
		Pt	Po	T	r (%)
1	Kota Jayapura	451.580	396.800	15	1,21
2	Kab. Jayapura	182.340	166.370	15	0,91
3	Kab. Sarmi	45.220	41.370	15	0,87
4	Kab. Keerom	67.890	61.390	15	0,98
5	Kab. Mamberamo Raya	43.780	36.280	15	1,78
6	Kab. Kepulauan Yapen	127.770	112.190	15	1,27
7	Kab. Biak Numfor	151.080	134.100	15	1,16
8	Kab. Waropen	38.750	33.760	15	1,36
9	Kab. Supiori	27.500	22.380	15	2,00
	PAPUA	1.135.910	1.004.640	15	1,18

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 dan Diolah.

Tabel II.24 di atas terlihat bahwa, Kabupaten Mamberamo Raya juga memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, yaitu sebesar 1,78%, hal ini mungkin disebabkan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mamberamo Raya tersebut sehingga menarik masyarakat yang berada di daerah atau wilayah lainnya.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Papua tahun 2020 tertinggi terjadi pada umur 0-4 tahun dan diikuti kelompok umur 5-9 tahun dengan nilai berturut-turut 132.380 jiwa dan 115.720 jiwa, namun diproyeksikan pada tahun 2025 kelompok umur 5-9 tahun adalah yang terbesar yakni 131.130 jiwa, yang diikuti kelompok umur 0-4 tahun sebesar 100.720 jiwa. Sedangkan yang terkecil ada pada kelompok umur 70-74 tahun sebesar 11.180 jiwa tahun 2020 dan pada tahun 2025 pada kelompok umur 75+ tahun, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini.

Tabel II.21 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 (Ribuan Jiwa)

No.	Umur	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
1.	0-4	132,38	100,72	98,41	102,40	95,06	88,78
2.	5-9	115,72	131,13	99,80	97,64	93,01	88,82
3.	10-14	84,20	114,66	130,01	99,11	105,71	112,96
4.	15-19	67,69	83,47	113,70	128,95	161,20	202,33

No.	Umur	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
5.	20-24	86,85	67,14	82,79	112,79	124,51	137,85
6.	25-29	87,81	86,07	66,47	81,94	82,23	80,90
7.	30-34	91,34	87,07	85,23	65,79	59,56	54,42
8.	35-39	78,13	90,36	86,16	84,29	86,66	89,12
9.	40-44	62,35	76,63	88,66	84,63	94,00	104,67
10.	45-49	54,25	60,61	74,55	86,39	101,21	118,82
11.	50-54	40,17	52,34	58,55	72,14	87,99	107,88
12.	55-59	37,12	38,10	49,71	55,75	64,19	74,43
13.	60-64	24,43	34,18	35,25	46,13	57,56	72,47
14.	65-69	19,32	21,51	30,29	31,40	37,25	44,52
15.	70-74	11,18	15,81	17,81	25,15	33,15	43,71
16.	75+	11,72	13,85	18,52	23,01	28,91	36,45
	Papua	1.004,66	1.073,65	1.135,91	1.197,51	1.312,19	1.458,14

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024*) dan Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**)

Tabel II.25 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2045 jumlah penduduk diatas 200.000 ribu jiwa terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun dan jumlah penduduk 100.000-140.000 jiwa terjadi pada kelompok umur 10-14 tahun, 20-24 tahun, dan 40-54 tahun, selebih dibawah 100.000 jiwa dan yang terkecil pada kelompok umur 75+ sebesar 36.450 jiwa.

Jumlah penduduk di Provinsi Papua berdasarkan jenis kelamin menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel II.26 di bawah ini.

Tabel II.22 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Laki-Laki (L) dan Perempuan (P)) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 (Ribu Jiwa)

No.	Kabupaten/Kota	2020*		2021*		2022*		2023*		2024*		2025*	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kota Jayapura	211,59	185,21	225,23	200,88	236,79	214,79	247,12	227,90	271,98	253,13	304,99	285,42
2	Kab. Jayapura	86,85	79,52	90,56	84,29	93,77	88,57	97,33	93,21	104,50	102,42	113,74	114,48
3	Kab. Sarmi	22,04	19,33	23,09	20,39	23,90	21,32	24,69	22,36	26,78	24,77	29,52	28,01
4	Kab. Keerom	32,41	28,98	34,02	30,81	35,45	32,44	36,94	34,09	40,50	38,04	45,26	43,43
5	Kab. Membramo Raya	19,05	17,23	20,89	19,25	22,61	21,17	24,28	23,04	26,61	25,90	29,31	29,42
6	Kab. Kepulauan Yapen	58,25	53,94	62,00	58,12	65,59	62,18	69,29	66,33	74,34	72,06	80,17	78,80
7	Kab. Biak Numfor	68,80	65,30	73,06	69,73	77,12	73,96	81,25	78,21	86,61	84,04	92,64	90,78
8	Kab. Waropen	17,91	15,85	19,15	17,15	20,33	18,42	21,58	19,77	23,94	22,38	27,02	25,89
9	Kab. Supiori	11,64	10,74	12,93	12,10	14,12	13,38	15,40	14,72	17,27	16,92	19,59	19,67
	PAPUA	528,54	476,10	560,93	512,72	589,68	546,23	617,88	579,63	672,52	639,67	742,24	715,90

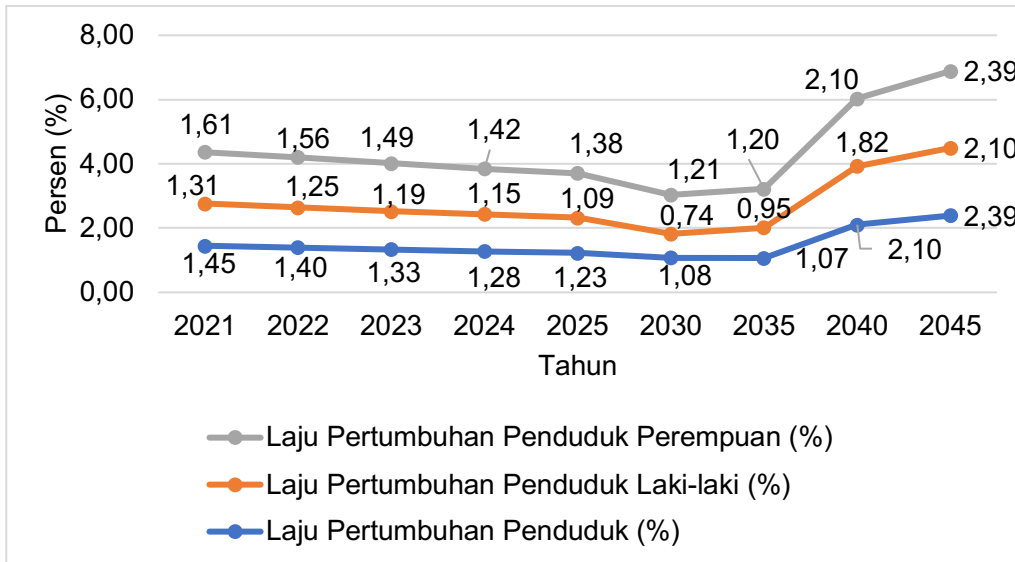
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024*) dan Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**).

Tabel II.26 diatas terlihat bahwa, pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak 1.004.660 jiwa, jika dibagi berdasarkan jenis kelamin menjadi 528.540 jiwa penduduk laki-laki dan jiwa penduduk perempuan 476.100 dimana rasio jenis kelamin adalah 111,01 yang berarti terdapat 111 laki-laki untuk 100 perempuan. Sampai tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi jumlah penduduk perempuan dengan jumlah berturut-turut 742.240 jiwa laki-laki dan 715.900 jiwa perempuan. Walaupun sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2045 jumlah penduduk laki-laki mendominasi jumlah penduduk Perempuan, akan tetapi laju pertumbuhan penduduk perempuan mendominasi



pertumbuhan penduduk laki-laki , bahkan mendominasi laju pertumbuhan penduduk Papua secara umumnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.24.

Gambar II.24 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2021-2045



Sumber : BPS Provinsi Papua dan Diolah, 2024.

2.1.5.2 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk

Rasio jenis kelamin atau *Sex Ratio* Penduduk Provinsi Papua menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2045 dapat dilihat pada Tabel II.27 berikut ini.

Tabel II.23 Sex Ratio Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
1	Kota Jayapura	114,24	112,12	110,24	108,43	107,45	106,86
2	Kab. Jayapura	109,22	107,44	105,87	104,42	102,03	99,36
3	Kab. Sarmi	114,02	113,24	112,10	110,42	108,11	105,38
4	Kab. Keerom	111,84	110,42	109,28	108,36	106,46	104,21
5	Kab. Membramo Raya	110,56	108,52	106,80	105,38	102,73	99,61
6	Kab. Kepulauan Yapen	107,99	106,68	105,48	104,46	103,16	101,74
7	Kab. Biak Numfor	105,36	104,78	104,27	103,89	103,06	102,05
8	Kab. Waropen	113,00	111,66	110,37	109,16	106,95	104,39
9	Kab. Supiori	108,38	106,86	105,53	104,62	102,08	99,59
	PAPUA	111,01	109,40	107,95	106,60	105,14	103,68

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024*) dan Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**).

Tabel II.27 di atas menunjukkan bahwa, rasio jenis kelamin hasil perhitungan dan proyeksi dari tahun 2020-2045 bervariasi menurut Kabupaten/Kota. Secara umum, rasio jenis kelamin di Provinsi Papua tahun 2020-2045 menunjukkan pola yang semakin menurun dan berlaku untuk semua Kabupaten/Kota dengan rasio jenis kelamin pada tahun 2045 sebesar 103,68 yang berarti terdapat 104 laki-laki untuk 100 perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kota Jayapura (106,86), yang diikuti Kabupaten Sarmi (105,38), Kabupaten Waropen (104,39) dan Kabupaten Keerom (104,21), sedangkan 3 (tiga)

Kabupaten dibawah 100 adalah Kabupaten Mamberamo Raya (99,61), Kabupaten Supiori (99,59), dan Kabupaten Jayapura (99,36).

2.1.5.3 Analisis Distribusi dan Kepadatan Penduduk

1) Distribusi Penduduk

Distribusi atau penyebaran penduduk akan mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah, semakin besar penyebaran penduduk disuatu wilayah maka tingkat kepadatan penduduk akan semakin tinggi. Distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel II.28 di bawah ini.

Tabel II.24 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
1	Kota Jayapura	39,50	39,69	39,74	39,67	40,02	40,49
2	Kab. Jayapura	16,56	16,29	16,09	15,91	15,77	15,65
3	Kab. Sarmi	4,12	4,05	3,98	3,93	3,93	3,95
4	Kab. Keerom	6,11	6,04	5,97	5,93	5,99	6,08
5	Kab. Mamberamo Raya	3,61	3,74	3,85	3,95	4,00	4,03
6	Kab. Kepulauan Yapen	11,17	11,19	11,24	11,32	11,16	10,90
7	Kab. Biak Numfor	13,35	13,30	13,29	13,32	13,00	12,58
8	Kab. Waropen	3,36	3,38	3,41	3,45	3,53	3,63
9	Kab. Supiori	2,23	2,33	2,42	2,52	2,61	2,69
	PAPUA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024*) dan Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**).

Tabel II.28 di atas menunjukkan bahwa, penyebaran penduduk terbesar ada di Kota Jayapura sebesar 39,50% tahun 2020 dan tetap terbesar sampai tahun 2045 hingga mencapai 40,49%, yang diikuti oleh Kabupaten Jayapura sebesar 16,56% tahun 2020, walaupun menurun menjadi 15,65% tahun 2045. Hal ini disebabkan karena Kota Jayapura sebagai Ibukota Provinsi sebagai pusat administrasi dan pemerintahan, pusat jasa pendidikan, pusat jasa kesehatan, pusat jasa keuangan dan jasa lainnya. Terjadinya penurunan sebesar 0,91 poin di tahun 2045 disebabkan karena terjadinya penurunan pertumbuhan penduduk. Distribusi penduduk terkecil terjadi pada Kabupaten Supiori dan Kabupaten Waropen, berturut-turut 2,23% dan 3,36% tahun 2020 serta 2,69% dan 3,63% pada tahun 2045.

2.1.5.4 Analisis Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah dan ini biasa juga disebut Kepadatan Penduduk Kasar Bruto, sedangkan Kepadatan Penduduk Kasar Netto adalah perbandingan jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah dengan luas pekarangan yang di gunakan. Dalam hal ini, analisis kepadatan penduduk di Provinsi Papua hanya kepadatan Bruto karena data luas pekarang tidak tersedia, untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota tahun 2020-2045 dapat dilihat pada Tabel II.29 dibawah ini.



Tabel II.25 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
1	Kota Jayapura	835,48	475	510	541	569	629	707
2	Kab. Jayapura	14.082,21	12	12	13	14	15	16
3	Kab. Sarmi	14.068,37	3	3	3	3	4	4
4	Kab. Keerom	9.526,32	6	7	7	7	8	9
5	Kab. Mamberamo Raya	28.042,39	1	1	2	2	2	2
6	Kab. Kepulauan Yapen	2.429,03	46	49	53	56	60	65
7	Kab. Biak Numfor	2.257,78	59	63	67	71	76	81
8	Kab. Waropen	10.778,76	3	3	4	4	4	5
9	Kab. Supiori	660,61	34	38	42	46	52	59
	PAPUA	82.680,95	12	13	14	14	16	18

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024*) dan Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**)

Berdasarkan tabel diatas kepadatan bruto terbesar terjadi pada Kota Jayapura yaitu sebesar 475 jiwa/km² tahun 2020 dan meningkat kepadannya tahun 2045 menjadi 707 jiwa/km², hal ini mungkin disebabkan oleh karena jumlah penduduk terbesar dengan luas wilayah terkecil kedua, sedangkan kepadatan bruto terkecil terjadi pada Kabupaten Mamberamo Raya yakni tahun 2020 sebesar 1 jiwa/km² dan hanya 2 jiwa/km² tahun 2045. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Mamberamo Raya adalah luas wilayah terbesar dengan jumlah penduduk terkecil ketiga.

2.1.5.5 Analisis Kelahiran dan Kematian

1) Kelahiran

Untuk mengukur kemungkinan pertumbuhan penduduk yang paling tepat adalah menggunakan analisis mengenai fertilitas. Fertilitas berikut dihitung dengan menggunakan Tingkat Fertilitas Total atau **Total Fertility Rate (TFR)**. Tingkat fertilitas yang terjadi di Provinsi Papua adalah merupakan ukuran berhasil tidaknya dari program Keluarga Berencana (KB) serta upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ada tabel II.30.

Tabel II.26 Total Fertility Rate (TFR) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045

No.	Kabupaten/Kota	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
1	Kota Jayapura	2,31	2,24	2,20	2,14	2,09	2,03
2	Kab. Jayapura	2,83	2,73	2,66	2,57	2,49	2,41
3	Kab. Sarmi	2,56	2,45	2,40	2,33	2,26	2,19
4	Kab. Keerom	2,66	2,58	2,52	2,44	2,37	2,30
5	Kab. Mamberamo Raya	3,58	3,42	3,32	3,17	3,04	2,92
6	Kab. Kepulauan Yapen	3,30	3,16	3,07	2,95	2,84	2,74
7	Kab. Biak Numfor	3,26	3,10	3,00	2,89	2,78	2,67
8	Kab. Waropen	3,31	3,12	3,04	2,92	2,80	2,69
9	Kab. Supiori	4,11	3,87	3,74	3,56	3,39	3,24
	PAPUA	3,10	2,96	2,88	2,77	2,67	2,58

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024*) dan Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**).

Berdasarkan tabel jumlah fertilitas yang diambil data series tahun 2020 sampai tahun 2045 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 ada 8 (delapan) kabupaten yang memiliki fertilitas tinggi dan yang tertinggi adalah Kabupaten Supiori sebesar 4,11 sedangkan Kota Jayapura memiliki fertilitas yang cukup rendah sebesar 2,31, yang berarti bahwa di Kabupaten Supiori setiap 1.000 perempuan setelah melewati masa suburnya akan melahirkan 4,11 bayi laki-laki dan perempuan, sedangkan di Kota Jayapura hanya melahirkan 2,31 bayi laki-laki dan Perempuan. Selama periode tiap 5 (lima) tahun sampai tahun 2045 angka fertisasi mengalami penurunan pada setiap Kabupaten/Kota dan terendah masih tetap di Kota Jayapura.

Jika dihitung berdasarkan standar fertilitas Indonesia yaitu 2,50%, maka Tingkat Fertisasi Total di Provinsi Papua dari tahun 2020-2045 dikategorikan sangat rendah, yaitu antara 0,26-0,31%. Adapun fertilitas sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kedua angka wanita usia produktif. Semua kabupaten/kota selama periode tahun 2020 sampai dengan 2045 mengalami fertilitas yang menurun dan tingkat fertilitas rendah terjadi pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Keerom, sedangkan kabupaten lainnya lebih tinggi walaupun masih dibawah standar angka fertilitas Indonesia.

2) Kematian

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk. dua komponen lainnya adalah kelahiran dan mobilitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan ukuran dari tinggi rendahnya tingkat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut, sehingga dengan memperhatikan trend dari tingkat mortalitas dimasa lampau yang terjadi di Provinsi Papua dan estimasi dimasa mendatang maka dapatlah kita membuat sebuah proyeksi penduduk pada pada kabupaten/kota di Provinsi Papua. Perhitungan angka mortalitas menggunakan Tingkat Kematian Bayi atau **Infant Mortality Rate (IMR)**, lebih jelasnya Tingkat Kematian Bayi menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel II.31 di bawah ini.

Tabel II. 27 Infant Mortality Rate (IMR) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045

No.	Kabupaten/Kota	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
1	Kota Jayapura	24,19	24,17	22,69	19,44	18,11	16,87
2	Kab. Jayapura	30,39	29,66	27,65	23,90	22,09	20,41
3	Kab. Sarmi	32,19	30,95	27,38	25,04	23,04	21,20
4	Kab. Keerom	32,19	31,25	27,80	25,31	23,38	21,59
5	Kab. Membramo Raya	37,16	35,84	31,90	28,52	26,13	23,94
6	Kab. Kepulauan Yapen	27,56	26,97	24,45	21,48	19,79	18,23
7	Kab. Biak Numfor	27,49	27,16	24,66	21,31	19,61	18,04
8	Kab. Waropen	32,67	31,71	28,33	25,42	23,40	21,54



9	Kab. Supiori	32,67	31,71	28,33	25,42	23,40	21,54
	PAPUA	30,84	30,02	27,12	24,02	22,12	20,38

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024*) dan Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**).

Tabel II.31 di atas menunjukkan bahwa, secara umum Tingkat Kematian Bayi di Provinsi Papua Tahun 2020 sebesar 30,84, yang berarti bahwa terdapat 30,84 bayi meninggal tiap 1.000 kelahiran atau sebesar 3,08% bayi meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa, Tingkat Kematian Bayi masih tinggi di Provinsi Papua, dimana menurut Referensi Biro Populasi Washington DC (1997), mortalitas lebih dari 2,00% dikategorikan tinggi. Jika dilihat dari Kabupaten/Kota, Tingkat Kematian Bayi tertinggi terjadi pada Kabupaten Supiori dan Waropen sebesar 3,27% dan terendah di Kota Jayapura sebesar 2,42%. Di Tahun 2045 diproyeksikan Tingkat Kematian Bayi disemua Kabupaten/Kota akan menurun dan terendah di Kota Jayapura sebesar 1,69%, disusul Kabupaten Biak Numfor (1,80%) dan Kabupaten Kepulauan Yapen (1,82%). Sedangkan 6 (enam) Kabupaten lainnya masih di atas 2,00%.

Tipologi Kabupaten/Kota berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 dapat dilihat pada tabel II.32 sampai dengan tabel II.37 berikut ini.

Tabel II.28 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2020

Fertilitas 1) / Mortalitas 1)	Fertilitas Tinggi	Fertilitas Rendah
Mortalitas Tinggi	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Tinggi (Kuadran I):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Tinggi (Kuadran II): Kota Jayapura Kab. Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Membramo Raya Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor Kab. Waropen Kab. Supiori
Mortalitas Rendah	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Rendah (Kuadran III):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Rendah (Kuadran IV):

Sumber : Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024

Empat kuadran pada tabel tipologi Kabupaten/Kota berdasarkan fertilitas dan mortalitas, dapat menunjukkan karakteristik tiap Kabupaten/Kota. **Karakteristik kuadran I** adalah daerah – daerah yang sedang mengalami perkembangan, dengan jumlah wanita usia menikah yang cukup tinggi dan pengetahuan tentang KB yang masih rendah menyebabkan daerah ini memiliki fertilitas tinggi. Namun, di sisi yang lain mortalitasnya juga tinggi ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan di daerah tersebut masih kurang memadai. **Karakteristik kuadran II** adalah daerah dimana pengetahuan mengenai Keluarga Bencana sudah dipahami namun pelayanan kesehatan belum memadai. **Karakteristik**

kuadran III adalah daerah – daerah yang berpotensi mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. **Karakteristik kuadran IV** merupakan daerah dengan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai dan pengetahuan tentang KB sudah baik. Rata- rata hasil perhitungan di Provinsi Papua berada di **Kuadran II**, hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan di Provinsi Papua pada masih relatif rendah, dimana 100,00% kabupaten/kota adalah daerah Tingkat Kelahiran Bayi rendah dan Tingkat Kematian Bayi tinggi, hal ini terjadi pada tahun 2020-2030, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.33 sampai dengan tabel II.34.

Tabel II.29 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2025

Fertilitas 1)		Fertilitas Tinggi	Fertilitas Rendah
Mortalitas 1)			
Mortalitas Tinggi	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Tinggi (Kuadran I):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Tinggi (Kuadran II): Kota Jayapura Kab. Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Membramo Raya Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor Kab. Waropen Kab. Supiori	
Mortalitas Rendah	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Rendah (Kuadran III):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Rendah (Kuadran IV):	

Sumber : Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024

Tabel II.30 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2030

Fertilitas 1)		Fertilitas Tinggi	Fertilitas Rendah
Mortalitas 1)			
Mortalitas Tinggi	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Tinggi (Kuadran I):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Tinggi (Kuadran II): Kota Jayapura Kab. Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Membramo Raya Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor Kab. Waropen Kab. Supiori	
Mortalitas Rendah	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Rendah (Kuadran III):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Rendah (Kuadran IV):	

Sumber : Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024

Pada Tahun 2035 yakni pada tabel II.35 terlihat bahwa delapan kabupaten atau 88,89% kabupaten masih berada pada kuadran II, yang berarti daerah dimana pengetahuan



mengenai Keluarga Bencana sudah dipahami namun pelayanan kesehatan belum memadai, sedangkan dua satu kota berada pada kuadran IV, yakni Kota Jayapura yang merupakan daerah dengan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai dan pengetahuan tentang KB sudah baik.

Tabel II.31 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2035

Fertilitas 1)		Fertilitas Tinggi	Fertilitas Rendah
Mortalitas 1)			
Mortalitas Tinggi	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Tinggi (Kuadran I):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Tinggi (Kuadran II): Kota Jayapura Kab. Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Membramo Raya Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor Kab. Waropen Kab. Supiori	
Mortalitas Rendah	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Rendah (Kuadran III):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Rendah (Kuadran IV): Kota Jayapura	

Sumber : Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024

Tabel II.32 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2040

Fertilitas 1)		Fertilitas Tinggi	Fertilitas Rendah
Mortalitas 1)			
Mortalitas Tinggi	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Tinggi (Kuadran I):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Tinggi (Kuadran II): Kab. Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Membramo Raya Kab. Waropen Kab. Supiori	
Mortalitas Rendah	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Rendah (Kuadran III):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Rendah (Kuadran IV): Kota Jayapura Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor	

Sumber : Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024

Tabel II.33 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Fertilitas dan Mortalitas Tahun 2045

Fertilitas 1)		Fertilitas Tinggi	Fertilitas Rendah
Mortalitas 1)			

Mortalitas Tinggi	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Tinggi (Kuadran I):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Tinggi (Kuadran II):	Kab. Jayapura
			Kab. Sarmi
			Kab. Keerom
			Kab. Membramo Raya
			Kab. Waropen
			Kab. Supiori
Mortalitas Rendah	Daerah Fertilitas Tinggi Mortalitas Rendah (Kuadran III):	Daerah Fertilitas Rendah Mortalitas Rendah (Kuadran IV):	Kota Jayapura
			Kab. Kepulauan Yapen
			Kab. Biak Numfor

Sumber : Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024

Tahun 2040-2045 atau pada Tabel II.32 sampai dengan Tabel II.37 di atas, terlihat bahwa Tingkat Kelahiran dan Tingkat Kematian sudah semakin membaik karena 33,33% Kabupaten/Kota berada pada Kuadran IV dari sebelumnya tahun 2020-2030 sebesar 0,00% dan tahun 2035 sebesar 11,11%.

3) Migrasi

Migrasi atau perpindahan permanen merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk selain fertilitas dan mortalitas. Namun, dibandingkan dengan data fertilitas dan mortalitas, data migrasi masih sangat langka. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan survei khusus untuk migrasi. Kejadian migrasi adalah kejadian demografi yang sangat jarang, tidak dialami oleh semua orang, sehingga data migrasi yang diperoleh dari survei umumnya kurang baik karena terbatasnya jumlah sampel. Sementara itu, data migrasi yang bersumber dari pencatatan administrasi masih jauh dari kesempurnaan sehingga data migrasi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045 menggunakan data dasar tahun 2020 dan tidak bisa diproyeksi.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Papua salah satunya adalah migrasi, tinggi rendahnya migrasi yang terjadi berarti menunjukkan bahwa di kabupaten/kota tersebut memiliki suatu daya tarik di bandingkan dengan daerah lain. Untuk lebih jelasnya migrasi penduduk di Provinsi Papua menurut Kabupaten/Kota berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel II.38 berikut ini.

Tabel II.34 Migrasi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Laki-Laki (L)		Perempuan (P)		Jumlah (L+P)		Migrasi Neto		Jumlah (L+P)
		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	L	P	
1	Kota Jayapura	93.094	11.638	81.802	10.281	174.896	21.919	81.456	71.521	152.977
2	Kab. Jayapura	20.623	37.508	18.245	32.722	38.868	70.230	(16.885)	(14.477)	(31.362)
3	Kab. Sarmi	4.383	1.495	3.829	1.506	8.212	3.001	2.888	2.323	5.211
4	Kab. Keerom	10.339	1.660	9.062	1.605	19.400	3.264	8.679	7.457	16.136
5	Kab. Membramo Raya	1.938	314	1.549	234	3.487	548	1.624	1.315	2.939



6	Kab. Kepulauan Yapen	7.493	10.789	6.368	10.066	13.861	20.854	(3.296)	(3.698)	(6.994)
7	Kab. Biak Numfor	8.793	18.764	8.918	18.916	17.711	37.680	(9.971)	(9.998)	(19.969)
8	Kab. Waropen	2.644	3.066	2.725	2.604	5.369	5.669	(422)	121	(301)
9	Kab. Supiori	917	417	1.394	499	2.310	916	500	895	1.395
	PAPUA	150.224	85.651	133.892	78.433	284.114	164.081	64.573	55.459	120.032

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023.

Tabel II.38 di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 jumlah penduduk masuk ke Provinsi Papua sebanyak 284.114 jiwa yang terdiri dari 150.224 laki-laki dan 133.892 jiwa perempuan, sedangkan migrasi keluar atau pindah sebanyak 164.081 jiwa yang terdiri 85.651 jiwa laki-laki dan 78.433 jiwa Perempuan, sehingga nilai migrasi neto sebesar 120.032 jiwa, yang terdiri dari 64.573 jiwa laki-laki dan 55.459 jiwa perempuan.

Ditinjau dari tiap Kabupaten/Kota, migrasi masuk yang tertinggi pada Kota Jayapura sebesar 174.896 jiwa yang terdiri dari 93.094 jiwa laki-laki dan 81.802 jiwa Perempuan, sedangkan migrasi keluar atau pindah sebesar 21.919 jiwa yang berasal dari 11.639 jiwa laki-laki dan 10.281 jiwa Perempuan, sehingga nilai migrasi netonya sebesar 152.977 jiwa, yang artinya pada tahun 2020 penambahan jumlah penduduk di Kota Jayapura sebesar 152.977 jiwa berasal dari migrasi, baik dari antar kabupaten di Provinsi Papua maupun dari luar Provinsi Papua. Migrasi masuk terkecil terjadi pada Kabupaten Supiori sebesar 2.310 jiwa sedangkan migrasi keluar terkecil ada pada Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 548 jiwa.

Pengurangan jumlah penduduk akibat migrasi keluar lebih besar dari pada migrasi masuk terjadi pada empat kabupaten, dari yang tertinggi ke rendah berturut-turut yaitu : (1) Kabupaten Jayapura sebesar 31.362 jiwa; (2) Kabupaten Biak Numfor 19.696 jiwa; (3) Kabupaten Kepulauan Yapen 6.994 jiwa dan; (4) Kabupaten Waropen 301 jiwa.

Empat kuadran pada tabel tipologi Kabupaten/Kota berdasarkan migrasi masuk dan migrasi keluar atau pindah di Provinsi Papua tahun 2020 disusun untuk mengetahui karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota dan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.39 berikut ini.

Tabel II.35 Tipologi Kabupaten/Kota Berdasarkan Migrasi Masuk dan Keluar

Datang		Datang Tinggi	Datang Rendah
Pindah	Pindah Tinggi	Daerah Datang Tinggi Pindah Tinggi (Kuadran I):	Daerah Datang Rendah Pindah Tinggi (Kuadran II): Kab. Jayapura Kab. Biak Numfor Kab. Kepulauan Yapen Kab. Waropen
	Pindah Rendah	Daerah Datang Tinggi Pindah Rendah (Kuadran III): Kota Jayapura Kab. Keerom Kab. Sarmi	Daerah Datang Rendah Pindah Rendah (Kuadran IV): Kab. Mamberamo Raya Kab. Supiori

Sumber : Hasil Analisis BAPPPERIDA Provinsi Papua, 2024.

Karakteristik kuadran I dinamika kependudukan yang tinggi, ada bangkitan aktivitas ekonomi namun juga bangkitan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan bangkitan di daerah lain, terlihat dari banyaknya jumlah yang pindah. **Karakteristik kuadran II** adalah daerah rawan karena kurangnya bangkitan/aktivitas ekonomi sehingga lebih banyak penduduk yang pindah dibandingkan dengan penduduk yang datang. **Karakteristik kuadran III** adalah daerah – daerah yang berpotensi mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, sekaligus memiliki aktivitas ekonomi yang kuat. **Karakteristik kuadran IV** merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi yang hanya mencukupi untuk skala lokal saja. Secara umum pada tahun 2020, Provinsi Papua ditipologikan pada Kuadran III, yaitu provinsi yang berpotensi mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, sekaligus memiliki aktivitas ekonomi yang kuat.

Tipologi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua paling banyak terdapat pada kuadran II atau sebesar 44,45%, kabupaten-kabupaten tersebut merupakan daerah rawan karena kurangnya bangkitan/aktivitas ekonomi sehingga lebih banyak penduduk yang pindah dibandingkan dengan penduduk yang datang. Sebanyak dua kabupaten (22,22%), yakni Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Supiori merupakan kabupaten-kabupaten dengan aktivitas ekonomi yang hanya mencukupi untuk skala lokal saja, selebihnya 33,33% merupakan kabupaten/kota yang berpotensi mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, sekaligus memiliki aktivitas ekonomi yang kuat.

2.1.5.6 Analisis Piramida Penduduk dan Angka Beban Tanggung (Dependency Ratio)

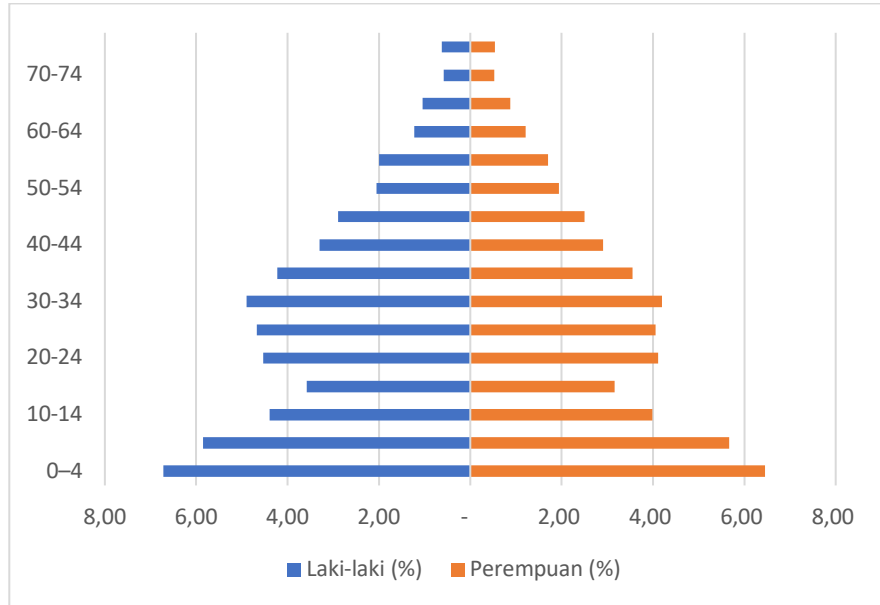
1) Piramida Penduduk

Piramida penduduk Provinsi Papua berdasarkan persentase jenis kelamin laki-laki dan Perempuan tahun 2020-2045 dapat dilihat pada gambar II.25 sampai dengan gambar II.30. Berdasarkan gambar piramida penduduk Provinsi Papua memiliki struktur piramida muda dengan kata lain, komposisi penduduk usia muda merupakan komposisi terbanyak dalam diagram cohort tersebut selama tahun 2020 sampai 2045, yakni 62,72% pada tahun 2020



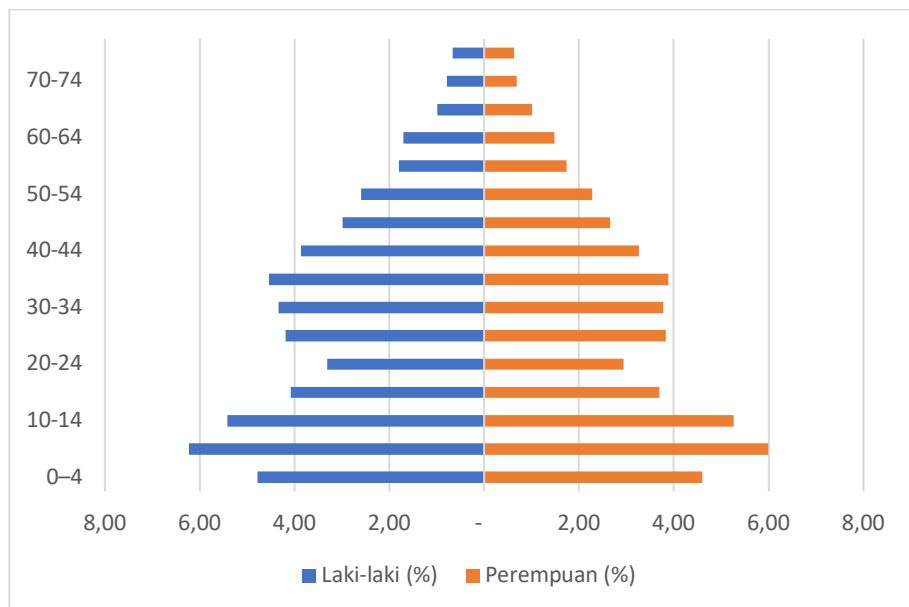
menjadi 71,52% tahun 2045 . Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum serta juga angka beban tanggung.

Gambar II.25 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2020 (Persen)



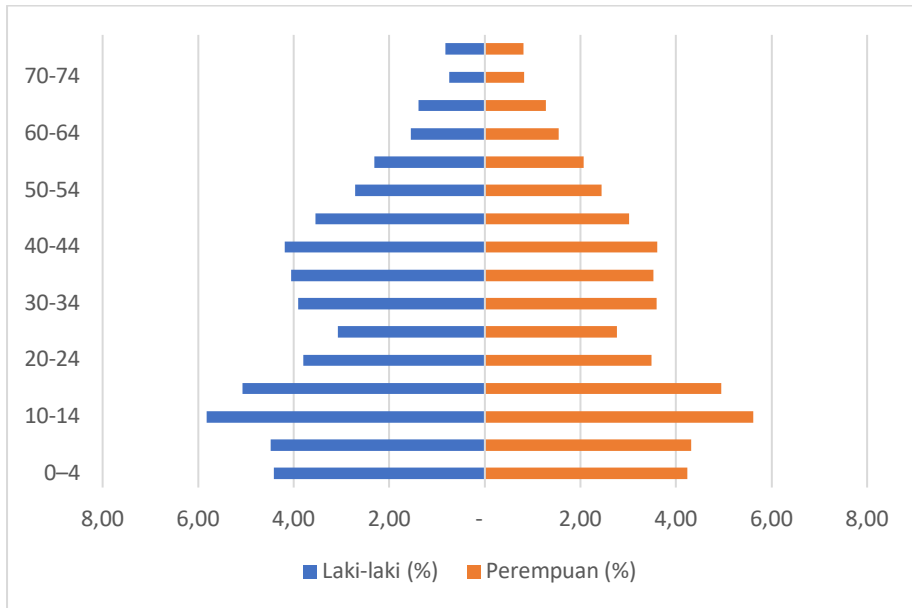
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 dan Diolah.

Gambar II.26 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2025 (Persen)



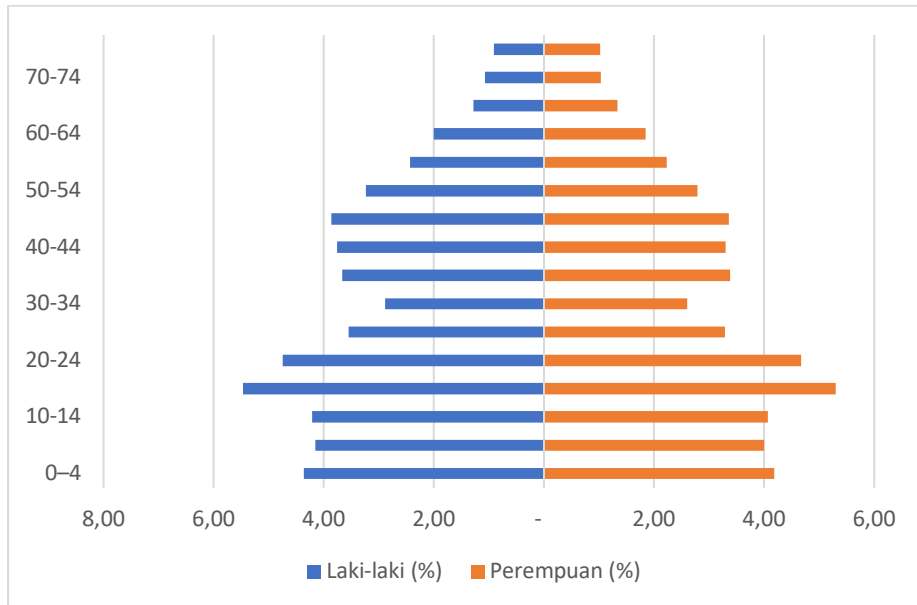
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 dan Diolah.

Gambar II.27 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2030 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 dan Diolah.

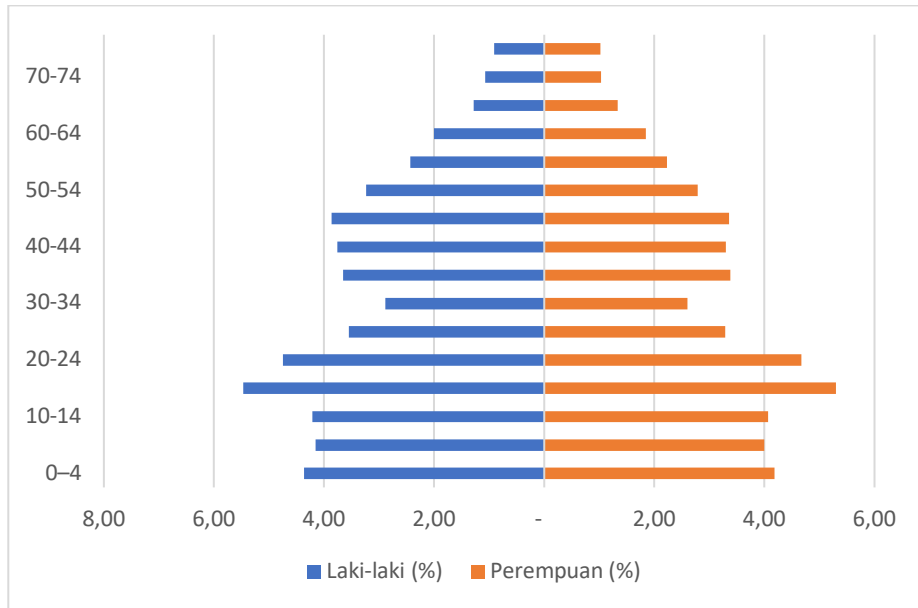
Gambar II.28 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2035 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 dan Diolah.

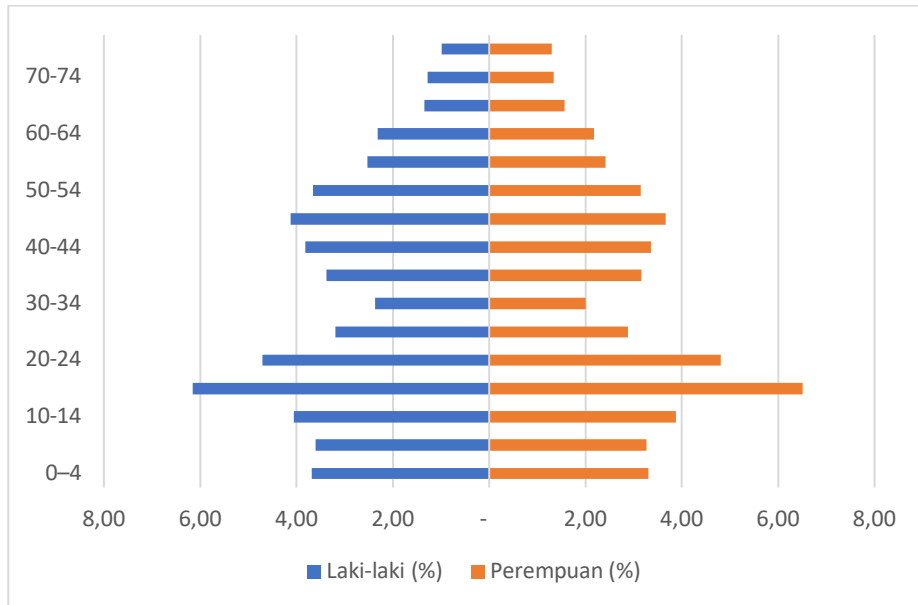


Gambar II.29 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2040 (Persen)



Sumber : Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024.

Gambar II.30 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Tahun 2045 (Persen)



Sumber : Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024.

Gambar II.25 sampai dengan Gambar II.30 di atas menunjukkan bahwa, berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk di Provinsi Papua adalah Tipe Ekspansif, yaitu sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini umumnya terdapat pada wilayah yang mempunyai angka kelahiran

dan angka kematian tinggi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya Tingkat kelahiran dan mulai menurunnya tingkat kematian.

2) Angka Beban Tanggung (Dependency Ratio)

Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk belum produktif secara ekonomis, kelompok penduduk umur 15-64 tahun sebagai kelompok produktif dan penduduk umur 65 tahun keatas sebagai kelompok penduduk yang tidak produktif lagi, maka Rasio Beban Tanggung (*Dependency Ratio*) dapat dihitung. Lebih jelasnya, Angka Beban Tanggung (Dependency Ratio) menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 dapat dilihat pada Tabel II.40 di bawah ini.

Tabel II.36 Angka Beban Tanggung (Dependency Ratio) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020-2045 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2020*	2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
1	Kota Jayapura	47,84	48,81	46,20	40,55	38,15	35,96
2	Kab. Jayapura	69,58	67,59	57,66	45,99	40,70	36,31
3	Kab. Sarmi	70,65	65,23	52,67	40,24	34,57	30,29
4	Kab. Keerom	67,25	65,89	56,74	42,51	37,59	33,75
5	Kab. Membramo Raya	57,53	60,57	58,93	57,51	57,75	58,26
6	Kab. Kepulauan Yapen	66,00	64,19	58,09	55,18	52,53	50,41
7	Kab. Biak Numfor	65,59	63,77	59,67	55,69	53,15	50,96
8	Kab. Waropen	80,38	74,86	60,13	47,04	39,55	33,42
9	Kab. Supiori	81,75	81,49	67,34	59,26	52,83	46,94
	PAPUA	66,80	65,38	57,30	48,99	44,74	41,21

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024*) dan Hasil Analisis BAPPERIDA Provinsi Papua, 2024**).

Apabila dihitung angka beban tanggung Provinsi Papua mencapai angka 66,80% tahun 2020 dan terus menurun hingga mencapai 41,21% tahun 2045, angka ini menandakan bahwa pada tahun 2020 setiap 100 orang penduduk menanggung 66,80 orang penduduk yang lain, dan terus menurun hingga tahun 2045 setiap 100 orang penduduk menanggung 41,21 orang penduduk lainnya, angka ini termasuk kategori rendah.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 ASPEK KESEJAHTERAAN EKONOMI

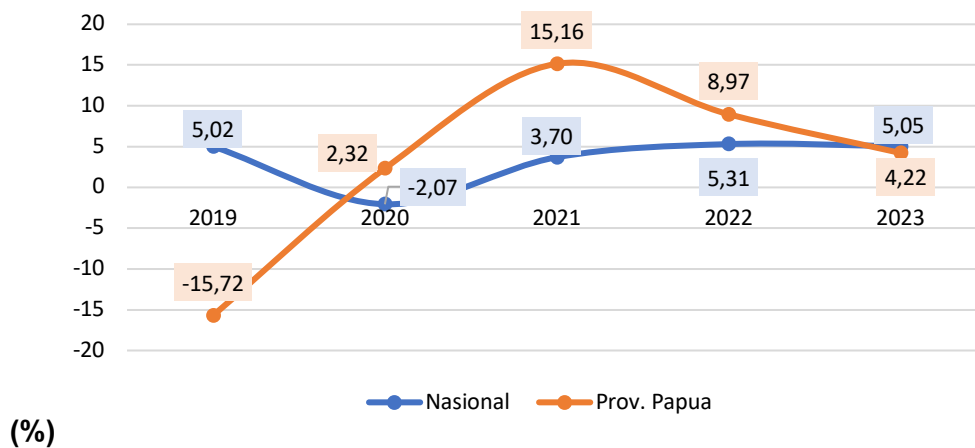
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua selama periode 2020-2023 menunjukkan trend pertumbuhan positif. Tahun 2020-2022 mengalami pertumbuhan diatas pertumbuhan ekonomi nasional kecuali untuk tahun 2023, pasca DOB, melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan pertumbuhannya sebesar 4,22 persen (berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional). Salah satu dampak dari pemekaran tersebut adalah berubahnya



struktur perekonomian daerah, PDRB Provinsi Papua hanya menghitung penciptaan nilai tambah dari kegiatan ekonomi di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua dan dengan bertumpu pada pada lapangan yang produksinya dalam bentuk jasa (sektor tersier) yang kontribusinya mencapai 61,2 persen terhadap perekonomian Provinsi Papua. Pada tahun 2023, kontribusi sektor primer yang berasal dari produksi PT Freeport Indonesia di Timika serta perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan di kawasan selatan Papua tidak dapat lagi dimasukkan dalam menghitung penciptaan nilai tambah kegiatan ekonomi di Provinsi Papua karena bukan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Papua.

Gambar II.31 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Papua *) Data tahun 2023 merupakan data pasca DOB (Data 9 Kabupaten/Kota)

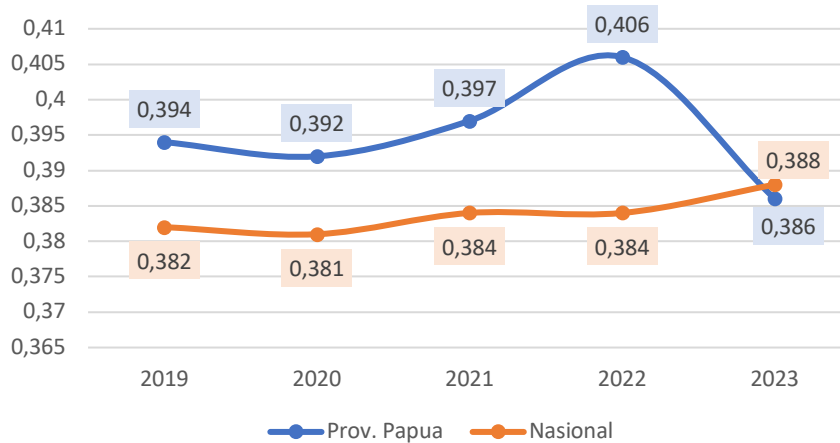
2.2.1.2 Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan pada suatu daerah secara menyeluruh. Indeks gini berada pada rentang 0 – 1. Semakin tinggi indeks gini maka semakin tinggi ketimpangan dan semakin rendah indeks gini maka semakin rendah ketimpangan. Nilai koefisien gini <0,4 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah; 0,4-0,5 berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang; dan >0,5 berada pada kategori tingkat ketimpangan tinggi.

Indeks gini Provinsi Papua pada Maret 2023 sebesar 0,386 atau mengalami penurunan sebesar 0,02 dibandingkan dengan Maret 2022. Capaian Provinsi Papua tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 0,388. Secara umum, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua selama periode tahun 2019-2023 berada pada

kategori tingkat ketimpangan rendah, kecuali tahun 2022 yang berada pada tingkat ketimpangan sedang.

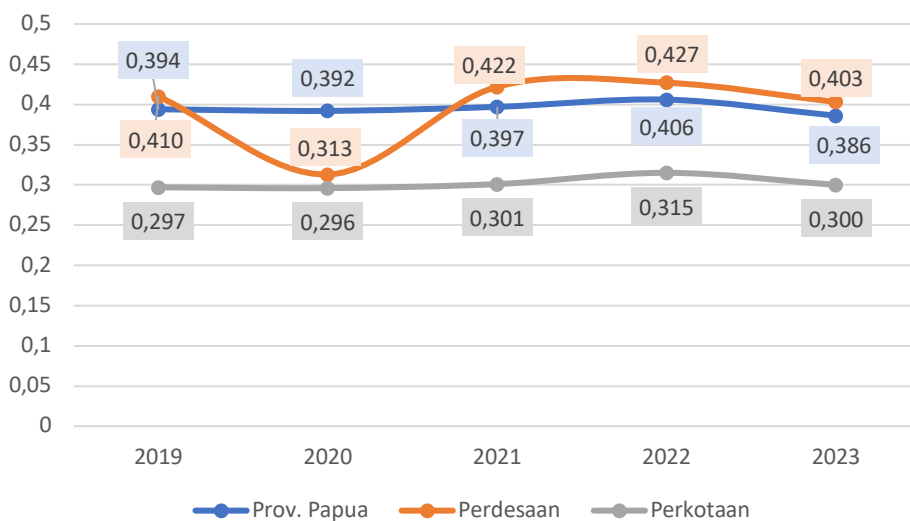
Gambar II... Indeks Gini Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Papua

Untuk wilayah perkotaan berada pada tingkat ketimpangan rendah dan untuk wilayah perdesaan berada pada tingkat ketimpangan sedang, kecuali tahun 2020 yang berada pada tingkat ketimpangan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan rendahnya ketimpangan di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan.

Gambar II... Indeks Gini Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua

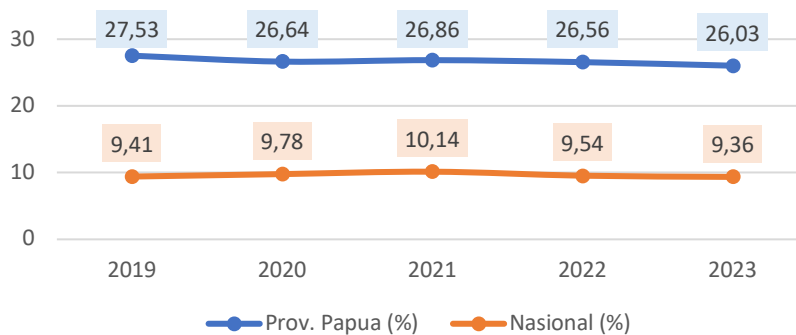


Untuk tahun 2023, Kabupaten/Kota yang memiliki indeks gini tertinggi adalah Kabupaten Waropen (0,407), kemudian diikuti oleh Kabupaten Keerom (0,381) dan Kabupaten Sarmi (0,372). Sedangkan yang terendah adalah Kota Jayapura (0,320). Secara keseluruhan, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah, kecuali Kabupaten Waropen yang berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang.

2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal

Kondisi kemiskinan di Provinsi Papua merupakan salah satu gambaran dari kondisi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua periode 2019-2023 cenderung menurun dan walaupun persentase kemiskinan Provinsi Papua masih jauh diatas nasional, namun dari sisi relevansinya sejalan dengan perubahan persentase kemiskinan nasional. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua tahun 2023 sebesar 149,55 ribu jiwa atau turun sebesar 3,56 ribu jiwa dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 153,11 ribu jiwa. Hal ini sama dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua tahun 2023 yang sebesar 26,03 persen atau menurun 0,53 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 26,56 persen.

Gambar II. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Papua

Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Papua tahun 2023 adalah Kabupaten Supiori sebesar 36,99 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 29,63 persen, Kabupaten Waropen sebesar 29,16 persen, dan Kabupaten Keerom sebesar 15,68 persen. Sedangkan yang terendah adalah Kota Jayapura sebesar 10,50 persen. Ditinjau dari tempat tinggal, maka tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 34,49 persen dan di perkotaan sebesar 5,68 persen.

Garis Kemiskinan sebagai indikator yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk masuk dalam kategori penduduk miskin atau tidak miskin, dimana penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah Garis Kemiskinan. Untuk tahun 2023, Garis Kemiskinan Provinsi Papua sebesar Rp 686.469/kapita/bulan. Angka ini meningkat sebesar Rp 57.294 jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 629.175/kapita/bulan. Kemudian, indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada Maret 2023 sebesar 6,25 atau meningkat sebesar 0,09 poin dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 6,16 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada Maret 2023 sebesar 2,15 atau meningkat sebesar 0,05 poin dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 2,10. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menurun karena semakin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin meningkat.

Berdasarkan data BPS, karakteristik keluarga miskin di Provinsi Papua per Maret 2023, sebagai berikut: wanita sebagai kepala rumah tangga wanita sebesar 7,67 persen; Rata-rata Lama Sekolah kepala keluarga sebesar 6,10 tahun; tingkat pendidikan kepala keluarga yang tertinggi adalah tidak tamat SD sebesar 40,89 persen dan yang terendah adalah tamat universitas sebesar 4,45 persen; serta sumber penghasilan utama rumah tangga tertinggi adalah dari pertanian sebesar 83,89 persen dan yang terendah adalah dari industri 0,74 persen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Papua yang termasuk dalam daftar Daerah Tertinggal, yaitu Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya di wilayah adat Mamta serta Kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori di wilayah adat Saereri. Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 5 (lima) penyebab ketertinggalan, yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah/daerah tertentu.

Tabel II.37 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)				
		1	2	3	4	5
1	Keerom	Aksesibilitas	Ekonomi	Keuangan	SDM	
	Mamberamo Raya	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM		
2	Waropen	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik	Keuangan
	Supiori	Ekonomi	Aksesibilitas	Keuangan	Karakteristik	SDM

Sumber: Strategis Daerah, Tahun 2022



Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan 54 kampung di Provinsi Papua sebagai kampung yang diprioritaskan dalam sasaran pembangunan kampung dan pembangunan daerah tertinggal serta daerah transmigrasi yang terdiri dari 8 (delapan) kampung dengan status berkembang dan 46 kampung dengan status tertinggal.

Tabel II.38 Kampung Prioritas Sasaran Pembangunan Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

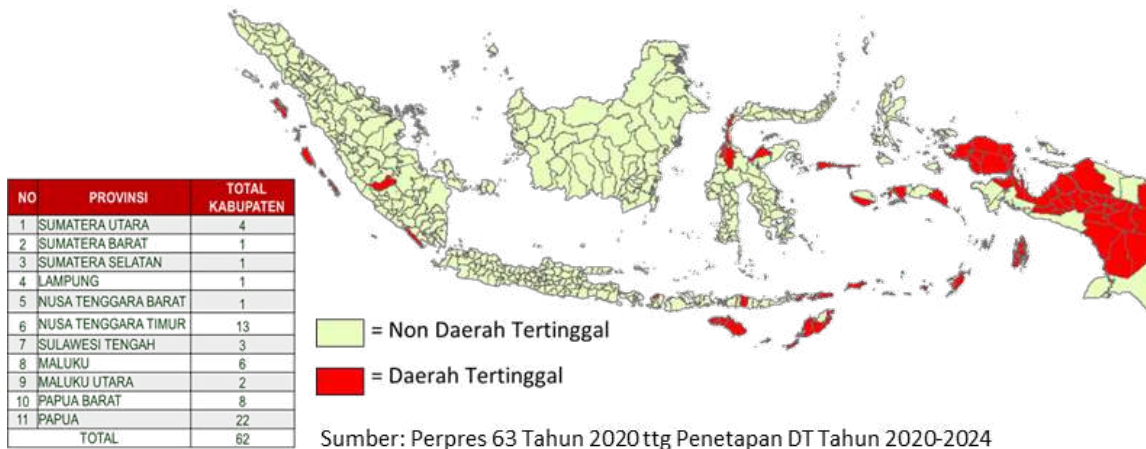
Wilayah Adat	Kabupaten	Distrik	Kampung	Status Perkembangan
MAMTA	Keerom	Web	Umuaf	Tertinggal
	Keerom	Web	Dubu	Tertinggal
	Keerom	Web	Yuruf	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Molof	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Senggi	Berkembang
	Keerom	Senggi	Warlef	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Jabanda	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Woslay	Berkembang
	Keerom	Waris	Kalimo	Tertinggal
	Keerom	Waris	Yuwainda	Tertinggal
	Keerom	Waris	Banda	Tertinggal
	Keerom	Waris	Kalifam	Tertinggal
	Keerom	Waris	Ampas	Tertinggal
	Keerom	Arso	Sawyatami	Tertinggal
	Keerom	Arso	UPT Pir III / Bagia	Tertinggal
	Keerom	Arso	Ubiyau	Tertinggal
	Keerom	Arso	Asiaman	Berkembang
	Keerom	Arso Timur	Kriku	Tertinggal
	Keerom	Skanto	UPT Arso XIV / Wulukubun	Berkembang
	Keerom	Skanto	Arsopura	Berkembang
	Keerom	Skanto	UPT Arso IX / Intaimilyan	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Waropen Atas	Barapasi	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ilir	Trimuris	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ilir	Warembori	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Burmeso	Berkembang
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ulu	Dabra	Tertinggal
SAERERI	Waropen	Waropen Bawah	Sawara Jaya SP VI	Berkembang

Wilayah Adat	Kabupaten	Distrik	Kampung	Status Perkembangan
	Waropen	Waropen Bawah	Waren Satu	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Waren Dua	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Sarafambai	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Nonomi	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Awaso	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Soimiangga	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Harapan Jaya SP II	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Demisa SP III	Tertinggal
	Waropen	Urei Faisei	Kemon Jaya SP V	Tertinggal
	Waropen	Urei Faisei	Apainabo	Tertinggal
	Waropen	Oudate	Botawa	Berkembang
	Waropen	Kirihi	Dairi	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Sooh	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Diwa	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kawari	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kuaisa	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Foida	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Dirou	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Antu Aru	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Wauka	Tertinggal
	Supiori	Supiori Selatan	Biniki	Tertinggal
	Supiori	Kepulauan Aruri	Rayori	Tertinggal
	Supiori	Supiori Utara	Warsa	Tertinggal
	Supiori	Supiori Utara	Warbor	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Koiryakam	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Wayori	Tertinggal
	Supiori	Supiori Timur	Douwbo	Tertinggal

Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No 126 Tahun 2017



Gambar II.31 Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024



Sumber : Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan DT Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Papua tahun 2023 adalah Kabupaten Supiori sebesar 36,99 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 29,63 persen, Kabupaten Waropen sebesar 29,16 persen, dan Kabupaten Keerom sebesar 15,68 persen.

Perkembangan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua hasil penilaian dari Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sampai dengan Tahun 2023 yang lalu menetapkan bahwa Kabupaten Supiori sudah siap entas dari ketertinggalan, sementara 3 Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen masih dalam posisi sebagai Daerah Tertinggal. Hal ini disebabkan karena 3 (tiga) kabupaten tersebut nilai Indek Pembangunan Manusia dan Persentasi Penduduk Miskinnya masih dibawah dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Namun demikian pada tahun 2024, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah tertinggal yang terentaskan Tahun 2020-2024. Dalam Keputusan Menteri tersebut dinyatakan sebanyak 26 daerah tertinggal yang terentaskan, dimana 2 kabupaten daerah tertinggal terentaskan tersebut diantaranya adalah Kabupaten Supiori dan Kabupaten Keerom.

Sehingga sampai dengan Tahun 2024 ini, masih terdapat 2 Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen, dengan kriteria ketertinggal, sebagai berikut :

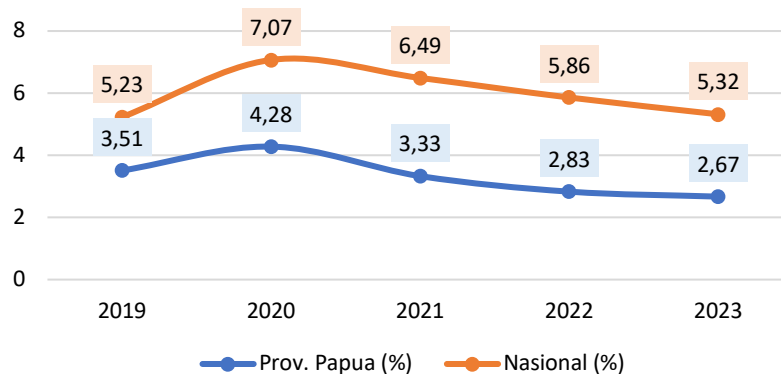
Tabel II.39 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Keteringgalan di Provinsi Papua

No.	Kab/Kota	Penyebab Utama Keteringgalan (Nomor Urut)					
		1	2	3	4	5	6
1	Mamberamo Raya	Sarpras	Aksesibilitas	Karakteristik daerah	Ekonomi	SDM	Keuangan daerah
2	Waropen	Sarpras	Aksesibilitas	Karakteristik daerah	-	SDM	Keuangan daerah

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua selama periode 2019-2023 mengalami perkembangan yang cenderung menurun. TPT tahun 2023 sebesar 2,67 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh pasar kerja. Selain itu, TPT Provinsi Papua juga selalu berada dibawah nasional selama periode tersebut.

Gambar II. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Papua

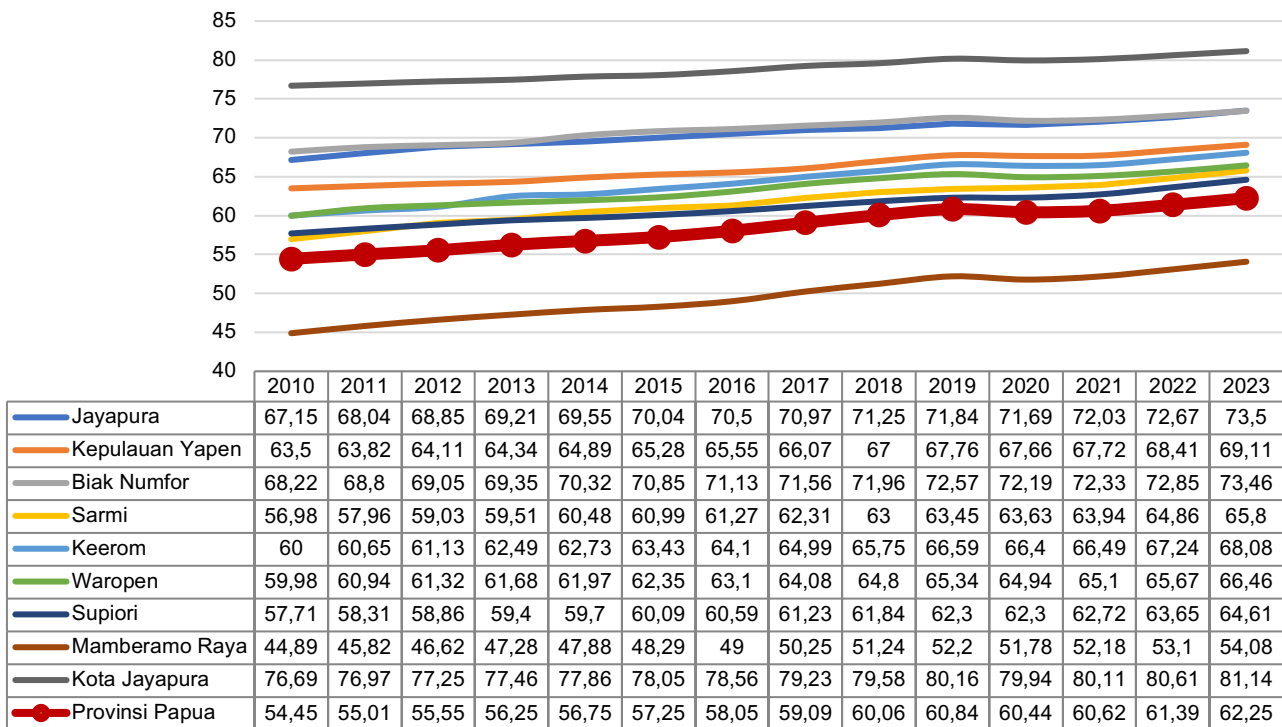
2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia pada kurun waktu 2010-2023. Hal tersebut membuat Provinsi Papua kini berstatus “sedang” dari status sebelumnya “rendah”. Berdasarkan gambar, Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Papua yang memiliki IPM



tertinggi pada tahun 2010-2023, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua sekaligus berada di bawah garis provinsi. IPM di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota dari tahun 2010-2023 ditunjukkan pada Gambar II.34

Gambar II.32 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2023

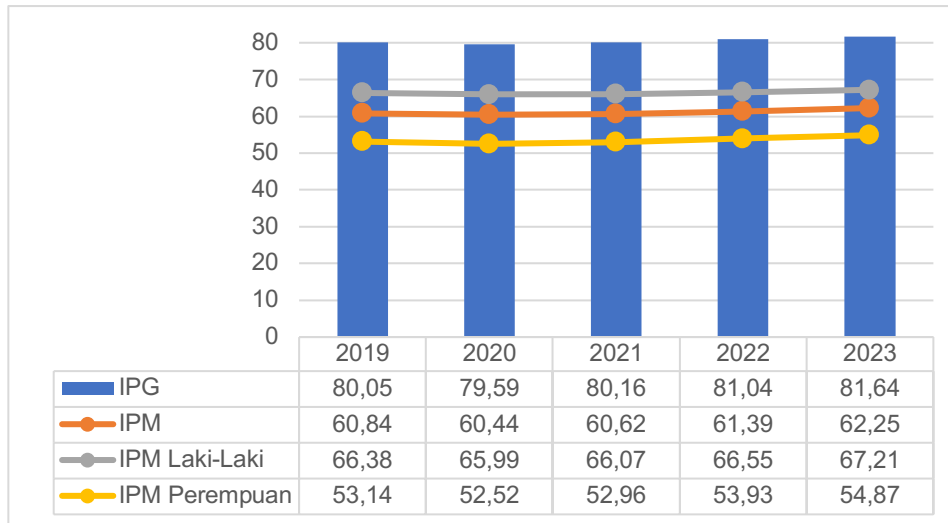


Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah)

Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IPM Provinsi Papua berdasarkan gender ditunjukkan pada Gambar II.35. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa IPM di Provinsi Papua pada tahun 2010-2023 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan di Provinsi Papua digambarkan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Diketahui juga bahwa IPG di Provinsi Papua masih berada di bawah angka 100 yang diartikan bahwa capaian Perempuan masih lebih rendah dibandingkan capaian laki-laki. Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami peningkatan IPG menuju 100 yang menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan yang terjadi antara Perempuan dan laki-laki di Provinsi Papua.

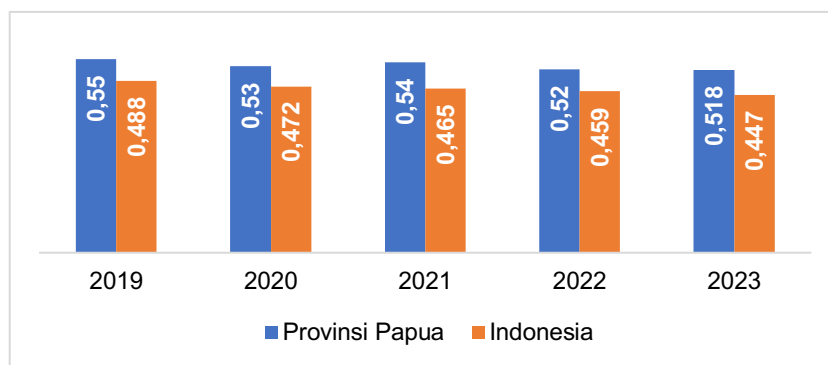
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua menunjukkan penurunan yang diartikan bahwa kesetaraan gender semakin membaik di Provinsi Papua yang ditunjukkan melalui Gambar II.36.

Gambar II.33 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Sumber: BPS RI, 2023 (data diolah)

Gambar II.34 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Sumber: BPS RI, (data diolah)

2.2.3 Angka Harapan Hidup

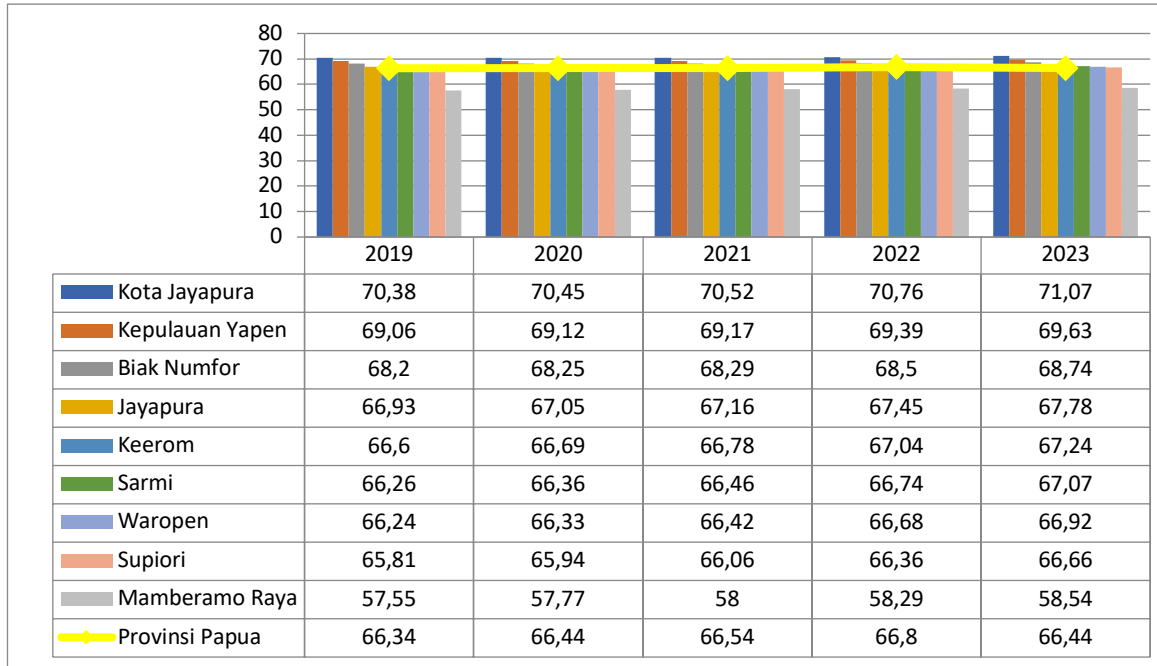
Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua dapat dilihat secara umum maupun berdasarkan jenis kelamin. AHH merupakan indikator penting dalam kesehatan yang dapat mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat umum pada waktu tertentu di level dampak sehingga AHH merupakan gambaran keadaan kesehatan di suatu wilayah. Faktor-faktor penentu tinggi rendahnya AHH antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu, ketersediaan pelayanan kesehatan, dan kondisi sosio-ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, AHH menjadi komponen di bidang kesehatan dalam menentukan angka Indeks Pembangunan Manusia. Semakin tinggi AHH menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Berdasarkan Gambar II.37, diketahui bahwa AHH baik secara provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2019-2023. Kota



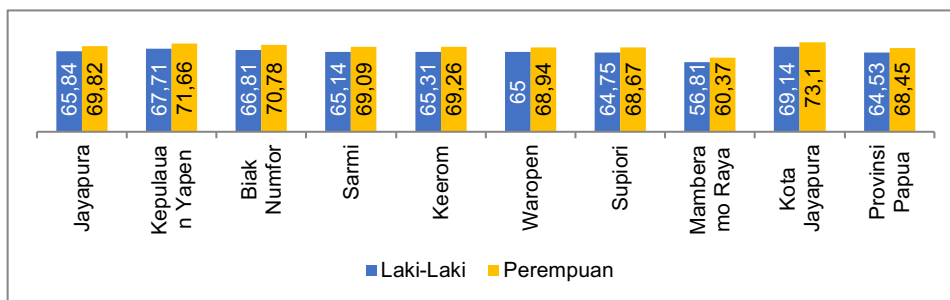
Jayapura menjadi kota di Provinsi Jayapura dengan tingkat AHH tertinggi, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah di Provinsi Papua. Terdapat kabupaten dengan AHH di bawah garis provinsi pada tahun 2023 di antaranya adalah Kabupaten Mamberamo Raya.

Gambar II.35 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Gambar II.36 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

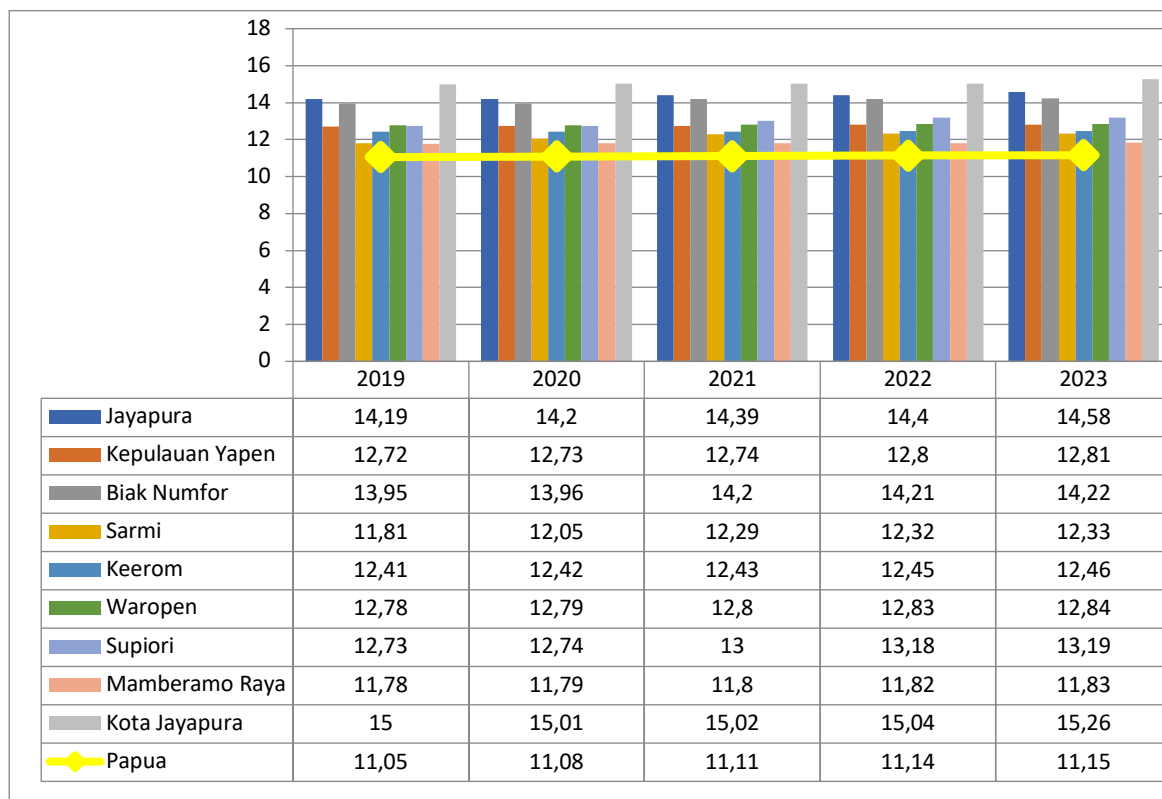
Berdasarkan Gambar II.38, diketahui bahwa Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan tingkat AHH tertinggi pada tahun 2023 untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan diikuti Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah pada tahun 2023 di Provinsi Papua untuk kedua jenis kelamin. Berdasarkan gambar juga diketahui bahwa AHH pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

2.2.4 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua dapat dilihat secara umum maupun berdasarkan jenis kelamin. HLS Provinsi Papua secara umum digunakan untuk melihat lamanya tahun bersekolah yang diharapkan dapat kemudian hari dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas.

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan suatu indikator untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk yang berada di usia sekolah oleh pemerintah. Berdasarkan kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, HLS dihitung bagi penduduk dari usia 7 tahun ke atas.

Gambar II.37 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

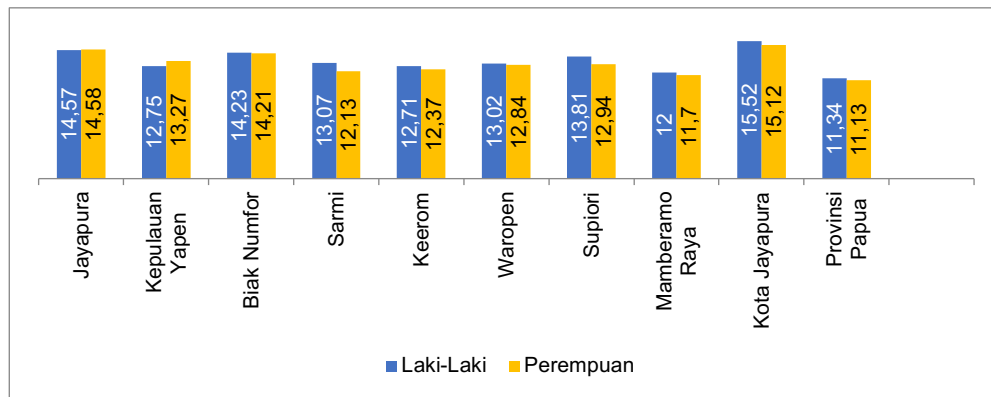
Berdasarkan Gambar II.39, HLS di Provinsi Papua mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. Hal tersebut membuktikan bahwa Provinsi Papua secara terus menerus meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendidikan bagi penduduk usia sekolah di atas 7 tahun di Provinsi Papua. Kenaikan secara Provinsi juga sudah diikuti dengan kenaikan HLS pada masing-masing kabupaten/kota yang ada.

Berdasarkan Gambar II.39, HLS Provinsi Papua ditunjukkan melalui masing-masing kabupaten/kota berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023. Diketahui bahwa, Kota



Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan angka HLS tertinggi untuk kedua jenis kelamin diikuti Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten di Provinsi Papua dengan angka HLS terendah pada tahun 2023. Angka HLS berdasarkan gender pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua diketahui telah berada di atas rata-rata provinsi.

Gambar II.38 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023



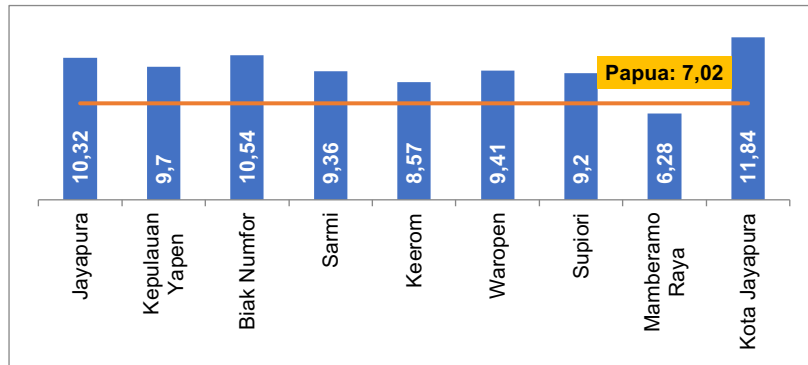
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

2.2.5 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan perhitungan jumlah tahun oleh penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar II.41.

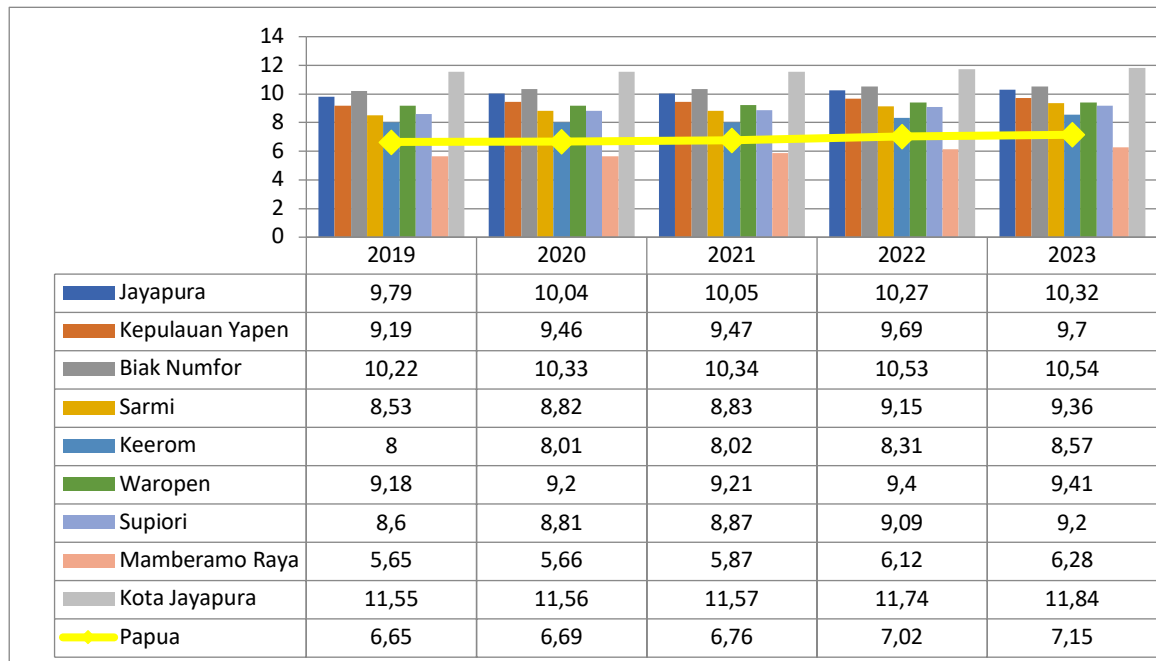
Berdasarkan Gambar II.41, mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua berada di atas rata-rata Provinsi. Masih terdapat kabupaten dengan RLS di bawah rata-rata Provinsi Papua yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. RLS tertinggi di Provinsi Papua adalah Kota Jayapura. Berdasarkan Gambar II.42, RLS di Provinsi Papua menurut masing-masing kabupaten/kota mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Secara kabupaten/kota, Kota Jayapura memiliki RLS tertinggi selama 5 tahun terakhir namun hal tersebut belum diikuti oleh Kabupaten Mamberamo Raya yang memiliki RLS masih di bawah RLS Provinsi Papua.

Gambar II.39 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Gambar II.40 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2022

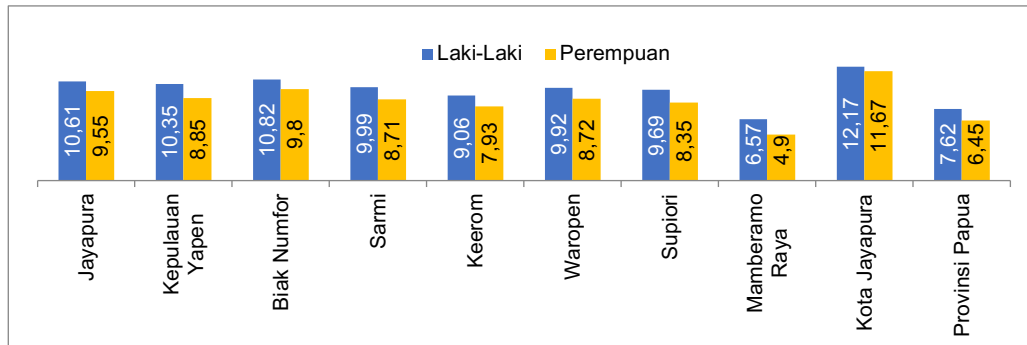


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Gambar II.43 menunjukkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Papua berdasarkan gender. Angka RLS tertinggi di Provinsi Papua untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 adalah Kota Jayapura. Sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan RLS berdasarkan gender terendah di Provinsi Papua. Kabupaten Mamberamo Raya juga menjadi kabupaten dengan capaian RLS yang masih berada di bawah garis rata-rata secara provinsi. Berdasarkan Gambar II.43 juga dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki cenderung mendominasi perolehan RLS berdasarkan gender di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Kota Jayapura cenderung memiliki capaian RLS yang hampir serupa untuk kedua jenis kelamin.



Gambar II.41 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023

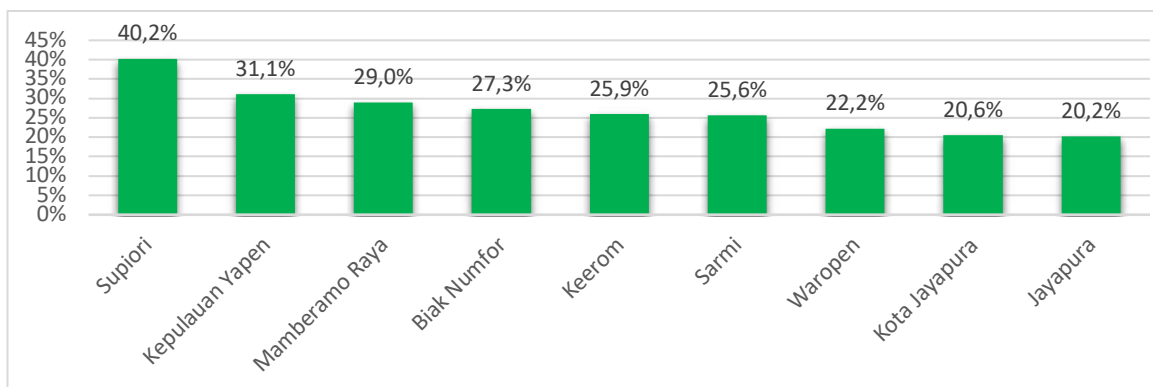


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

2.2.6 Prevalensi Stunting

Stunting adalah keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek berdasarkan tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, atau disebut 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Gambar II.42 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Survey Status Gizi Indonesia, 2022

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi balita stunting di 9 kabupaten di Provinsi Papua rata-rata sebesar 26,9%. Tidak tersedia angka prevalensi untuk Provinsi Papua pasca pembentukan DOB, sebab survei dilakukan sebelum pemekaran provinsi. Berdasarkan kabupaten, prevalensi tertinggi balita stunting terdapat di Kabupaten Supiori yakni 40,2%, dan terendah di Kabupaten Jayapura sebesar 20,2%. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang angka balita stuntingnya di bawah angka nasional, 21,6%. Tujuh kabupaten lainnya menunjukkan prevalensi di atas angka nasional.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

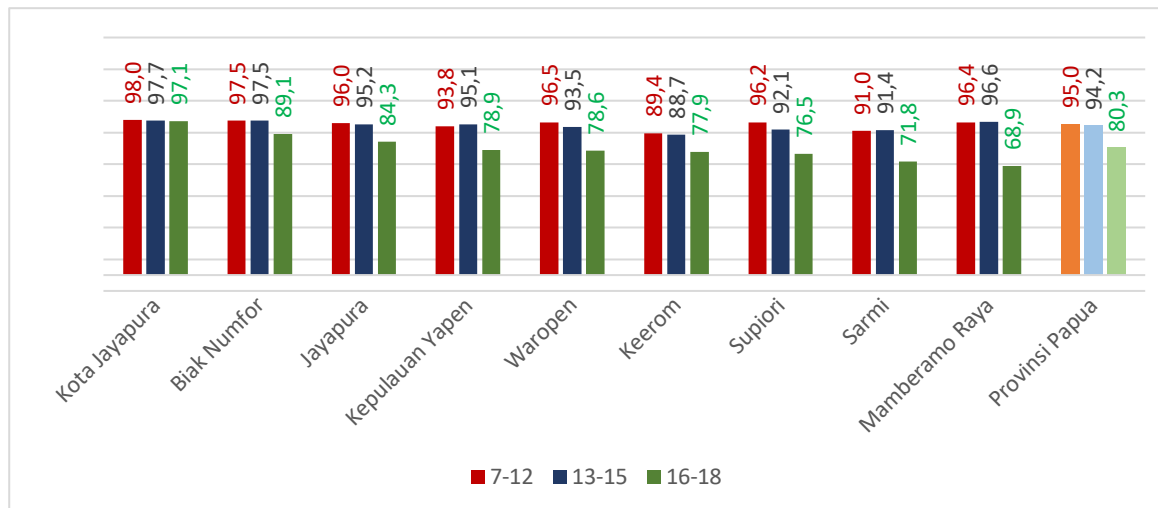
2.3.1.1 Pendidikan

1) Partisipasi Sekolah

Tingkat keikutsertaan penduduk di Provinsi Papua dalam pendidikan formal yang dinyatakan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara umum tidak jauh tertinggal daripada capaian nasional. APS menunjukkan jumlah dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok umur yang sama. APS cenderung menurun dengan makin tingginya kelompok umur penduduk yang juga menunjukkan jenjang Pendidikan yang sedang ditempuh. APS di Provinsi Papua pada tahun 2021 pada kelompok usia 7-12 tahun menunjukkan angka 95,0%, lebih rendah daripada angka nasional 99,1%. Sedangkan untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 94,2% sedikit lebih rendah daripada angka nasional 95,8%. Sementara APS untuk kelompok usia 16-18 tahun, lebih tinggi daripada angka nasional yakni 80,3% (nasional: 70,7%)

Jika dilihat angka-angka kabupaten/kota, APS tertinggi untuk ketiga kelompok umur terdapat di Kota Jayapura, sedangkan kabupaten dengan angka terendah yaitu Sarmi dan Mamberamo Raya. Berikut grafik yang menunjukkan APS per kabupaten/kota dan Provinsi.

Gambar II.43 Angka Partisipasi Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

2) Fasilitas Pendidikan

Pada tahun ajaran 2021-2022, fasilitas pendidikan yang terdapat di Provinsi Papua adalah 237 unit TK/RA, 849 unit SD/MI, 279 unit SMP/MTs, 168 unit SMA/SMK/MA dan 30 unit Perguruan Tinggi. Sebaran fasilitas Pendidikan berdasarkan kabupaten/kota cukup merata,



kecuali perguruan tinggi hanya terdapat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Biak Numfor.

Tabel II.40 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua Tahun Ajaran 2021/2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan				
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT
1	Jayapura	52	141	50	34	5
2	Kepulauan Yapen	14	124	36	18	3
3	Biak Numfor	18	167	55	26	6
4	Sarmi	6	65	19	9	0
5	Keerom	51	81	20	13	0
6	Waropen	2	54	18	8	0
7	Supiori	29	40	13	8	0
8	Mamberamo Raya	2	71	20	6	0
9	Kota Jayapura	63	106	48	46	16
Total		237	849	279	168	30

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2023

2.3.1.2 Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi

Salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, AKB di Provinsi Papua sebelum pemekaran Provinsi sebesar 38,2 per 1.000 Kelahiran Hidup. Angka ini lebih dari 2 kali lipat angka nasional yang besarnya 16,9 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Tabel II.41 Angka Kematian Bayi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah kematian bayi	Jumlah kelahiran hidup	AKB
1	Sarmi	0	235	0,00
2	Mamberamo Raya	0	86	0,00
3	Kota Jayapura	10	4.955	2,02
4	Jayapura	12	2.041	5,88
5	Supiori	3	387	7,75
6	Biak Numfor	14	1.453	9,64
7	Keerom	13	793	16,39
8	Kepulauan Yapen	37	2.010	18,41
9	Waropen	2	30	66,67
Provinsi Papua		91	11.990	7,59

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021

2) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian IBU (AKI) adalah indikator penting lainnya dalam mengukur derajat Kesehatan Masyarakat. AKI adalah banyaknya kematian perempuan sejak saat hamil hingga 42 hari sejak berakhirnya kehamilan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, AKI di Provinsi Papua sebelum pembentukan DOB adalah 565 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 3 kali lebih tinggi daripada angka nasional yakni 189 per 100.000 kelahiran hidup

Laporan Dinas Kesehatan Tahun 2021 menunjukkan angka yang lebih rendah daripada angka nasional. Sama halnya dengan angka kematian bayi, ada kemungkinan pencatatan dan pelaporan dari tingkat kabupaten ke bawah tidak cukup lengkap dan teratur sehingga terdapat perbedaan antara angka laporan Dinas Kesehatan dan angka hasil sensus penduduk.

Tabel II.42 Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah kematian ibu	Jumlah kelahiran hidup	AKI
1	Sarmi	0	235	0
2	Mamberamo Raya	0	86	0
3	Kota Jayapura	4	4.955	81
4	Biak Numfor	2	1.453	138
5	Kepulauan Yapen	3	2.010	149
6	Jayapura	4	2.041	196
7	Supiori	1	387	258
8	Keerom	4	793	504
9	Waropen	1	30	3333
Provinsi Papua		19	11.990	158

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021

3) Fasilitas Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas di Provinsi Papua jika dilihat dari sebaran wilayah telah cukup memadai, yakni telah tersedia setidaknya 1 Rumah Sakit di setiap kabupaten, serta jumlah puskesmas berdasarkan jumlah distrik di tiap kabupaten/ kota. Tabel berikut menampilkan jumlah RS dan Puskesmas di tiap kabupaten pada tahun 2022.

Tabel II. 43 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum	Puskesmas
Jayapura	1	21
Kepulauan Yapen	1	15
Biak Numfor	3	21
Sarmi	1	11
Keerom	1	10
Waropen	1	10
Supiori	1	5
Mamberamo Raya	1	11
Kota Jayapura	8	13
Papua	18	117

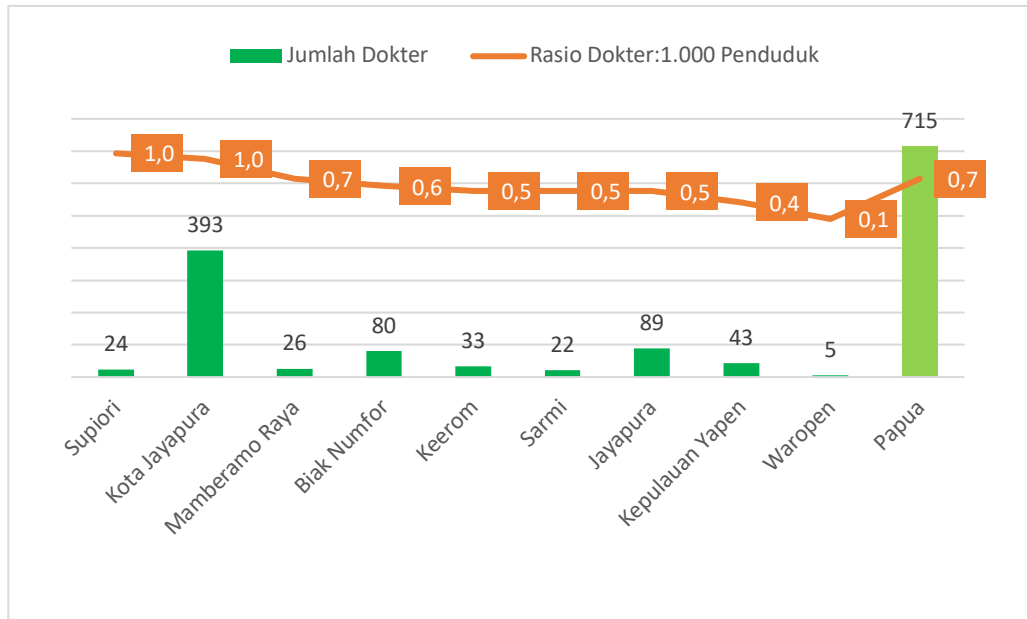
Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023

4) Tenaga Kesehatan

Sebaran tenaga Kesehatan berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan jumlah yang belum memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Dari segi kuantitas, tenaga perawat dan bidan menunjukkan jumlah yang cukup tinggi di semua kabupaten/ kota, seperti ditunjukkan oleh Tabel II.53. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, untuk tenaga dokter umum baru 2 kabupaten yang telah memenuhi standar WHO yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk, yakni Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura. Dalam tingkat provinsi, rasio dokter per 1000 penduduk baru mencapai 0,7.



Gambar II.44 Rasio Dokter Umum per 1.000 Penduduk Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023 (diolah)

Tabel II.44 Jumlah Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Jayapura	89	461	241	74	51
Kepulauan Yapen	43	411	134	36	28
Biak Numfor	80	556	266	58	30
Sarmi	22	196	139	20	13
Keerom	33	234	114	30	29
Waropen	5	133	38	7	8
Supiori	24	177	71	15	13
Mamberamo Raya	26	130	58	12	8
Kota Jayapura	393	1 293	305	193	95
Papua	715	2298	1366	445	275

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jaringan Jalan dengan kondisi aksesibilitas yang paling baik di Provinsi Papua terdapat pada Kabupaten Jayapura dengan total 384,1 km (31,42%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Kabupaten Sarmi merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua dengan 37,7 km (3,08%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua sebagaimana tersaji pada Tabel II.54.

Tabel II.45 Panjang Jalan di Provinsi Papua (km)

Kabupaten/Kota	Aspal	Lainnya	Total
Jayapura	178	206,1	384,1
Kepulauan Yapen	58	117,01	175,01

Kabupaten/Kota	Aspal	Lainnya	Total
Biak Numfor	164,4	7,6	172
Sarmi	0	37,7	37,7
Keerom	12	79,8	91,8
Waropen	45,5	57	102,5
Supiori	30	49,21	79,21
Mamberamo Raya	0	75,6	75,6
Kota Jayapura	96,38	8	104,38
Provinsi Papua	584,28	638,02	1.222,3

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023 (Data diolah)

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Jumlah rumah layak huni selama tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel II.55.

Tabel II. 46 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2022

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Swadaya (Unit)		1000	1680	2700	1768	1840	380	1089
1	Biak Numfor	300	320	450	160	100	-	35
2	Jayapura	200	-	725	431	261	66	162
3	Keerom	-	-	615	190	100	129	177
4	Kepulauan Yapen	-	-	290	166	250	165	165
5	Mamberamo Raya	-	270	-	70	150	-	-
6	Sarmi	-	200	-	196	185	-	-
7	Supiori	200	550	-	180	100	-	-
8	Waropen	-	190	160	170	250	-	-
9	Kota Jayapura	300	150	460	205	444	20	550
Rumah Khusus		247	129	35	25	61	0	20
1	Biak Numfor	87	25	10	-	-	-	-
2	Jayapura	50	25	25	-	12	-	-
3	Keerom	-	-	-	25	-	-	-
4	Kepulauan Yapen	110	25	-	-	-	-	20
5	Mamberamo Raya	-	25	-	-	-	-	-
6	Sarmi	-	10	-	-	20	-	-
7	Supiori	-	19	-	-	-	-	-
8	Waropen	-	-	-	-	29	-	-
9	Kota Jayapura	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan PSU							295	546
1	Biak Numfor	-	-	-	-	-	-	-
2	Jayapura	-	-	-	-	-	60	92
3	Keerom	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepulauan Yapen	-	-	-	-	-	-	-
5	Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-
6	Sarmi	-	-	-	-	-	-	-
7	Supiori	-	-	-	-	-	-	-



No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8	Waropen						-	-
9	Kota Jayapura						235	454

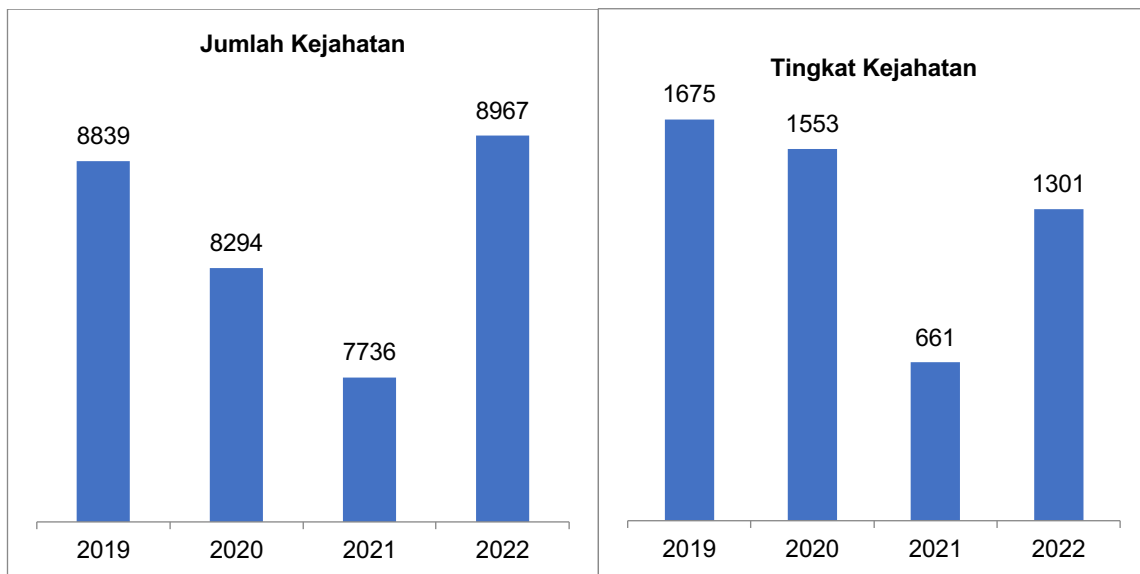
Sumber : data RTLH dari aplikasi e-RTLH yang sudah di input oleh Kabupaten/ Kota (Periode 12 September 2022)

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Tindak Kejahatan

Perkembangan tindak kejahatan terlihat dari rasa aman yang dirasakan masyarakat. Data dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, yang diartikan bahwa semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin tinggi risiko masyarakat terhadap tindak pidana yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Dalam konteks lebih luas, terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Gambar II.47 menunjukkan jumlah kejahatan dan tingkat risiko kejahatan di Papua tahun 2019-2022.

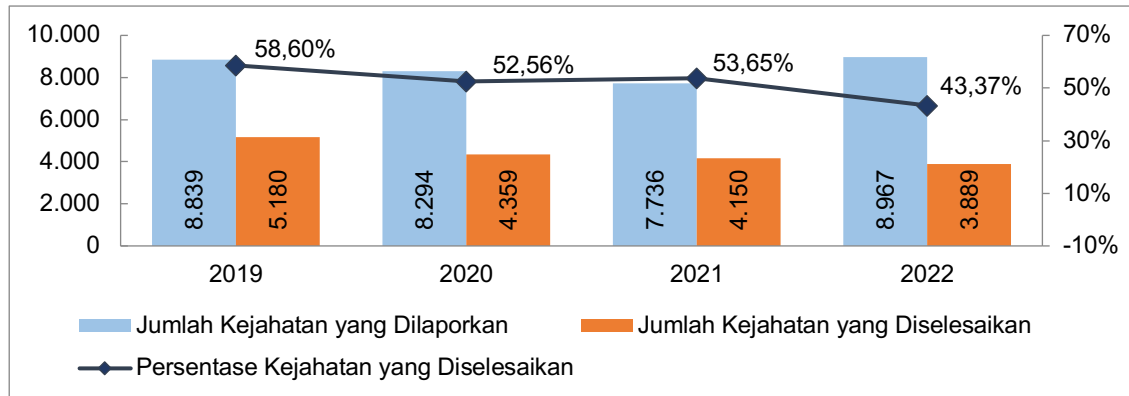
Gambar II.45 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Gambar II.48 menunjukkan jumlah kejahatan sempat mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 7.736 kejadian. Jumlah kejahatan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 8.967 kejadian. Tingkat kejahatan juga mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 661 kejadian namun kembali meningkat menjadi 1.301 kejadian pada tahun 2022. Adapun jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022, dapat diselesaikan dengan capaian 43,37%. Persentase tersebut cenderung menurun bila dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 53,65%.

Gambar II.46 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Selang waktu terjadinya tindak kejahatan (*crime clock*) pada tahun 2019 adalah 01.00'32" (1 jam 32 detik) yang kemudian memanjang menjadi sebesar 1.03'32" (1 jam 3 menit 32 detik) pada tahun 2020. Interval terjadinya tindak kejahatan juga menjadi semakin panjang yaitu pada tahun 2021 menjadi sebesar 01.07'56" (1 jam 7 menit 56 detik). Berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya, interval pada tahun 2022 memendek menjadi 00.58'37" (58 menit 37 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.

Tabel II.47 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

Jenis Kejahatan		Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan				Persentase yang Diselesaikan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan	35	35	39	51	21	20	30	34	60	57,14	76,92	66,76
Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Ringan												
	Penganiayaan Berat	1482	1446	1538	1513	1081	986	1155	956	72,94	68,19	75,1	63,19
	Kekerasan dalam Rumah Tangga												
Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan	110	85	110	91	80	57	99	67	72,73	67,06	90	73,63
	Pencabulan												
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan												
	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan												
	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)												



Jenis Kejahatan		Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan				Persentase yang Diselesaikan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian	3679	3936	3611	4079	1831	1733	1531	1353	49,77	44,03	42,4	33,17
	Pencurian dengan pemberatan												
	Pencurian Kendaraan Bermotor												
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang												
	Pembakaran dengan Sengaja												
	Penadahan												
Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika	110	133	68	96	109	124	57	86	99,09	93,23	83,82	89,58
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/ Perbuatan Curang	1226	1167	1035	1099	745	606	471	935	60,77	51,93	45,51	85,08
	Penggelapan												
	Korupsi												
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum	113	177	287	118	67	42	203	50	59,29	23,73	70,73	42,37

Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Tabel II.56, diketahui bahwa jenis kejahatan dengan jumlah laporan tertinggi adalah Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang. Pada tahun 2022, jumlah laporan terkait kejahatan ini menembus sebanyak 4.079 laporan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3.611 laporan. Meskipun kejahatan jenis ini memiliki jumlah laporan tertinggi, namun jumlah maupun persentase yang diselesaikan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Pada tahun 2022, jenis kejahatan ini mampu diselesaikan dengan persentase 33,17% berkurang dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 42,4%. Kejahatan terhadap fisik dan badan juga menjadi jenis kejahatan dengan laporan terbanyak. Pada tahun 2022, jumlah laporan kejahatan jenis ini mencapai 1.513 laporan. Jumlah laporan cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 namun meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2019 dan 2020 yang berkisar pada angka 1400-an laporan. Kejahatan terkait narkotika menjadi salah satu kejahatan dengan jumlah maupun persentase tertinggi yang diselesaikan. Pada tahun 2019, diketahui bahwa sebesar 99,09% jenis kejahatan ini dapat diselesaikan sebelum mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 83,82% dan kembali meningkat menjadi 89,58% pada tahun 2022.

Tabel II.48 Karakteristik Penduduk Papua Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

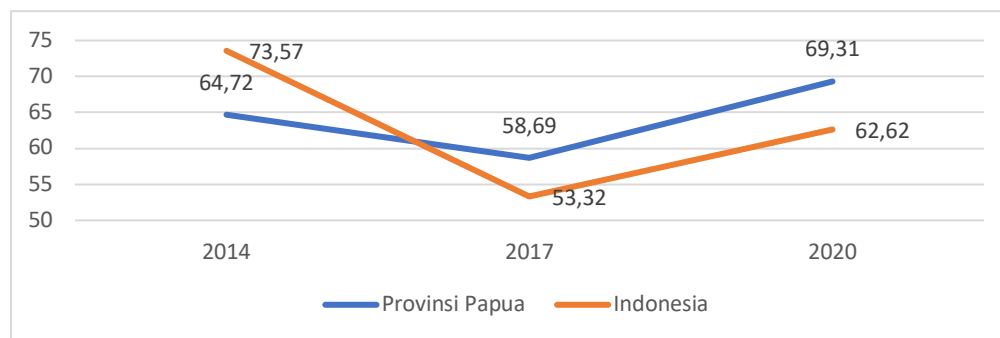
Korban Kejahatan	Laki-Laki				Perempuan			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Terhadap Nyawa	87,1	73,91	76,19	95,83	12,9	26,09	23,81	4,17
Terhadap Fisik/Badan	67,02	75,66	63,66	80,53	32,98	24,34	36,34	19,47
Terhadap Kesusilaan	1,59	0	4,29	54,84	98,41	100	95,71	45,16

Korban Kejahatan	Laki-Laki				Perempuan			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	66,67	63,39	62,07	86,05	33,33	36,61	37,93	13,95

Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Tabel II.57, diketahui bahwa mayoritas korban kejahatan terhadap nyawa, fisik/badan, dan hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Sebaliknya, korban kejahatan terhadap kesusilaan terjadi paling banyak terhadap jenis kelamin perempuan.

Gambar II.47 Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Papua Tahun 2014-2020



Sumber: Susenas Modul Hansos dalam BPS, 2020

Unsur rasa aman juga menjadi kebutuhan dan hak dasar setiap orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh sebab itu, rasa aman diperlukan sebagai dasar ketertiban Masyarakat untuk mencapai perencanaan Pembangunan khususnya di Provinsi Papua. Berdasarkan data Susenas Modul Hansos pada Gambar II.49, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Papua adalah sebesar 69,31 pada tahun 2020. Proporsi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2017 dengan proporsi sebesar 58,69.

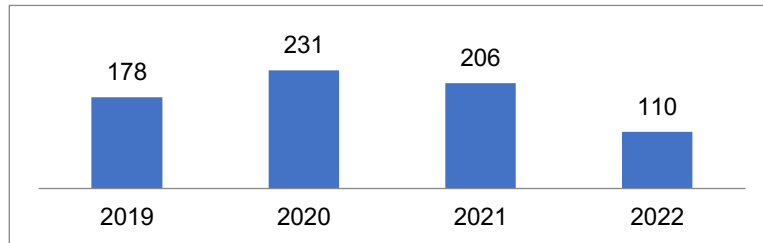
2) Unsur Penegak Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Aspek pertahanan keamanan merupakan faktor hakiki guna menjamin kelangsungan hidup negara. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Salah satu faktor tersebut adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk di Provinsi Papua yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok apabila hubungan antar kelompok tidak dikelola dengan baik. Jumlah personil keamanan (Polisi) juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Jumlah



personil keamanan yang mencukupi akan semakin memudahkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan.

Gambar II.48 Rasio Penduduk Terhadap Personil Polisi di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

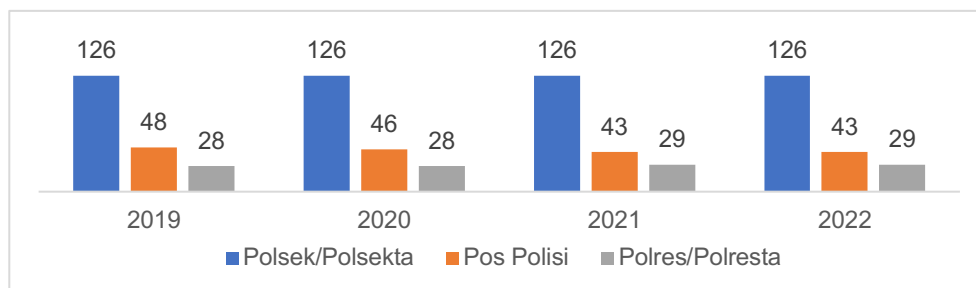


Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Gambar II.50, diketahui bahwa pada tahun 2022 rasio penduduk terhadap personil polisi di Provinsi Papua adalah 1:110. Hal ini diartikan bahwa 1 polisi berbanding 110 penduduk di Papua. Pada kondisi ideal, rasio polisi dan penduduk adalah 1:350, yang artinya 1 polisi berbanding 350 penduduk. Berdasarkan hal tersebut, maka rasio penduduk terhadap polisi di Provinsi Papua sudah mencapai kondisi ideal tiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

Keamanan suatu wilayah juga perlu ditinjau berdasarkan sarana keamanan yang ada. Jumlah sarana keamanan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.51. Jumlah Polsek/Polsekta tetap sama sejak tahun 2019 hingga 2022. Jumlah pos polisi mengalami penurunan dari 48 unit di tahun 2019 menjadi 43 unit pada tahun 2022. Sementara Polres/Polresta mengalami penambahan 1 unit pada tahun 2021 menjadi 29 unit.

Gambar II.49 Jumlah Sarana Keamanan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

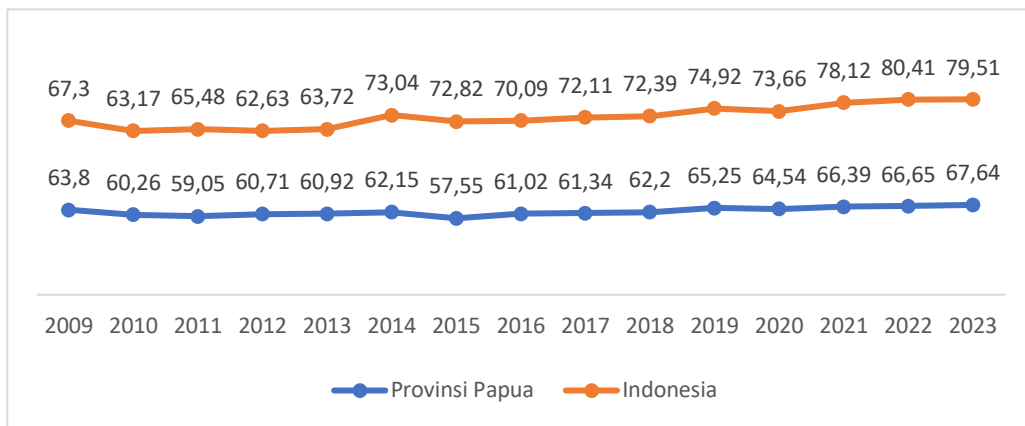
Guna menjaga ketentraman, ketertiban, dan melindungi masyarakat, diperlukan adanya campur tangan masyarakat dan pemerintah. Unsur pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Salah satu prasyarat dalam pelaksanaan pembangunan adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib. Pengamanan dari Satpol PP dan personil Linmas dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut khususnya pada lokasi yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Di lain sisi, diperlukan juga kesadaran serta kepatuhan masyarakat untuk mendukung hal tersebut.

3) Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit untuk menunjukkan tingkat perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2009-2023, IDI Provinsi pernah mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga mencapai angka dibawah angka 60. Perkembangan IDI di Provinsi Papua ditunjukkan melalui Gambar II.52.

Gambar II.50 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Tahun 2009-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020

Per tahun 2021, perhitungan IDI sudah menggunakan metode baru dengan 3 aspek penyusun yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia dalam BPS, pada tahun 2021 IDI di Provinsi Papua mencapai angka 66,39 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 66,65, dan pada tahun 2023 naik menjadi 67,64. Kenaikan angka menuju 100 menandakan bahwa kinerja demokrasi di Provinsi Papua semakin meningkat.

IDI Provinsi Papua masih berada dalam kategori “**sedang**”, meskipun begitu terdapat perubahan signifikan pada capaian aspek penyusun IDI seperti pada capaian Aspek Kesetaraan yang melampaui Aspek Kebebasan. Meskipun keseluruhan aspek masih berada dalam kategori "sedang", namun peningkatan yang terjadi menandai pergeseran fokus dalam pembangunan demokrasi, penekanan pemberdayaan kesetaraan tetapi juga menegaskan perlunya perbaikan dalam kapasitas lembaga demokrasi.



Tabel II.49 Capaian IDI Provinsi Papua Berdasarkan Aspek dan Indikator Penyusunnya 2021-2023

No.	Indikator IDI	2021	2022	2023
Aspek Kebebasan				
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	54,15	0	93,6
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	0	0	0
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100	100	100
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100	100
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	99,48	99,48	99,48
6	Pemenuhan hak hak pekerja	100	94,32	88,53
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	68,87	75,57	64,01
Aspek Kesetaraan				
8	Kesetaraan gender	89,01	90,54	86,64
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	43,48	100	20,29
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	54	57,5	58,33
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	50,32	39,86	49,25
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	96,67	97,17	97,33
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	66,37	63,03	68,33
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	48,43	50,22	48,31
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi				
15	Kinerja lembaga legislatif	4,17	16,22	90,48
16	Kinerja lembaga yudikatif	87,23	91,45	87,82
17	Netralitas penyelenggara pemilu	85	85	75
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	71,67	88,33	91,67
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	80,23	81,46	81,31
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	57,14	42,86	71,43
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	75,2	65	22,2
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	10,77	33,85	3,08

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

2.3.1.6 Sosial

1) Agama dan Kepercayaan

Keagamaan menjadi salah satu aspek sosial mendasar di Provinsi Papua. Provinsi Papua memiliki latar belakang keagamaan maupun kepercayaan yang telah berkembang sejak lama dan turun-temurun. Agama dan kepercayaan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel II.59. Agama dan kepercayaan yang mendominasi di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kota adalah agama Protestan sebanyak 625.247 jiwa diikuti agama Islam sebanyak 252.315 jiwa dan agama Katolik sebanyak 110.249 jiwa. Kota Jayapura menjadi kota dengan pemeluk agama Islam, Katolik, Hindu, dan Budha terbanyak pada tahun 2020, sementara Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan pemeluk agama Protestan terbanyak.

Tabel II.50 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua Tahun 2020 (Jiwa)

Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Jayapura	34.069	150.327	293	233	196	-

Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Kepulauan Yapen	10.973	113.868	2.045	47	22	-
Biak Numfor	3.004	118.501	3.546	150	301	-
Sarmi	6.706	29.311	152	35	-	-
Keerom	2.705	22.506	17.661	366	15	-
Waropen	9.722	34.661	1.777	20	-	-
Supiori	486	18.975	162	10	-	-
Mamberamo Raya	2.031	7.035	135	-	6	-
Kota Jayapura	182.619	130.063	84.478	741	1.237	-
Provinsi Papua	252.315	625.247	110.249	1.602	1.777	-

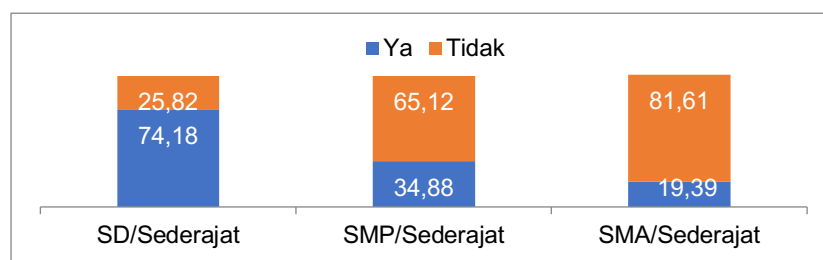
Sumber: Kementerian Agama Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

2) Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Papua menjadi salah satu isu pembangunan strategis. Masalah terkait kesejahteraan sosial di Provinsi Papua antara lain adalah ketelantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah masih belum optimal dalam menangani permasalahan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu, guna mewujudkan kesejahteraan sosial, terdapat beberapa bantuan yang dapat diterima oleh penerima bantuan di Provinsi Papua seperti Program Indonesia Pintar (PIP), akses terhadap perlindungan sosial, dan penerima kredit dalam setahun.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan. PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan pemberian bantuan tunai untuk anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.

Gambar II.51 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar Menurut Jenis PIP di Provinsi Papua Tahun 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, 2021 dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2023

Persentase rumah tangga sebagai sasaran utama penerima PIP masih tergolong sangat rendah yaitu hanya 9,27%. Rumah tangga penerima PIP paling banyak berada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 74,18%. Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat masing-masing berada pada persentase 34,88% dan 19,39%. Jenjang pendidikan SMA/Sederajat menjadi persentase paling sedikit penerima PIP.



Akses terhadap perlindungan sosial termasuk dalam sistem jaminan sosial nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Seluruh warga Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional tanpa terkecuali. Jenis jaminan sosial mencakup Jaminan Pensiun/veteran, Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja, Jaminan/Asuransi Kematian dan Pesangon (PHK). Jaminan pensiun menjadi jenis jaminan sosial dengan cakupan persentase penerima tertinggi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 di Provinsi Papua. Sebaliknya, pesangon PHK menjadi jenis jaminan sosial dengan persentase terendah pada tahun 2023 yaitu 0,67% diikuti jaminan kehilangan pekerjaan yang terdata sejak tahun 2023 yaitu 0,75%.

Tabel II.51 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Jenis Jaminan Sosial	Cakupan Penerima Manfaat (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaminan Pensiun	6,52	7,46	5,65	4,71	6,14
Jaminan Hari Tua	5,1	5,29	3,68	3,1	4,15
Asuransi Kecelakaan Kerja	4,22	4,53	3,54	2,91	3,75
Jaminan / Asuransi Kematian	4,56	4,33	3,48	2,94	3,34
Jaminan Kehilangan Pekerjaan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,75
Pesangon PHK	1,62	1,84	0,81	1,03	0,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019-2023

Kredit usaha merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial lainnya yang diterima penduduk di Provinsi Papua. Kredit usaha lebih berfokus pada kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan, koperasi, pegadaian, maupun perorangan. Berdasarkan Tabel II.61, diketahui bahwa jenis kredit yang paling banyak diterima masyarakat di Provinsi Papua adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase rumah tangga penerima KUR lebih tinggi dibandingkan jenis kredit lainnya. Sebaliknya, BUMDES menjadi jenis kredit dengan persentase terendah diikuti pinjaman online. Sejak tahun 2022, jenis kredit pinjaman online mulai terdata dan meningkat di tahun 2023 menjadi 0,47 dari 0,27 pada tahun 2022.

Tabel II.52 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Menurut Jenis Kredit di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Jenis Kredit	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	32,13	36,96	34,3	39,75	42,78
Kredit dari Bank Umum selain KUR	46,27	39,46	41,02	32,21	34,18
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	5,63	6	6,46	12,2	5,35
Kredit dari Koperasi	7,47	6,41	7,19	7,14	7,88
Kredit Perorangan/Perorangan dengan Bunga	3,51	4,78	2,4	2,42	4,98
Pegadaian	1,67	2,71	5,23	3,94	4,11
Perusahaan Leasing	3,47	4,59	4,55	4,92	7,66
Kelompok Usaha Bersama	1,85	0,2	0,97	N/A	N/A
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	1,29	0,48	1,38	0,27	0,85
Pinjaman Online	N/A	N/A	N/A	0,27	0,47

Jenis Kredit	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lainnya	6,04	3,64	1,86	4,76	8,02

Sumber: Susenas Maret dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019-2023

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK dan TPT dilihat dari penduduk dengan usia di atas 15 tahun yang terbagi dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah Angkatan Kerja secara provinsi adalah sebanyak 2.516.129 jiwa dengan persentase bekerja terhadap angkatan kerja adalah sebesar 97,33%. Adapun Jumlah Bukan Angkatan Kerja adalah sebesar 743.102 jiwa yang terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Tabel II.53 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Papua Tahun 2023

No	Kabupaten	Angkatan Kerja					Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah						
1	Jayapura	70.469	913	2.076	2.989	73.458	95,93	10.327	20.225	4.508	35.060
2	Kepulauan Yapen	44.746	N/A	1.871	1.871	46.617	95,99	6.754	16.779	6.214	29.747
3	Biak Numfor	57.919	1.323	2.194	3.517	61.436	94,28	8.014	19.213	4.469	31.696
4	Sarmi	17.303	97	454	551	17.854	96,91	2.427	5.462	1.419	9.308
5	Keerom	30.851	N/A	357	470	31.321	98,5	2.814	4.866	1.787	9.467
6	Waropen	13.453	N/A	556	651	14.104	95,38	2.009	3.484	1.603	7.096
7	Supiori	7.842	N/A	347	396	8.238	95,19	1.158	3.792	1.145	6.095
8	Mamberamo Raya	10.846	N/A	44	N/A	10.890	99,6	911	9.206	4.433	14.550
9	Kota Jayapura	178.808	4.789	16.779	21.568	200.376	89,24	25.848	58.215	12.978	97.041
	*)Provinsi Papua	2.448.947	14.821	52.361	67.182	2.516.129	97,33	156.725	441.573	144.804	743.102

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024 *) Data Sebelum Pemekaran

Apabila kegiatan utama di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan gender seperti terlihat pada Tabel II.63, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua didominasi oleh laki-laki yaitu 1,52 juta jiwa. Angka ini merupakan angka Provinsi Papua sebelum pemekaran. Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 2,45 juta jiwa yang juga didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 60,12%.



Tabel II.54 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2023

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Angkatan Kerja	1.515.065	1.001.064	2.516.129
i. Bekerja	1.472.266	976.681	2.448.947
ii. Pengangguran Terbuka	42.799	24.383	67.182
Bukan Angkatan Kerja	233.618	509.484	743.102
i. Sekolah	79.412	77.313	156.725
ii. Mengurus Rumah Tangga	58.641	382.932	441.573
iii. Lainnya	95.565	49.239	144.804
*) Jumlah	1.748.683	1.510.548	3.259.231

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024 *) Data Sebelum Pemekaran

Secara provinsi, TPT di Provinsi Papua pada Agustus 2021-2023 menunjukkan penurunan persentase dari 3,33% menjadi 2,67%. Penurunan persentase TPT pada selang tahun yang sama juga diikuti oleh penurunan TPAK. Persentase TPAK secara provinsi mengalami penurunan dari 78,29% pada tahun 2021 menjadi 77,2% pada tahun 2023. Persentase TPT dan TPAK ditunjukkan pada Tabel II.64.

Tabel II.55 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – Agustus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021-2023

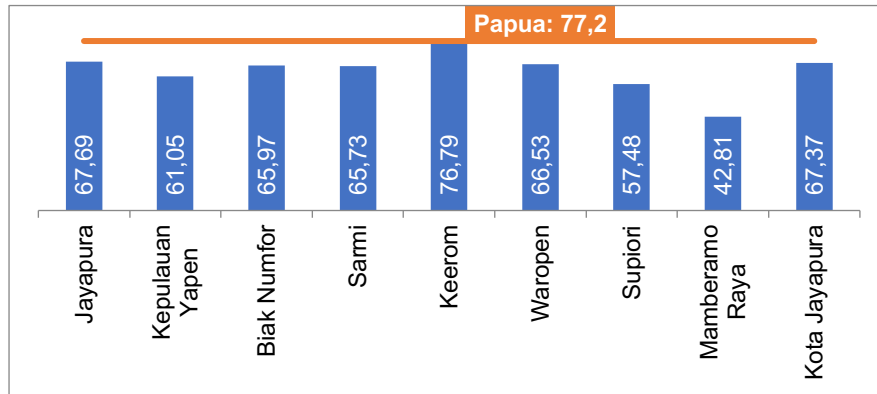
No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jayapura	7,87	5,94	4,07	67,97	65,13	67,69
2	Kepulauan Yapen	2,47	3,6	4,01	63,94	68,36	61,05
3	Biak Numfor	9,49	7,4	5,72	69,47	72,31	65,97
4	Sarmi	2	2,09	3,09	68,57	68,96	65,73
5	Keerom	1,41	2,49	1,5	76,91	74,75	76,79
6	Waropen	8,56	6,64	4,62	56,39	56,98	66,53
7	Supiori	2,66	2,93	4,81	68,56	61,22	57,48
8	Mamberamo Raya	1,91	2,32	N/A	66,84	63,19	42,81
9	Kota Jayapura	11,67	9,71	10,76	63,75	60,61	67,37
	*) Provinsi Papua	3,33	2,83	2,67	78,29	77,75	77,2

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024*) Data Sebelum Pemekaran Provinsi

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) - Agustus tertinggi di Provinsi Papua pada tahun 2023 berada di Kabupaten Keerom dengan persentase sebesar 76,79%. Persentase TPAK yang semakin meningkat di suatu daerah mengindikasikan bahwa penduduk dalam usia angkatan kerja di daerah tersebut secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan persentase TPAK terendah di Provinsi Papua pada tahun 2023. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, persentase TPAK pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua masih berada di bawah garis TPAK provinsi. Persentase TPAK di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar II.54.

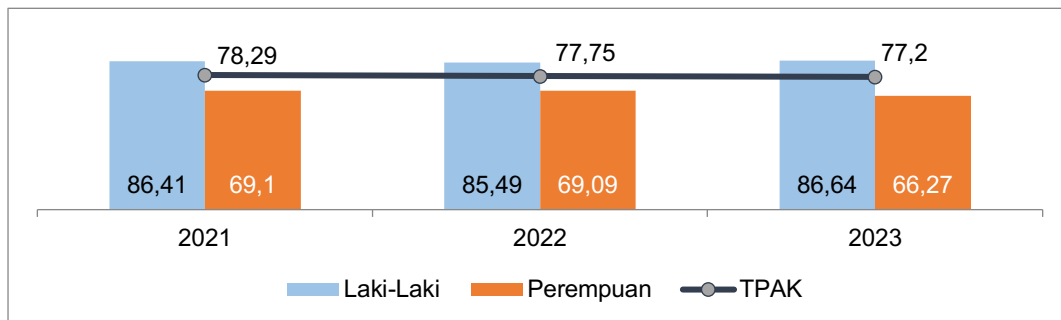
Gambar II.52 Persentase Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) - Agustus di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

TPAK di Provinsi Papua juga ditinjau berdasarkan gender atau jenis kelamin. Diketahui bahwa TPAK di Provinsi Papua didominasi oleh laki-laki. TPAK laki-laki mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 86,64% dari 85,49% pada tahun 2022. TPAK perempuan pada tahun 2023 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Tahun 2023, persentase TPAK perempuan adalah sebesar 66,27% dari sebelumnya 69,10% pada tahun 2021 dan 69,09% pada tahun 2022. Adapun TPAK laki-laki berada di atas garis rata-rata provinsi sementara perempuan berada di bawah garis rata-rata provinsi.

Gambar II.53 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023



Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Unsur Aparatur Sipil Negara

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Papua dilihat dari kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kontribusi perempuan bagi PNS di Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebanyak 13.433 jiwa. Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dan kota dengan jumlah PNS perempuan terbanyak dengan masing-masingnya berjumlah 2.311 dan 2.472 jiwa. Apabila dibandingkan secara total dengan jumlah laki-laki,



jumlah perempuan dalam kepegawaian negeri sipil cenderung tidak memiliki perbandingan yang begitu tinggi. Jumlah tersebut ditunjukkan pada Tabel II.65.

Tabel II.56 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	1.771	2.311	4.082
2	Kepulauan Yapen	1.911	1.617	3.528
3	Biak Numfor	1.974	1.972	3.946
4	Sarmi	1.188	898	2.086
5	Keerom	1.602	1469	3.071
6	Waropen	1.375	951	2.362
7	Supiori	1.371	1.137	2.508
8	Mamberamo raya	1.252	606	1.858
9	Kota Jayapura	1.603	2.472	4.075
	Provinsi Papua	14.047	13.433	27.480

Sumber: BPS Provinsi Papua dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

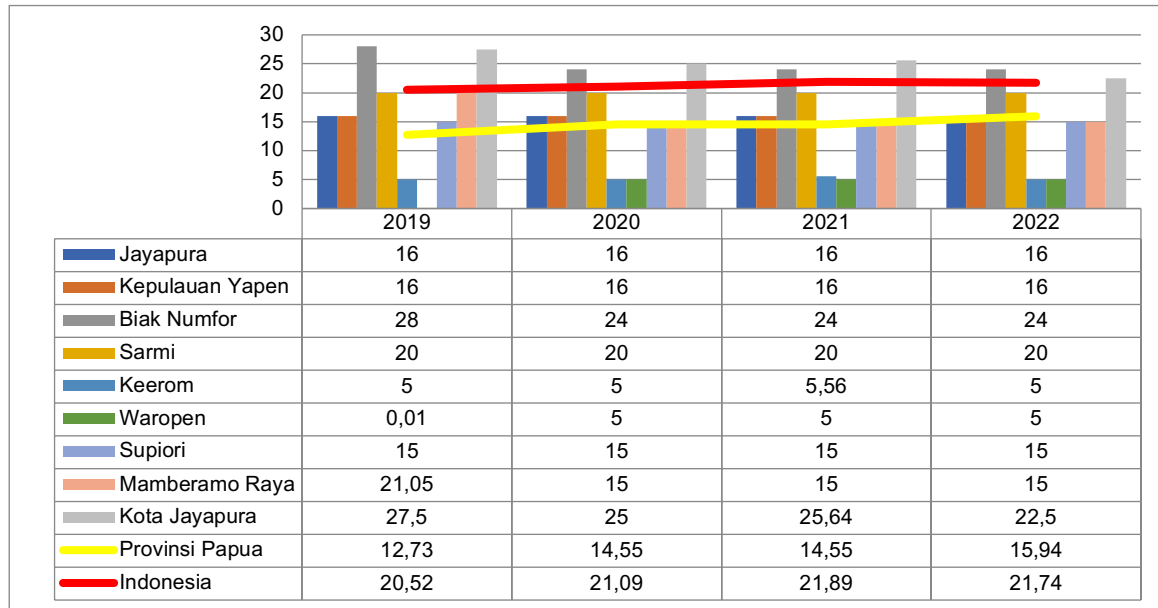
2) Keterlibatan di Parlemen

Pemberdayaan perempuan juga dapat terlihat dari keterlibatannya di parlemen. Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara dalam keterwakilan perempuan di parlemen menurut data World Bank tahun 2019. Hal tersebut mencerminkan bahwa angka keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen masih rendah dan berpengaruh terhadap kebijakan kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan di Parlemen dari Provinsi Papua pada tahun 2019-2022 ditunjukkan pada Gambar II.58.

Jika dilihat secara nasional, keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi Papua masih berada di bawah garis nasional. Secara provinsi, terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua yang sudah memiliki persentase keterlibatan perempuan di parlemen di atas garis provinsi. Kabupaten/kota dengan persentase keterlibatan perempuan di parlemen tertinggi adalah Kota Jayapura dan kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Kabupaten Keerom dan Waropen.

Partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan di Papua menjadi fokus penting untuk mencapai representasi yang lebih inklusif dan merata. Partisipasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun begitu perempuan di Papua semakin aktif terlibat dalam berbagai tingkatan politik dan pemerintahan. Terdapat sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan di Papua, mencakup advokasi untuk peningkatan jumlah perempuan di lembaga-lembaga legislatif, peningkatan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam agenda politik, serta dukungan terhadap kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik.

Gambar II.54 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua

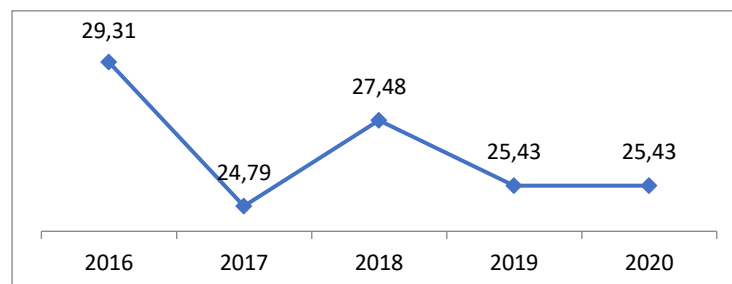
2.3.2.3 Pangan

Urusan pangan di Provinsi Papua dilihat berdasarkan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, konsumsi setara kedelai pada penduduk, kerawanan pangan, ketidakcukupan konsumsi pangan, dan program bantuan pangan.

1) Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari

Tubuh memerlukan minimal 1400 kkal asupan untuk dapat melakukan aktivitas dalam sehari. Apabila penduduk belum memenuhi kebutuhan kalori minimum per hari maka hal tersebut mengindikasikan kurangnya kebutuhan kalori penduduk yang sesuai dengan standar. Adapun penduduk di Provinsi Papua dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari semakin mengalami penurunan sejak tahun 2016 meskipun sempat meningkat pada tahun 2018 sebelum kembali menurun hingga tahun 2020.

Gambar II.55 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 kkal/Kapita/Hari di Provinsi Papua Tahun 2016-2020



Sumber: BPS RI, 2022



Rata-rata konsumsi per kapita ditinjau dari kalori dan protein per hari dan kelompok bahan makanan lainnya. Berdasarkan Tabel II.66, diketahui bahwa rata-rata konsumsi per kapita per hari di Provinsi Papua cenderung mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Sementara rata-rata konsumsi protein per kapita per hari sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 namun perlahan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 46,8 gram dari 45,07 gram. Meskipun rata-rata kalori dan protein mengalami kecenderungan untuk meningkat, tetapi masih belum bisa mencapai rata-rata nasional.

Tabel II.57 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Provinsi	Kalori (kkal)					Protein (gram)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Papua	1.863,07	1.914,12	1.879,71	1.902,04	1.902,72	44,66	46,52	44,94	45,07	46,8
Indonesia	2.120,52	2.112,06	2.143,21	2.079,09	2.087,64	62,13	61,98	62,28	62,21	62,33

Sumber: Publikasi Statistik Indonesia dalam BPS, 2023

2) Konsumsi Setara Kedelai

Konsumsi setara kedelai dilihat berdasarkan jenis pengolahan kedelai dalam bentuk tahu, tempe, dan kecap. Konsumsi tahu, tempe, dan kecap di Provinsi Papua diketahui masih berada di bawah angka konsumsi nasional yang ditunjukkan pada Tabel II.67.

Tabel II.58 Konsumsi Setara Kedelai (Tahu, Tempe, Kecap) di Provinsi Papua Tahun 2020

Uraian	Konsumsi Setara Kedelai (kg/kapita/tahun)			
	Tahu	Tempe	Kecap	Total
Papua	2,23	1,65	0,34	4,22
Indonesia	2,78	3,64	0,74	7,17

Sumber: BPS RI, 2022

Apabila dilihat secara tahunan mulai dari tahun 2018 hingga 2020, konsumsi total setara kedelai cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2018, konsumsi setara kedelai meraih angka 3,42 hingga pada tahun 2020 meraih angka 4,22. Laju pertumbuhan konsumsi setara kedelai di Provinsi Papua adalah sebesar 11,09 per tahunnya. Konsumsi setara kedelai dan laju pertumbuhannya pada tahun 2018-2020 ditunjukkan pada Tabel II.68.

Tabel II.59 Konsumsi Setara Kedelai di Provinsi Papua Tahun 2018-2020

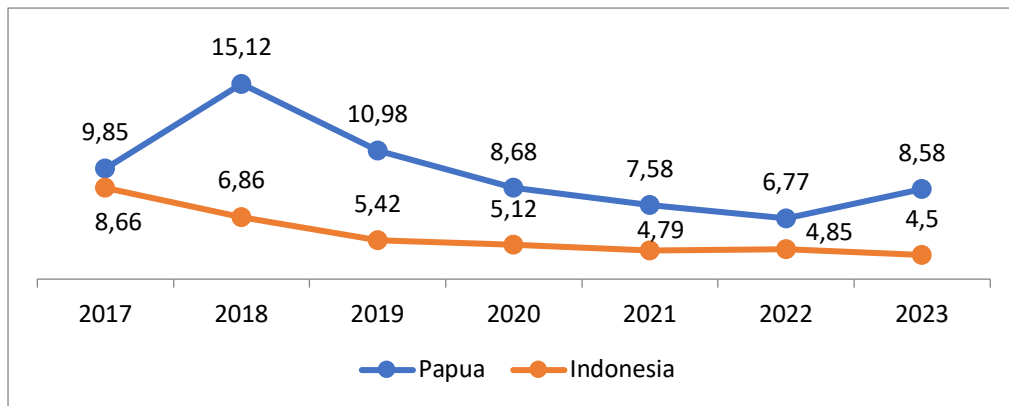
Uraian	Konsumsi Setara Kedelai (kg/kapita/tahun)			Pertumbuhan
	2018	2019	2020	
Papua	3,42	3,66	4,22	11,09
Indonesia	7,51	7,14	7,17	-2,29

Sumber: BPS RI, 2022

3) Kerawanan Pangan dan Ketidacukupan Konsumsi Pangan

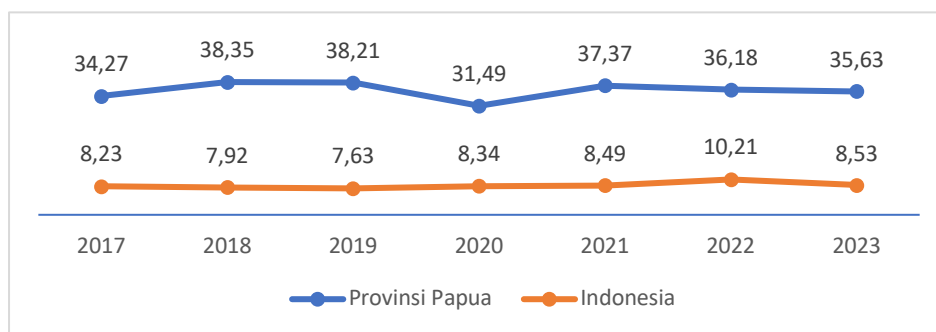
Kerawanan pangan menunjukkan kondisi ketidakcukupan pangan di suatu daerah. Prevalensi penduduk di Provinsi Papua dengan kerawanan pangan baik sedang maupun berat yang didasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan tahun 2017-2023. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan. Skala ini memungkinkan untuk menganalisa prevalensi kerawanan pangan secara konsisten. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat memberikan gambaran secara langsung terkait ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler. Berdasarkan Gambar II.60, angka prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan mengalami fluktuasi. Tahun 2018 menjadi tahun dengan perolehan prevalensi tertinggi di Provinsi Papua yaitu mencapai 15,12% yang ditunjukkan pada Gambar II.60.

Gambar II.56 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen)



Sumber: Susenas dalam BPS RI, 2023

Gambar II.57 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen)



Sumber: Susenas dalam BPS, 2024

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu dimana konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk

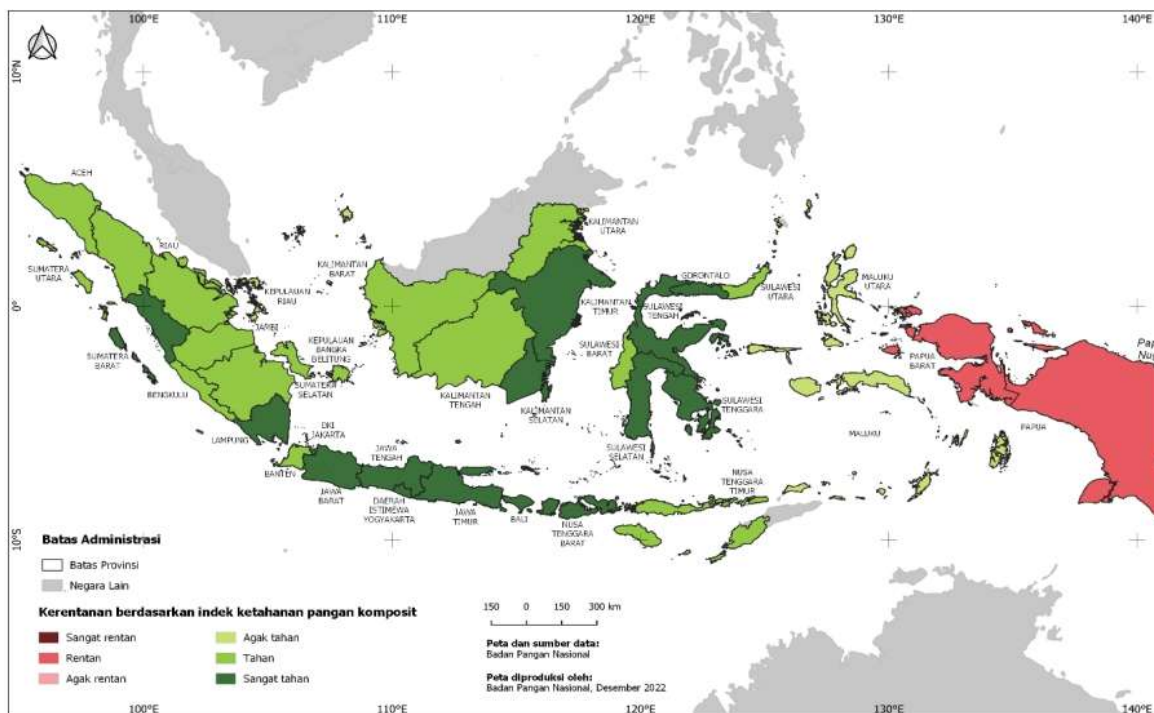


memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Papua sejak tahun 2017 menjadi yang terbesar secara Nasional dan jauh berada di atas garis nasional. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Papua berstatus “sangat tinggi” pada tahun 2019 dan 2021, serta berstatus “tinggi” pada tahun 2020. Prevalensi ketidakcukupan pangan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.61.

4) Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Provinsi Papua dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indikator penyusun ketahanan pangan di Indonesia didasarkan pada 3 aspek yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan/distribusi, dan pemanfaatan pangan di Indonesia pada kurun waktu tertentu. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu dari 34,79 menjadi 37,80. Meskipun begitu, Provinsi Papua juga menjadi provinsi dengan peringkat “rendah” dalam skor IKP dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini menjadikan Provinsi Papua menjadi provinsi Prioritas 1 untuk peningkatan skor IKP.

Gambar II.58 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

IKP dibedakan berdasarkan kabupaten dan kota untuk menentukan tingkatan kelompok kerentanan. Berdasarkan data IKP tahun 2022, sebanyak 70 kabupaten atau 16,83% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP rendah, salah satunya adalah kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua. Berdasarkan

pengelompokkan terhadap kabupaten pada Tabel II.69, terlihat bahwa Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten Prioritas 1 dalam kurun 3 tahun terakhir. Sebaliknya Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan tingkat kerentanan yang cukup baik yaitu berada pada Prioritas 4 selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan tinjauan kota, Kota Jayapura sebagai satu-satunya kota di Provinsi Papua menunjukkan ketahanan pangan sangat baik dengan berada pada Prioritas 5. IKP Provinsi Papua berdasarkan kabupaten dan kota ditunjukkan pada Tabel II.69.

Tabel II.60 Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

Wilayah	Uraian	2020	2021	2022	
Provinsi Papua	IKP (indeks)	34,79	35,48	37,8	
	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	
	Interpretasi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi	
	a. Indeks Ketersediaan (IK)	7,98	8,89	17,68	
	b. Indeks Keterjangkauan	49,49	49	49,89	
	c. Indeks Pemanfaatan (IP)	42,29	43,71	42,34	
Kabupaten					
1	Jayapura	IKP (indeks)	58,11	54,91	70,62
		Kategori	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 5
2	Kepulauan Yapen	IKP (indeks)	43,38	43,92	44,82
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
3	Biak Numfor	IKP (indeks)	48,51	49,07	48,16
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
4	Sarmi	IKP (indeks)	44,68	44,73	57,07
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 3
5	Keerom	IKP (indeks)	60,24	61,38	61,22
		Kategori	Prioritas 4	Prioritas 4	Prioritas 4
6	Waropen	IKP (indeks)	37,5	50,03	44,89
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 2
7	Supiori	IKP (indeks)	31,59	28,11	29,87
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
8	Mamberamo Raya	IKP (indeks)	19,8	21,95	22,96
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
9	Kota Jayapura	IKP (indeks)	68,83	70,18	74,64
		Kategori	Prioritas 5	Prioritas 5	Prioritas 5

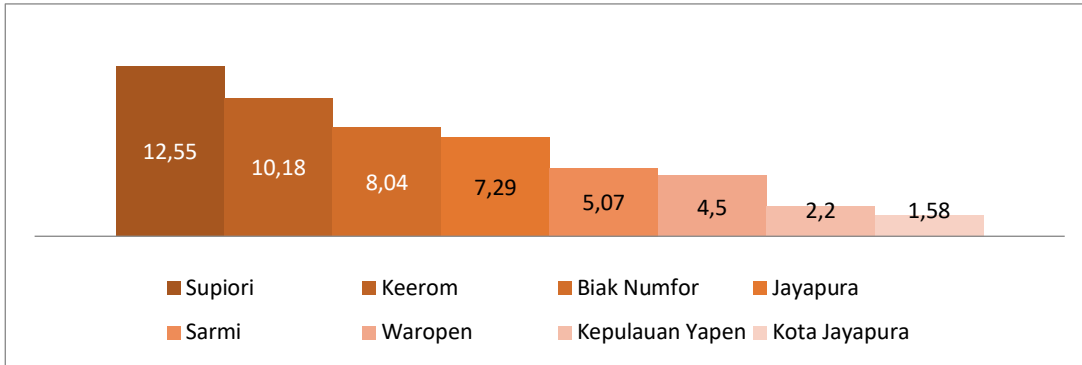
Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, 2020-2022

5) Program Bantuan Pangan

Provinsi Papua termasuk dalam wilayah program bantuan pangan. Bantuan pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sembako. BNPT merupakan bantuan sosial pangan non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pemerintah sebesar 110.000 rupiah tiap bulan melalui mekanisme perbankan. Bantuan Sembako adalah pengembangan BPNT yang dilakukan sejak tahun dimulainya yaitu tahun 2020. KPM memperoleh program bantuan Sembako sebesar 150.000 rupiah melalui mekanisme perbankan. Adapun persentase KPM di Provinsi Papua yang menerima BPNT maupun Bantuan Sembako pada tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar II.63.



Gambar II.59 Persentase Penerima BPNT dan Bantuan Sembako Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023



Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, 2023

Adapun realisasi jumlah KPM Bansos Pangan di Provinsi Papua pada tahun 2022 berjumlah 1.205.586 KPM dengan rencana jumlah KPM adalah sebesar 1.500.427 KPM. Realisasi jumlah KPM cenderung mendekati rencana jumlah KPM Bansos Pangan. Hal serupa juga berlaku pada rencana dan realisasi anggaran Bansos Pangan di tahun yang sama seperti ditunjukkan pada Tabel II.70.

Tabel II.61 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Rencana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)	Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)	Rencana Anggaran Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)	Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)
Jayapura	19.364	17.672	11.609.600.000	10.596.800.000
Kepulauan Yapen	41.321	38.174	24.776.200.000	22.899.600.000
Biak Numfor	44.572	42.894	26.718.400.000	25.727.600.000
Sarmi	12.908	11.610	7.742.000.000	6.964.800.000
Keerom	15.431	14.483	9.253.400.000	8.687.800.000
Waropen	10.207	9.622	6.120.600.000	5.769.600.000
Supiori	7.977	7.918	4.784.200.000	4.748.800.000
Mamberamo Raya	8.212	6.600	4.926.000.000	3.958.800.000
Kota Jayapura	36.769	31.033	21.997.800.000	18.577.400.000
Papua	1.500.427	1.205.586	899.932.600.000	723.129.600.000

Sumber: BPS RI, 2023

2.3.2.4 Pertanian

Urusan pertanahan di Provinsi Papua dilihat dari peralihan tanah. Peralihan tanah memiliki beberapa pengelompokan di antaranya jual-beli, pewarisan, hibah, tukar-menukar, dan lelang. Pada tahun 2016-2017, pertanahan di Provinsi Papua mengalami penurunan. Berdasarkan Tabel II.71, diketahui bahwa pertanahan berdasarkan jual-beli, pewarisan,

hibah, tukar-menukar, dan lelang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 penurunan peralihan tanah menjadi sebesar 5.887 ha.

Tabel II.62 Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

Tahun	Jual-Beli	Pewarisan	Hibah	Tukar Menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7.057
2017	5.211	451	197	3	25	5.887

Sumber: Bappeda Papua

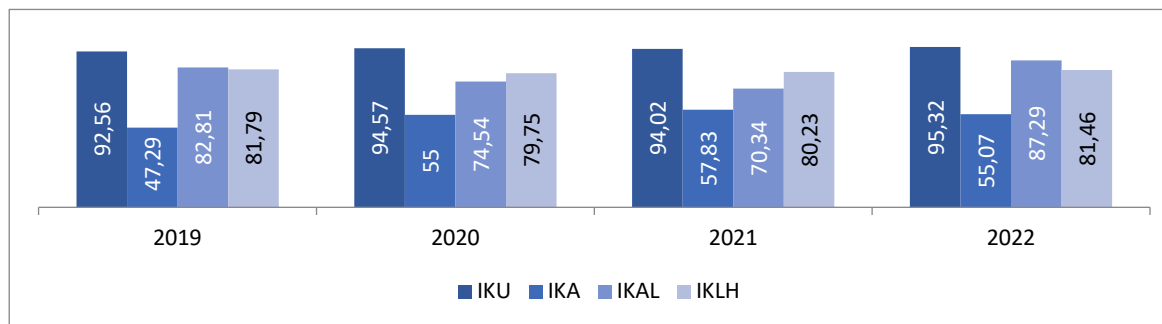
2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu wilayah yang berkaitan dengan sumber daya alam. Lingkungan hidup di Provinsi Papua dapat dilihat dari indeks lingkungan hidup beserta nilai kompositnya dan persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi yang dikelola secara aman berdasarkan tipe daerah.

1) Indeks Lingkungan Hidup

Provinsi Papua memiliki kekayaan akan sumber daya alam sehingga perencanaan dan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga unsur lingkungan hidup. Perubahan kondisi lingkungan menjadi salah satu isu penting terkait pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan Gambar II.64, diketahui bahwa IKLH Provinsi Papua pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020-2022. IKLH Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.64.

Gambar II.60 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (data diolah, 2023)

Pada tahun 2023, perolehan IKLH Provinsi Papua dengan menggunakan metode lama masih mengungguli rata-rata IKLH Nasional. Skor IKLH Provinsi Papua sebesar 81,31, lebih tinggi 8,78 poin dibandingkan nasional yaitu sebesar 72,53. Sama halnya dengan perolehan IKLH, nilai komposit (IKU, IKA, IKL, IKAL) Provinsi Papua juga cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan menggunakan rumus baru di tahun yang sama, IKLH Provinsi Papua mengalami kenaikan sebanyak 0,57 poin



menjadi 81,88. Namun kenaikan ini tidak disertai dengan kenaikan pada salah satu nilai kompositnya. Perolehan IKA dengan rumus baru cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yaitu 70,74 dari 72,01. Penurunan tersebut terjadi karena terdapat penambahan parameter yang membuat nilai IKU cenderung turun. Selain itu pada rumus terbaru, terdapat perubahan metode perhitungan pada IKA menjadi metode IKA-INA serta klasifikasi tutupan lahan ditambahkan dalam perhitungan IKL dan penambahan Faktor Koreksi Ekosistem Gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan sistem gambut.

Tabel II.63 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya Berdasarkan Metode Perhitungan di Provinsi Papua Tahun 2023

Provinsi	Capaian 2023 (Rumus Lama)					Capaian 2023 (Rumus Baru)				
	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL
Papua	81,31	95,87	54,73	100	84,56	81,88	84,47	70,74	100,01	84,56
Nasional	72,53	88,67	54,59	61,79	78,84	76,09	78,14	72,01	77,87	78,84

Sumber: Bappeda 2024 mengacu Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

Apabila ditinjau secara kabupaten, Supiori menjadi kabupaten dengan perolehan IKLH tertinggi baik menggunakan rumus lama maupun baru pada tahun 2023 yaitu sebesar 87,44 dan 85,37. Sebaliknya, Kota Jayapura menjadi kota dengan perolehan IKLH terendah dengan kedua rumus tersebut di tahun 2023 yaitu sebesar 73,5 dan 78,65.

Tabel II.64 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya Berdasarkan Metode Perhitungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023

Kab/Kota	Gambut/Non Gambut	Capaian 2023 (Rumus Lama)				Capaian 2023 (Rumus Baru)			
		IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL
Biak Numfor	Non Gambut	82,84	95,23	62	95,71	82,12	84,13	70,74	97,94
Jayapura	Gambut	79,62	94,54	51,67	100	84,84	83,5	77,44	100
Keerom	Gambut	77,7	94,46	46,67	100	80,14	84,08	64,33	100
Kepulauan Yapen	Non Gambut	83,85	94,16	63,33	100	83,97	83,63	74,99	100
Mamberamo Raya	Gambut	84,96	100	60	100	84,08	85,96	72,79	100
Sarmi	Gambut	78,93	94,4	50	100	80,7	83,97	65,94	100
Supiori	Non Gambut	87,44	98,89	67,78	100	85,37	85,52	76,68	100
Waropen	Gambut	81,45	97,52	53,33	100	81,3	85,02	66,39	100
Kota Jayapura	Gambut	75,5	93,32	49	88,03	78,65	83,36	66,54	90,75

Sumber: Bappeda 2024 mengacu Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

2) Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman merupakan salah satu upaya dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Tertuang dalam poin 6 SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak, sanitasi aman diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas air bersih untuk mewujudkan air minum yang aman dan terjangkau. Akses sanitasi aman di Provinsi Papua melalui rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dilihat berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, akses terhadap sanitasi layak, praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat

(SPALD-T), dan keterlayanan sistem pengelolaan lumpur tinja. Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi yang dikelola secara aman di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel II.74.

Tabel II.65 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Tipe Daerah di Provinsi Papua Tahun 2020-2023

	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan + Perdesaan			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Papua	5,6	5,07	8,64	4,96	1,11	1,01	5,68	0,53	2,32	2,13	6,47	1,82
Indonesia	11,25	10,42	13,54	13,67	3,03	3,07	5,52	5,37	7,64	7,25	10,16	10,21

Sumber: Susenas Maret dalam BPS, 2023

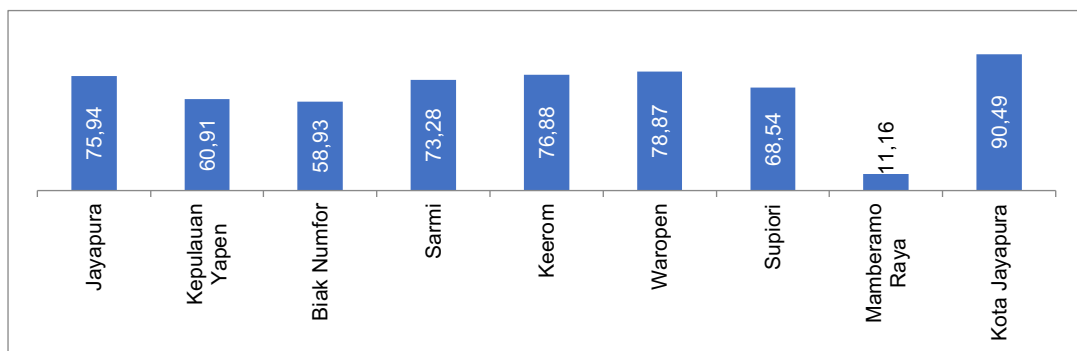
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Papua dilihat dari kepemilikan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

1) Kependudukan

Penduduk pada usia 0-17 tahun di Provinsi Papua yang telah memiliki akta kelahiran di tahun 2020 sudah berada di atas rata-rata yaitu di atas 50% pada masing-masing kabupaten/kota. Meskipun kepemilikan akta kelahiran sudah berada di atas rata-rata, masih terdapat satu kabupaten dengan kepemilikan akta kelahiran di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 11,16%. Hal tersebut cukup menunjukkan ketimpangan besar dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun menurut kabupaten/kota pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar II.65.

Gambar II.61 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020

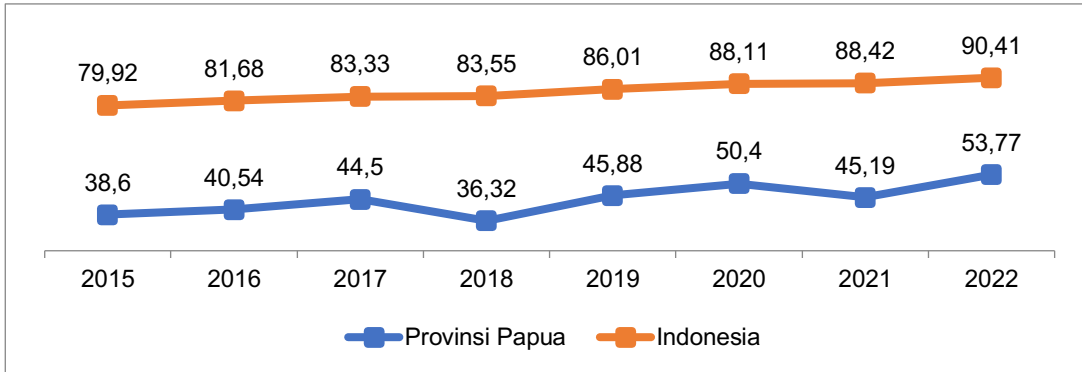


Sumber: Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua, BPS

Jika dilihat secara nasional melalui Gambar II.66, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun di Provinsi Papua masih berada di bawah garis nasional. Meskipun persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran secara provinsi cenderung meningkat namun masih belum dapat mendekati persentase nasional.



Gambar II.62 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun di Provinsi Papua Tahun 2015-2022



Sumber: Susenas dalam BPS RI

2) Catatan Sipil

Pencatatan sipil merupakan pelayanan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sifatnya unik, tunggal, dan melekat pada penduduk yang terdaftar sebagai warga Indonesia. Kepemilikan NIK di Provinsi Papua sudah berada di atas rata-rata yaitu sebesar 80%. Meskipun begitu, masih terdapat satu kabupaten dengan persentase kepemilikan NIK sekaligus kepemilikan KTP terendah yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. Persentase kepemilikan NIK berdasarkan jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel II.75.

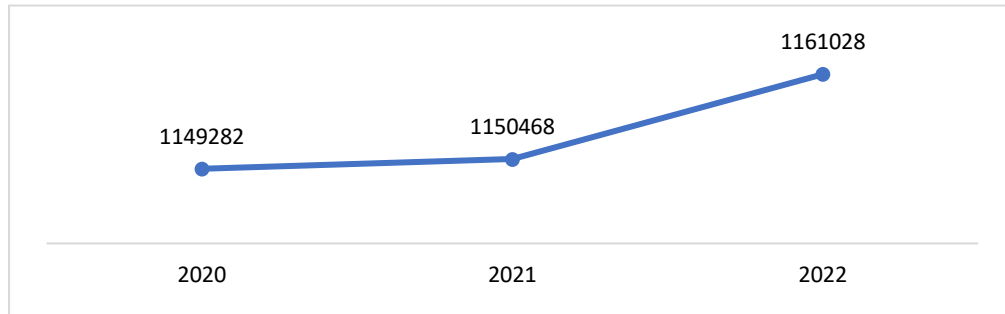
Tabel II.66 Persentase Kepemilikan NIK Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020

No	Kabupaten	Persentase Kepemilikan NIK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	86,98	86,68	86,84
2	Kepulauan Yapen	84,86	83,41	84,16
3	Biak Numfor	89,47	88,69	89,09
4	Sarmi	88,47	88,75	88,59
5	Keerom	82,25	84,46	83,24
6	Waropen	87,94	87,69	87,82
7	Supiori	99,42	98,84	99,15
8	Mamberamo Raya	39,72	41,12	40,36
9	Kota Jayapura	94,95	95,6	95,24

Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah, 2021)

Berdasarkan data Capaian Target Stranas AKPSH oleh Bappenas pada indikator cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk Warga Negara Indonesia, Provinsi Papua mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tercakup dalam kepemilikan NIK. Cakupan kepemilikan NIK dari tahun 2020-2022 di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II..

Gambar II.63 Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua 2020-2022

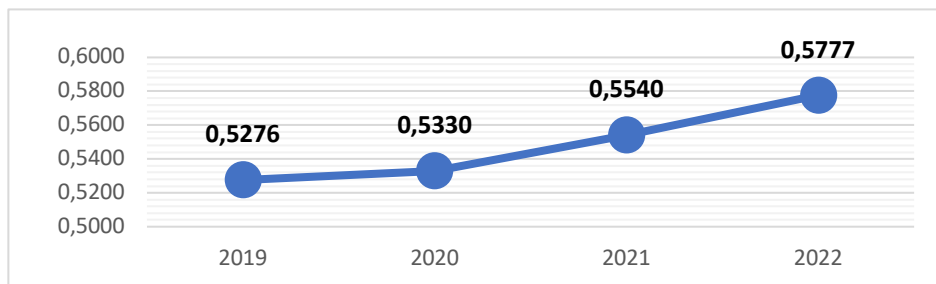


Sumber: Capaian Target Stranas AKPSH Bappenas, 2023

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi Provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak pada 2022. Meskipun Demikian, terdapat peningkatan nilai Indeks Desa Membangun dari 0,5276 pada tahun 2019 menjadi 0,5777 pada tahun 2022.

Gambar II.64 Indeks Desa Membangun Provinsi Papua



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (data diolah)
Catatan : Data Provinsi Papua (9 Kabupaten/Kota)

Tabel II.67 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar)

Tahun	Uraian	Dana Desa	Total TKDD	% DD Terhadap TKDD
2020	Anggaran	964,17	7817,78	12,33
	Realisasi	964,14	7.765,70	12,42
	Realisasi Capaian	100,00	99,33	100,67
2021	Anggaran	985,10	7.807,25	12,62
	Realisasi	983,54	7.735,30	12,71
	Realisasi Capaian	99,84	99,08	100,77
2022	Anggaran	802,71	9.218,91	8,71
	Realisasi	802,12	9.576,53	8,38
	Realisasi Capaian	99,93	103,88	96,19

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2021, (data diolah)
Catatan: Data Provinsi Papua (9 Kab/Kota)

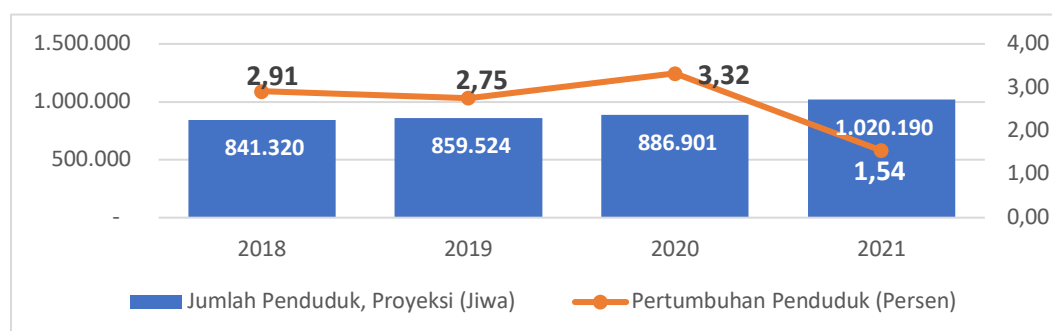


Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya, sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan desa tahun sebelumnya.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Provinsi Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 841.320 jiwa pada tahun 2018 menjadi 1.020.190 jiwa pada tahun 2021. Meskipun demikian, terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 2,91% pada 2018 menjadi 1,54% pada tahun 2021 (lihat Gambar II.69). Berdasarkan Gambar II.70 dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Papua sebanyak 4-5 orang per keluarga yang mengindikasikan terdapat upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Papua. Hal ini pun terlihat dari Tabel II.77 yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif di Provinsi Papua yang cukup tinggi pada tahun 2017-2021, meskipun dalam kondisi fluktuatif setiap tahunnya.

Gambar II.65 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua (Data Provinsi Papua 9 Kab/Kota)

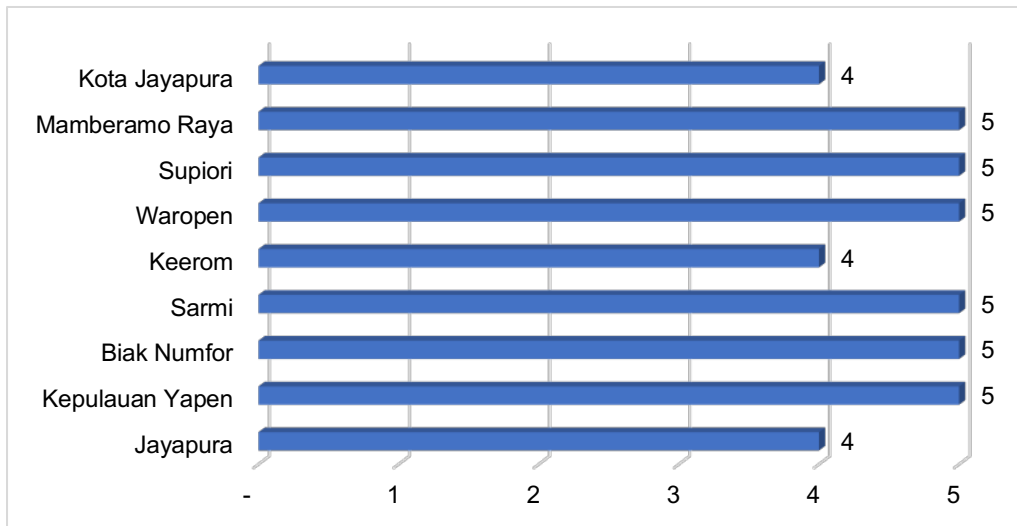
Tabel II.68 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa)

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jayapura	22.729	24.189	13.814	1.143	1.865
2	Kepulauan Yapen	5.113	7.474	478	5.209	6.426
3	Biak Numfor	13.378	15.189	18.031	1.653	7.568
4	Sarmi	514	1.354	19.093	19.093	7.901
5	Keerom	2.863	4.588	6.824	8.225	8.984

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
6	Waropen	865	2.34	5.602	5.977	7.179
7	Supiori	463	651	876	889	76
8	Mamberamo Raya	961	171	299	907	907
9	Kota Jayapura	60.326	33.394	48.066	46.727	50.876
Papua		107.212	89.35	113.083	89.823	91.782

Sumber: BPS Provinsi Papua

Gambar II.66 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang)



Sumber: BPS Provinsi Papua

2.3.2.9 Perhubungan

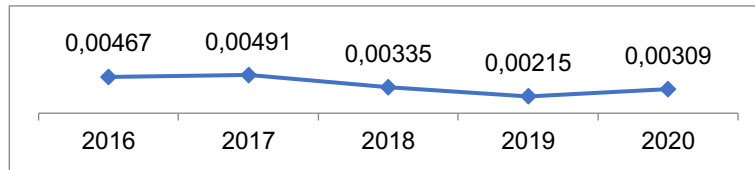
Perhubungan di Provinsi Papua dilihat dari transportasi darat, laut, udara, dan konektivitas. Transportasi darat mencakup jalan, transportasi laut mencakup jumlah penumpang domestik menggunakan moda transportasi kapal, dan transportasi udara mencakup jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi pesawat. Konektivitas menjelaskan terkait aksesibilitas jalan baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua berdasarkan tingkat kemantapannya.

1) Transportasi Darat

Provinsi Papua memiliki terminal tipe C sebanyak dua buah. Terminal tipe C merupakan terminal dengan cakupan wilayah yang lebih kecil. Terminal tipe C di Provinsi Papua berada di beberapa lokasi, yaitu Entrop di Kota Jayapura dan Biak di Kabupaten Biak Numfor.



Gambar II.67 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)



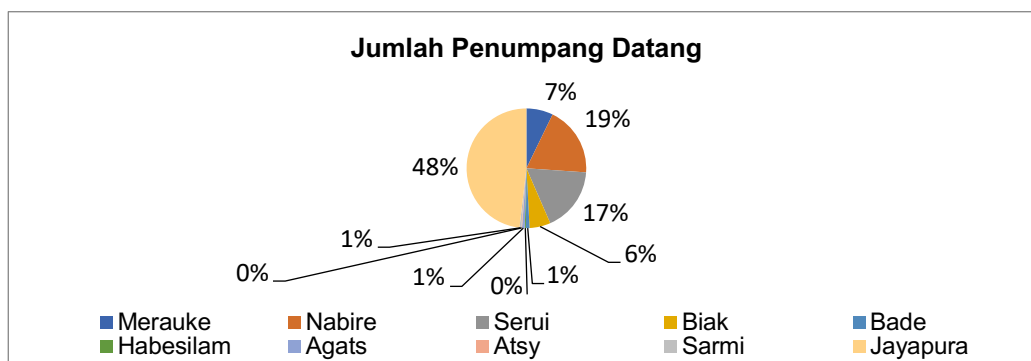
Sumber: BPS Provinsi Papua

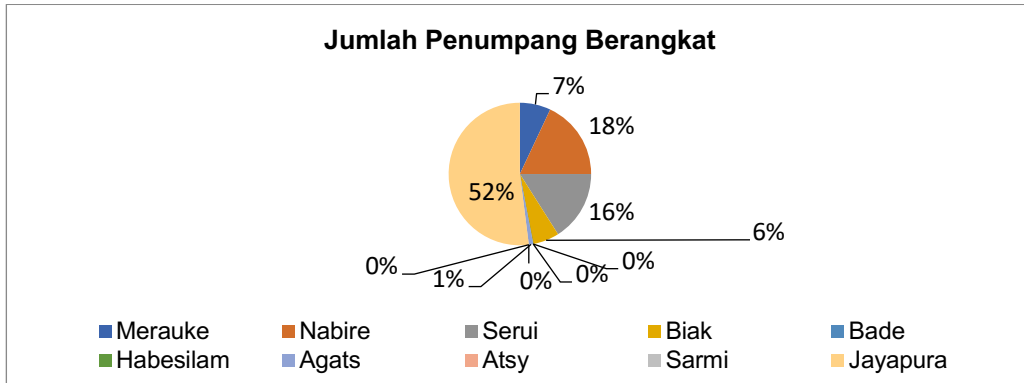
Penggunaan transportasi darat di Provinsi darat dilihat dari ketersediaan aksesibilitas berupa jalan terhadap jumlah kendaraan. Tahun 2016-2020 ketersediaan jalan terhadap jumlah kendaraan mengalami penurunan. Rata-rata perbandingan panjang jalan dengan kendaraan bermotor pada tahun 2016 adalah 1 km/467 unit kendaraan dan menurun hingga tahun 2020 sebesar 1 km/309 unit kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2017 ditunjukkan pada Gambar II.71.

2) Transportasi Laut

Angkutan laut menjadi salah satu moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi terutama untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat maupun udara. Angkutan laut masih dipilih menjadi salah satu moda transportasi juga dikarenakan tarifnya yang relatif masih murah jika dibandingkan dengan transportasi udara untuk tujuan yang sama.

Gambar II.68 Persentase Penumpang Datang dan Berangkat Dalam Negeri Menurut Pelabuhan Provinsi Papua Tahun 2022





Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Tahun 2022

Transportasi laut di Provinsi Papua dilihat dari jumlah penumpang domestik yang menggunakan mode transportasi laut kapal baik berangkat maupun datang. Diketahui bahwa jumlah penumpang domestik baik datang maupun berangkat di sepuluh pelabuhan di Papua (sebelum pemekaran) pada tahun 2022 masing-masingnya mencapai 384.492 orang dan 372.184 orang. Penumpang yang datang maupun berangkat seluruhnya merupakan penumpang domestik/dalam negeri. Pelabuhan Jayapura merupakan pelabuhan dengan jumlah penumpang datang dan berangkat paling banyak yang memberikan andil lebih dari 30% terhadap total jumlah penumpang. Jumlah penumpang domestik di Provinsi Papua (sebelum pemekaran) dengan moda transportasi laut pada tahun 2022 ditunjukkan pada Gambar II.72.

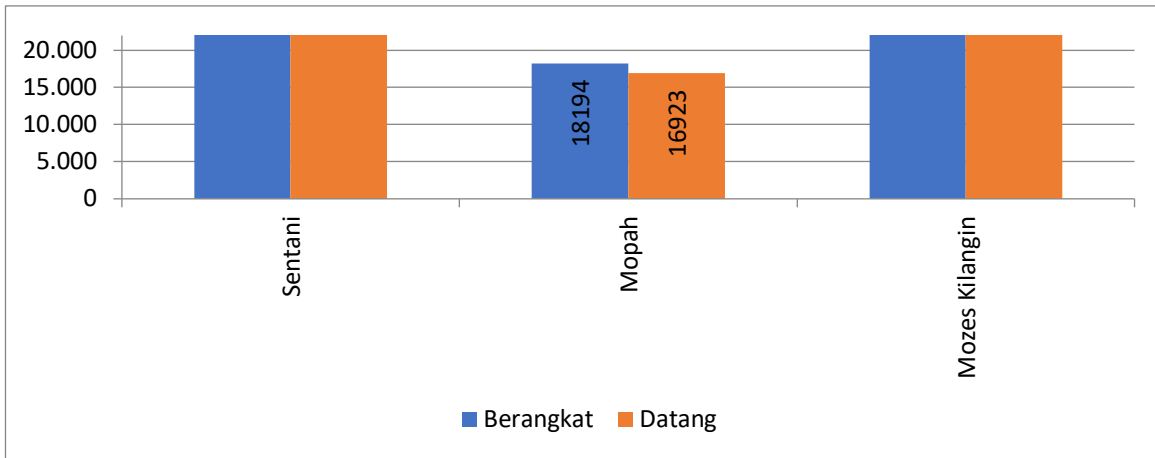
3) Transportasi Udara

Transportasi udara menjadi salah satu transportasi pilihan untuk perjalanan di dalam pulau maupun keluar Provinsi Papua. Salah satu mode yang digunakan pada transportasi udara di Provinsi Papua adalah pesawat. Uraian terkait transportasi udara di Provinsi Papua dapat dilihat dari jumlah keberangkatan dan kedatangan baik pesawat maupun penumpang. Terdapat empat bandara yang berlokasi di Provinsi Papua di antaranya yaitu Bandara Sentani, Bandara Stevanus Rumbewas, Bandara Frans Kaisepo, dan Bandara Towe.

Bandara Sentani (Jayapura) menjadi bandara dengan jumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat tertinggi pada tahun 2022, masing-masingnya mencapai 20.844 unit dan 21.039 unit. Adapun Bandara Stevanus Rumbewas (Kepulauan Yapen) memiliki total keberangkatan dan kedatangan pesawat yang sama yaitu 244 unit. Bandara Frans Kaisepo (Biak Numfor) memiliki keberangkatan dan kedatangan yang hampir sama yaitu 1.862 unit dan 1.863 unit. Jumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat sebagai moda transportasi udara menurut bandara ditunjukkan pada Gambar II.73.



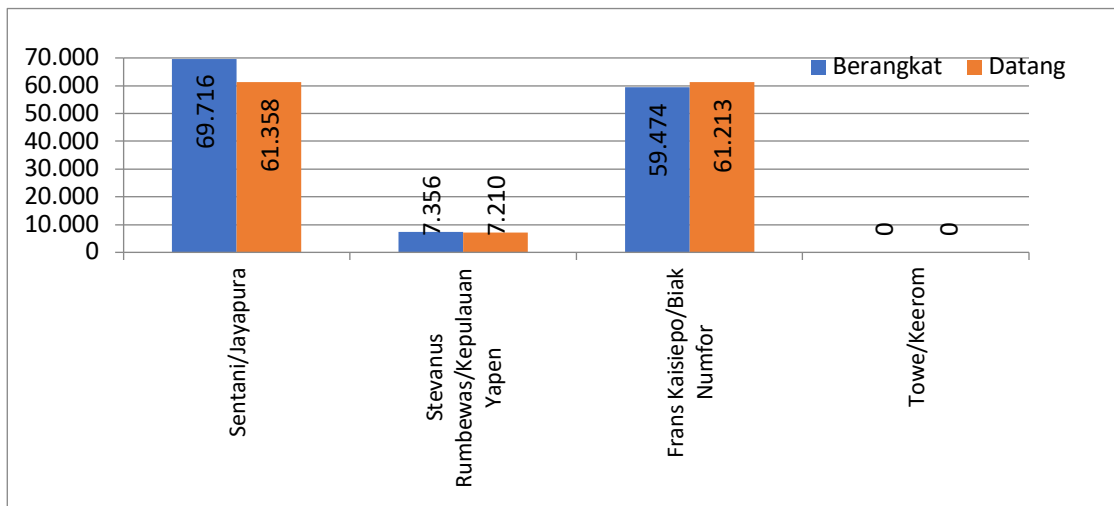
Gambar II.69 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Pesawat Menurut Bandara di Provinsi Papua Tahun 2023



Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Tahun 2023

Jumlah keberangkatan dan kedatangan penumpang tertinggi pada tahun 2022 berada pada Bandara Sentani yang masing-masingnya mencapai 69.716 orang dan 61.358 orang. Jumlah tersebut diikuti oleh Bandara Kaisepo dengan keberangkatan mencapai 59.474 orang dan kedatangan mencapai 61.213 orang. Adapun Bandara Stevanus Rumbewas memiliki jumlah keberangkatan sebanyak 7.356 orang dan kedatangan sebanyak 7.210 orang. Jumlah keberangkatan dan kedatangan penumpang menurut bandara ditunjukkan pada Gambar II.74.

Gambar II.70 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Menurut Bandara di Provinsi Papua Tahun 2022

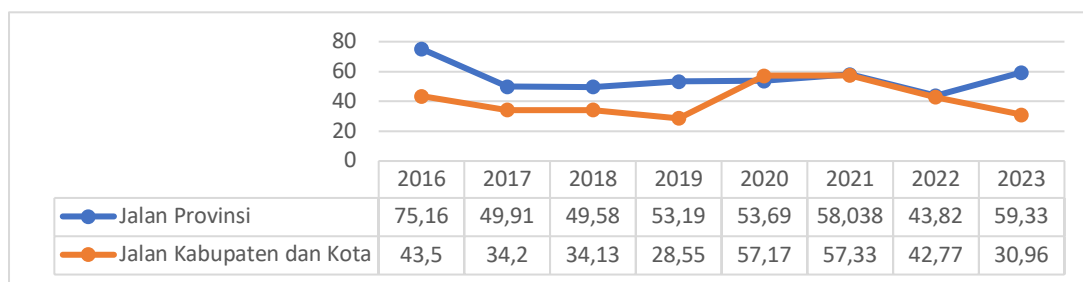


Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Tahun 2022

4) Konektivitas

Konektivitas di Provinsi Papua juga dapat dilihat dari keterhubungan aksesibilitas berupa jalan daerah. Jalan daerah merupakan jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang didalamnya berisikan kemantapan jalan baik secara provinsi maupun kabupaten dan kota. Jalan daerah dalam kondisi mantap artinya jalan daerah dalam kondisi baik dan sedang. Persentase kemantapan jalan provinsi maupun kabupaten dan kota di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.75.

Gambar II.71 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Provinsi Papua Tahun 2016-2023



Sumber : Jalan Provinsi (kecuali DKI Jakarta) : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SiPDJD)

2.3.2.10 Penanaman Modal

Penanaman modal di Provinsi Papua dilihat dari realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri dan Dalam Negeri. Adapun jumlah investor di Provinsi Papua pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah proyek mencapai 127 unit dan di tahun 2023 menurun mencapai 73 unit. Realisasi investasi penanaman modal luar negeri di Provinsi Papua juga mengalami penurunan menjadi 8,3 juta US\$ pada tahun 2023. Jumlah proyek dan realisasi investasi pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel II.78.

Tabel II.69 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Juta US\$)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Juta US\$)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Papua	127	184	95	86	73	941	567,7	1.489,1	1.260,5	8,3
Indonesia	30.354	36.726	27.271	32.681	70.898	28.208,8	28.666,3	31.093,1	45.605	50.267,5

Sumber: BPS RI, 2024

Jumlah proyek pada penanaman modal dalam negeri cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019 hingga 2023 dengan proyek pada tahun 2019 sebanyak 68 unit dan 2023 sebanyak 971 unit. Realisasi investasi juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Jumlah proyek dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2023 mencapai 971 unit dengan realisasi investasi sebesar 1.174,1 miliar rupiah.



Tabel II.70 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Miliar Rupiah)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Papua	68	323	473	754	971	567,7	2.722,2	911	1.311,8	1.174,1
Indonesia	30.451	96.623	106.002	124.582	266.722	386.498,4	413.535,5	447.063,6	552.769	674.923,4

Sumber: BPS RI, 2024

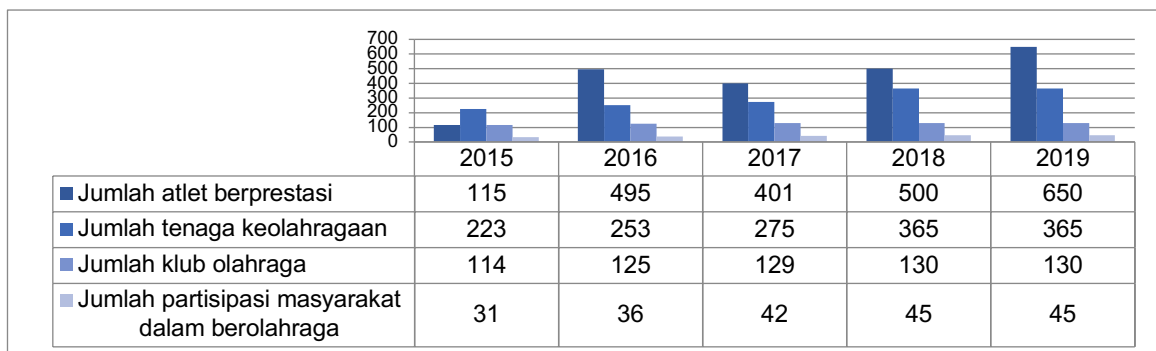
2.3.2.11 Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga di Provinsi Papua dilihat dari keorganisasian yang ada dan sarana prasarana olahraga sebagai fasilitas olahraga. Organisasi terbagi menjadi dua yaitu organisasi keolahragaan dan kepemudaan. Sarana dan Prasarana olahraga menjadi penunjang untuk kegiatan olahraga yang ada di Provinsi Papua.

1) Organisasi Keolahragaan

Organisasi keolahragaan menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mengembangkan minatnya pada bidang olahraga. Provinsi Papua mengalami kenaikan klub olahraga dikarenakan semakin banyaknya kegiatan olahraga dari berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga nasional. Pemberdayaan organisasi keolahragaan dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.76.

Gambar II.72 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



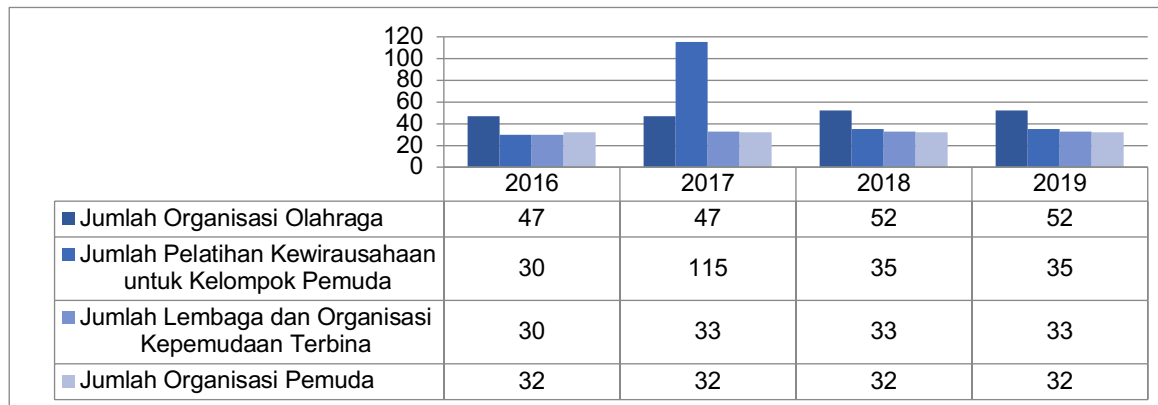
Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

Berdasarkan Gambar II.76, diketahui bahwa, jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga semakin meningkat dari tahun 2015-2019 begitu juga dengan jumlah atlet berprestasi, klub olahraga, dan jumlah tenaga keolahragaan. Banyaknya klub olahraga juga diikuti dengan meningkatnya jumlah atlet-atlet berprestasi di tingkat kabupaten hingga internasional dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan jumlah tersebut, organisasi keolahragaan di Provinsi Papua semakin mengalami peningkatan dalam mendukung bidang olahraga.

2) Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu bentuk atau wadah bagi para pemuda untuk mengembangkan diri. Terdapat empat indikator bagi pemberdayaan pemuda di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019, di antaranya adalah organisasi olahraga, lembaga dan organisasi kepemudaan terbina, organisasi pemuda, dan pelatihan kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda.

Gambar II.73 Jumlah Organisasi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi Papua Tahun 2016-2019 (Unit)



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Indikator-indikator tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah unit yang ada. Jumlah unit organisasi olahraga di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019, diikuti dengan jumlah unit lembaga dan organisasi kepemudaan terbina, dan jumlah organisasi pemuda. Satu indikator yang mengalami penurunan ditinjau dari unit adalah jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemuda. Keempat indikator tersebut beserta jumlah unit pada tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar II.77.

Kepemudaan di Provinsi Papua juga ditinjau berdasarkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP Papua semakin meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dari 49,83 menjadi 52,00. Penyumbang kenaikan pada angka IPP bersumber dari domain kesehatan dari 67,50 menjadi 75,00 dan domain partisipasi kepemimpinan dari 46,67 menjadi 53,33.

Tabel II.71 Perkembangan Nilai IPP dan Domain Penyusun IPP Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2019-2023

WILAYAH	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022
PAPUA	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	49,83	50,17	52,00	55,50
	a. Domain Pendidikan	56,67	56,67	56,67	60,00
	b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	67,50	67,50	75,00	82,50
	c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	45,00	50,00	45,00	55,00
	d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	46,67	46,67	53,33	53,33
	e. Domain Gender dan Diskriminasi	33,33	30,00	30,00	26,67
INDONESIA	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,67	51,00	53,33	55,33
	a. Domain Pendidikan	70,02	70,01	70,00	70,00
	b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	55,00	55,00	60,00	65,00
	c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	45,00	40,00	40,00	45,00



WILAYAH	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022
	d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	46,66	46,67	43,33	43,33
	e. Domain Gender dan Diskriminasi	46,67	43,33	53,33	53,33

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam dokumen Indeks Pembangunan Pemuda 2024

3) Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga merupakan fasilitas fisik untuk menunjang kebutuhan dalam berolahraga. Provinsi Papua memiliki sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang penduduk melakukan kegiatan olahraga. Berdasarkan Tabel II.81, diketahui bahwa terdapat sejumlah fasilitas penunjang berbagai jenis olahraga yang ada di Provinsi Papua ditinjau dari desa/kelurahan. Pada tahun 2021, fasilitas olahraga terbanyak pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua adalah fasilitas sepak bola dan bola voli.

Tabel II.72 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2021

No	Kabupaten	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja	Futsal	Renang	Bela Diri	Bilyard	Lainnya
1	Jayapura	74	120	29	16	4	15	26	4	7	7	2
2	Kepulauan Yapen	36	61	3	1	1	2	4	1	2	3	1
3	Biak Numfor	116	192	7	3	4	4	9	1	2	3	0
4	Sarmi	36	53	4	1	1	1	8	0	3	1	0
5	Keerom	34	76	18	4	0	12	7	1	14	3	0
6	Waropen	10	28	2	1	0	3	3	0	1	0	0
7	Supiori	17	37	2	2	0	2	0	0	0	0	0
8	Mamberamo Raya	34	47	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kota Jayapura	23	30	15	14	11	5	14	5	11	5	1

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021

2.3.2.12 Statistik

Statistik di Provinsi Papua dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Ketersediaan dokumen statistik diperlukan dalam rangka perencanaan serta pembangunan di Provinsi Papua yang berdasarkan pada hasil perhitungan. Instansi yang bergerak dalam penyediaan dokumen statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan salah satu unit yang berada di bawah naungan Bappeda yaitu Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua (PUSDALISBANG). PUSDALISBANG memiliki muatan utama berupa statistik hasil pembangunan dari penggunaan dana OTSUS Papua, penyediaan data SID, analisis statistik kinerja pembangunan, dan penyajian data tematik baik secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. PUSDALISBANG Provinsi Papua juga mengembangkan e-Government sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

2.3.2.13 Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/ Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh; peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua.

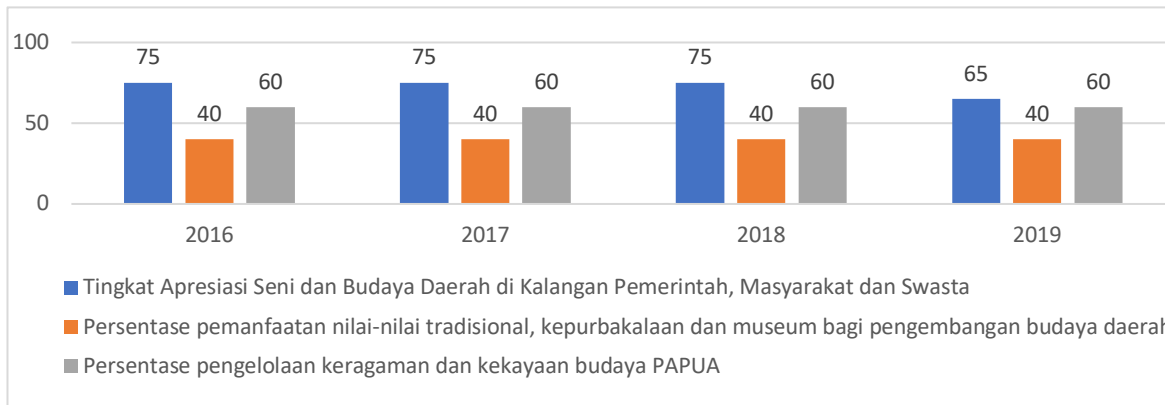
Tabel II.73 Perkembangan Warisan Tak Benda Papua

Tahun	No	Karya Budaya	Kategori
2013	67	Yosim Pancar	Seni Pertunjukan
	68	Ukiran Asmat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	69	Barappen	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	70	Tifa	Seni Pertunjukan
	77	Noken	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	119	Papeda	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	120	Tomako Batu	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	121	Koteka	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	141	Wor Biak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	142	Elha	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
	143	Aker	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
	144	Honai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	145	Khombow	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	146	Terfo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	143	Yu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	144	Pokem	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018' (Catatan : Belum dipisah 29 Kab/Kota)



Gambar II.74 Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua

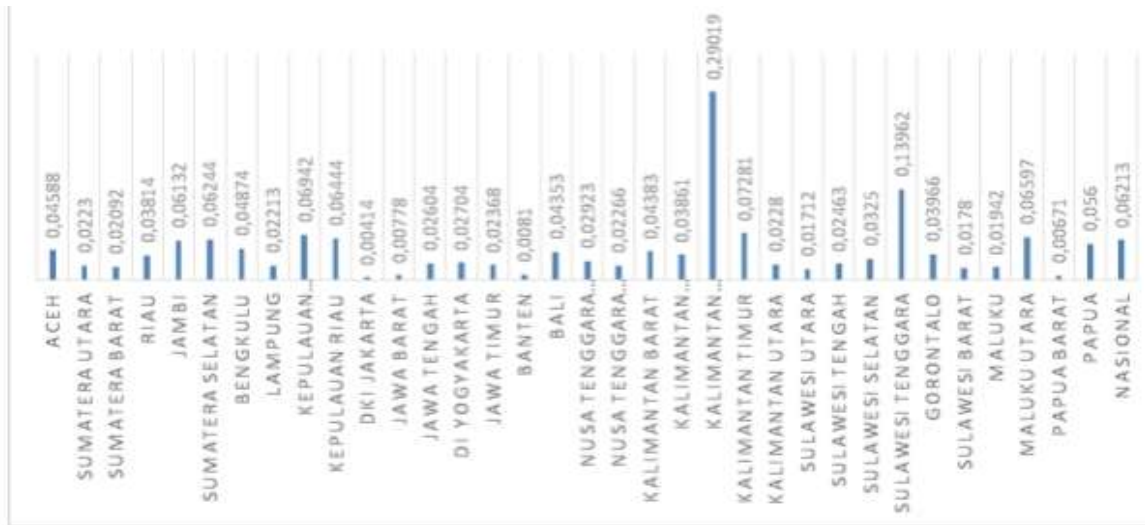
Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan perlindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya Tercatat pada tahun 2016 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.

2.3.2.14 Perpustakaan

Perpustakaan di Provinsi Papua dapat dilihat dari ketercukupan jumlah koleksi. Jumlah koleksi dapat dikatakan mencukupi jika setiap satu orang penduduk membaca dua koleksi berdasarkan ketentuan IFLA/UNESCO. Secara nasional, rasio ketercukupan jumlah koleksi masih belum mencukupi ketentuan IFLA/UNESCO. Berdasarkan data rasio jumlah koleksi koleksi dari IFLA/UNESCO, Provinsi Papua memiliki rasio sebesar 0,056.

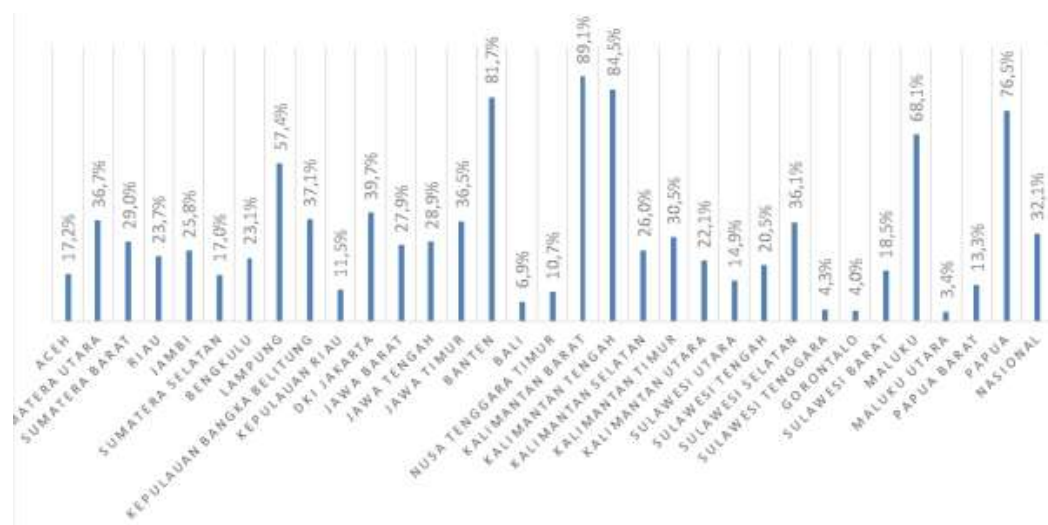
Gambar II.75 Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori Dari IFLA/UNESCO pada 34 Provinsi Di Indonesia Dan Secara Nasional



Sumber: Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan data rasio ketercukupan dengan penilaian IFLA/UNESCO pada Gambar II.79, diketahui bahwa seluruh provinsi di Indonesia masih belum memenuhi ketercukupan jumlah koleksi memenuhi ketercukupan jumlah koleksi. Meski begitu, secara persentase jumlah koleksi buku yang dipinjam terhadap keseluruhan koleksi buku, Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi dengan persentase tertinggi setelah Provinsi Banten. Persentase tersebut ditunjukkan pada Gambar II.80.

Gambar II.76 Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Keseluruhan Koleksi Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional

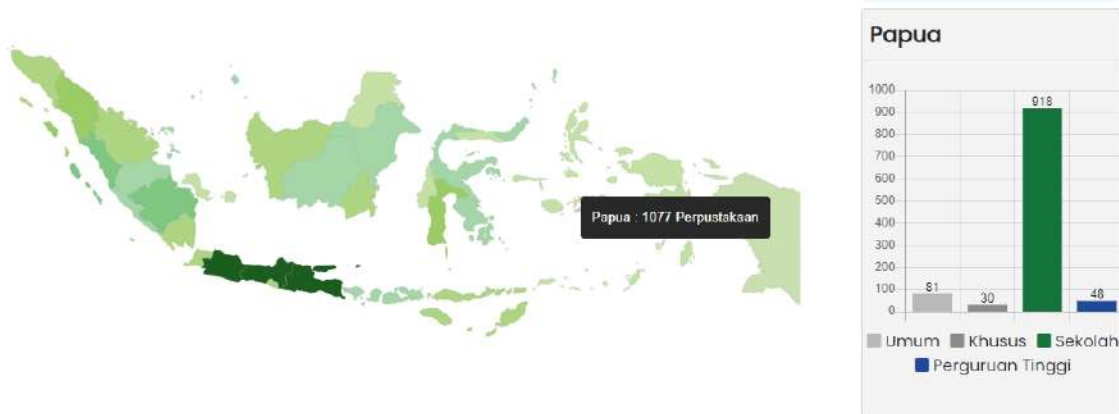


Sumber: Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024



Berdasarkan data perpustakaan dalam website pendataan perpustakaan berbasis wilayah, jumlah perpustakaan di Provinsi Papua mencapai 1077 unit yang meliputi perpustakaan sekolah sebanyak 918 unit, umum sebanyak 81 unit, perguruan tinggi sebanyak 48 unit, dan khusus sebanyak 30 unit. Jumlah perpustakaan ditunjukkan pada Gambar II.81.

Gambar II.77 Sebaran Perpustakaan Dalam Peta Secara Nasional

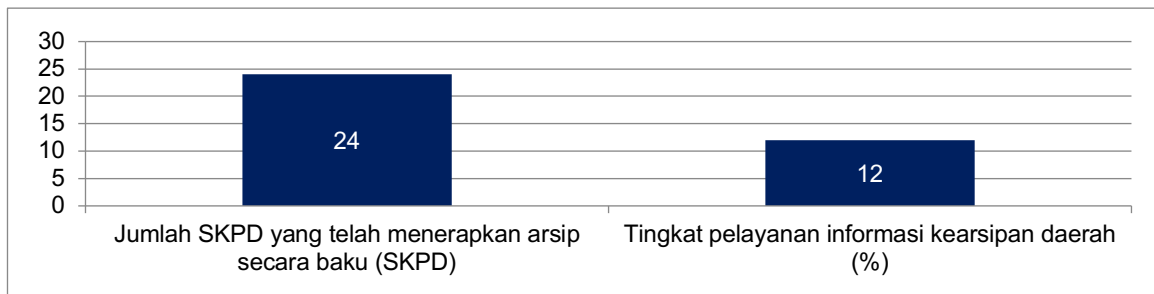


Sumber: data.perpusnas.go.id

2.3.2.15 Kearsipan

Urusan kearsipan di Provinsi Papua meliputi berbagai kegiatan di dalamnya meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam arsip nasional. Pengelolaan arsip didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan lainnya. Tenaga arsip dalam mengelola kearsipan merupakan tenaga arsip dari Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku dan telah mengikuti berbagai pembekalan terkait kearsipan. Perangkat Daerah di Provinsi Papua yang telah menerapkan arsip buku secara baku baru berjumlah 24 PD, sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa PD yang belum menerapkan arsip secara baku.

Gambar II.78 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Provinsi Papua memiliki jumlah akomodasi sebanyak 28 unit, 2148 kamar dan 3019 tempat tidur yang tersebar di Kabupaten Jayapura, kepulauan Yapen, Biak Numfor dan kota Jayapura pada tahun 2021 (lihat Tabel II.83). Kota Jayapura merupakan wilayah yang paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang pariwisata. Pengembangan/ pembangunan layanan akomodasi perlu lebih ditingkatkan di Kabupaten Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori dan Mamberamo Raya karena sampai dengan tahun 2021 belum memiliki layanan akomodasi dalam mendukung kegiatan pariwisata daerah.

Tabel II.74 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	2019			2020			2021		
		Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
1	Jayapura	4	293	463	5	231	611	5	428	695
2	Kepulauan Yapen	1	31	50	1	26	51	1	30	51
3	Biak Numfor	2	78	106	2	57	106	2	78	111
4	Sarmi									
5	Keerom									
6	Waropen									
7	Supiori									
8	Mamberamo raya									
9	Kota Jayapura	15	1170	1886	15	1093	1756	20	1612	2162
PROVINSI PAPUA		22	1572	2505	23	1407	2524	28	2148	3019

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

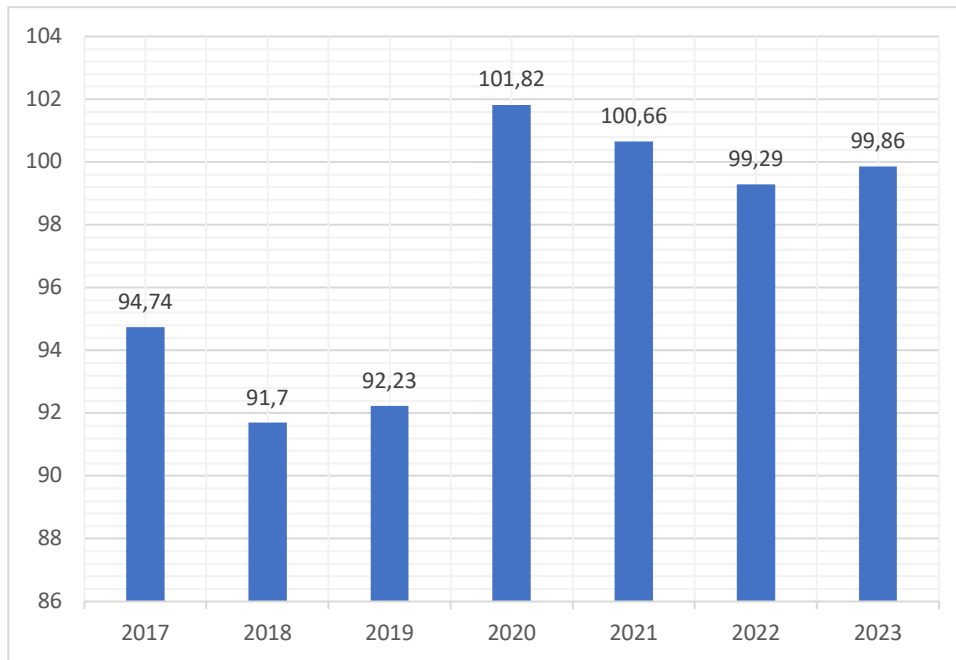
2.3.3.2 Pertanian

NTP (Nilai Tukar Petani) di Provinsi Papua sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat, tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Perkembangan NTP Provinsi Papua selama tahun 2017–2023 dalam kurun waktu 7 tahun NTP Papua menunjukkan kecenderungan meningkat, hingga sampai tahun 2023 sebesar 99,86 persen. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa kondisi petani di Papua mengalami surplus. Mulai tahun 2018-2020 terindikasi harga produksinya lebih rendah dibandingkan kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami penurunan lebih jauh dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan para petani semakin berkurang dibandingkan tingkat kesejahteraan sebelumnya.



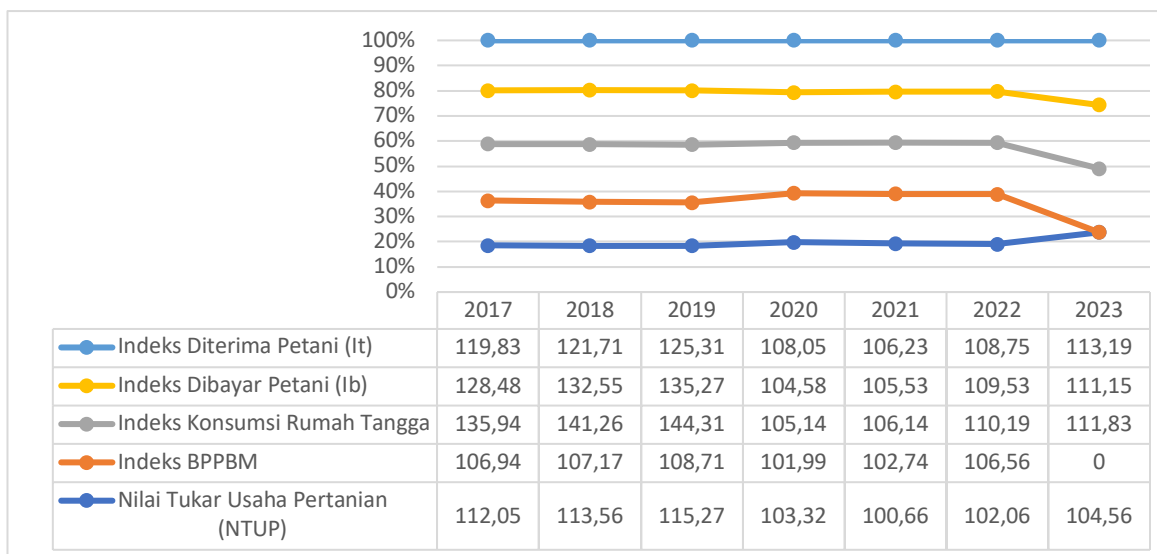
Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan masing-masing komponen pembentuk NTP Papua, terlihat seluruh komponen mengalami trend negatif. Meskipun demikian capaian komponen nilai tukar petani berada pada angka rata-rata diatas 100 persen. Sehingga hal tersebut memiliki dampak yang baik dalam peningkatan kesejahteraan petani di Papua.

Gambar II.79 Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2017-2023



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Gambar II.80 Komponen Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2017-2023



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Produksi komoditas di Provinsi Papua paling tinggi berupa Produksi Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua mencapai 6.340,06 Ton dan produksi padi setara beras mencapai 2.601,42 Ton Tahun 2021. Produksi komoditas tertinggi berada di Kabupaten Jayapura, sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.84.

Tabel II.75 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)
1 Jayapura	3.193,21	813,87	591	1044
2 Yapen			167	162
3 Biak Numfor			764	
4 Sarmi	78,94	44,84	209	37
5 Keerom	135,92	77,21	517	290
6 Waropen	56,49	32,08	64	38
7 Supiori			12	
8 Mamberamo Raya				
9 Kota Jayapura	2.875,5	1633,42	321	5
Provinsi Papua	6.340,06	2.601,42	2.645	1.576

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.3.3.3 Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai produksi tercatat sesuai data BPS diantaranya adalah hasil perikanan tangkap di laut dan juga perikanan umum di daratan. Dari wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak memiliki hasil produksi perikanan tangkap di laut, sedangkan wilayah dengan hasil yang lengkap adalah di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen. Produksi hasil perikanan tangkap di laut Provinsi Papua tahun 2021 ada sebanyak 126.675 ton.

Tabel II.76 Produksi Komoditas Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Perikanan tangkap di laut		Perikanan perairan umum daratan	
	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)
1 Jayapura	19.015	690.399.360	741	6.704.392
2 Yapen	6.165	193.500.017	-	-
3 Biak Numfor	41.124	1.474.923.137	-	-
4 Sarmi	16.396	489.494.238	-	-
5 Keerom	-	-	-	-
6 Waropen	831	21.100.857	511	4.602.888
7 Supiori	1.889	54.290.770	-	-
8 Mamberamo Raya	-	-	-	-
9 Kota Jayapura	41.255	1.496.675.020	-	-
Provinsi Papua	126.675	4.420.383.399	1.252	11.307.280

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023



2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi terutama fasilitas kelistrikan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena kebutuhan listrik tidak hanya bersumber dari rumah tangga, tetapi juga kebutuhan instansi pemerintah, perkantoran dan industri. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Papua. Tabel II.86 menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan di Papua. Berdasarkan Tabel II.86 diketahui bahwa rata-rata rumah tangga yang telah memiliki sumber penerangan listrik di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sebanyak 74,04%. Dalam hal ini, daerah yang perlu diprioritaskan dalam percepatan akses listrik di Provinsi Papua adalah Kabupaten Mamberamo Raya dan Supiori.

Tabel II.77 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
1	Jayapura	91,47	3,25	5,28	100,00
2	Kepulauan Yapen	70,95	12,20	16,85	100,00
3	Biak Numfor	99,79	0,20	0,01	100,00
4	Sarmi	87,91	7,83	4,27	100,00
5	Keerom	82,82	6,27	10,91	100,00
6	Waropen	63,35	26,12	10,54	100,00
7	Supiori	66,14	7,18	26,68	100,00
8	Mamberamo Raya	4,46	86,46	9,08	100,00
9	Kota Jayapura	99,45	0,18	0,37	100,00
Provinsi Papua (*rata-rata kab/kota)		74,04	16,63	9,33	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Tabel II.87 menunjukkan produksi listrik menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.87 diketahui bahwa daya listrik terpasang di Provinsi Papua adalah 271.635 KW dengan produksi listrik sebesar 693.684.781 KWh, listrik terjual sebesar 614.472.107 KWh, dipakai sendiri sebesar 8.903.206 KWh, susut/hilang sebesar 70.309.468 KWh.

Tabel II.78 Produksi Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Daya terpasang	Produksi listrik	Listrik terjual	Dipakai sendiri	Susut hilang
	KW	KWh	KWh	KWh	KWh
1 Jayapura	32.876	114.740.369	104.309.426	-	10.430.943
2 Yapen	1.400	34.819.284	28.826.054	2.015	5.991.215
3 Biak Numfor	49.892	79.862.556	71.349.975	995.682	7.516.899
4 Sarmi	4.890	12.730.661	11.366.662	-	1.363.999
5 Keerom	306	24.068.325	22.121.622	-	1.946.703
6 Waropen	1.172	8.206.725	7.147.972	-	1.058.753
7 Supiori	-	10.068.731	8.832.220	-	1.236.511
8 Mamberamo Raya	-	-	-	-	-
9 Kota Jayapura	181.099	409.188.130	360.518.176	7.905.509	40.764.445
Provinsi Papua	271.635	693.684.781	614.472.107	8.903.206	70.309.468

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.3.3.5 Perdagangan

Provinsi Papua melakukan ekspor bijih tembaga dan konsentrat (HS26) dengan volume ekspor mencapai 1.728.475.100 ton atau sekitar 90,99 persen dari total volume ekspor provinsi Papua pada tahun 2021. Total volume ekspor Provinsi Papua sendiri adalah sekitar 1.899.612.101 ton di tahun tersebut. Negara penerima ekspor terbesar dari Papua adalah Negara Jepang, dengan nilai ekspor ke negara tersebut sekitar US\$ 1.366.460.621. Selain Jepang, dua negara lain yang menjadi penerima ekspor terbesar Papua adalah negara Asia lainnya dan Korea Selatan dengan nilai ekspor masing-masing mencapai US\$ 648.696.536 dan US\$ 637.536.734. Perkembangan impor di Provinsi Papua cukup fluktuatif, dengan mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir. Nilai impor Papua mengalami peningkatan dari US\$ 191.719.492 di tahun 2020 menjadi US\$ 272.239.487 di tahun 2021.

2.3.3.6 Perindustrian

Perusahaan industri besar dan sedang di Papua tahun 2020 tersebar di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kabupaten Jayapura (7 industri), Kota Jayapura (10 industri), Kepulauan Yapen (1 industri) dan Biak Numfor (3 industri). Perusahaan industri besar dan sedang mampu menyerap tenaga kerja di Provinsi Papua tahun 2020 sebanyak 1165 tenaga kerja. Adapun lokasi dengan penyerapan tenaga kerja industri besar dan sedang tertinggi terdapat di Kabupaten Biak Numfor (452 tenaga kerja) dan Kota Jayapura (386 tenaga kerja), sebagaimana ditampilkan dalam Tabel II.88.

Berdasarkan survei industri mikro dan kecil tahunan, dari total industri di Provinsi Papua didominasi usaha industri mikro dan kecil yang mencapai 9.748 industri pada tahun 2020 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Industri mikro dan kecil di Provinsi Papua mampu menyerap tenaga kerja sebesar 16.836 tenaga kerja. Lokasi industri mikro dan kecil terbanyak terdapat di Kabupaten Biak Numfor (2.542 industri), Kabupaten Supiori (1.745 industri), dan Kepulauan Yapen (1.731 industri). Adapun penyerapan tenaga kerja industri mikro dan kecil terbanyak terdapat di Biak Numfor (4.230 tenaga kerja), Kepulauan Yapen (3.403 tenaga kerja), serta Kota Jayapura (3.389 tenaga kerja), sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.88.

Tabel II.79 Jumlah Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020

Kabupaten/Kota	Industri Mikro dan Kecil		Industri Besar dan Sedang	
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
Jayapura	1.227	2.011	7	325
Kepulauan Yapen	1.731	3.403	1	2
Biak Numfor	2.542	4.230	3	452
Sarmi	96	98	0	0
Keerom	179	307	0	0
Waropen	455	776	0	0
Supiori	1.745	2.414	0	0
Mamberamo Raya	89	208	0	0
Kota Jayapura	1.684	3.389	10	386



Kabupaten/Kota	Industri Mikro dan Kecil		Industri Besar dan Sedang	
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
Papua	9.748	16.836	21	1.165

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.4 ASPEK DAYA SAING

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Salah satu aspek daya saing bagi suatu wilayah adalah melalui kemampuan ekonomi. Daya saing ekonomi daerah di Provinsi Papua ditinjau dari kinerja PDRB, PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita.

2.4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Sektor utama penopang perekonomian Provinsi Papua selama periode 2019-2022 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Pasca DOB di tahun 2023, terjadi pergeseran struktur ekonomi Provinsi Papua, sektor Transportasi dan Pergudangan menggeser sektor Pertambangan dan Penggalian. Hal ini disebabkan PT. FI sebagai kontributor utama sektor Pertambangan dan Penggalian tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Provinsi Papua sehingga kontribusidari sektor tersebut di tahun 2023 hanya sebesar 0,84 persen dibandingkan kontribusinya di tahun 2022 yang sebesar 38,60 persen. Untuk tahun 2023, sektor utama penopang perekonomian Provinsi Papua adalah sektor Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Transportasi dan Pergudangan.

Tabel II. ...1 Kontribusi Sektor Utama PDRB Provinsi Papua menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,76	12,28	10,84	10,30	14,46
2	Pertambangan dan Penggalian	23,56	28,21	36,82	38,60	
3	Konstruksi	16,13	15,43	13,86	13,75	20,33
4	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,91	10,51	9,37	9,20	16,04
5	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,81	11,07	9,34	8,53	11,60
6	Transportasi dan Pergudangan					8,04

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Dari sisi pengeluaran, kontributor utama untuk perekonomian Provinsi Papua selama periode 2019-2022 adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga;

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Ekspor Barang dan Jasa; serta Impor Barang dan Jasa. Pasca DOB di tahun 2023, terjadi pergeseran struktur ekonomi Provinsi Papua, skomponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menggeser komponen Ekspor Barang dan Jasa. Meningkatnya komponen Impor Barang dan Jasa mengindikasikan bahwa cukup besar konsumsi di Provinsi Papua yang bukan dihasilkan sendiri namun berasal dari luar Provinsi Papua.

Tabel II. ...2 Kontribusi Sektor Utama PDRB Provinsi Papua menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)

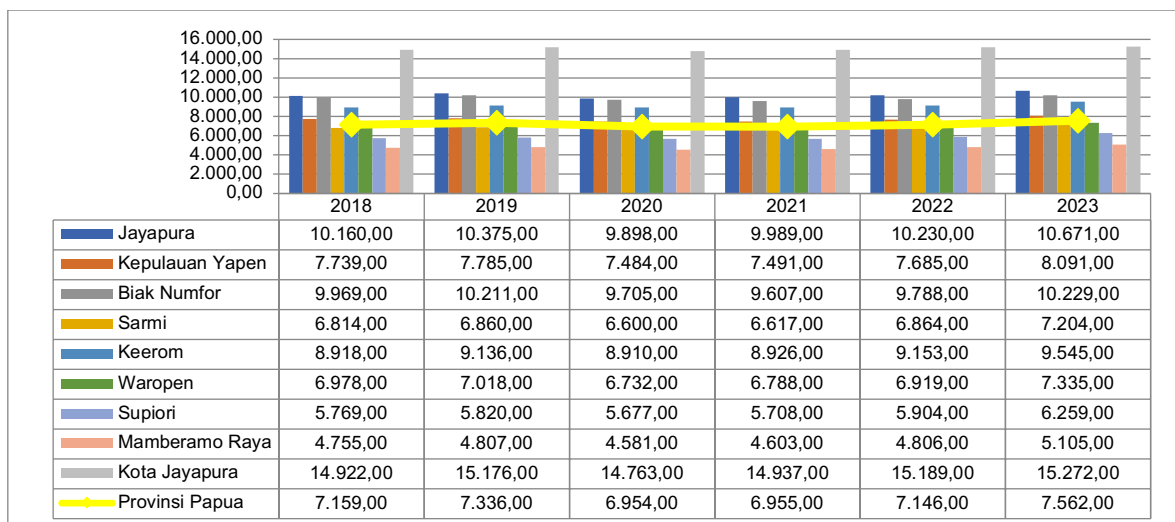
No	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,60	50,73	44,04	43,49	54,99
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	36,94	34,79	32,82	31,92	39,34
3	Ekspor Barang dan Jasa	30,02	32,81	46,17	55,14	
4	Impor Barang dan Jasa	47,02	41,88	45,01	49,75	58,37
5	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah					31,29

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.4.1.2 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita dapat dilihat melalui pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga menjadi ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Gambar II.81 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023



Semakin tinggi pengeluaran per kapita menunjukkan semakin banyak uang yang dikeluarkan tiap anggota rumah tangga setiap bulannya. Perhitungan pengeluaran per kapita sudah dihitung menggunakan metode baru. Adapun pengeluaran per kapita di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar II.85.

Berdasarkan Gambar II.85, pengeluaran per kapita tertinggi dari tahun 2018-2023 adalah Kota Jayapura dengan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 mencapai 15.272 rupiah diikuti oleh Kabupaten Jayapura sebesar 10.671 rupiah dan Kabupaten Biak Numfor sebesar 10.229 rupiah. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah yaitu sebesar 5.105 rupiah pada tahun 2023.

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Realisasi Indeks Pendidikan di Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2023 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Provinsi Papua sehingga berdampak produktivitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar dalam mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat. Unsur pembangunan literasi masyarakat terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan. Sedangkan unsur aspek masyarakat meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah civitas sekolah dan akademika. Data mengenai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Papua belum tersedia, namun berikut adalah informasi mengenai literasi di Papua:

- Berdasarkan data Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) 2022, Papua memiliki tingkat literasi terendah di Indonesia.
- Beberapa kendala yang dihadapi untuk meningkatkan literasi di Papua adalah:

- Ketersediaan bahan bacaan yang tidak merata
 - Kondisi gedung perpustakaan daerah yang kurang nyaman
 - Budaya Papua yang lebih didominasi oleh budaya tutur
 - Dukungan guru yang menguasai literasi sangat minim
- Beberapa saran untuk meningkatkan literasi di Papua adalah:
 - Orangtua menanamkan budaya literasi pada anak sejak dini
 - Menggalakkan program membaca keluarga
 - Mendorong kolaborasi antara komunitas dan pemerintah
 - Pemerintah mendukung gerakan-gerakan dari komunitas literasi

Indeks Literasi Digital

Perkembangan digitalisasi di Indonesia yang sangat signifikan beberapa tahun belakangan ini ikut mendorong terciptanya ekosistem digital yang semakin baik. Pemetaan kompetensi digital masyarakat di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022) melalui survei status literasi digital dan mengukurnya menjadi indeks literasi digital Indonesia. Terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Keempat pilar ini dijadikan acuan untuk pengembangan program literasi digital nasional yang mencakup digital society, digital economy, dan digital government. Indeks Literasi Digital Provinsi Papua setiap tahun mengalami peningkatan, namun belum masuk kedalam 15 (lima belas) besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia dan berada diatas skor Nasional.

2.4.2.1 Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Guna mencapai tujuan pembangunan, salah satu hal yang dimuat di dalamnya adalah mengenai aparatur pemerintah. Pemerintah perlu bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, profesional, dapat memberikan pelayanan publik, dan berperan sebagai perekat kesatuan bangsa. Tugas aparatur sipil negara adalah melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembantuan tertentu. Penyiapan ketersediaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kualitas secara proporsional di semua instansi menjadi arahan terkait kebijakan pembangunan kepegawaian di daerah.

Salah satu aparatur sipil negara daerah di Provinsi Papua adalah Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2023, PNS di lingkungan instansi Provinsi Papua berjumlah 6.979 orang berdasarkan hasil pencatatan dari Badan Kepegawaian Negara. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, data untuk tahun 2023 cenderung mengalami penurunan jumlah. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 2023, data masih merupakan data sebelum pemekaran. Jumlah PNS pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 3.725 orang. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditempuh PNS di Provinsi Papua adalah S1 yaitu sebanyak 3.108 orang.



Tabel II.80 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023

Tingkat Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD	109	70	31	9	8	3	118	78	34
SMP	205	171	78	31	27	10	236	198	88
SMA	4402	4095	1074	1962	1680	547	6364	5775	1621
Diploma I/Akta I	208	216	3	75	86	10	283	302	13
Diploma II/Akta II	118	101	7	37	29	4	155	130	11
Diploma III/Akta III	1217	1339	315	1192	1231	596	2409	2570	911
Diploma IV/Akta IV	440	496	54	256	256	75	696	752	129
S1/Sarjana	6809	6591	1557	6178	6011	1551	12987	12602	3108
S2/Pasca Sarjana	2013	2109	583	1263	1422	453	3276	3531	1036
S3/Doktor/Ph.D	122	129	23	38	42	5	160	171	28
Jumlah	15643	15317	3725	11041	10792	3254	26684	26109	6979

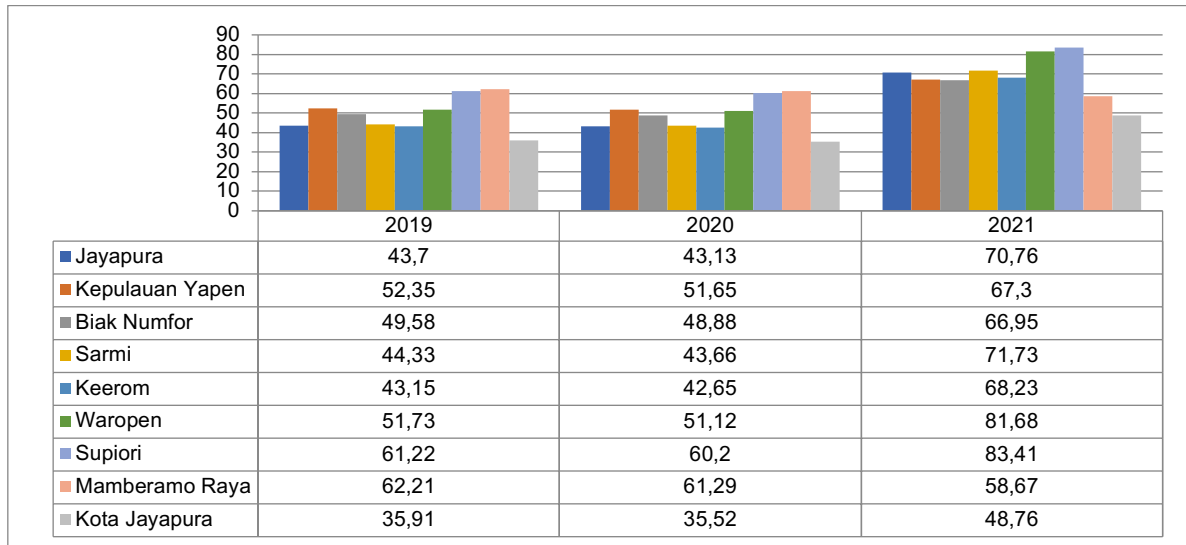
Sumber: BPS dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

2.4.2.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan rasio untuk menunjukkan keadaan ekonomi yang digolongkan dalam negara maju atau negara berkembang. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif maupun tidak produktif lagi menjadi semakin tinggi. Persentase rasio ketergantungan di Provinsi Papua pada tahun 2019-2021 ditunjukkan pada Gambar II.86.

Berdasarkan Gambar II.86, diketahui bahwa rasio ketergantungan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua meningkat pada tahun 2021. Kabupaten dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura menjadi kota dengan rasio ketergantungan terendah pada tahun 2021. Rasio ketergantungan yang cenderung meningkat pada tahun 2021 di Provinsi Papua menandakan bahwa semakin banyak penduduk produktif yang harus menanggung sejumlah penduduk yang belum produktif maupun tidak produktif lagi.

Gambar II.82 Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.4.3.1 Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi merupakan sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh masyarakat untuk mobilitas. Oleh karenanya, ketersediaan prasarana transportasi menjadi salah satu fasilitas digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Tabel II.81 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum

Kabupaten	Jenis Prasarana Transportasi				Ketersediaan Angkutan Umum		
	Darat	Air	Darat dan Air	Udara	Ada, Dengan Trayek Tetap	Ada, Tanpa Trayek Tetap	Angkutan Umum
Jayapura	109	16	19	0	83	43	18
Kepulauan Yapen	64	50	49	2	53	41	71
Biak Numfor	195	4	69	0	172	73	23
Sarmi	84	14	13	0	64	16	31
Keerom	82	4	5	0	13	14	64
Waropen	62	3	36	10	0	41	70
Supiori	14	8	16	0	22	13	3
Mamberamo Raya	1	43	15	0	3	6	50
Kota Jayapura	36	1	2	0	34	5	0

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

Jenis prasarana transportasi darat menjadi jenis transportasi dengan jumlah terbanyak yang digunakan oleh Masyarakat. Adapun prasarana transportasi darat dan darat dan air terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Biak Numfor dengan masing-masingnya sebanyak 195 unit dan 69 unit. Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi kabupaten dengan prasarana transportasi air terbanyak. Lalu Kabupaten Waropen menjadi kabupaten dengan prasarana



transportasi udara terbanyak yaitu berjumlah 10 unit. Adapun ketersediaan angkutan umum dengan dan tanpa trayek tetap terbanyak berada di Kabupaten Baik Numfor yaitu 172 unit dan 73 unit. Sedangkan angkutan umum terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu sebanyak 71 unit disusul Kabupaten Waropen sebanyak 70 unit.

2.4.3.2 Infrastruktur Komunikasi

Infrastruktur komunikasi menjadi salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat untuk menjalin komunikasi dan berjejaring. Wilayah Provinsi Papua yang luas juga disertai kebutuhan akan komunikasi dan jejaring yang tinggi bagi masyarakat, infrastruktur komunikasi menjadi salah satu infrastruktur penting di wilayah Papua.

Apabila ditinjau berdasarkan masing-masing desa/kelurahan, angka ketersediaan BTS pada kategori “tidak ada”, jauh lebih banyak dibandingkan area yang telah terlayani oleh BTS, kecuali Kota Jayapura. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah pada masing-masing kabupaten/kota yang masih belum terlayani oleh sinyal seluler. Sinyal internet telepon seluler juga telah menjangkau beberapa desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten dengan paling banyak sudah terlayani oleh sinyal 4G/LTE. Namun juga masih ditemukan beberapa area pada masing-masing kabupaten yang belum terlayani sinyal internet. Kabupaten Biak Numfor menjadi kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yang tidak memiliki sinyal akses internet.

Tabel II.82 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet Telepon Seluler

Kabupaten	Keberadaan BTS		Kekuatan Sinyal Seluler				Sinyal Internet Telepon Seluler			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Kuat	Kuat	Lemah	Tidak Ada Sinyal	4G/LTE	3G/H/H+/E VDO	2,5G/1/GPRS	Tidak Ada Sinyal Internet
Jayapura	36	108	33	51	37	23	63	31	8	19
Kepulauan Yapen	16	149	4	41	51	69	61	9	8	18
Biak Numfor	57	211	77	76	75	40	149	10	30	39
Sarmi	25	86	18	33	30	30	40	18	14	9
Keerom	28	63	16	22	22	31	36	9	1	14
Waropen	11	100	2	25	13	71	24	1	0	15
Supiori	16	22	1	14	16	7	9	4	4	14
Mamberamo Raya	14	45	4	10	5	40	10	2	2	5
Kota Jayapura	31	8	23	14	1	1	38	0	0	0

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

Adapun warnet menjadi keberadaan sarana komunikasi terbanyak yang dimiliki masing-masing desa/kelurahan di Provinsi Papua. Selain itu, keberadaan sarana komunikasi lainnya yang dapat melayani masyarakat di antaranya adalah keberadaan kantor pos/pos pembantu, pos keliling, dan perusahaan jasa ekspedisi swasta.

Tabel II.83 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi

Kabupaten	Warnet	Kantor Pos/Pos Pembantu	Pos Keliling	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta
Jayapura	26	5	7	7
Kepulauan Yapen	14	1	0	3
Biak Numfor	32	11	15	8
Sarmi	10	1	1	1
Keerom	9	1	4	4
Waropen	7	1	0	5
Supiori	3	2	1	2
Mamberamo Raya	4	1	0	0
Kota Jayapura	20	9	1	16

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.4.4.1 Laju Inflasi Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Papua di 3 kota IHK, pada Januari 2023, terjadi inflasi y-o-y sebesar 5,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,76 pada Januari 2022 menjadi 112,35 pada Januari 2023. Tingkat inflasi month-to-month sebesar -0,40 persen dan tingkat inflasi year-to-date sebesar -0,40 persen. Jika dirinci menurut 3 kota HK dan inflasi mtm, maka pada Januari 2023 di Merauke terjadi inflasi sebesar 0,41 persen, Timika terjadi inflasi -0,60 persen dan Kota Jayapura dengan inflasi sebesar -0,55 persen. Sedangkan untuk inflasi yoy, terjadi inflasi sebesar 4,41 persen di Merauke, sebesar 5,75 persen di Timika dan Kota Jayapura mengalami inflasi 5,26 persen. Secara nasional, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dan terendah di Sorong sebesar 3,23 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran dan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yoy (secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.95). Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year-on-year pada Januari 2023, antara lain: angkutan udara, bensin, beras, biaya akademi/perguruan tinggi dan angkutan dalam kota. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil deflasi year-on-year antara lain: biaya ponsel, ikan ekor kuning, bawang putih, ikan tongkol, dan kangkung.

Tabel II.84 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Month to Month (mtm) Januari	-0,27	0,03	-0,40
2	Year to Date (ytd) Januari	-0,27	0,03	-0,40
3	Year on Year (yoy) Januari	0,93	2,10	5,23

Sumber: BPS Provinsi Papua

2.4.4.2 Kondisi Politik dan Keamanan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tercatat tahun 2016 IDI Papua adalah sebesar 61,02 persen meningkat 3,52 point pada



tahun 2020 menjadi 64,54 persen. Hal tersebut juga tidak terlepas dari komponen pembentuk dari setiap aspek diantaranya Aspek Kebebasan Sipil (Persen); Aspek Hak-Hak Politik (Persen); dan Aspek Lembaga Demokrasi (Persen).

Tabel II.85 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek di Provinsi Papua, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Demokrasi Indonesia (Persen)	61,02	61,34	62,20	65,25	64,54
Aspek Kebebasan Sipil (Persen)	92,15	89,09	84,36	93,08	89,32
Aspek Hak-Hak Politik (Persen)	41,13	42,16	47,90	51,16	53,54
Aspek Lembaga Demokrasi (Persen)	53,45	56,91	57,05	52,61	51,83

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan aspek pembentuk IDI, persentase hak-hak politik cenderung meningkat meskipun nilainya tergolong cukup rendah. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya yaitu kebebasan hak sipil dan Lembaga demokrasi cenderung mengalami penurunan. Meskipun cenderung aspek kebebasan sipil terlihat mengalami penurunan, tetapi capaian rata-rata pertahun tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan metode baru perhitungan IDI, terdapat perubahan indikator dalam aspek-aspek perhitungan IDI. Penggunaan indikator-indikator baru menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan bagi Provinsi Papua. Adapun nilai IDI provinsi mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 66,65 dari sebelumnya 66,39.

Tabel II.86 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek Berdasarkan Metode Baru di Provinsi Papua, 2021-2022

Uraian	2021	2022
Indeks Demokrasi Indonesia (Persen)	66,39	66,65
Aspek Kebebasan (Persen)	75,64	67,23
Aspek Kesetaraan (Persen)	62,3	67,85
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Persen)	62,15	64,63

Sumber: BPS RI, 2023

Tingkat kriminalitas di Papua tercatat dalam tiga tahun terakhir mengalami perbaikan. Tercatat terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan setiap tahunnya, sama halnya dengan resiko penduduk yang berpotensi ditindakpidanakan. Penyelesaian tindak pidana sampai dengan tahun 2021 sebesar 42,82 persen, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,79 persen. Penyelesaian kasus tindak pidana merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun angkanya tercatat menurun setiap tahunnya, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.98.

Tabel II.87 Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	3.347	4.304	4.355
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (kasus)	8.551	8.005	6.864

Uraian	2019	2020	2021
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (per 100.000 Penduduk)	248,7	234,28	199,64
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)	50,18	45,79	42,82
Tingkat Kriminalitas (Persen)	25,55	18,60	15,76

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

2.4.4.3 Produktivitas Total Daerah

Kontribusi tenaga kerja di Papua selama lima tahun terakhir terhadap produk domestik regional bruto (PDRB ADHB Tanpa Tambang) semakin baik. Jika dilihat berdasarkan tren perkembangan produktivitas total daerah selama 2017-2021 mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Ukuran produktivitas daerah dapat memvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah atau PDRB.

Tabel II.88 Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB Tanpa tambang (Rp. Juta)	122.457.689	133.409.669	144.899.565	142.683.470	148.652.165
Angkatan Kerja (jiwa/orang)	1.762.841	1.835.963	1.842.203	1.769.403	1.952.777
Produktivitas total daerah (P)	69,47	72,66	78,66	80,64	76,12

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 dan BPS Papua 2022 (data diolah)

Komponen pembentuk produktivitas total pada indikator PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan pada Angkatan kerja terjadi penurunan pada periode 2019-2020. Pandemi

i COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang berdampak kepada pengurangan tenaga kerja khususnya pada sektor swasta. Sehingga meningkatkan angka pengangguran secara keseluruhan di Provinsi Papua. Sampai dengan tahun 2021 produktivitas TK dalam perekonomian adalah sebesar Rp.76,12 Juta/TK/tahun yang tercatat menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp.80,64 Juta/TK/tahun.

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Subbab ini menjelaskan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD 2025-2045. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025, diketahui bahwa **capaian kinerja agregat jangka panjang Provinsi Papua termasuk kategori sangat tinggi**. Terdapat peningkatan capaian kinerja agregat dari 89,36% pada 2006-2011 menjadi 109,40% pada 2012-2018, kemudian terjadi peningkatan kembali menjadi 133% pada 2019-2023 (sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.87). Terdapat tren peningkatan signifikan pada capaian kinerja peningkatan iklim berinvestasi (sasaran 5), peningkatan Fasilitas wilayah (sasaran 4) serta peningkatan kesejahteraan (sasaran 1) di Provinsi Papua.

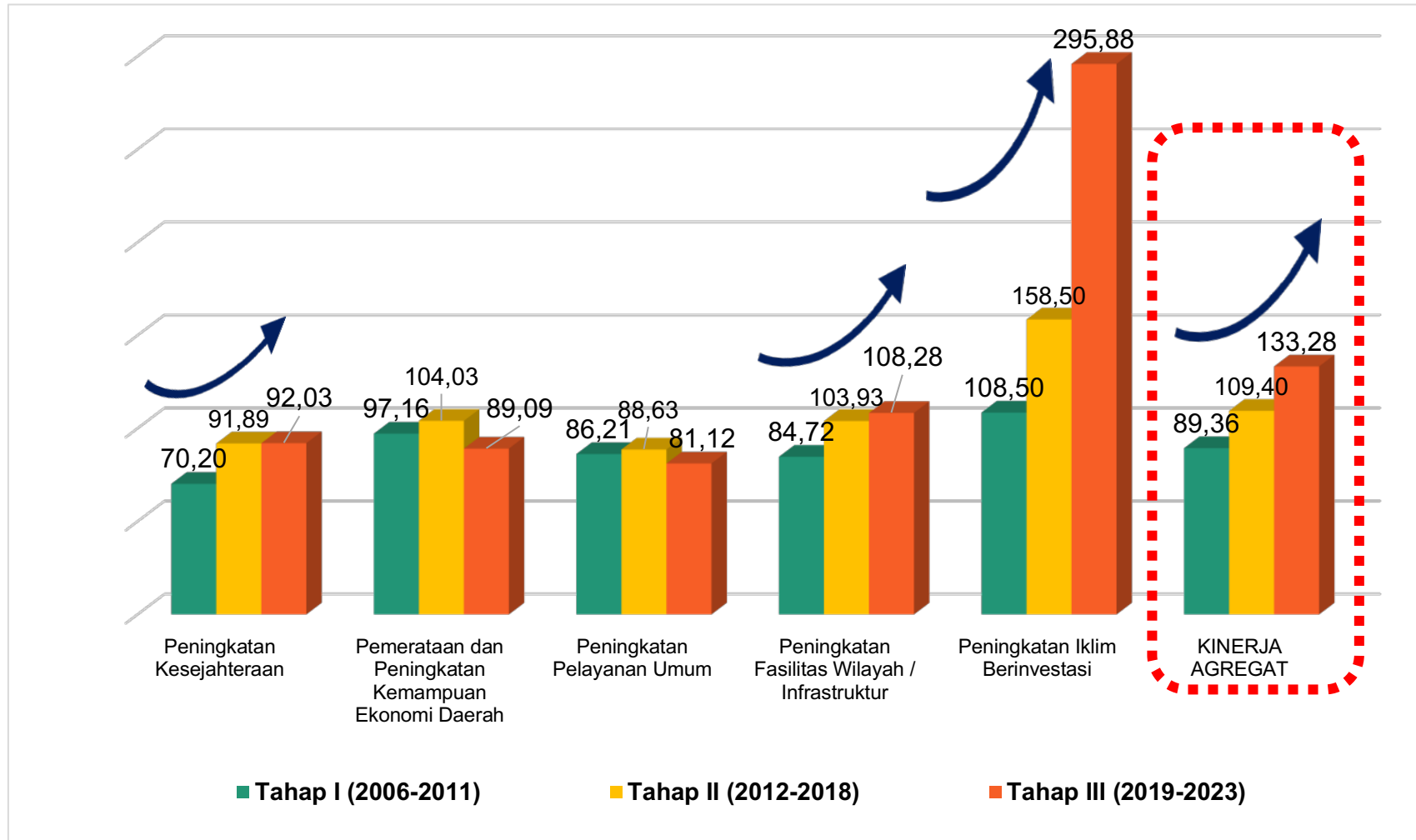


Capaian kinerja pemerataan dan peningkatan kemampuan ekonomi daerah (sasaran 2) dan Peningkatan pelayanan umum (sasaran 3) mengalami tren penurunan sehingga kedepannya perlu dikaji kembali dalam penentuan target pembangunan maupun perumusan strategi pembangunan.

Capaian peningkatan peningkatan iklim berinvestasi, peningkatan fasilitas wilayah, dan peningkatan kesejahteraan yang telah dilakukan dalam 20 tahun terakhir perlu dipertahankan untuk menjadi *enabling environment* dalam mencapai target percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua pada periode RPJPD 2025-2045.

Rekomendasi terhadap RPJPD 2025-2045 berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu: (1) peningkatan kesejahteraan; (2) pemerataan dan peningkatan kemampuan ekonomi daerah; (3) peningkatan fasilitas wilayah/ infrastruktur; dan (4) peningkatan iklim berinvestasi.

Gambar II.83 Refleksi Pembangunan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025



Sumber: Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025



2.5.1 Rekomendasi Tentang Peningkatan Kesejahteraan

Tabel II.89 Rekomendasi Tentang Peningkatan Kesejahteraan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none">1) Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan manusia, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial;2) Peningkatan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan penting. Diperlukan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau untuk semua orang;3) Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil penting dalam mencapai IPM yang tinggi. Kolaborasi ini dapat meliputi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya finansial untuk mendukung upaya pembangunan manusia yang berkelanjutan.
b	Upaya Mengentaskan Buta Huruf	<ol style="list-style-type: none">1) Fokus pengentasan buta huruf pada daerah-daerah yang buta hurufnya tinggi;2) Pengembangan dan peningkatan jaringan pemberantasan buta huruf dan inovasi pada pendidikan buta huruf;3) Pembangunan dan pengembangan PKBM pada daerah-daerah yang terisolir secara luas dan merata;4) Pembentukan tim satgas tingkat kabupaten, distrik dan kampung untuk mengoptimalkan PKBM dengan dukungan alokasi dana desa (ADD).
c	Upaya Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan	<ol style="list-style-type: none">1) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik budaya;2) Pemerintah melakukan pendataan masyarakat dengan pendapatan rendah agar dapat dibuat kebijakan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat kurang mampu baik itu ekonomi, pendidikan dan kesehatan;3) Penyediaan lapangan kerja padat karya, serta pemberian pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar;4) Peningkatan kesejahteraan petani, melalui upaya peningkatan NTP (Nilai Tukar Petani) baik itu dengan subsidi produksi maupun harga pasar;5) Menekan kenaikan harga dan kemahalan harga barang-barang konsumsi strategis pada daerah-daerah yang sulit akses;6) Pengembangan sistem redistribusi pendapatan yang dilakukan dengan mendorong adanya <i>personal social responsibility</i> (PSC) pada kelompok pendapatan menengah ke atas

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.5.2 Rekomendasi Tentang Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah

Tabel II.90 Rekomendasi Tentang Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlunya membangun korporasi dalam agrobisnis yang dapat menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak 2) Peningkatan muatan lokal berbasis SDA lokal pada sektor industri, konstruksi, dan jasa perdagangan 3) Peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan industri secara inklusif dan berkelanjutan 4) Pengembangan industri-industri berbasis pertanian, kreatif dan pariwisata yang berdaya saing 5) Penetapan regulasi daerah untuk pengembangan komoditi unggulan daerah; 6) Perlunya membangun korporasi dalam agrobisnis ubi jalar yang dapat menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani padi; 7) Peningkatan sarana dan prasarana produksi padi secara meluas dan merata; 8) Pengembangan teknologi tanaman dan diversifikasi varietas padi; 9) Peningkatan kapasitas petani padi melalui pendidikan dan pelatihan 10) Kebijakan yang mendukung pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 11) Perlunya membangun korporasi dalam agrobisnis ubi jalar yang dapat menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani ubi jalar; 12) Pengembangan agroindustri jalar yang berdaya saing dan berkelanjutan; 13) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana produksi ubi jalar, dan pengembangan teknologi tepat guna ubi kayu; 14) Pengelolaan risiko iklim dan bencana alam, dan pengendalian penyakit dan hama; 15) Pemberian dukungan keuangan dan pendampingan kepada petani ubi jalar; 16) Perlunya membangun korporasi dalam agrobisnis ubi kayu yang dapat menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani ubi kayu; 17) Pengembangan agroindustri ubi kayu yang berdaya saing dan berkelanjutan; 18) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana produksi ubi kayu, dan pengembangan teknologi tepat guna ubi kayu; 19) Pemberian dukungan keuangan dan pendampingan kepada petani ubi kayu. 20) Memperkuat kelembagaan petani sektor pertanian jagung;



No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		<ol style="list-style-type: none"> 21) Kolaboratif (pemerintah, lembaga pertanian, petani) dalam membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan sentra produksi jagung; 22) Meningkatkan infrastruktur pertanian tanaman jagung berbasis teknologi pertanian yang modern; 23) Mengelola risiko iklim, dan meningkatkan pengendalian penyakit dan hama; 24) Menyediakan akses pembiayaan dan pasar yang stabil. 25) Pemanfaatan potensi perikanan yang besar dan perbaikan kinerja sektor perikanan secara berkelanjutan; 26) Penerapan sepenuhnya ekonomi biru dalam pembangunan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan; 27) Diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga terkait, nelayan, dan masyarakat); 28) Penegakan hukum yang ketat pada kegiatan <i>illegal fishing</i>, penggunaan pukat, penangkapan ikan menggunakan bom ikan, dan pengrusakan terumbu karang; 29) Peningkatan kapasitas, dan investasi dalam infrastruktur perikanan. 30) Perlunya peningkatan pengolahan komoditas hasil perikanan, perkebunan, hasil hutan bukan kayu, dll untuk kebutuhan lintas pulau di Indonesia; 31) Perlunya membangun kerjasama antara Pulau, dengan mengandalkan komoditas unggulan Provinsi Papua yang tidak banyak dimiliki pulau lainnya di Indonesia
b	Upaya Menurunkan Tingkat Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membuka dan memperluas lapangan kerja padat karya secara merata; 2) Menciptakan partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong pengembangan ekonomi yang produktif; 3) Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar, dan memperoleh pendapatan yang lebih berimbang; 4) Peningkatan pengawasan dan penegakan Perda UMR pada para pengusaha; 5) Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 6) Diversifikasi lapangan usaha ekonomi dalam peningkatan partisipasi angkatan kerja; 7) Dilakukannya sinergitas dan kolaboratif dengan stakeholders di daerah dalam upaya mengurangi pengangguran; 8) Perluasan dan peningkatan program-program padat karya yang inovatif dan efektif guna menangani pengangguran; 9) Investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur;

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		10) Penciptaan peluang usaha dan peluang kerja baru.

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.5.3 Rekomendasi Tentang Peningkatan Pelayanan Umum

Tabel II.91 Rekomendasi Tentang Peningkatan Pelayanan Umum Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Akses dan Derajat Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) dan penyediaan fasilitas kesehatan di daerah-daerah dataran rendah sulit akses; 2) Pengembangan dan perluasan kunjungan tenaga kesehatan seluruh wilayah pedalaman sulit akses; 3) Peningkatan kualitas tim kesehatan di puskesmas yang mampu memberikan pelayanan tatalaksana balita sakit dan gizi buruk; 4) Peningkatan investasi pendidikan dan pelatihan tenaga medis dalam bidang penolong kelahiran, yang meliputi peningkatan jumlah tenaga medis yang terlatih dan meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan; 5) Peningkatan Infrastruktur dan peralatan medis yang berkualitas untuk persalinan; 6) Penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi; 7) Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pasca persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih; 8) Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga kesehatan, LSM, dan sektor swasta perlu dilakukan untuk mengimplementasikan program-program dan kebijakan yang efektif dalam mengurangi AKB; 9) Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan RS mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK); 10) Penyediaan tempat tunggu untuk kelahiran dan perawatan balita komplikasi; 11) Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pasca persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih; 12) Penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi; 13) Penjaminan ketersediaan obat dan kebutuhan sediaan darah setiap saat; 14) Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas yang mampu memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan RS mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK);



No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		<ol style="list-style-type: none"> 15) Pendidikan kesehatan yang intensif perlu diberikan kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil, keluarga, dan masyarakat sekitar, mengenai pentingnya perawatan prenatal yang baik, persalinan yang aman, dan perawatan pasca kelahiran yang tepat; 16) Program pemantauan kehamilan yang intensif dan perawatan langsung yang diberikan oleh tenaga medis yang terlatih dapat membantu mengidentifikasi risiko dan memberikan perawatan yang tepat; 17) Program penempatan dokter di daerah terpencil dan pedesaan perlu diperluas dan ditingkatkan. Insentif seperti tunjangan dan fasilitas kerja yang lebih baik dapat diberikan untuk menarik dokter ke daerah-daerah yang sulit dijangkau; 18) Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam pengembangan karir dan pengembangan profesional dokter, termasuk program pelatihan lanjutan, kesempatan penelitian, dan keterlibatan dalam manajemen kesehatan; 19) Peningkatan jumlah tenaga kebidanan dan keperawatan yang memadai sesuai proporsi jumlah penduduk; 20) Perlu ditingkatkan akses ke fasilitas kesehatan, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk meningkatkan distribusi bidan di seluruh wilayah; 21) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi Bidan; 22) Program penempatan di daerah terpencil atau pedesaan dapat mendorong perawat untuk bekerja di wilayah tersebut; 23) Peningkatan upah dan kesejahteraan perawat, termasuk tunjangan dan fasilitas kerja yang memadai, dapat meningkatkan daya tarik profesi perawat
b	Upaya Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak tidak mampu hingga tuntas belajar 12 tahun; 2) Optimalisasi peran lembaga pendidikan, organisasi profesi pendidik dan dunia usaha, serta melakukan gerakan orang tua asuh siswa; 3) Pengembangan dan peningkatan pendidikan menengah yang berkualitas dan merata; 4) Penguatan pembelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21 pada jenjang pendidikan menengah; 5) Pemenuhan dan peningkatan pemanfaatan anggaran pendidikan; 6) Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan, termasuk alokasi dana yang memadai untuk merekrut dan mempertahankan guru SD yang berkualitas; 7) Distribusi guru yang merata di berbagai daerah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil. 8) Melakukan Perencanaan anggaran yang bersumber dari DAK, OTSUS maupun APBD untuk pembangunan maupun rehabilitasi ruang belajar bagi sekolah di daerah yang sulit akses atau terisolasi demi pemerataan pendidikan. 9) Pendidikan dasar yang berkualitas dan merata;

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		<p>10) Penguatan pembelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21;</p> <p>11) Pemenuhan tenaga pendidik dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP);</p> <p>12) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik;</p> <p>13) Pemenuhan dan peningkatan pemanfaatan anggaran pendidikan;</p> <p>14) Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, termasuk penambahan ruang belajar yang memadai, fasilitas pendukung, dan perbaikan kondisi bangunan;</p> <p>15) Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan, termasuk alokasi dana yang memadai untuk merekrut dan mempertahankan guru SMP yang berkualitas;</p> <p>16) Perlu dilakukan upaya untuk memastikan distribusi guru yang merata di berbagai daerah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil, dengan memberikan insentif dan fasilitas yang memadai;</p> <p>17) Pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, serta meningkatkan akses guru terhadap sumber daya pendidikan yang relevan dan mutakhir;</p> <p>18) Pengembangan program pengajaran yang menarik dan relevan dapat meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan ke SMA/MA, sehingga meningkatkan permintaan akan guru di tingkat tersebut;</p> <p>19) Perencanaan Strategis yang baik guna mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan peningkatan alokasi guru dan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut;</p> <p>20) Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun dan memperluas infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan ruang belajar tambahan di SMA/MA yang membutuhkan;</p> <p>21) Selain ruang kelas konvensional, dapat dilakukan penyediaan ruang belajar alternatif, seperti ruang belajar berbasis teknologi atau ruang belajar berbagi yang dapat digunakan oleh beberapa sekolah dalam satu lokasi;</p> <p>22) Perlu dilakukan penyesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan alokasi ruang belajar, serta pengawasan penggunaannya agar sesuai dengan kebutuhan rasio murid SMA/MA terhadap ruang belajar;</p> <p>23) Perlu dilakukan perbaikan dalam sistem penempatan guru, termasuk analisis kebutuhan dan alokasi guru yang lebih tepat berdasarkan rasio murid SMA/MA terhadap guru di berbagai wilayah;</p> <p>24) Program Peningkatan Jumlah Guru dan Kualifikasi Guru;</p> <p>25) Diperlukan pengawasan dan monitoring yang lebih baik terkait penempatan guru, mobilitas guru, dan pemenuhan rasio murid SMA/MA terhadap guru di setiap sekolah</p>



Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.5.4 Rekomendasi Tentang Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Tabel II.92 Rekomendasi Tentang Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Elektrifikasi Penduduk	<ol style="list-style-type: none">1) Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur listrik, terutama di daerah yang belum terlayani atau sulit dijangkau;2) Intensifitas penggunaan teknologi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin dapat membantu meningkatkan aksesibilitas listrik di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik seperti di perkotaan;3) Optimalisasi penyediaan jaringan listrik ke seluruh daerah pelosok dengan melanjutkan dan memperkuat program Papua Terang;
b	Upaya Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak huni	<ol style="list-style-type: none">1) Mengembangkan kemitraan, kolaborasi, dan sinergi yang lebih baik antara seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan permukiman dan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan;2) Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program sepuluh ribu rumah layak huni;3) Percepatan penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif;4) Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat rumah sehat dan praktik yang dapat meningkatkan kualitas rumah;5) Pemerintah memberikan program subsidi membangun atau memperbaiki rumah menuju rumah sehat.
c	Upaya Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi	<ol style="list-style-type: none">1) Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan nasional;2) Pemerintah harus melakukan reformasi perizinan dan mempercepat proses perizinan untuk pembangunan jalan nasional;3) Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan provinsi guna mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut;4) Pemerintah harus memperbaiki proses perizinan pembangunan jalan;5) Pemerintah perlu mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan provinsi secara efisien dan berkelanjutan;6) Perencanaan Infrastruktur jalan yang memadai, pemeliharaan jalan dan perbaikan jalan yang terintegrasi (Jalan Trans-Papua);7) Perencanaan infrastruktur jalan kota sampai kampung-kampung;8) Pembangunan dan peningkatan bandara hub internasional dan penyediaan rute internasional;

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		<ol style="list-style-type: none"> 9) pelatihan bagi tenaga kerja pelabuhan udara dalam hal penanganan barang yang efisien dan aman; 10) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas dan kemampuan mereka dalam menangani jumlah barang yang lebih besar; 11) Pembangunan bandara perairan untuk mendukung daerah terluar sulit akses atau terisolir dan destinasi pariwisata; 12) Perlu dilakukan investasi dalam pembangunan dan perluasan infrastruktur pelabuhan udara, termasuk landasan pacu yang lebih panjang, terminal kargo yang lebih luas, dan fasilitas pengangkutan barang yang lebih efisien; 13) Perlu dilakukan perbaikan dalam pengaturan kapasitas dan proses operasional pelabuhan udara, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang dan peningkatan kerja sama antara pemangku kepentingan terkait; 14) Perlu percepatan pembangunan pelabuhan depapre sebagai pelabuhan khusus peti kemas untuk bongkar muat barang antar pulau dan luar negeri di Provinsi Papua; 15) Perlunya peningkatan pengolahan komoditas hasil perikanan, pekebunan, hasil hutan bukan kayu, dll untuk kebutuhan ekspor; 16) perlunya peningkatan kerjasama perdagangan luar negeri dengan dengan negara-negara pasifik yang terdekat dan menjajaki peluang kerjasama dengan negara-negara di amerika latin dengan memanfaatkan jaringan logistik terdekat menuju amerika; 17) Menjadikan Pelabuhan Biak sebagai gerbang Indonesia di Kawasan Timur; 18) Perlu percepatan pembangunan pelabuhan depapre sebagai pelabuhan khusus peti kemas untuk bongkar muat barang antar pulau dan luar negeri di Provinsi Papua.
d	<p>Upaya Meningkatkan Pemenuhan Air Bersih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur air bersih yang memadai, termasuk pembangunan sumur, pipa distribusi air, dan sistem penyediaan air bersih yang efisien; 2) Program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih, kebersihan, dan pengelolaan air yang baik perlu ditingkatkan; 3) Mempercepat pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman melalui strategi menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman serta berkelanjutan. 4) Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur air bersih, termasuk pembangunan sumur, pipa distribusi, dan instalasi pengolahan air; 5) Peningkatan kualitas sumber daya air melalui regulasi yang ketat dan tindakan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan pengendalian polusi, pengelolaan daerah tangkapan air, dan konservasi sumber daya air;



No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		6) Pendidikan masyarakat tentang pentingnya air bersih, sanitasi yang baik, dan praktik penghematan air dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program akses air bersih;
e	Upaya Melestarikan Hutan	<ol style="list-style-type: none">1) Penyuluhan dan pendampingan pengelola hutan pada masyarakat adat;2) Penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya lahan;3) Penataan ruang berbasis konservasi;4) Perlindungan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan;5) Pemerintah perlu menguatkan kebijakan hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hutan lindung, termasuk <i>illegal logging</i> dan kegiatan ilegal lainnya;6) Untuk mengurangi tekanan terhadap hutan lindung, diperlukan pengembangan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan, seperti pengembangan pariwisata berbasis hutan, agroforestri, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;7) Program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan lindung, manfaatnya, dan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan lindung perlu ditingkatkan;8) Harus selalu dilakukan monev terkait penebangan liar, membuka lahan lain yang merusak hutan lindung tersebut;9) Pemerintah perlu menguatkan kebijakan dan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan, termasuk penegakan hukum yang lebih efektif terhadap aktivitas ilegal;10) Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas penebangan dan eksploitasi di hutan produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan;11) Memberdayakan dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan produksi melalui pelatihan, pendidikan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian hutan produksi.

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.5.5 Rekomendasi Tentang Peningkatan Iklim Berinvestasi

Tabel II.93 Rekomendasi Tentang Peningkatan Iklim Berinvestasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Realisasi Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah perlu melakukan kampanye promosi investasi yang lebih aktif, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menarik minat investor, dengan melibatkan unsur adat; 2) Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur, terutama dalam hal transportasi dan konektivitas, guna memfasilitasi aksesibilitas dan mobilitas investor asing dalam menjalankan proyek PMA; 3) Pemerintah dapat meningkatkan upaya promosi dan kerjasama dengan negara-negara asing untuk memperluas jaringan investasi PMA. Melalui kampanye promosi yang efektif dan kerjasama bilateral yang kuat, jumlah proyek PMA dapat meningkat; 4) Penyediaan informasi investasi; 5) Regulasi yang lebih jelas, transparan, dan efisien akan mendorong investor untuk melaksanakan proyek dengan lebih cepat; 6) Program pelatihan tenaga kerja yang terarah dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal; 7) Pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi dan kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang; 8) Pelibatan dan penyadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi dalam pembangunan daerah.
b	Upaya Meningkatkan Fasilitas Keuangan Dalam Berinvestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah perlu fokus pada pengembangan infrastruktur keuangan di Papua, termasuk pembangunan jaringan perbankan yang lebih luas, peningkatan aksesibilitas ATM, dan peningkatan layanan keuangan di daerah terpencil; 2) Bank perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. 3) Peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang tinggi. Terutama untuk pengusaha muda berbagai sektor, yang saat ini harus siap menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat; 4) Peningkatan digitalisasi di sektor keuangan yang mempermudah akses terhadap berbagai produk investasi.

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.6 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

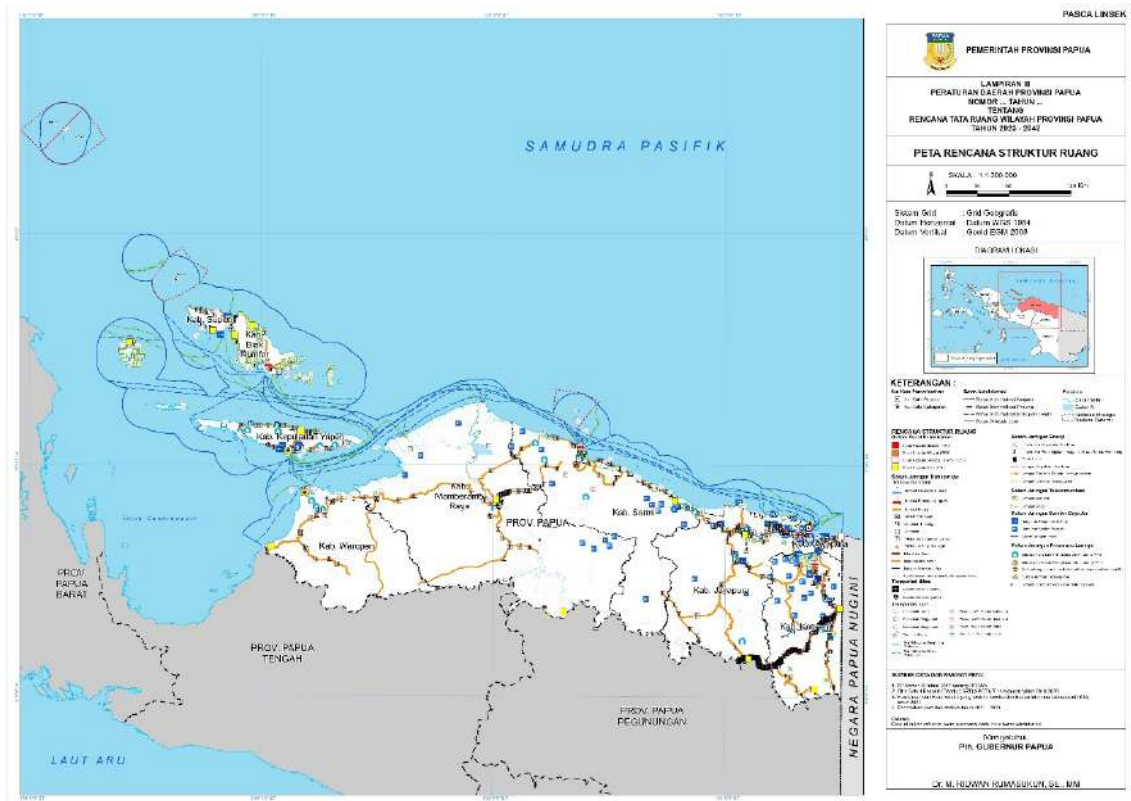
Penataan ruang Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042. Kebijakan penataan ruang Provinsi Papua terdiri atas:



- a. pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri;
- b. pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari;
- c. pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat;
- d. peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan;
- e. pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah;
- f. pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik;
- g. pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah;
- h. pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara.

Pemanfaatan ruang Provinsi Papua berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang, dengan memperhatikan hak ulayat dan karakteristik masyarakat adat (lihat Gambar II.88 dan Gambar II.89). Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Papua dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta maupun kerja sama pendanaan. Adapun kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar II.84 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Papua Tahun 2023-2042

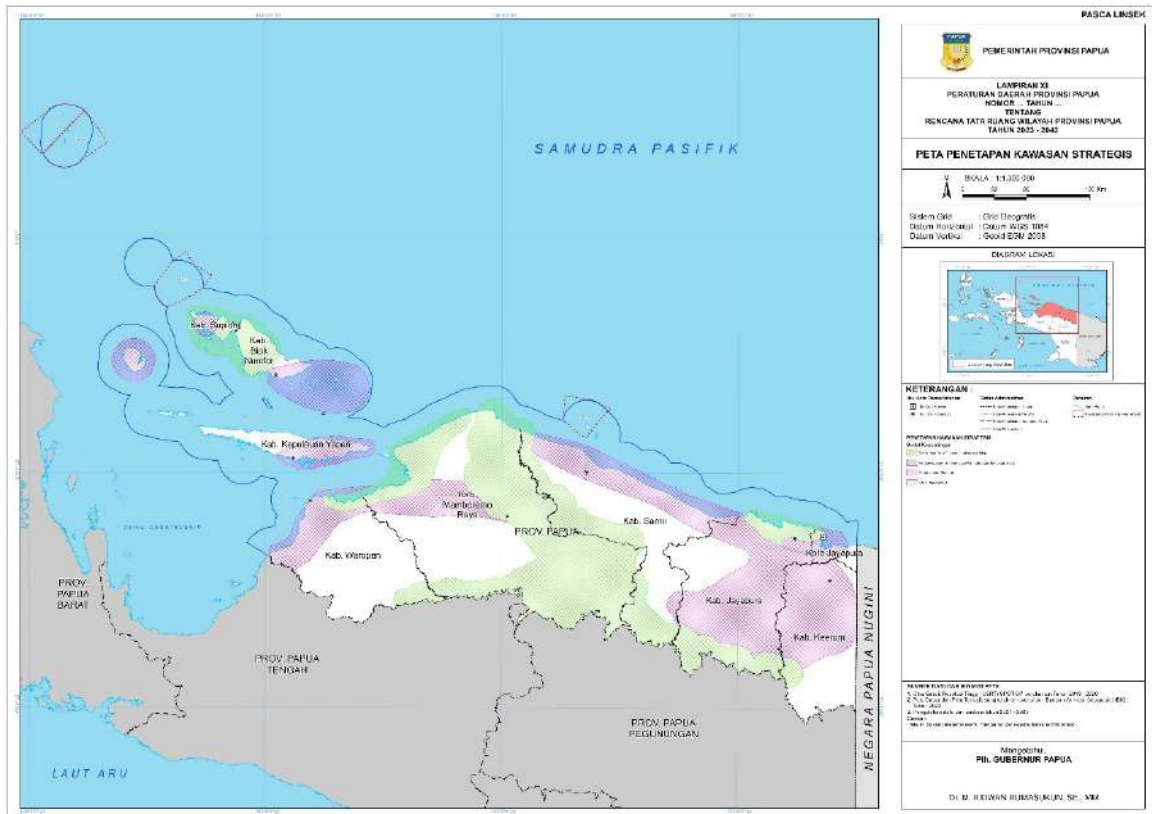


Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Provinsi Papua terdiri atas (PKN), (PKW), (PKSN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKN di Provinsi Papua meliputi Kota Jayapura dan Sebagian Kabupaten Jayapura. PKW di Provinsi Papua meliputi Biak di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi di Kabupaten Sarmi, dan Arso di Kabupaten Keerom. PKSN di Provinsi Papua meliputi Jayapura di Kota Jayapura dan Biak di Kabupaten Biak Numfor. Adapun PKL di Provinsi Papua meliputi Perkotaan Genyem dan Airu (Kabupaten Jayapura); Perkotaan Warsa, Swandiwe dan Yenburwo (Kabupaten Biak Numfor); Perkotaan Waris dan Towe (Kabupaten Keerom); Perkotaan Bonggo (Kabupaten Sarmi); Perkotaan Serui dan Saubeba (Kepulauan Yapen); Perkotaan Botawa dan Wapoga (Kabupaten Waropen); Perkotaan Awaki dan Sorendiweri (Kabupaten Supiori); serta Perkotaan Kasonaweja dan Dabra (Mamberamo Raya).



Gambar II.85 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Papua Tahun 2023-2042



Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Untuk mendukung fungsi dari pusat kegiatan wilayah tersebut, terdapat indikasi program utama pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana yang ditampilkan dalam Lampiran XV Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042. Indikasi program utama terdiri atas program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Adapun sumber pendanaan indikasi program utama berasal dari APBN, APBD, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tabel II.94 Pengembangan Sistem Pusat Permukiman dan Kawasan Strategis di Provinsi Papua

SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS			POTENSI		
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)			
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi		Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
SWP 1	1	Kota Jayapura						Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi	Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura	Kawasan Cagar Alam Cycloops	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan c. Peternakan d. Perikanan e. Pariwisata f. Jasa
	2	Jayapura			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkotaan Genyem, ▪ Perkotaan Airu 			Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi	Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja ▪ Kawasan Cagar Alam Cycloops 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan (kelapa sawit, kakao, sagu) c. Peternakan d. Perikanan e. Pariwisata (Kerajinan kapak batu Ormu Wari, Danau Sentani, dsb) f. Pertambangan g. Industri h. Kehutanan
	3	Keerom				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkotaan Waris, ▪ Perkotaan Towe 			Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi		Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja



SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS					POTENSI	
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)				
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
	4	Sarmi		✓		<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Bonggo 		KSNT Pulau Liki	Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi		Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, kakao) c. Pertambangan (nikel) d. Perikanan e. Kehutanan f. Pariwisata
SWP II	5	Biak Numfor		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Warsa, Perkotaan Swandiwe, Perkotaan Yenburwo 	KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi		Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor	Kawasan Goa Jepang Biak	Kawasan Rawan Bencana Biak-Supiori	<ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan b. Pariwisata c. Pertanian d. Pertambangan e. Peternakan
	6	Supiori				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Awaki, Perkotaan Sorendiweri 		KSNT Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi		Kawasan Maudori Supiori	Kawasan Rawan Bencana Biak-Supiori	<ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata b. Perikanan
	7	Kepulauan Yapen				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Serui, Perkotaan Saubeba 			Kawasan perikanan dan pariwisata Kep. Yapen		Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata (Kampung wisata Alam) b. Perikanan (ikan dan rumput laut) c. Perkebunan (sagu, kakao) d. Kehutanan e. Pertanian

SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS					POTENSI	
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)				
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
											f. Peternakan	
SWP III	8	Memberamo Raya				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Kasonaweja, Perkotaan Dabra 			Kawasan pertanian Mamberamo Raya-Waropen		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan rakyat c. Pertambangan (batu bara) d. Perikanan e. Pariwisata (pariwisata alam) f. Kehutanan
	9	Waropen				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Botawa, Perkotaan Wapoga 			Kawasan pertanian Mamberamo Raya-Waropen		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata (Wisata Rohani Pulau Nau, Pantai Mangrove) b. Perikanan (ikan, udang, kepiting) c. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) d. Perkebunan (sagu) e. Kehutanan f. Pertambangan

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2023-2042



Provinsi Papua memiliki beragam kawasan potensial yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembangunan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi sektoral serta potensi alam yang sangat kaya. Pembangunan Provinsi Papua harus memanfaatkan berbagai sumber daya potensial yang tersedia, serta menekankan pada sektor-sektor unggulan di Provinsi Papua. Berdasarkan karakteristik wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 2023-2042, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan (kawasan budidaya). Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Provinsi Papua yang dapat dikembangkan terdiri atas 10 kawasan, yaitu: (1) kawasan hutan produksi; (2) kawasan perkebunan rakyat; (3) kawasan pertanian; (4) kawasan perikanan; (5) kawasan pertimbangan dan energi; (6) Kawasan peruntukkan industri; (7) kawasan pariwisata; (8) kawasan permukiman; (9) Kawasan transportasi; serta (10) kawasan pertahanan dan keamanan.

Selain berdasarkan pemetaan kawasan budidaya, potensi pengembangan wilayah Provinsi Papua juga diimplementasikan berdasarkan penetapan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional (KSN); kawasan strategis nasional tertentu (KSNT); dan kawasan strategis provinsi (KSP). KSN di Provinsi Papua meliputi: (1) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Biak; serta (2) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa Kawasan Perbatasan Negara. KSNT di Provinsi Papua meliputi: (1) Pulau Faniido, Pulau Bras, Pulau Befondi di Kabupaten Supiori, serta (2) Pulau Liki di Kabupaten Sarmi. Adapun KSP di Provinsi Papua meliputi:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang terdiri atas:
 - 1) Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pengolahan hasil pertanian menunjang ekspor.
 - 2) Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari.
 - 3) Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari.
 - 4) Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk penyediaan lahan pertanian tanaman pangan dalam menunjang ketahanan pangan dan industri pengolah hasil tanaman pangan sebagai satu kesatuan kegiatan secara terpadu.

- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, yang terdiri atas:
- 1) Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, yang bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Danau Sentani sebagai pusat wisata budaya masyarakat Pesisir Pulau Papua.
 - 2) kawasan Goa Jepang Biak di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut, yang bertujuan sebagai pusat festival budaya.
 - 3) kawasan Maudori Supiori di Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Maudori sebagai kawasan pelestarian budaya yang berbasis religi.
- c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang terdiri atas:
- 1) Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Mamberamo-Foja sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
 - 2) Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Biak-Supiori sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
 - 3) kawasan Cagar Alam Cycloops dan sekitarnya di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan darat dan laut Cycloops sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
 - 4) Kawasan Mangrove Waropen – Mamberamo Raya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah pesisir sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.



BAB III

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

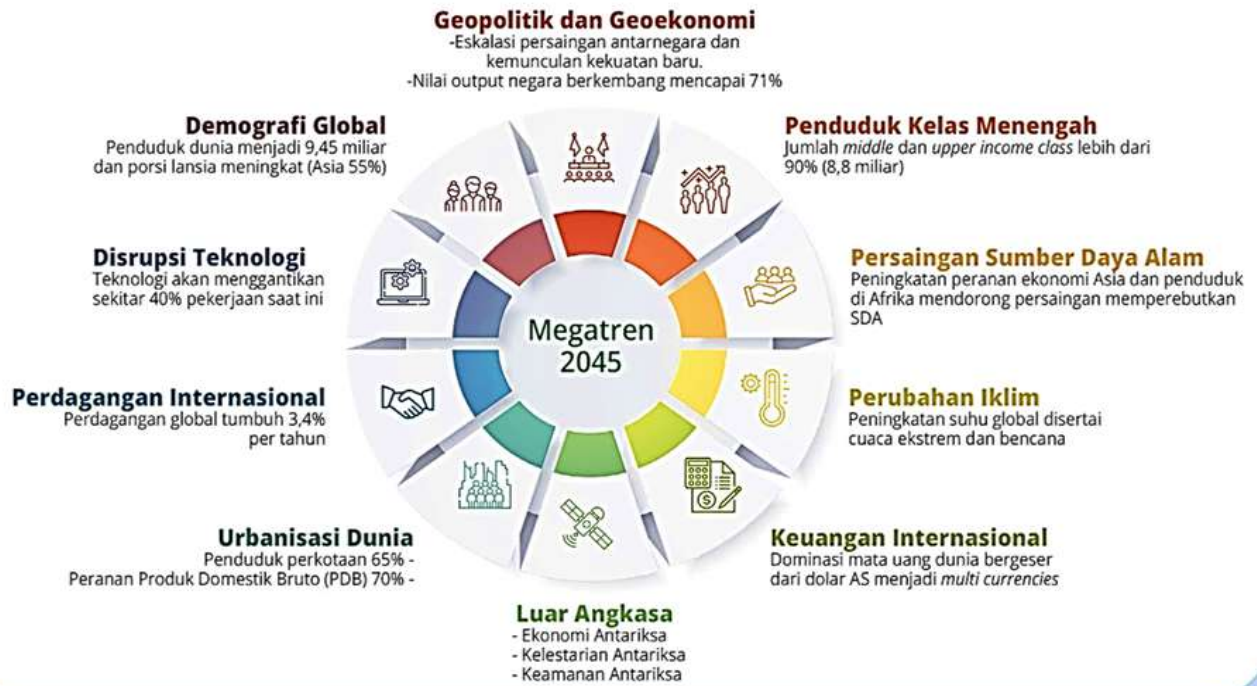
Bab ini memuat permasalahan utama dan isu strategis pembangunan daerah Papua yang dirumuskan dan disimpulkan berdasarkan kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal pembangunan Papua



Sungai Mamberamo

Membentang sepanjang 1.102 km yang berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudera Pasifik. Sungai ini merupakan sungai terlebar di Indonesia yang dijuluki “Amazonnya Indonesia”

ISU STRATEGIS INTERNASIONAL



ISU STRATEGIS NASIONAL

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Rendahnya tingkat produktivitas | 10 | Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial |
| 2 | Lemahnya kapasitas IPTEKIN | 11 | Kualitas dan kuantitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal |
| 3 | Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah | 12 | Kualitas kehidupan demokrasi dan politik yang belum memadai |
| 4 | Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata dan ekonomi laut | 13 | Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan |
| 5 | Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi | 14 | Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan |
| 6 | Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan | 15 | Belum optimalnya ketahanan sosial dan ekologi |
| 7 | Belum optimalnya pembangunan komunikasi dan informasi | 16 | Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang belum optimal |
| 8 | Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas | 17 | Belum optimalnya kesinambungan dalam pembangunan |
| 9 | Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah | | |

ISU STRATEGIS DOMESTIK PAPUA





BAB III

Permasalahan dan Isu Strategis



3.1 PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Kemudian untuk masalah merupakan hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. Dan akar masalah adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, dimana pemecahannya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pembahasan ini, disampaikan beberapa masalah pokok pembangunan di Papua yang harus diagendakan untuk dituntaskan di masa depan.

3.1.1 Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah

Kualitas pembangunan ekonomi yang rendah ini ditandai dengan masih tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi. Kontribusi kegiatan ekonomi lokal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan dalam perekonomian



wilayah masih rendah, tenaga kerja yang belum berkualitas, daya saing investasi yang rendah, dan tingginya defisit perdagangan antar daerah. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “kualitas pembangunan ekonomi yang masih rendah” ditampilkan dalam Tabel III.1.

Tabel III.1 Permasalahan Pokok 1: Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
1	Ketimpangan pembangunan ekonomi yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi topografi yang sebagian besar berlereng, dengan curah hujan yang tinggi, merupakan kendala utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua karena menyebabkan sulitnya membangun infrastruktur dasar dan tingginya biaya transportasi (<i>high cost</i>). Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi secara merata baik itu antar sektor maupun antar wilayah b. Indeks Ketimpangan Ekonomi (IKE) berdasarkan ukuran koefisien variasi di Provinsi Papua selama tahun 2016-2022 dinilai sangat tinggi, baik itu secara sektoral maupun spasial. c. Secara sektoral rata-rata IKE Papua mencapai 1,6233 poin per tahun, yang bermakna bahwa derajat penyimpangan nilai PDRB dari masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,6233 poin per tahun. d. IKE untuk ketimpangan spasial rata-rata mencapai 1,4377 per tahun yang artinya penyimpangan nilai PDRB per kapita pada masing-masing wilayah terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,4377 poin per tahun. Kedua angka IKE ini masih jauh sekali dari batas IKE terendah sebesar 0,2 poin.
2	Rendahnya kontribusi kegiatan ekonomi lokal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya konsentrasi pembangunan untuk penyelesaian permasalahan produktivitas di sektor hulu (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) sehingga hal ini tentunya akan berdampak pada produktivitas di sektor hilir. b. Belum optimalnya pengelolaan hasil produksi komoditas unggulan yang dapat memenuhi standar kebutuhan pasar. c. Pondasi perekonomian Papua selama ini didominasi oleh sektor-sektor ekonomi diluar sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2023, kontribusi terhadap PDRB Provinsi Papua didominasi oleh sektor konstruksi (18,21%) dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (15,60%). Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya berkontribusi sebesar 14,16% dan sektor industri pengolahan sebesar 2,86%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah melalui berbagai program dan proyek untuk mengaktifkan peran serta dan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum menunjukkan hasil yang baik. d. Belum berperannya sektor industri pengolahan dalam menggerakkan perekonomian wilayah menandakan bahwa ada ketergantungan yang berlebih pada pengelolaan SDA sebagai komoditas ekspor, investasi dan pendapatan daerah. Kondisi ini dapat melemahkan pondasi perekonomian wilayah secara berkelanjutan dalam jangka panjang, oleh karena volatilitas harga dan jumlah produksi hasil ekstraktif (misal: komoditi pertanian) sangat tinggi. Beda halnya dengan produk-produk hasil industri pengolahan yang bersifat <i>durable goods</i> (barang-barang tahan lama), harga dan produksinya cenderung terus mengalami peningkatan, memiliki umur ekonomi yang panjang, dapat disimpan lebih lama, harga yang lebih kompetitif, dan yang paling utama sektor industri pengolahan ini mampu memperkuat sektor-sektor ekonomi hulu dalam perekonomian wilayah.
3	Kualitas tenaga kerja yang rendah	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur tenaga kerja di Provinsi Papua selama ini lebih dominan pada tenaga kerja dengan pendidikan SD dan kebawah, rata-rata sekitar 59,48% per tahun. Sedangkan untuk tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMK dan ke atas hingga pendidikan tinggi, yang dikategorikan tenaga kerja yang berkualitas, hanya 27,82% per tahun untuk waktu yang sama.

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
		<p>b. Struktur tenaga kerja sektoral selama tahun 2021-2023 lebih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang kurang memerlukan tenaga kerja berpendidikan, dengan pangsa tenaga kerja sekitar 69,23% per tahun.</p> <p>c. Tingkat upah di sektor pertanian paling rendah, dan sebagian juga merupakan tenaga kerja keluarga, akhirnya kemampuan sektor tersebut untuk mentransmisi pendapatan keluarga di atas garis kemiskinan sangat rendah, sehingga banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian selama ini masih belum mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan di Papua lebih baik.</p>
4	Daya saing investasi yang rendah	<p>a. Perkembangan ICOR Provinsi Papua selama periode 2011- 2022 sangat fluktuatif berkisar diantara 15,83 poin paling tinggi di tahun 2012, dan 2,28 poin paling rendah di tahun 2021, dengan asumsi ICOR negatif diabaikan dalam perhitungan.</p> <p>b. Rata-rata ICOR selama periode 2011-2022 mencapai 6,29 poin per tahun, dengan kata lain-lain untuk meningkatkan PDRB Papua sebesar 1 rupiah rata-rata dibutuhkan tambahan investasi sebesar 6,29 rupiah per tahun. Angka ini sangat tinggi jauh di atas batas maksimum ICOR efisien sebesar 4,00 poin. Sehingga terindikasi selama ini ada inefisiensi (pemborosan) dalam perekonomian Papua sebesar 36,40% per tahun, yang menandakan juga daya saing investasi sangat rendah.</p>
5	Defisit perdagangan antardaerah yang sangat tinggi	<p>a. Keterkaitan dan hubungan kerja sama ekonomi antarwilayah yang saling menguntungkan sangat diperlukan bagi pembangunan di suatu daerah. Karena pada hakikatnya, tidak ada satupun daerah yang mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki sendiri karena adanya keterbatasan dan kelangkaan. Namun begitu, jika keterkaitan dan hubungan tersebut tidak berimbang, dimana ada salah satu yang mendominasi karena sangat kuat, maka hal tersebut tidaklah sehat bagi pembangunan ekonomi wilayah yang posisinya lemah. Kondisi seperti inilah yang terjadi di Papua</p> <p>b. Sepanjang tahun 2015-2022 rasio neraca perdagangan antar daerah terhadap PDRB Provinsi Papua lebih banyak mengalami defisit dengan kecenderungan yang meningkat, bahkan di tahun 2021 sempat menyentuh angka -9,98%. Meskipun di tahun 2022 ada koreksi penurunan, akan tetapi kondisi defisit masih tetap besar, yaitu -6,40%.</p> <p>c. Jika dihitung rata-ratanya selama periode 2015-2022, terlihat rasio defisit di Provinsi Papua bisa mencapai -4,24% per tahun. Dengan kata lain ada kebocoran ekonomi rata-rata -4,24% per tahun. Kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan Papua, oleh karena rasio defisit yang besar tersebut menyebabkan : (1) banyak modal yang lari ke luar; (2) hilangnya potensi efek multiplier; (3) ketergantungan ekonomi terhadap daerah luar bertambah tinggi; (4) kesenjangan antardaerah semakin melebar; dan (5) daya saing perekonomian daerah semakin rendah.</p>

Sumber: Hasil Analisis (2024)

3.1.2 Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya

Kualitas pembangunan sosial budaya yang belum optimal ini ditandai dengan rendahnya akses dan mutu pendidikan; belum optimalnya akses dan derajat kesehatan, tingginya ketimpangan gender dan rendahnya perlindungan terhadap anak, rendahnya daya saing kepemudaan, dan pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “belum optimalnya kualitas pembangunan sosial budaya” ditampilkan dalam Tabel III.2.



Tabel III.2 Permasalahan Pokok 2: Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
1	Rendahnya akses dan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none">Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua baru mencapai 7,2 tahun di tahun 2023, yang terlihat hanya meningkat rata-rata 0,1 tahun dari tahun 2010. Apabila akselerasi lama sekolah masih sama seperti periode sebelumnya, maka di tahun 2045 diperkirakan Pemerintah Provinsi Papua hanya sanggup mewujudkan Rata-rata Lama Sekolah bagi penduduknya sebesar 9,8 tahun, ini masih jauh dibawah target generasi emas Indonesia melalui program wajib belajar 12 tahun.Selain akses yang belum memadai, kualitas pendidikan di Papua juga terlihat sangat kurang. Hal ini ditandai salah satunya dengan jumlah sekolah yang masih banyak belum terakreditasi, contohnya di tahun 2021 mencapai 43,70% dari total 4.774 Satuan Pendidikan (SP), dengan rincian secara berurutan yang paling tinggi adalah pada satuan pendidikan SD sebanyak 1.176 unit (56,38%), kemudian PAUD sebanyak 540 unit (25,89%), SMP sebanyak 268 unit (12,85%), SMA sebanyak 67 unit (3,21%), dan SMK sebanyak 35 unit (1,68%).
2	Belum optimalnya pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none">Berdasarkan hasil Long Form SP2020, AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah 16,85 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dimana AKB tertinggi berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 38,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan AKB terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,38 kematian per 1.000 kelahiran hidup.Berdasarkan hasil Long Form SP2020 besaran AKI di Indonesia sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, dengan AKI paling tinggi di Papua sebesar 565 per 100.000 kelahiran hidup, dan terendah sebesar 48 per 100.000 kelahiran hidup di DKI Jakarta.Provinsi Papua saat ini masih merupakan endemik malaria tertinggi di Indonesia. Berdasarkan catatan WHO pada tahun 2021 ditemukan 811.636 kasus malaria baru, dimana sekitar 89% dari banyaknya kasus tersebut ada di Provinsi Papua. Sejauh ini Malaria menjadi salah satu penyebab paling besar pada kematian ibu dan anak. Selain malaria, kematian ibu dan anak di Papua juga dipengaruhi infeksi, TB, dan masalah perilaku ibu hamil seperti tekanan darah tinggi, jarang melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta kurang menjaga pola makan.Masih banyak puskesmas di Papua yang belum memenuhi standar puskesmas sesuai Permenkes RI No 43 tahun 2019 dan ada yang belum terakreditasi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan, setidaknya-tidaknya dalam sebuah Puskesmas tersedia 9 jenis tenaga medis, yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Farmasi, Kesmas, Keslink, Gizi, dan tenaga laboratorium medik. Berdasarkan buku Data Dasar Puskesmas Kondisi 31 Desember 2019 Provinsi Papua yang diterbitkan Kemenkes RI, jumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar tersebut hanya sebanyak 27 puskesmas atau sekitar 14,59% dari total Puskesmas yang terdata. Sedangkan untuk proporsi Puskesmas yang belum terakreditasi di tahun 2019 sebanyak 25,43%, dalam proses akreditasi sebanyak 5,61%, dan sudah terakreditasi sebanyak 69.16%.
3	Masih tingginya ketimpangan gender	<ol style="list-style-type: none">IKG (Indeks Ketimpangan Gender) Papua tahun 2023 mencapai 0,515 poin, yang masuk dalam 10 besar tertinggi di Indonesia. Nilai ini hanya terkoreksi 0,02 poin dari data IKG tahun 2021 sebesar 0,535 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pembangunan manusia di Papua belum inklusif karena terdistorsi oleh adanya ketimpangan gender yang tinggi.Keterlibatan perempuan dalam parlemen hanya 15,94% pada tahun 2022, masih jauh dibawah angka ideal 30%.Rata-rata Lama Sekolah perempuan 6 tahun, di bawah laki-laki 7,4 tahun.Angka Buta Huruf perempuan lebih tinggi sebesar 16,71%, sedangkan laki-laki sebesar 13,67%TPAK perempuan lebih rendah sebesar 69,09%, dan laki-laki sebesar 85,49%.
4	Daya saing kepemudaan	<ol style="list-style-type: none">Sepanjang periode 2015-2022, IPP Provinsi Papua bergerak diantara angka 48,00 poin di tahun 2015 dan 55,50 untuk tahun 2022, dengan rata-rata peningkatan 1,07

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
	yang masih rendah	<p>point per tahun (Kemenpora RI, 2023). Selama 7 tahun tersebut cenderung IPP Provinsi Papua berada pada urutan terendah di Indonesia.</p> <p>b. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Provinsi Papua dalam pembangunan pemuda (IPP) terdapat pada domain pendidikan yang nilai indeksnya cenderung tidak mengalami perubahan dalam periode 2017–2021, dan terendah di Indonesia. Hal ini terjadi karena capaian indikator-indikator domain ini masih rendah, yang menggambarkan daya saing pemuda di Papua selama ini rendah, yang tercermin pada kondisi dimana sebagian besar pemuda Papua berpendidikan SMU ke bawah, bahkan ada yang tidak pernah bersekolah dan tidak sedikit pula yang putus sekolah yang disebabkan kondisi sosial ekonomi.</p> <p>c. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain ketidakmampuan dalam bersaing, terbatasnya peluang kerja yang menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik.</p>
5	Pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai	<p>a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang paling banyak ditangani oleh pemerintah Provinsi selama ini adalah keluarga fakir miskin.</p> <p>b. Meskipun pemerintah terlihat cukup berhasil mereduksi tingkat kemiskinan hingga mencapai 26,03% di tahun 2023 (BPS Papua, 2023), akan tetapi penanganan masalah penduduk fakir miskin ternyata belum berjalan optimal, dimana jumlah fakir miskin cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.</p> <p>c. Selain fakir miskin, PMKS yang juga banyak ditangani pemerintah provinsi adalah penyandang HIV/AIDS. Data per Desember 2022 menunjukkan sekitar 50.502 orang penderita HIV/AIDS dengan pembagian Laki-laki 23.590 orang dan Perempuan 26.822 orang. Jalur penularan HIV/AIDS paling banyak ditemukan melalui hubungan seksual bebas yang ditularkan dari para pekerja seksual.</p>

Sumber: Hasil Analisis (2024)

3.1.3 Penanganan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum Belum Optimal

Provinsi Papua termasuk 5 (lima) daerah dengan angka kriminalitas tertinggi di Indonesia di tahun 2021. Sebagaimana yang dipublikasikan oleh BPS RI (2022), Crime Rate Papua di tahun 2021 mencapai 186 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tingkat nasional sebesar 90 per 100.000 penduduk. Dimana tingkat penyelesaian tindak pidana di Papua untuk tahun yang sama hanya mencapai 42,45%, paling rendah ketiga di Indonesia, dengan jumlah tindak pidana sebanyak 6.236 kasus. Kemudian dalam hal penanganan bencana daerah, Papua selama ini belum dapat menurunkan level resiko bencana dari kategori Sedang ke Rendah. Selama tahun 2016-2022 nilai IRB (Indeks Resiko Bencana) Papua berkisar diantara 122,15 - 125,31 poin, dimana hingga saat sekarang masih ada 5 daerah yang tergolong resiko tinggi, yaitu Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Merauke dan Nabire. Daerah lainnya termasuk dalam kategori resiko sedang. Seluruh fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban umum di Papua belum begitu optimal mendukung pelaksanaan pembangunan daerah selama ini.

3.1.4 Tingkat Kerawanan Politik dan Demokrasi yang Patut Diwaspadai

Kebebasan berpendapat di Papua selama ini merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi yang ditandai oleh partisipasi, transparansi, dan politik yang akuntabel telah menjadi pusat tumbuhnya kebebasan berpendapat, baik di level individu maupun kelompok. Namun, kebebasan yang tidak terkendali saat ini telah



mendistorsi demokrasi yang dimanfaatkan untuk menyerang kepentingan orang lain atau kelompok lain tanpa data dan informasi yang valid, ini tercermin dengan semakin maraknya *hoaks*, *hate speech*, dan propaganda hitam yang cenderung negatif mengganggu pelaksanaan pembangunan di Papua. Sebagai contoh pada tahun 2023 Aparat Kepolisian Daerah Papua menemukan penyebaran berita bohong atau hoaks yang masif di wilayah Papua. Berdasarkan hasil pantauan selama 3 bulan (Januari-Maret 2023), ditemukan 2-3 berita hoaks setiap harinya tersebar di Papua.

Narasi yang disampaikan penyebar hoaks terindikasi ingin memprovokasi masyarakat sehingga memunculkan aksi yang dapat berdampak pada gangguan keamanan dan kriminalitas. Perkembangan teknologi digital dan kemudahan untuk mengakses berbagai media sosial (Instagram, whatsapp, facebook, dan lain-lain) menjadi salah satu pemicu beredarnya informasi yang bertendensi negatif tersebut.

Selanjutnya untuk aspek politik, meskipun Papua dinilai tingkat partisipasi pemilihnya terbanyak di Indonesia pada Pilkada 2018, yaitu sebesar 84% (Bawaslu RI, 2018), namun pada tahun tersebut tingkat kerawanan politik di Papua dinilai Tinggi, sebagaimana yang dinyatakan Bawaslu RI bahwa : dari 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, terdapat tiga provinsi yang masuk kategori nilai Kerawanan Tinggi, yaitu: Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Selanjutnya di tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih di Papua juga dinilai paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 95,75%, akan tetapi tingkat kerawanan politik ternyata dinilai lebih tinggi dari rata-rata Indonesia dengan skor IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) sebesar 49,63 poin. Begitu juga di tahun 2020, tingkat kerawanannya malah meningkat menjadi 51,57 poin, dan terakhir di tahun 2024 diprediksi tingkat kerawanan politik di Papua semakin meningkat menjadi 57,27 poin yang dianggap merupakan tingkat kerawanan patut diwaspadai (Bawaslu RI, 2024).

3.1.5 Sarana Prasarana dan Konektivitas yang Belum Memadai

Dalam pembangunan daerah sangat diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, guna mendukung berjalannya aktivitas suatu daerah. Adapun konektivitas merupakan kondisi yang menyebabkan atau memungkinkan dua atau lebih pusat pelayanan saling terhubung untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sarana prasarana dan konektivitas seperti jalan, air bersih, sanitasi, pasar, terminal, dan lain-lain harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat. Tabel III.3 menampilkan permasalahan pembangunan sarana prasarana dan konektivitas di Provinsi Papua.

Tabel III.3 Permasalahan Pembangunan Sarana Prasarana dan Konektivitas di Provinsi Papua

No	Sarana Prasarana	Deskripsi dan Data Dukung
1	Panjang jalan	Total panjang jalan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 21.563 km, dimana sekitar 44,31% dalam kondisi rusak dan rusak berat, dan hanya 20,77% yang dalam keadaan baik, serta 34,93% yang dalam kondisi sedang.

No	Sarana Prasarana	Deskripsi dan Data Dukung
2	Air bersih	Selama periode 2011-2022 kondisi akses air bersih pada masyarakat di Provinsi Papua masih di bawah 50%, yang cenderung mengalami penurunan sekitar -0,33% per tahun yaitu dari 39,43% di tahun 2011 menjadi 35,77% tahun 2022.
3	Listrik	Tingkat elektrifikasi di Provinsi Papua masih belum memadai dan menyebar tidak merata. Merujuk pada data BPS Provinsi Papua, di tahun 2022 tercatat elektrifikasi penduduk baru mencapai 79,96% yang sebagian besar terdistribusi pada kota-kota besar seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Merauke, Timika.
4	Rumah layak huni	Kepemilikan rumah layak huni di Provinsi Papua selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan sekitar -10,32% per tahun. Dimana pada tahun 2018 proporsi kepemilikan rumah layak huni sebesar 58,23%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 27,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah rumah tangga yang tinggi tidak diimbangi dengan penambahan ketersediaan rumah layak huni secara proporsional.
5	Komunikasi dan informasi	Ketersediaan akses komunikasi dan informasi melalui internet saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Papua cukup banyak tersedia menara BTS (Base Transceiver Station) yang dapat memfasilitasi akses terhadap internet tersebut melalui jaringan 3g/4g. Tercatat pada tahun 2020 sudah ada 213 unit menara BTS di Papua, yang dikelola oleh Telkomsel sebanyak 175 unit, XL sebanyak 36 unit, dan Indosat sebanyak 2 unit (Kementerian Kominfo RI, 2022). Akan tetapi, dengan jumlah BTS sebanyak itu masih belum mampu untuk melayani kebutuhan akses internet yang memadai, karena hingga tahun 2022 berdasarkan publikasi dari Kemendesa-DT RI melalui rekomendasi IDM 2022 menunjukkan masih sekitar 93,34% kampung yang masyarakatnya belum dapat mengakses internet.
6	Transportasi darat	Jumlah kendaraan bermotor di Papua, berdasarkan data BPS RI tahun 2021 sebanyak 449.709 unit kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor sekitar 87,16%, dan 12,84% merupakan mobil yang umumnya untuk angkutan barang. Khusus untuk terminal mobil penumpang umum dan barang, sampai saat ini jumlahnya sangat minim, kurang lebih hanya 7 unit yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Darat yaitu Terminal Tipe A sebanyak 1 unit, Tipe B sebanyak 2 unit, dan lainnya merupakan Tipe C.
7	Transportasi udara	Di Papua peran transportasi udara sangat dominan dalam menghubungkan daerah-daerah terdalam atau terpencil, akibat sangat minimnya sarana prasarana transportasi darat yang tersedia. Kondisi ini akhirnya membuat biaya transportasi sangat mahal dan berpengaruh pada harga-harga barang. Contohnya untuk harga barang-barang konstruksi yang tercermin pada IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) yang dipublikasikan oleh BPS Papua (2023). Sepanjang tahun 2018-2022 misalkan, IKK Provinsi Papua selalu paling tinggi di Indonesia, dengan rata-rata nilai IKK sekitar 211,01 poin. Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Perhubungan RI, di tahun 2022 terdapat 151 bandara di Papua (di luar lapangan terbang yang tidak terdaftar di IATA), dimana hanya 2 Bandara dalam kategori internasional (Jayapura dan Biak Numfor), lainnya merupakan penerbangan domestik dan perintis.
8	Transportasi laut	Jumlah pelabuhan di Provinsi Papua yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah masih sangat terbatas, dimana sampai dengan tahun 2023 hanya ada 24 pelabuhan yang dikelola KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan), yang lebih banyak pengelolaannya pada KSOP Kelas III (70,83%). Berhubung jumlah pelabuhan sangat kurang, menyebabkan pelayanan rute pelayaran perintis di Papua masih sangat terbatas. Sebagai misal di tahun 2023, dalam menyukseskan program Tol Laut di Papua terdapat 3 (tiga) kapal penumpang yang melayani rute pelayaran Papua, yaitu : (1) KM Sabuk Nusantara 58 dengan rute pelayaran : Jayapura – Teba – Puiwai – Waren – Serui – Biak – Napan Wainami – Nabire (Pulang Pergi); (2) KM



No	Sarana Prasarana	Deskripsi dan Data Dukung
		Sabuk Nusantara 81 dengan rute pelayaran : Jayapura – Kaipuri – Waren – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari (Pulang Pergi); dan (3) KM Sabuk Nusantara 100 dengan rute pelayaran : Jayapura – Sarmi – Teba – Kurudu – Waren – Serui – Ansus – Wooi – Miosnum – Poom – Biak (Pulang Pergi).

Sumber: Hasil Analisis (2024)

3.1.6 Kualitas Lingkungan Hidup yang Belum Maksimal

Dalam hal lingkungan hidup, masih banyak masalah yang belum dapat dituntaskan hingga saat ini, sebagaimana yang disinyalir oleh Kementerian LH Indonesia (2022) bahwa berdasarkan hasil analisis, isu lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Papua adalah: (1) kualitas air permukaan dan air laut, (2) perubahan ekstrem iklim global, serta (3) alih fungsi lahan dan hutan yang juga menyangkut aspek keanekaragaman hayati, pencemaran air dan pengelolaan persampahan/limbah. Mengacu pada dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) tahun 2021, nilai IKLH Provinsi Papua adalah sebesar 80,23 poin. Adapun faktor pembentuk IKLH yang skornya paling rendah adalah IKA (Indeks Kualitas Air) sebesar 57,83 poin. Secara umum rendahnya nilai IKA di Papua disebabkan oleh parameter fecal coliform. Hal ini berkaitan dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang belum berjalan dengan baik. Masalah pencemaran air di Ekoregion Papua juga dipengaruhi oleh limbah kegiatan pertambangan/industri. Perubahan ekstrem pada iklim global turut berperan dalam menyebabkan berbagai permasalahan seperti kebakaran hutan, kekeringan, banjir, longsor, coral bleaching, dan lain-lain.

3.1.7 Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

United Nations Development Programme atau UNDP mengemukakan bahwa governance atau tata kelola pemerintahan adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor. Governance bisa dikatakan baik (*good governance*) apabila sumber daya dan problem yang dihadapi publik dikelola secara efektif dan efisien, yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik. Sehingga *good governance* adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan fungsi negara yang baik, atau menurut World Bank sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. Untuk mengamati perkembangan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Papua selama ini, Tabel III.4 menampilkan beberapa indikator kinerja yang dapat menggambarkan hal tersebut.

Tabel III.4 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pelayanan Publik				B-	B-
SAKIP		B	B	B	B

Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE	2,240				1,876
Indeks RB		B	CC	CC	CC
Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)				Sangat Rentan	Sangat Rentan
Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber: Menpan RB-RI dan KPK-RI (2023)

Berdasarkan Tabel III.4 terlihat nilai IPP Provinsi Papua untuk tahun 2021 dan 2022 masing-masing berpredikat B- atau dinilai berkinerja “Baik Dengan Catatan”, yang berarti masih ada 3 (tiga) tahapan predikat lagi yang harus dilalui Pemerintah Provinsi Papua untuk memperoleh predikat tertinggi yaitu A atau berkinerja “Pelayanan Prima”.

Kemudian untuk penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, selama tahun 2019 sampai dengan 2022, nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Papua hanya bertahan pada predikat B (Baik). Dimana untuk mencapai predikat SAKIP yang tertinggi AA (Sangat Memuaskan), pemerintah provinsi harus melalui tiga tahapan predikat lagi.

Selanjutnya untuk penilaian transparansi, dapat diamati pada nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik secara transparan. Terlihat angka indeks SPBE diantara tahun 2018 dan 2022 cenderung nilainya menurun, yaitu dari 2,240 menjadi 1,876 poin yang masuk dalam predikat Cukup. Pemerintah provinsi tampaknya harus bekerja keras dimasa mendatang untuk mencapai predikat Memuaskan dengan nilai SPBE antara 4,2 – 5,0.

Terkait dengan upaya mereformasi birokrasi yang dilakukan selama ini, terindikasi Pemerintah Provinsi Papua mengalami banyak kendala, sehingga terlihat nilai indeks RB mengalami penurunan dari predikat B (Baik) di tahun 2019 menjadi CC (Cukup) pada tahun 2020, dan sampai tahun 2022 predikatnya tidak pernah naik kembali ke B, selalu bertahan di CC. Padahal untuk memperoleh predikat RB tertinggi, yaitu Istimewa atau AA dengan skor lebih dari 90 poin, pemerintah provinsi harus melalui 4 (empat) tingkatan predikat RB, yang masih sangat jauh jika dibandingkan predikat CC.

Dalam kaitannya menilai kinerja pemerintahan yang bersih, terdapat salah satu indikator kinerja yang sangat representatif untuk menunjukkan hal tersebut, yaitu Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Untuk rilis tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa Indeks SPI Provinsi Papua masing-masing sebesar 58,04 dan 66,76 poin, keduanya masuk dalam kategori Sangat Rentan. Dimana untuk tahun 2022 KPK-RI menyebutkan tingkat kerawanan korupsi di Papua terbentuk dari 7 (tujuh) komponen penilaian risiko, yang dapat dilaporkan nilainya dari urutan terbesar hingga terendah, yaitu : (1) Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor sebesar 61%; (2) Risiko Pengelolaan PBJ sebesar 44%; (3) Risiko Trading In Influence sebesar 39%; (4) Risiko Nepotisme Dalam Pengelolaan SDM sebesar 35%; (5) Risiko

Penyalahgunaan Perjalanan Dinas sebesar 31%; (6) Risiko Suap/ Gratifikasi sebesar 29; dan (7) Risiko Jual/Beli Jabatan sebesar 18%.

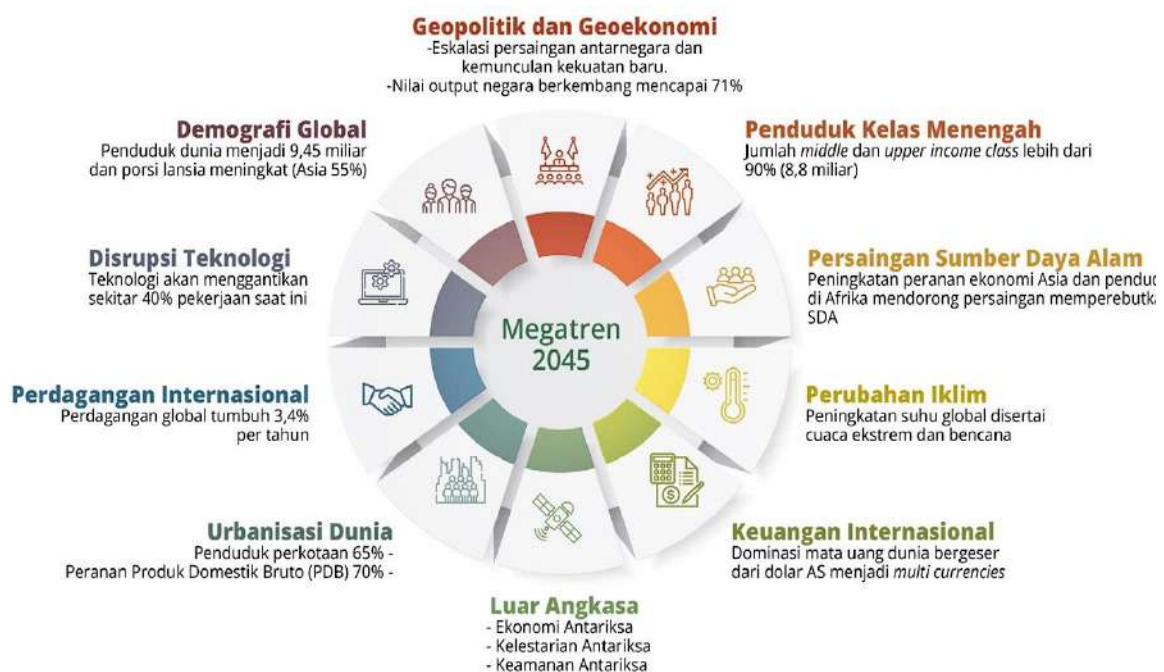
Setelah berturut-turut 8 kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Provinsi Papua dalam pelaporan keuangan tahun 2022 hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil kurang memuaskan ini diakui pemerintah provinsi sebagai akibat transisi pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berdampak pada kapasitas fiskal.

3.2 ISU STRATEGIS

3.2.1 Isu Internasional

Integrasi perencanaan daerah dengan isu-isu global merupakan fokus utama dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, seperti isu perubahan iklim hingga bonus demografi. Dengan memperhatikan isu global, RPJPD dapat memuat arah pembangunan yang berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global, sehingga memastikan bahwa pembangunan daerah terjalin dalam konteks yang lebih luas. Penyusunan RPJPD harus secara cermat menimbang strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai kompleksitas yang ditawarkan oleh isu-isu global. Pada bagian ini akan diulas mengenai bagaimana sinkronisasi antara RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025–2045 dan perubahan dinamika global, dengan mengintegrasikan 10 (sepuluh) isu strategis yang dijelaskan dalam RPJPN 2025–2045. Isu-isu strategis global yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dijabarkan pada Gambar III.1 dan Tabel III.5.

Gambar III.1 Megatren Global 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Tabel III.5 Isu Strategis Internasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045

No	Isu	Deskripsi
1	Demografi Global	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. b. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. c. Bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. d. Dalam demografi skala mikro, kualitas keluarga dipengaruhi oleh perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global. e. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global
2	Geopolitik dan Geoekonomi	<p>Geopolitik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. b. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan c. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. d. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik Kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN <i>Outlook on the Indo-Pacific</i> untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di Kawasan. e. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. <p>Geoekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. b. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang c. Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. d. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. e. Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015.
3	Disrupsi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. b. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. c. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. d. Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. e. Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis <i>artificial intelligence</i> (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. f. Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi, dan juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional.



No	Isu	Deskripsi
		g. Disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja Pemerintah, termasuk dalam melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, dan penyusunan regulasi.
4	Urbanisasi Dunia	<p>a. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota.</p> <p>b. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara <i>emerging economies</i> yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.</p> <p>c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.</p>
5	Perdagangan Internasional	<p>a. Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika.</p> <p>b. Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi.</p> <p>c. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang.</p> <p>d. Kerja sama Kawasan menciptakan <i>hub</i> perdagangan strategis.</p>
6	Keuangan Internasional	<p>a. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi.</p> <p>b. Tren penggunaan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara.</p> <p>c. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan.</p>
7	Kelas Menengah	<p>a. Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia.</p> <p>b. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam, termasuk kebutuhan gaya hidup baru (<i>new life style</i>).</p>
8	Persaingan Sumber Daya Alam	Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.
9	Perubahan Iklim	<p>a. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari.</p> <p>b. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global.</p> <p>c. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.</p>
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	<p>a. Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (<i>common heritage of humankind</i>), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.</p> <p>b. Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang.</p>

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Pemetaan isu global yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 memuat beberapa hal terkait tantangan dan peluang yang akan dihadapi selama dua puluh tahun ke depan. Isu-isu tersebut perlu dilihat secara kontekstual dengan menyesuaikan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap daerah. Namun, beberapa upaya mendasar perlu dilakukan mengingat dampaknya yang sudah terasa hingga hari ini. Upaya tersebut antara lain seperti mempersiapkan kualitas SDM yang mumpuni dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan persiapan fondasi pembangunan yang matang, Provinsi Papua dapat memanfaatkan serta memitigasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan dari isu-isu global tersebut.

3.2.2 Isu Nasional

Penyelarasan isu strategis nasional dalam penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025–2045 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan daerah dengan yang telah disusun oleh pemerintah pusat dalam lokus nasional. Hal ini juga mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi koordinasi antar pelaku pembangunan. Adapun tujuh isu strategis nasional yang telah ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 dapat dilihat pada Tabel III.6.

Tabel III.6 Isu Strategis Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045

No	Isu	Deskripsi
1	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih lagi pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat.
2	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dihadapkan oleh masih lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran, selain itu kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.
3	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Hal ini diakibatkan terjadinya pelemahan sektor manufaktur (<i>dutch diseases</i>), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

No	Isu	Deskripsi
4	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Inovasi dan pengembangan produk juga masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.
5	Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut	Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut, serta belum berkembangnya pemanfaatan <i>Sea Lines of Communication</i> (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan antara lain rendahnya penanganan sampah plastik, masih tingginya kegiatan <i>illegal, unreported and unregulated fishing</i> (IVUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.
6	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi	Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (<i>low-skilled workers</i>) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
7	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Kondisi ini dapat dilihat pada penggunaan energi fosil yang masih tinggi, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi. Selain itu juga pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (<i>brown economy</i>). Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta penegakan hukum dan regulasi termasuk pengaturan sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau yang masih lemah.
8	Belum optimalnya pembangunan komunikasi dan informasi	Hal ini dapat diperhatikan pada ketersediaan infrastruktur dan literasi digital yang masih terbatas, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri, masyarakat yang terjangkau jaringan 4g berkualitas dan juga kecepatan internet yang memadai masih terbatas dan tidak merata, dan terjadinya ketimpangan penetrasi pengguna internet

No	Isu	Deskripsi
		<p>antar wilayah yang berpotensi memperlebar perbedaan kualitas layanan publik di setiap wilayah. Selain itu semua, penggunaan internet di Indonesia masih terbatas pada sektor tertentu dan kurang produktif seperti media dan hiburan, keuangan, dan perdagangan. Pola penggunaan internet yang tidak produktif, tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada perekonomian nasional.</p>
9	<p>Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas</p>	<p>Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.</p>
10	<p>Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.</p>
11	<p>Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial</p>	<p>Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Selain itu layanan pendidikan juga terlihat belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi. Selanjutnya kualitas pendidikan yang masih rendah, yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas. Dan belum terdistribusi ke seluruh daerah. Selain itu produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan penduduk Lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.</p>
12	<p>Kualitas dan kuantitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal</p>	<p>Dalam tata kelola, pemerintah masih berhadapan dengan beberapa masalah, antara lain : (1) adanya regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah; (2) kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif; (3) proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif; (4) belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D; dan (5) ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di</p>



No	Isu	Deskripsi
		dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. kemudian dalam pelayanan publik permasalahan utamanya adalah : (1) belum meratanya kualitas pelayanan publik; (2) kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat; dan (3) belum optimalnya transformasi digital di tingkat pemerintahan.
13	Kualitas kehidupan demokrasi dan politik yang belum memadai	Hal ini tercermin pada rendahnya Integritas pada partai politik, partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan, demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan
14	Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan	Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum Optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi.
15	Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan, serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan	Sementara itu, kekuatan daya gentar pertahanan di kawasan belum terbangun dan ketergantungan terhadap Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) luar negeri masih sangat tinggi. Tantangan lainnya adalah tata kelola dan kelembagaan keamanan nasional masih perlu diperkuat, meningkatnya jenis kejahatan baru dengan menggunakan teknologi tinggi, masih lemahnya keamanan Siber, serta masih tingginya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan.
16	Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun, tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-growth	Tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi di antaranya rendahnya penerimaan negara, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak yang hanya 10,4 persen dari PDB pada tahun 2022. Selain itu, kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB masih rendah, yaitu sebesar, 15,8 persen (2022). Ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan. Selanjutnya, di sisi kebijakan moneter menghadapi tantangan menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas di pasar global, terutama pangan dan energi serta risiko ketidakpastian ekonomi dan politik global. Kondisi ini berdampak pada naiknya risiko tekanan inflasi dan nilai tukar, sehingga kebijakan moneter cenderung lebih ketat untuk menahan risiko ketidakstabilan harga domestik.
17	Belum optimalnya ketahanan sosial dan ekologi	Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Kemudian budaya literasi, kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, peran dan fungsi keluarga belum optimal, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan Lansia juga belum memadai. Berikutnya, terkait keagamaan,

No	Isu	Deskripsi
		kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan, serta penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah Selanjutnya, ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, tingginya tingkat bencana hidrometeorologi, kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana. Di sisi lain, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga terjadi di berbagai wilayah.
18	Masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah	Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran, masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif, Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan ditunjukkan oleh tata kelola yang lemah.
19	Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal	Konektivitas hinterland (intra-pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan, danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya berupa masih terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler, terutama di pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia.
20	Belum optimalnya kesinambungan dalam pembangunan	Terutama dalam hal pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan. Untuk pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. Instrumen pengaman (<i>safe guarding</i>) untuk pelaksanaan dan pengendalian pembangunan juga belum efektif, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional belum optimal, serta komunikasi publik untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjalin dengan baik. Sementara itu, kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Secara umum, isu strategis nasional yang ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 berfokus pada transformasi tiga sektor utama, yakni sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketiga sektor transformasi ini menjadi panduan utama dalam mewujudkan tujuan bernegara dan

pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam upaya mencapai transformasi tersebut, integrasi isu strategis ini memberikan ruang pembangunan yang luas dalam rincian kegiatan sesuai dengan karakteristik Provinsi Papua.

3.2.3 Isu Strategis Domestik Papua

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pokok yang teridentifikasi selama ini, terdapat 10 isu strategis domestik yang super prioritas untuk ditangani dengan cepat, bertahap dan efektif oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mewujudkan transformasi pembangunan secara optimal dimasa depan. Ke-10 isu strategis yang dimaksud dapat divisualisasikan dalam Gambar III.2.

Gambar III.2 Isu-Isu Strategis Super Prioritas Domestik dalam Transformasi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2045



Sumber: Kajian Retrospektif dan Prospektif Transformasi Pembangunan Provinsi Papua, 2024

3.2.3.1 Potensi Sumber Daya Pembangunan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, telah memberikan otoritas yang lebih besar atas sumber daya dan pembangunan lokal Provinsi Papua dalam kerangka Otonomi Khusus yang akan dijalankan selama 20 tahun mendatang. Tersedianya sumber Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, yang diprediksi dari tahun 2025 hingga 2045 secara kumulatif bisa mencapai ± 71,14 triliun rupiah di seluruh wilayah Papua, merupakan potensi yang sangat besar untuk dioptimalkan oleh daerah-daerah yang ada di Papua selama 20 kedepan dalam upaya, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas dan daya saing OAP; (2) mengembangkan ekonomi berbasis SDA lokal serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan OAP yang berkeadilan dan berkelanjutan; (3) mempercepat pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu, khususnya di daerah- daerah pemukiman OAP; (4) meningkatkan dan melestarikan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan

iklim, dan pembangunan rendah karbon, serta (5) mempercepat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.3.2 Mempertahankan dan Menghormati Keragaman Budaya Masyarakat Papua

Apabila memperhatikan proporsi penduduk Non-OAP (bukan Orang Asli Papua) berdasarkan SP (Sensus Penduduk), tercatat pada SP2000 penduduk Non-OAP sebanyak 29,90%, dan pada SP2010 turun menjadi 23,70% (Suntono, 2012). Selanjutnya berdasarkan publikasi dari Dinas Kependudukan dan Capil Provinsi Papua di tahun 2017, terindikasi proporsi penduduk Non-OAP sebesar 50,24%. Sedangkan di tahun 2020, mengacu pada data Dinas Sosial, Kependudukan, P3A Propinsi Papua, proporsi penduduk Non-OAP sebesar 43,85%, yang sebagian besar terkonsentrasi di daerah-daerah dataran rendah dan kota-kota besar di Papua seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Dengan semakin terbukanya Papua dimasa depan, yang ditandai dengan bertambahnya kota-kota pusat pertumbuhan baru, dipastikan proporsi penduduk Non-OAP akan kembali naik dan semakin bertambah, yang diperkirakan pada tahun 2045 proporsinya bisa mencapai 60-65%. Sudah barang tentu, dengan semakin bertambahnya penduduk Non-OAP tersebut, khazanah budaya di Papua akan semakin beragam. Sehingga bukan hanya budaya Papua saja yang berkembang, tetapi juga budaya- budaya lainnya yang dibawa oleh penduduk migrasi Non-OAP, seperti budaya Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Dampak keberagaman budaya sangat dirasakan masyarakat Papua. Dampak positif keberagaman budaya tentunya merupakan peluang yang perlu dikelola secara optimal. Sedangkan dampak negatifnya akan menjadi tantangan dimasa depan, antara lain : (1) adanya sikap etnosentrisme, yaitu sebuah sikap atau pandangan yang bertumpu pada kebudayaan sendiri, yang akan menimbulkan perasaan atau sikap meremehkan suatu suku atau kebudayaan lain; (2) adanya stereotip, yang menimbulkan pandangan yang negatif terhadap suatu kelompok budaya, dikarenakan adanya perbedaan budaya; (3) terjadinya konflik sosial dan budaya, yang disebabkan primordialisme, yaitu suatu sikap yang menganggap jika sukunya lebih baik dibanding suku lainnya; (4) cepatnya perubahan sosial dan budaya sebagai dampak dari kemajuan pembangunan dan teknologi, yang dapat mendegradasi nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat Papua. Menurut Pamungkas (2021, dalam Papatungan, 2022), pada dasarnya penduduk OAP tidak menolak pembangunan, hanya saja butuh pemahaman yang baik terutama dari sisi tradisi, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembangunan, sehingga OAP memang benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Oleh sebab itu penduduk Papua yang beraneka ragam budaya ini, nilai toleransi dan inklusif semakin penting untuk ditingkatkan guna menjaga kehidupan sosial yang damai sentosa.

3.2.3.3 Demografi, Urbanisasi dan Keterkaitan Kota-Kampung

Jumlah penduduk Papua akan semakin bertambah dengan suku atau etnik yang beragam dan arus migrasi ke Papua, penduduk semakin terkonsentrasi di kota, dan keterkaitan ekonomi kampung-kota di Papua semakin bertambah kuat dan meningkat. Berdasarkan



data antar-SP (Sensus Penduduk) dari BPS Provinsi Papua (2023), cenderung penduduk Papua terus mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif. Misalkan pada SP1990 penduduk Papua mengalami pertumbuhan rata-rata 1,63% per tahun jika dibandingkan SP1980. Selanjutnya di SP2000 agak melambat menjadi 1,52% per tahun bila dibandingkan SP1990. Kemudian kembali cepat pada SP2000 sebesar 2,70% pertahun dibandingkan SP1990. Dan terakhir di SP2020 melambat lagi menjadi 2,11% per tahun dibandingkan SP2000. Tercatat pada SP2020 ini (sebelum DOB) jumlah penduduk Papua sudah mencapai 4.303.707 jiwa. Selain faktor kelahiran (Fertility), penyebab bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Papua selama ini adalah migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Merujuk pada data BPS Provinsi Papua, selama periode SP1980 sampai dengan SP2020, rata-rata penduduk migrasi seumur hidup mengalami peningkatan kurang lebih 2,40% per tahun, dan tercatat pada SP2020 jumlah penduduk migrasi seumur hidup di Papua sebesar 471.686 jiwa, atau 10,96% dari total penduduk Papua. Selain migrasi, mobilitas penduduk di Papua dapat juga dicermati pada arus urbanisasi dari kampung ke kota, yang diindikasikan dengan rasio derajat urbanisasi. Jika beranjak pada data antar-SP, derajat urbanisasi di Papua cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 25,96% pada SP2010 menjadi 30,20% pada SP2020. Dengan semakin berkembangnya daerah perkotaan, dan bertambahnya kota-kota pusat pertumbuhan baru, dipastikan arus mobilitas penduduk (migrasi dan urbanisasi) di Papua akan semakin meningkat dimasa depan yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan daerah jika tidak terkendali, seperti : (1) semakin minimnya lahan kosong, dan harga tanah yang terus naik; (2) menambah pencemaran lingkungan; (3) permukiman kumuh bertambah, dan bisa menjadi penyebab bencana alam; (4) tingkat kriminalitas meningkat; (5) bertambahnya golongan masyarakat miskin; (6) ketimpangan pendapatan meningkat, baik itu secara spasial, sektoral maupun personal. Namun disisi lain, apabila urbanisasi ditangani dengan baik bisa memberi dampak positif terhadap keterkaitan antara kampung-kota, antara lain : (1) meningkatnya kesejahteraan penduduk di kampung karena mendapatkan berbagai hal yang tak ada di desa seperti teknologi, informasi, dan lain-lain; (2) mempercepat pembangunan kampung karena adanya berbagai informasi yang diperoleh dari kota; (3) meningkatnya jumlah tenaga kerja di kota, terutama tenaga buruh yang berasal dari kampung; (4) kota dapat menjadi agen perubahan yang bisa ditiru pembangunan kampung agar semakin maju.

3.2.3.4 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berorientasi pada *zero poverty* dan *zero inequality*. RIPPPIP mentargetkan pada tahun 2041 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua berada pada interval 2,82-5,81%. Sedangkan dalam Visi Indonesia Emas 2045, ditargetkan kemiskinan Papua mengarah pada zero poverty diantara 1,01-2,50% pada tahun 2045. Baik itu target RIPPPIP 2041 maupun Indonesia Emas 2045, keduanya merupakan tantangan besar bagi Provinsi Papua dalam mentransformasi pembangunan sosial yang adaptif dimasa depan, khususnya dalam mereduksi kemiskinan. Hal ini disebabkan, kemampuan Provinsi Papua dalam menurunkan tingkat kemiskinan sepanjang tahun 2005-2023 masih sangat rendah, hanya mampu sebesar -0,82% per tahun, yang mana tingkat kemiskinan

pada tahun 2023 sebesar 26,03%. Jika angka kemiskinan tahun 2023 tersebut dijadikan sebagai baseline, maka untuk mencapai tingkat kemiskinan di tahun 2045 sebesar 2,5% (angka maksimum target Indonesia Emas 2045) dibutuhkan akselerasi penurunan kemiskinan di Papua yang lebih cepat lagi berkisar 1,01-1,23% per tahun sepanjang periode 2030-2045, dengan asumsi akselerasi kemiskinan selama tahun 2024-2029 masih mengikuti kapasitas penurunan kemiskinan pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dimasa depan ditantang untuk mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan *pro-poor* yang lebih efektif, inovatif dan integratif baik itu secara sektoral, spasial maupun personal. Selain kemiskinan, tantangan yang tak kalah besarnya adalah upaya untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi masyarakat. Pada pembahasan sebelumnya telah diutarakan kondisi ketimpangan pendapatan sektoral dan spasial di wilayah Papua sangat tinggi, masing-masing mencapai 1,6233 dan 1,4377 poin per tahun sepanjang periode 2016-2022. Sementara ketimpangan pendapatan antar personal di tahun 2023 yang direpresentasikan Gini Ratio masih di atas batas ketimpangan rendah, yaitu 0,386 poin. Berhadapan dengan angka-angka ketimpangan yang tinggi ini, Provinsi Papua akan menghadapi tantangan yang berat dimasa depan untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang mengarah pada *zero inequality*, atau mendekati kesetaraan yang sempurna.

3.2.3.5 Ekonomi Daerah dan Ketenagakerjaan

Pemberdayaan ekonomi serta pertumbuhan industri berbasis pertanian dan kelautan, dan tenaga kerja yang didukung oleh infrastruktur modern dan penguatan konektivitas. Provinsi Papua memiliki potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang sangat kaya dan beragam, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berbagai potensi SDA pertanian dan perkebunan, mulai dari tanaman palawija, buah-buahan, sayur-sayuran hingga tanaman keras seperti kakao, cengkeh, kayu merbau, dan lain-lain, semuanya tersedia. Begitu juga dengan sumber daya perikanan, baik itu perikanan darat maupun perikanan laut, yang dibudidayakan atau pun ditangkap, potensinya sangat besar tersedia di Papua. Namun demikian, semua potensi SDA yang begitu besar tersebut sampai kini belum dapat memberikan nilai tambah yang lebih banyak kepada masyarakat. Oleh karena sebagian besar masih ditransaksikan tanpa melalui proses pengolahan. Dengan kata lain lebih banyak hasil SDA pertanian dan perikanan yang dipasarkan dalam bentuk bahan-bahan mentah yang sangat kecil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebagai salah satu indikasinya dapat diperhatikan pada kontribusi sektor industri terhadap pembentukan nilai tambah regional Papua selama periode 2010-2022, rata-rata hanya 1,97% per tahun pada PDRB Dengan Tambang, dan sebesar 3,40% untuk PDRB Tanpa Tambang. Kontribusi yang sangat rendah seperti ini merupakan tantangan berat bagi pemerintah provinsi untuk mentransformasi ekonomi Papua dimasa depan. Oleh karena salah satu syarat terwujudnya transformasi ekonomi adalah terjadinya perubahan struktur ekonomi yang fundamental dari sektor-sektor ekonomi ekstratif (seperti pertanian dan tambang) ke sektor manufaktur atau industri. Paling tidak kontribusi sektor industri antara 15-20% terhadap PDRB mampu mengubah struktur ekonomi Papua secara normal, yaitu perubahan struktur PDRB dari sektor pertanian ke industri yang diiringi dengan kenaikan pendapatan per kapita



yang lebih tinggi. Itulah tantangan besarnya bagi Papua dimasa depan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan potensi bahan baku yang banyak tersedia, industri berbasis pertanian dan perikanan harus dijadikan motor penggerak, yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian sesuai kebutuhan pasar industri. Dimana untuk hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua harus bekerja lebih keras lagi dimasa depan mengubah struktur tenaga kerja yang selama ini lebih dominan pada tenaga kerja yang berpendidikan rendah (SD dan kebawah), ke tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMK dan ke atas hingga pendidikan tinggi. Sekurangnya angka proporsi tenaga kerja berpendidikan ini harus mencapai 40-50% dalam komposisi pasar tenaga kerja Papua dimasa depan.

3.2.3.6 Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing akan menciptakan produktivitas dan kompetensi OAP yang tinggi. Pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar yang sangat penting dalam membentuk modal manusia (*human capital*) dalam artian pembangunan ekonomi investasi jangka panjang. Teori human capital menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini berargumentasi bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas, sehingga hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi (Nugroho, 2014). Selanjutnya terkait dengan kesehatan, Todaro dan Smith (2003) mengatakan bahwa kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat sebagai komponen produktivitas tenaga kerja dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari penerapan teori human capital dibidang pendidikan dan kesehatan ini adalah perlunya Provinsi Papua untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dimasa depan, dalam upaya meningkatkan dan memperbesar produktivitas tenaga kerja regional. Hal ini harus dilakukan karena dari kualitas pendidikan penduduk Papua, jika dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah sangat rendah, yaitu 7,2 tahun di tahun 2023, yang terlihat hanya bertambah 0,1 poin per tahun dari tahun 2010. Kondisi tersebut akhirnya berdampak terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja Papua juga rendah, rata-rata selama periode 2010-2023 hanya 77,36 juta rupiah per tenaga kerja per tahun, dengan pertumbuhannya sangat lambat sebesar 0,46% per tahun. Sama halnya dengan kualitas kesehatan penduduk Papua, yang dapat dicermati pada perkembangan indikator Angka Harapan Hidup, cenderung meningkat sangat lambat, rata-rata hanya 0,1 poin per tahun selama periode 2010-2023. Dengan kondisi kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk Papua tersebut, Pemerintah Provinsi Papua akan menghadapi tantangan yang berat dimasa depan dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

3.2.3.7 Disrupsi Teknologi dan Inovasi

Telah disampaikan sebelumnya bahwa di era disrupsi teknologi saat ini membuat segala hal menjadi instan, mudah dan modern. Gaya hidup masyarakat Papua secara berangsur mulai mengalami perubahan yang cukup drastis, yang cenderung sangat bergantung pada berbagai gadget (gawai) yang setiap waktu terus mengalami perubahan, contohnya smartphone. Melalui smartphone semua informasi dan komunikasi dapat diakses dan disebar secara mudah, dengan jarak dan jangkauan yang tak terbatas. Dampaknya, saat ini telah muncul konsumen baru yaitu social-customer yang tahu segalanya dan terkoneksi secara intens tanpa ada batasan mengenai informasi produk atau layanan yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan karena tersedianya koneksi internet yang semakin mudah diakses dan cepat melalui jaringan 4g. Sebagai indikasinya dapat dilihat pada data Susenas BPS Provinsi Papua antara tahun 2015 dan 2023 yang menunjukkan adanya lonjakan yang tinggi dalam penggunaan internet pada penduduk Papua, yaitu dari 8,98% di tahun 2015 menjadi 29,87% pada tahun 2023, dimana sekitar 97,68% diakses melalui smartphone. Guna menghadapi era disrupsi teknologi yang semakin masif dimasa depan ini, Pemerintah Papua harus mampu beradaptasi, berkreasi dan inovatif untuk selalu merekayasa IPTEK menjadi lebih berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima.

3.2.3.8 Pengelolaan SDA dan Pembangunan yang Berkelanjutan

Hutan dan perairan Papua memiliki dampak keberlanjutan oleh karena itu ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) dapat menjadi *development engine* yang rendah karbon dan mampu menstabilkan perubahan iklim yang drastis, serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan berbasis ekonomi hijau merupakan keniscayaan di Papua, mengingat semakin tidak terkendalinya kerusakan hutan lingkungan akibat dari pembangunan. Data yang dipublikasikan BPS RI (2023) menunjukkan bahwa selama periode 2013/2014 sampai dengan 2021/2022 rata-rata deforestasi netto di Provinsi Papua mencapai 24.111,39 hektar per tahun, dengan kontribusi tertinggi berasal dari APL (Areal Penggunaan Lain) sebesar 56,83%, sedangkan dari kawasan hutan sebesar 43,17%. Meskipun ekonomi hijau dalam 10 tahun terakhir ini sudah menjadi arus utama pemikiran ekonomi wilayah di Papua, akan tetapi hal tersebut masih sebatas pada tataran normatif, dan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam pembangunan daerah, cenderung implementasinya masih didasarkan pada asumsi *bussiness as usual*. Selain ekonomi hijau, Provinsi Papua juga sangat berpotensi untuk menerapkan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan, yang mencakup berbagai sektor dan bidang antara lain : perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola dengan visi berkelanjutan, sektor-sektor dan bidang pembangunan ekonomi biru tersebut dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan masyarakat Papua yang sejahtera, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.



3.2.3.9 Transformasi Birokrasi dan Manajemen ASN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan partisipatif dengan didukung modernisasi dan manajemen ASN yang profesional untuk pelayanan publik yang prima sangat diperlukan. Masyarakat Papua yang kini mulai beralih menjadi *social-customer* memiliki sosok yang lebih cerdas, kritis, dan menuntut kepuasan yang lebih tinggi. Kondisi ini akhirnya merubah karakteristik masyarakat yang menuntut lebih tinggi terhadap pelayanan publik dari pemerintah. Dimasa depan, Pemerintah Provinsi Papua harus dapat mengubah orientasi pelayanan publiknya secara bertahap, dari *supplier-oriented* (mengejar target) ke *consumer-oriented* (kepentingan masyarakat) dan terakhir ke *customer-oriented* (sesuai kebutuhan masyarakat) dimana tingkat partisipasi menjadi lebih besar. Untuk itu transformasi birokrasi dan manajemen ASN harus dilaksanakan seoptimal mungkin dimasa depan. Transformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat yang memberi kesadaran baru, pemerintah dibentuk tidak untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat sesuai kebutuhannya. Sedangkan transformasi manajemen ASN melingkupi penguatan budaya kerja, percepatan peningkatan kapasitas ASN, hingga peningkatan kinerja dan penghargaan. Tidak hanya transformasi pada tingkat instansi, setiap individu ASN juga dapat berinovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi selama tidak melanggar aturan.

3.2.3.10 Perdagangan Antardaerah dan Global yang Kompetitif


Perdagangan antardaerah atau antarpulau adalah perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu daerah ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut. Secara umum perdagangan antardaerah terjadi karena dua faktor, yakni perbedaan aktor produksi dan tingkat harga antardaerah. Adapun manfaat dari perdagangan antara daerah maupun global adalah: (1) menambah devisa negara untuk perdagangan global, dan menambah pendapatan daerah untuk perdagangan antarpulau; (2) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik; (3) menyediakan berbagai faktor-faktor produksi sebagai modal pembangunan; (4) meningkatkan produktivitas regional; (5) mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi; (6) menyerap lapangan kerja; (7) menstabilkan harga; (8) memperkuat kerjasama antardaerah dan antarnegara; (9) meningkatkan daya saing daerah; (10) mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah; (11) memperluas jangkauan pasar; (12) mempercepat alih teknologi. Melihat banyaknya manfaat yang diperoleh dari aktifitas perdagangan tersebut, maka sudah sepatutnya dimasa depan Papua harus mampu meningkatkan daya saing perdagangan antardaerah dan global. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Papua, karena selama ini perdagangan antardaerah selalu mengalami defisit sangat besar. Contohnya pada tahun 2018- 2021 rata-rata defisit perdagangan Papua mencapai -3,16 triliun rupiah dengan kenaikannya sekitar 86,11% per tahun, yang mana defisit terbesar rata-rata terjadi pada perdagangan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta (diolah dari data BPS RI, 2023).



BAB IV

Visi dan Misi Daerah

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan daerah Papua yang akan dicapai pada tahun 2025-2045, yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045, serta sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.



Monumen Kasih (Mokas) Serui, Kepulauan Yapen

*Merupakan icon wisata
religi umat Kristen setinggi
33 meter yang menghadap
ke arah Kota Serui*

VISI PROVINSI PAPUA 2025-2045

"Provinsi Papua **Maju dan Berkelanjutan**
Berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan Ekonomi Kreatif"



MAJU:

- ❑ Masyarakat Provinsi Papua telah tampil sebagai masyarakat dengan peradaban yang lebih tinggi baik secara fisik (infrastruktur, perdagangan, ekonomi dan kesejahteraan) dan memiliki pikiran visioner tentang kemajuan daerah dan negara.
- ❑ Maju juga mengandung arti afirmasi, yaitu bahwa tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan, terutama kesejahteraan OAP yang saat ini masih relatif tertinggal dalam pembangunan baik dari sisi partisipasi maupun hasil pembangunan



BERKELANJUTAN:

Pembangunan di Provinsi Papua berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan baik secara sosial, ekonomi, kelembagaan maupun dari sisi daya dukung lingkungan



EKONOMI BIRU:

Provinsi Papua memanfaatkan sumber daya lautan dan pesisir secara optimal untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat untuk mencapai kemajuan secara berkelanjutan



EKONOMI KREATIF:

Pembangunan ekonomi di Provinsi Papua akan bersumber dari kreatifitas masyarakat di Provinsi Papua sekaligus mengadopsi perkembangan pengetahuan dan teknologi mutakhir untuk kemajuan dan kesinambungan pembangunan



AGROINDUSTRI:

Provinsi Papua sebagai provinsi hijau akan mendayagunakan sumber daya alam untuk kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat



Lima Sasaran Utama Visi Papua 2025-2045



Peningkatan Pendapatan per Kapita



Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan



Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Daya Saing dan Inovasi Daerah



Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia



Penurunan Emisi GRK dan Masyarakat yang Berketahanan Iklim Menuju Net Zero Emission



Diwujudkan melalui:

17 Arah (Tujuan), 8 Misi, dan 45 Indikator Utama Pembangunan



BAB IV

Visi dan Misi Daerah



4.1 VISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045

Visi menjadi suatu Inspirasi tentang bagaimana suatu wilayah atau daerah berkembang, bertransformasi, atau mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Visi juga mencerminkan aspirasi dan cita-cita masyarakat serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan wilayah tersebut. Definisi visi jangka panjang daerah mencakup visi tentang perkembangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur, serta nilai-nilai, identitas, dan karakteristik unik yang ingin dipertahankan atau ditingkatkan dalam masa depan. Visi jangka panjang daerah berfungsi sebagai landasan atau kerangka kerja bagi perencanaan dan pengembangan wilayah, membantu memandu kebijakan dan program, yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi tersebut. Selain itu, visi ini juga dapat memotivasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Visi jangka panjang daerah juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang kuat, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah mereka.

Sesuai dengan analisis yang dikembangkan, pernyataan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045 adalah:

***”Provinsi Papua Maju dan Berkelanjutan
Berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan Ekonomi Kreatif”***



Selanjutnya visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Maju** merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti 1 v berjalan (bergerak) ke muka; tampil ke muka: 2 v menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang; 3 telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi: dan 4 cerdas; berkembang pikirannya; berpikir dengan baik. Dalam konteks visi pembangunan Provinsi Papua maka maju dapat diartikan bahwa pada tahun 2045 masyarakat Provinsi Papua telah tampil sebagai masyarakat dengan peradaban yang lebih tinggi baik secara fisik (infrastruktur, perdagangan, ekonomi dan kesejahteraan) dan memiliki pikiran visioner tentang kemajuan daerah dan negara. Di dalam visi maju juga mengandung arti afirmasi, yaitu bahwa tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan, terutama kesejahteraan orang asli Papua (OAP) yang saat ini masih relatif tertinggal dalam pembangunan baik dari sisi partisipasi maupun hasil pembangunan.
- b. **Berkelanjutan** merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti v berlangsung terus-menerus; berkesinambungan. Dalam kontak visi pembangunan Provinsi Papua maka berkelanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan di Provinsi Papua berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan baik secara sosial, ekonomi, kelembagaan maupun dari sisi daya dukung lingkungan.
- c. **Ekonomi Biru** adalah pengelolaan kegiatan sosial dan ekonomi yang mendorong eksploitasi, inovasi, dan pengelolaan laut dan sumber daya 'biru' yang memberi kehidupan secara berkelanjutan. Dalam konteks visi pembangunan di Provinsi Papua memiliki arti bahwa Provinsi Papua sebagai bagian dari negara kepulauan Indonesia yang memiliki sumber daya lautan yang luas akan memanfaatkan sumber daya lautan dan pesisir secara optimal untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat untuk mencapai kemajuan secara berkelanjutan.
- d. **Agroindustri** merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya. Dalam konteks visi pembangunan di Provinsi Papua, agroindustri memiliki arti bahwa Provinsi Papua sebagai provinsi hijau akan mendayagunakan sumber daya alam untuk kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. **Ekonomi Kreatif** adalah kegiatan ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ekonomi kreatif didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya, termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital. Dalam konteks visi pembangunan di Provinsi Papua, ekonomi kreatif memiliki arti bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Papua akan bersumber dari kreatifitas masyarakat di Provinsi Papua sekaligus mengadopsi perkembangan pengetahuan dan teknologi mutakhir untuk kemajuan dan kesinambungan pembangunan.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2025-2045 selanjutnya diukur dengan pencapaian lima sasaran visi dan indikator pencapaiannya sebagaimana Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Sasaran Visi dan Indikator Pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Papua 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline				Target	
		2020	2021	2022	2023	2025	2045
Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	44,59-67,49	45,40-69,88	45,95-73,68	47,32-78,08	51,39 - 92,17	124,57 - 536,26
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	69,22	70,09	69,01	70,93	72,45	88,42
	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan (%)	14,97	14,77	14,48	14,16	14,30	15,67
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	3,15	3,09	2,94	2,86	2,72 – 3,52	5,57 – 6,27
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	15,35-15,67	14,88-15,22	14,79-15,05	14,26-14,75	13,51 – 13,96	5,61 - 6,37
	Rasio Gini (Indeks)	0,326	0,328	0,327	0,335	0,339	0,352
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,42-0,44	0,42	0,39-0,41	0,39-0,40	0,39 – 0,41	0,36 – 0,48
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Daya Saing dan Inovasi Daerah	Indeks Pelayanan Publik		3*				
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)						
	Indeks Daya Saing Daerah			2,73*			
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia						
	Indeks Pembangunan Manusia	60,44*	60,62*	61,39*	62,25*		
Pelestarian ekologi dan Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%) (tahunan) <i>(Sumber : RUED Prov. Papua)</i>	97,85	97,93	98,01	98,09	98,16	99,53

- a. Sasaran visi pertama yaitu “**Peningkatan Pendapatan Per kapita**” akan dicapai dengan upaya transformasi ekonomi yang terus berlangsung melalui peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah pada sektor pertanian dan agroindustri, perikanan dan kelautan, pariwisata serta ekonomi kreatif. Upaya transformasi ekonomi daerah tersebut secara ekstensif akan menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat yang selanjutnya akan menjadi basis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif tersebut, PDRB per-kapita masyarakat Provinsi Papua akan mengalami peningkatan dari sebesar Rp.93,6 juta pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp.145 Juta pada tahun 2045. Demikian juga halnya dengan indeks ekonomi biru diperkirakan akan mengalami peningkatan dari sebesar 43,9 pada tahun 2025 menjadi sebesar 398,21 pada tahun 2045. Sedangkan kontribusi sektor industri terhadap total PDRB akan mengalami peningkatan signifikan menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2045.



- b. Sasaran visi kedua yaitu '**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**' akan dicapai melalui dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Selain itu, intervensi tersebut juga akan dilakukan dengan upaya pemerataan hasil pembangunan baik antar golongan penghasilan maupun antar wilayah di Provinsi Papua. Dalam perspektif tersebut, tingkat kemiskinan yang pada tahun 2025 mencapai sebesar 23 persen akan mengalami penurunan menjadi kisaran angka 5 persen pada tahun 2045. Kemudian rasio gini akan mengalami penurunan dari sebesar 0,38 pada tahun 2025 menjadi sebesar 0,25 pada tahun 2045.
- c. Sasaran visi ketiga yaitu '**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Daya Saing dan Inovasi Daerah**' akan dicapai melalui akan tercapai dengan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang profesional dan menciptakan iklim yang kondusif untuk berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, selain penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur daerah, pembangunan sumber daya manusia yang semakin mempunyai keahlian yang dibutuhkan, regulasi yang semakin mendorong terciptanya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam perspektif tersebut, indikator indeks pelayanan publik, indeks kepemimpinan kepala daerah dan indeks daya saing daerah dapat meningkat secara signifikan dan akan menunjukkan Provinsi Papua sebagai satu wilayah yang terkemuka dan kondusif bagi penanaman modal sektor agroindustri, ekonomi biru dan ekonomi kreatif.
- d. Sasaran visi keempat yaitu '**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia** akan dicapai melalui akselerasi Papua Cerdas yang tidak hanya mencakup wajib belajar dan pendidikan formal di semua jenjang pendidikan tapi juga menyangkut program-program pendidikan yang terintegrasi dengan penciptaan daya saing daerah di berbagai bidang sesuai dengan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Dalam perspektif tersebut, indeks modal manusia dan indeks pembangunan Manusia Provinsi Papua dalam periode tahun 2025-2045 minimal harus mengalami lompatan yang cukup jauh diatas capaian angka rata-rata nasional.
- e. Sasaran visi keenam yaitu '**Pelestarian ekologi dan Penurunan emisi GRK menuju net zero emission**' akan dicapai melalui fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, fasilitasi peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, perlindungan hutan dan lahan basah, edukasi masyarakat, dukungan riset dan inovasi, serta kerjasama dengan multi-stakeholder dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam perspektif tersebut, diharapkan terjadi Penurunan intensitas emisi GRK yang cukup drastis di Papua selama periode tahun 2025-2045.

4.2 MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045

Visi daerah Provinsi Papua selanjutnya diturunkan ke dalam 8 (delapan) misi daerah Provinsi Papua tahun 2025-2045 yaitu:

- a. **Misi 1: Transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan inklusif**, merupakan satu landasan gerak langkah bagi seluruh segenap pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan percepatan Papua Sehat, Cerdas dan Produktif. Dalam perspektif ini. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan sistem jaminan kesejahteraan sosial terutama bagi OAP harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah;
- b. **Misi 2: Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan produktif**, menjadi komitmen dan gerakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Selain itu, upaya ini penting dalam menciptakan nilai tambah dan produktivitas yang berkelanjutan pada sektor-sektor ekonomi potensial daerah terutama pertanian, agroindustri, perikanan dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. **Misi 3: Transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi**, merupakan upaya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara profesional, modern dan akuntabel. Dalam perspektif tersebut, transformasi tata kelola juga akan menjamin terlaksananya transformasi kesejahteraan sosial dan transformasi ekonomi yang akan terkait langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
- d. **Misi 4: Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah**, merupakan upaya melaksanakan penggalangan potensi keamanan dan ketertiban wilayah secara berkelanjutan yang berbasis pada supremasi hukum, iklim demokrasi yang kondusif dan ketahanan ekonomi daerah yang fundamental sehingga akan menciptakan kondisi wilayah yang stabil dan kondusif dalam melaksanakan transformasi kesejahteraan sosial, ekonomi dan tata kelola.
- e. **Misi 5: Pembangunan masyarakat yang berketahanan dari sisi sosial budaya dan ekologi**, merupakan upaya untuk menginternalisasikan sistem sosial, agama dan kearifan kebudayaan lokal dalam mewarnai dan memberikan nilai tambah bagi transformasi kesejahteraan sosial, ekonomi dan tata kelola. Masyarakat Papua yang tangguh akan merujuk pada kemampuan masyarakat Papua untuk menghadapi, menanggulangi, dan pulih dari berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan budaya yang potensial mengancam di masa depan;
- f. **Misi 6: Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan**, merupakan upaya untuk menciptakan pembangunan daerah yang lebih seimbang dalam hal distribusi kekayaan, kesempatan, dan manfaat pembangunan, dan pada akhirnya tercipta kualitas



hidup yang lebih merata diantara variasi dan perbedaan yang ada diantara berbagai wilayah yang ada di Provinsi Papua

- g. **Misi 7: Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan mudah diakses, serta kemandirian pangan**, merupakan upaya percepatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang meningkatkan akses konektivitas antar wilayah, penyediaan sumber daya energi, perumahan dan pemukiman, sanitasi, telekomunikasi dan sarana prasarana infrastruktur lainnya yang akan menjadi kondisi perlu bagi terjadinya transformasi kesejahteraan sosial, ekonomi dan tata kelola.
- h. **Misi 8: Peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan**, merupakan upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan. Misi ini mencerminkan kesadaran akan perlunya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Misi RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045 merupakan hasil penyelarasan kontekstual Papua dengan dokumen RIPP 2022-2041 dan RPJMN 2025-2045. Keselarasan antara visi dan misi Provinsi Papua dengan dokumen RIPP 2022-2041 dan RPJMN dapat dilihat dalam Gambar IV.1.

Gambar IV.1 Penyelarasan RPJPN 2025-2045 dan RIPP 2022-2041 dalam RPJPD Papua 2025-2045



Dalam Gambar IV.1 dapat dilihat bahwa delapan misi pembangunan provinsi papua selaras dengan delapan misi pembangunan dalam RPJPN 2025-2045. Sedangkan misi RIPP 2022-2041 lebih sempit dan fokus pada tiga misi utama yaitu Papua Sehat, Papua

Cerdas dan Papua Produktif telah tercakup ke dalam delapan visi RPJPD Propinsi Papua 2025-2045.



BAB V

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab ini memuat arah kebijakan sebagai kerangka kerja pembangunan dalam 4 tahapan pembangunan untuk mencapai visi daerah. Selain itu, bab ini juga memuat sasaran pokok yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.



Pulau Liki, Sarmi

Merupakan salah satu pulau terluar yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik dan memiliki keindahan alam luar biasa.



Transformasi Pembangunan Provinsi Papua 2025-2045:

Untuk mencapai visi pembangunan 2025-2045, Provinsi Papua harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.

Transformasi Pembangunan Papua 2025-2045



01

Transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan inklusif

Arah Pembangunan:

- Kesehatan untuk Semua
- Pendidikan Berkualitas yang Merata
- Perlindungan Sosial yang Adaptif



02

Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan produktif

Arah Pembangunan:

- Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- Penerapan Ekonomi Hijau
- Integrasi Ekonomi Domestik
- Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



03

Transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi

Arah Pembangunan:

- Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Keberhasilan transformasi secara menyeluruh perlu didukung oleh landasan dan kerangka implementasi transformasi sebagai faktor pemampu

Landasan Transformasi



Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah

Arah Pembangunan:

- Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat
- Stabilitas Ekonomi Makro
- Otonomi Khusus Papua yang menyejahterakan Orang Asli Papua



Pembangunan masyarakat yang berketahanan dari sisi sosial budaya dan ekologi

Arah Pembangunan:

- Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- Lingkungan Hidup Berkualitas
- Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan
- Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kerangka Implementasi



Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan



Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan mudah diakses, serta kemandirian pangan



Peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan



BAB V

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok



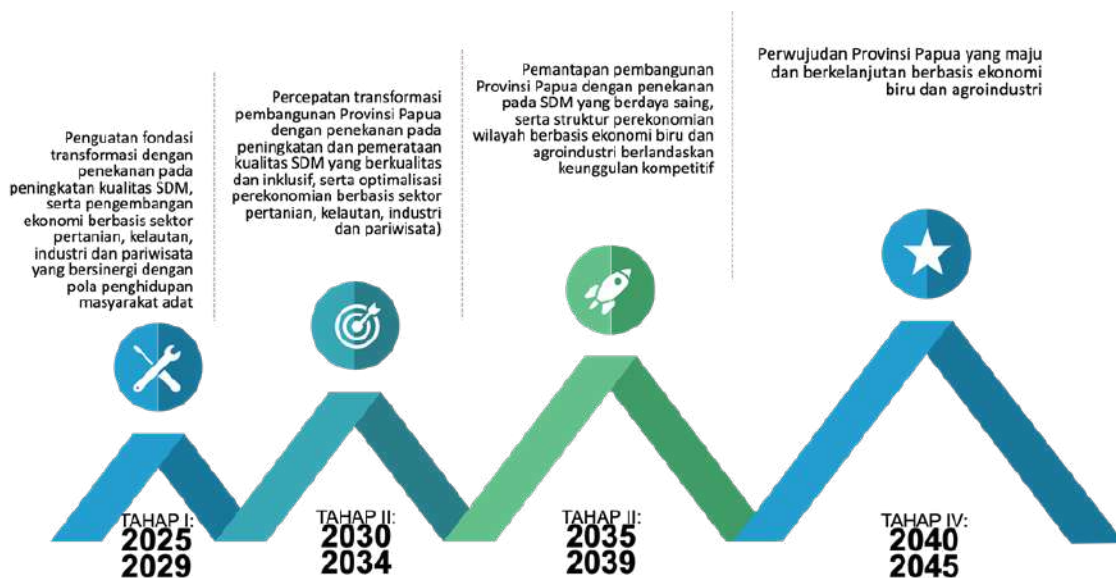
Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok pembangunan daerah merupakan titik antara yang akan dilalui oleh daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan tahapan dan koridor pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pemetaan terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dilakukan dengan menganalisis rangkaian permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang dapat terdeteksi dari capaian kinerja maupun evaluasi pembangunan daerah pada masa yang lalu, selanjutnya rumusan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah akan banyak berkaitan dengan penyelesaian masalah dan solusi yang paling layak. Selain itu, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperhitungkan dinamika wilayah dan tantangan yang diperkirakan akan muncul selama periode 2025-2045.

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan daerah disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika isu strategis di Papua. Sesuai dengan siklus dan skema perencanaan pembangunan daerah, Pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045 akan terbagi kedalam 4 (empat) tahapan periode pelaksanaan sesuai dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan RPJPD Tahap Pertama yang akan berlangsung dalam masa pemberlakuan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dengan tema **penguatan fondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat**;
- b. Pelaksanaan RPJPD Tahap Kedua yang akan berlangsung dalam masa pemberlakuan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2030-2034, dengan tema **percepatan transformasi pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berkualitas dan inklusif, serta optimalisasi perekonomian berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata**;
- c. Pelaksanaan RPJPD Tahap Ketiga yang akan berlangsung dalam masa pemberlakuan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2035-2039, dengan tema **pemantapan pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada SDM yang berdaya saing, serta struktur perekonomian wilayah berbasis ekonomi biru dan agroindustri berlandaskan keunggulan kompetitif**, dan
- d. Pelaksanaan RPJPD Tahap Keempat yang akan berlangsung dalam masa pemberlakuan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2040-2045, dengan tema **perwujudan Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif**.

Gambar V.1 Tahapan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045



Sumber : Data diolah, 2024

5.1.1 Tahap Pertama (2025-2029)

Tahap pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua yang terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2025-2029 dengan tema

Penguatan fondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat.

Transformasi Sosial akan berfokus pada upaya Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Ekonomi akan difokuskan pada upaya untuk Penguatan klaster-klaster ekonomi pertanian, kelautan, industri dan pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, pada saat yang sama juga akan diperkuat adanya Transformasi Tata kelola dengan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

5.1.2 Tahap Kedua (2030-2034)

Tahap Kedua pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua yang terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2030-2034 akan diarahkan pada upaya Percepatan transformasi pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berkualitas dan inklusif, serta optimalisasi perekonomian berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata.

Transformasi Sosial akan difokuskan pada upaya Percepatan pemerataan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif. Kemudian dalam lingkup upaya Transformasi Ekonomi akan difokuskan pada upaya Peningkatan produktivitas secara masif melalui keterkaitan antar klaster ekonomi, perluasan hilirisasi SDA dan perluasan akses pasar sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata. Pada saat yang sama juga akan diperkuat adanya Transformasi Tata kelola akan berfokus pada upaya Kelembagaan kolaboratif SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas, dan masyarakat sipil partisipatif.

5.1.3 Tahap Ketiga (2034-2039)

Tahap Ketiga pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua yang terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2030-2034 akan diarahkan pada upaya Pematapan pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada SDM yang berdaya saing, serta struktur perekonomian wilayah berbasis ekonomi biru dan agroindustri berlandaskan keunggulan kompetitif.

Transformasi Sosial akan difokuskan pada upaya Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan. Kemudian dalam lingkup upaya Transformasi Ekonomi akan difokuskan pada upaya Struktur perekonomian wilayah Papua berbasis ekonomi biru dan agroindustri berlandaskan keunggulan kompetitif. Pada saat yang sama juga akan diperkuat adanya Transformasi Tata kelola akan berfokus pada upaya Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri.



5.1.4 Tahap Keempat (2040-2045)

Tahap Keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua yang akan terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2040-2045 akan diarahkan pada pencapaian Perwujudan Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru dan agroindustri. Transformasi Sosial yang ditandai dengan terwujudnya SDM Papua yang unggul. Kemudian dalam lingkup upaya Transformasi Ekonomi sudah terlihat struktur perekonomian wilayah Papua berbasis ekonomi biru dan agroindustri bernilai tambah tinggi, berlandaskan keunggulan kompetitif, serta terhubung dengan jaringan pasar nasional dan global. Pada saat yang sama Transformasi Tata kelola akan terwujud dengan eksisnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Tabel V.1 Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN	TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
TEMA	Penguatan fondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat	Percepatan transformasi pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berkualitas dan inklusif, serta optimalisasi perekonomian berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata	Pemantapan pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada SDM yang berdaya saing, serta struktur perekonomian wilayah berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif berlandaskan keunggulan kompetitif	Perwujudan Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif
Transformasi Sosial	Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pemerataan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	SDM Papua yang unggul
Transformasi Ekonomi	Penguatan klaster-klaster ekonomi pertanian, kelautan, industri dan pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif melalui keterkaitan antar klaster ekonomi, perluasan hilirisasi SDA dan perluasan akses pasar sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata	Struktur perekonomian wilayah Papua berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif berlandaskan keunggulan kompetitif	Struktur perekonomian wilayah Papua berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif bernilai tambah tinggi, berlandaskan keunggulan kompetitif, serta terhubung dengan jaringan pasar nasional dan global
Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi , peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Kelembagaan kolaboratif SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas, dan masyarakat sipil partisipatif	Kelembagaan adaptif , SDM ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif



5.2 SASARAN POKOK

5.2.1 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Sasaran pokok, arah (tujuan) pembangunan daerah dan indikator utama pembangunan daerah merupakan rangkaian kerangka kerja logis strategi yang akan diterapkan dalam mencapai visi dan misi jangka panjang daerah yang sekaligus akan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi RPJPN 2025-2045 sesuai dengan konteks, karakteristik dan potensi wilayah Provinsi Papua pada umumnya.

Sasaran pokok pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025-2045 dirumuskan dari 17 (tujuh belas) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang juga dilengkapi dengan 45 indikator utama yang menjadi alat ukur atas kemajuan pelaksanaan masing-masing arah kebijakan pembangunan daerah tersebut. Penentuan sasaran pokok pembangunan daerah tersebut juga didasarkan pada hasil analisis konsolidasi sumber perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua, yaitu: arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045), Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2022-2041, Evaluasi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 dan hasil identifikasi isu strategis jangka panjang daerah. Selanjutnya, uraian rangkaian sasaran pokok, arah pembangunan daerah, indikator utama pembangunan daerah, antara lain:

5.2.1.1 Sasaran Pokok Terwujudnya Papua Sehat

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Pertama, yaitu; **Terwujudnya Papua Sehat**, yang diuraikan kedalam Arah Pembangunan Daerah **Kesehatan untuk Semua (IE1)** yang terdiri dari 4 indikator Pembangunan Daerah (IUP), yaitu:

- a. Meningkatnya usia harapan hidup (UHH) dari sebesar 69,2 tahun pada tahun 2025 menjadi selama 76,15 tahun pada tahun 2045
- b. Kesehatan Ibu dan Anak
 - 1) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) akan mengalami penurunan dari 343 kasus pada tahun 2025 menjadi 47 kasus pada tahun 2045
 - 2) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) akan mengalami penurunan tajam, dari sebesar 13,5 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2045
- c. Penanganan Tuberkulosis dan Malaria:
 - 1) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) akan mengalami peningkatan, dari sebesar 91 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2045
 - 2) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) akan mengalami peningkatan, dari sebesar 91 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2045
 - 3) Cakupan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria akan mengalami peningkatan signifikan dari 60 persen menjadi 100 persen

- d. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 akan dapat dipertahankan pada level 99 persen.

5.2.1.2 Sasaran Pokok Terwujudnya Papua Cerdas

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Kedua, yaitu; **Terwujudnya Papua Cerdas**, yang diuraikan kedalam Arah Pembangunan Daerah **Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE2)** dan terdiri dari 3 indikator Pembangunan Daerah (IUP), yaitu:

- a. Meningkatnya Hasil pembelajaran siswa, yaitu:
- 1) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca akan mengalami peningkatan dari kisaran poin 9-11 pada tahun 2025 menjadi kisaran poin 69-71 pada tahun 2045
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi numerasi akan mengalami peningkatan dari kisaran poin 0,00-2,00 pada tahun 2025 menjadi kisaran poin 61,50-63,50 pada tahun 2045
 - 3) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca akan mengalami peningkatan dari kisaran poin 16-18 pada tahun 2025 menjadi kisaran poin 59,85-61,85 pada tahun 2045.
 - 4) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca akan mengalami peningkatan dari kisaran poin 9-11 pada tahun 2025 menjadi kisaran poin 69-71 pada tahun 2045.
 - 5) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun akan mengalami peningkatan dari selama 7,6 tahun pada tahun 2025 menjadi selama 9,6 tahun pada tahun 2045.
 - 6) Angka harapan sekolah akan mengalami perkembangan dari selama 12 tahun pada tahun 2025 menjadi selama 16,7 tahun pada tahun 2045
- b. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi akan mengalami peningkatan dari sebesar 9,34 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 11,29 persen pada tahun 2045
- c. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi akan mengalami peningkatan dari sebesar 55,47 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 75,00 persen pada tahun 2045.

5.2.1.3 Sasaran Pokok Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial afirmatif terutama Bagi OAP

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Ketiga, yaitu; **Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial afirmatif terutama Bagi OAP**, yang diuraikan kedalam Arah Pembangunan Daerah **Perlindungan Sosial yang Adaptif (IE3)** dan terdiri dari 3 indikator Pembangunan Daerah (IUP), yaitu:

Tingkat kemiskinan akan dapat ditekan menjadi 5,61-6,37 persen pada tahun 2045 dari sebesar 13,51-13,96 persen pada tahun 2025



- a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Papua akan mengalami peningkatan, dari sebesar 26 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 76 persen pada tahun 2045
- b. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal akan mengalami peningkatan dari 15 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 45 persen pada tahun 2024.

5.2.1.4 Sasaran Pokok Terwujudnya Papua Produktif berbasis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang ditopang dengan penerapan IPTEK dan Inovasi

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Keempat, yaitu; **Terwujudnya Papua Produktif berbasis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang ditopang dengan penerapan IPTEK dan Inovasi**, yang diuraikan kedalam 4 Arah Pembangunan Daerah (IE4, IE5, IE6, dan IE7) dan 12 indikator Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Arah Pembangunan Daerah **Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE4)**, yang akan diukur dengan indikator-indikator berikut ini:
 - 1) Kontribusi PDRB Sektor Unggulan Lokal ditandai dengan :
 - (a) Kontribusi PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan mengalami peningkatan dari sebesar 14,30 persen tahun 2025 menjadi sebesar 30,67 persen pada tahun 2045.
 - (b) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan akan mengalami peningkatan dari sebesar 2,72 – 3,52 persen tahun 2025 menjadi sebesar 5,57 – 6,27 persen pada tahun 2045.
 - 2) Pengembangan pariwisata yang ditandai dengan:
 - (a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum akan mengalami peningkatan dari sebesar 1,15 - 1,24 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 1,72 persen pada tahun 2045.
 - (b) Jumlah tamu wisatawan mengalami peningkatan dari sebesar 8,1 ribu orang pada tahun 2025 menjadi sebesar 16,2 ribu orang pada tahun 2045.
 - 3) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif akan mengalami peningkatan signifikan dari sebesar 5,63 – 6,57 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 6,69 – 7,43 persen pada tahun 2045.
 - 4) Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD :
 - (a) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah akan mengalami peningkatan dari sebesar 99,59 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 99,64 persen pada tahun 2045.
 - (b) Rasio Kewirausahaan Daerah akan mengalami peningkatan dari sebesar 0,99 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 1,91 persen pada tahun 2045.
 - (c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB akan mengalami peningkatan dari sebesar 1,17 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 3,37 persen pada tahun 2045.
 - (d) Deviden BUMD terhadap PDRB akan mengalami peningkatan dari sebesar 0,11 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 0,82 persen pada tahun 2045.

- 5) Penciptaan lapangan Kerja yang Baik ditandai dengan Tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan dari 2,23 persen menjadi 1,31 persen pada tahun 2045.
 - 6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan akan mengalami peningkatan dari sebesar 50,53 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 38,19 persen pada tahun 2045.
 - 7) Proporsi UMKM yang menggunakan alat pembayaran digital akan mengalami peningkatan dari sebesar 49,50 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 75,72 persen pada tahun 2045.
- b. Arah Pembangunan Daerah **Penerapan Ekonomi Hijau (IE5)**, yang akan diukur dengan indikator Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau yang ditandai dengan;
- 1) meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau Daerah dari sebesar 72,45 pada tahun 2025 menjadi sebesar 88,42 pada tahun 2045
 - 2) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Perempuan akan mengalami peningkatan dari sebesar 22,34 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 66,46 persen pada tahun 2045
- c. Arah Pembangunan daerah **Transformasi Digital (IE6)**, yang akan diukur dengan indikator: Meningkatnya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pada tahun 2025 mencapai 3,4 menjadi sebesar 7 pada tahun 2045.
- d. Arah Pembangunan Daerah **Integrasi Ekonomi Domestik (IE7)**, yang akan diukur dengan 3 indikator berikut ini:
- 1) Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi akan mengalami penurunan dari sebesar 9,50 persen tahun 2025 menjadi sebesar 5,48 persen pada tahun 2045.
 - 2) Pembentukan Modal Tetap Bruto akan mengalami peningkatan dari sebesar 36,56 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 40,44 persen pada tahun 2045
 - 3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) akan mengalami peningkatan dari sebesar 45,68 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 51,38 persen pada tahun 2045

5.2.1.5 Sasaran Pokok Terwujudnya pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berimbang

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Kelima, yaitu; **Terwujudnya pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berimbang**, yang diuraikan kedalam Arah Pembangunan Daerah **Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE8)** yang akan diukur dengan indikator Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan, yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya Proporsi Kontribusi PDRB Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua terhadap Nasional dari sebesar 0,21 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 0,25 pada tahun 2045
- b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan akan mengalami peningkatan dari sebesar 30 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2045



- c. Indeks Desa Membangun akan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2045

5.2.1.6 Sasaran Pokok Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, adaptif dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Keenam, yaitu; **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, adaptif dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**, yang diuraikan kedalam Arah Pembangunan Daerah **Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif (IE9)** dan 5 indikator Pembangunan Daerah (IUP), yaitu:

- a. Indeks Reformasi Hukum akan mengalami peningkatan dari kisaran 23,4 pada tahun 2025 menjadi sebesar 57,4 pada tahun 2045
- b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan mengalami peningkatan dari 1,88 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 5 pada tahun 2045
- c. Indeks Pelayanan Publik akan mengalami peningkatan dari 3 pada tahun 2025 menjadi sebesar 5 pada tahun 2045
- d. Indeks Integritas Nasional akan mengalami peningkatan dari kisaran 67 pada tahun 2025 menjadi sebesar 80 pada tahun 2045
- e. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, meliputi;
 - 1) Meningkatnya Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - 2) Meningkatnya Persentase Kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17

5.2.1.7 Sasaran Pokok Terwujudnya Stabilitas dan Kondusivitas wilayah Papua dalam Tatanan Otonomi Khusus Papua

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Ketujuh, yaitu; **Terwujudnya Stabilitas dan Kondusivitas wilayah Papua dalam Tatanan Otonomi Khusus Papua**, yang diuraikan kedalam 3 Arah Pembangunan Daerah (IE10,IE11, IE12 dan 8 indikator Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Arah Pembangunan Daerah **Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat (IE10)**, yang akan diukur dengan indikator Tingkat kondusivitas wilayah, yang ditandai dengan:
 - 1) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya dari sebesar 69 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 86,69 pada tahun 2045
 - 2) Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia dari status sedang pada tahun 2025 menjadi status tinggi pada tahun 2045
- b. Arah Pembangunan Daerah **Stabilitas Ekonomi Makro (IE11)**, yang akan diukur dengan 4 indikator utama pembangunan berikut ini:
 - 1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) akan mengalami peningkatan dari kisaran 3,8 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 7,9 persen pada tahun 2045.
 - 2) Tingkat Inflasi (%) akan mengalami peningkatan penurunan dari kisaran 3,1 - 4,4 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 1,0 – 3,6 persen pada tahun 2045.

- 3) Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan, yang ditandai dengan:
 - (a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB mengalami peningkatan dari sebesar 40,60 persen pada tahun 2025 menjadi sebesar 21,11 persen pada tahun 2045
 - (b) Aset Dana Pensiun/PDRB akan mengalami peningkatan dari sebesar 0,03 persen pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,04 persen pada tahun 2045.
 - (c) Total Kredit/PDRB akan mengalami peningkatan dari sebesar 47,73 persen menjadi 49,83 persen pada tahun 2045.
 - 4) Tabungan masyarakat setara uang giral (Ternak Babi) akan mengalami peningkatan dari sebesar 500,01 milyar rupiah pada tahun 2024 menjadi sebesar 1.203,91 milyar rupiah pada tahun 2045.
- c. Arah Pembangunan Daerah **Otonomi Khusus Papua yang mensejahterakan Orang Asli Papua (IE12)**, yang akan diukur dengan 3 indikator utama pembangunan berikut:
- 1) Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk OAP (Tahun) secara signifikan selama periode tahun 2025-2045
 - 2) Meningkatnya Rerata Lama Sekolah penduduk OAP (Tahun) secara signifikan selama periode tahun 2025-2045 selama periode tahun 2025-2045
 - 3) Meningkatnya Daya Beli Penduduk OAP (Rp.) secara signifikan selama periode tahun 2025-2045 selama periode tahun 2025-2045

5.2.1.8 Sasaran Pokok Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Dalam Keluarga, Komunitas dan Masyarakat Papua

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Keempat, yaitu; **Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Dalam keluarga, komunitas dan Masyarakat Papua**, yang diuraikan kedalam 3 Arah Pembangunan Daerah (IE13, IE14, IE15) dan 6 indikator Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Arah Pembangunan Daerah **Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (IE13)**, yang akan diukur dengan 2 indikator utama pembangunan berikut ini:
 - 1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) akan mengalami peningkatan dari 49,97-48,99 poin pada tahun 2025 menjadi sebesar 55,12-55,83 poin pada tahun 2045
 - 2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) akan mengalami peningkatan dari 39 poin pada tahun 2025 menjadi sebesar 45 poin pada tahun 2045
- b. Arah Pembangunan Daerah **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif (IE14)**, yang akan diukur dengan 2 indikator utama pembangunan berikut ini:
 - 1) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga akan mengalami peningkatan dari 39 poin pada tahun 2025 menjadi sebesar 44 poin pada tahun 2045
 - 2) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) akan mengalami penurunan dari 0,48 poin pada tahun 2025 menjadi sebesar 0,22 poin pada tahun 2045
- c. Arah Pembangunan Daerah **Lingkungan Hidup Berkualitas (IE15)**, yang akan diukur dengan 2 indikator utama pembangunan berikut ini:
 - 1) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah akan mengalami peningkatan dari 0,38 poin pada tahun 2025 menjadi sebesar 0,62 poin pada tahun 2045
 - 2) Perbaikan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan:



- (a) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- (b) Meningkatnya cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
- (c) Meningkatnya cakupan Pengelolaan Sampah

5.2.1.9 Sasaran Pokok Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial, ekonomi dan pelayanan publik secara berkelanjutan yang sejalan dengan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Kesembilan, yaitu; **Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial, ekonomi dan pelayanan publik secara berkelanjutan yang sejalan dengan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola**, yang diuraikan kedalam Arah Pembangunan Daerah **Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan (IE16)** dan indikator pembangunan kondisi Ketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan, yaitu:

- a. Ketahanan Energi yang ditandai dengan
 - 1) Meningkatnya Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*
 - 2) Meningkatnya Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*
 - 3) Meningkatnya Cakupan rumah tangga yang memiliki akses listrik (PLN dan non PLN)
- b. Ketahanan Pangan yang ditandai dengan
 - 1) Produktivitas Komoditi Padi akan mengalami peningkatan dari 3,85 ton per hektar pada tahun 2025 menjadi sebesar 4,00 ton per hektar pada tahun 2045.
 - 2) Produktivitas Komoditi Jagung akan mengalami peningkatan dari 4,70 ton per hektar pada tahun 2025 menjadi sebesar 5,00 ton per hektar pada tahun 2045.
 - 3) Produktivitas Komoditi Kedelai akan mengalami peningkatan dari 1,12 ton per hektar pada tahun 2025 menjadi sebesar 1,50 ton per hektar pada tahun 2045.
 - 4) Produktivitas Komoditi Ubi Kayu akan mengalami peningkatan dari 17,34 ton per hektar pada tahun 2025 menjadi sebesar 20,00 ton per hektar pada tahun 2045.
 - 5) Produktivitas Komoditi Ubi Jalar akan mengalami peningkatan dari 13,01 ton per hektar pada tahun 2025 menjadi sebesar 15,00 ton per hektar pada tahun 2045.
 - 6) Produktivitas Komoditi Talas akan mengalami peningkatan dari 14,28 ton per hektar pada tahun 2025 menjadi sebesar 15,00 ton per hektar pada tahun 2045.
- c. Ketahanan Air, yang ditandai dengan
 - 1) Meningkatnya Kapasitas Air Baku (m³/detik)*
 - 2) Meningkatnya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

5.2.1.10 Sasaran Pokok Terwujudnya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah yang Kesepuluh, yaitu; **Terwujudnya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan**, yang diuraikan kedalam Arah Pembangunan Daerah **Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE17)** dan 2 indikator Pembangunan Daerah (IUP), yaitu:

- a. Indeks Risiko Bencana (IRB) akan mengalami penurunan dari sebesar 122,1 pada tahun 2025 menjadi sebesar 99-80 poin pada tahun 2045
- b. Persentase Penurunan Emisi GRK baik secara tahunan maupun kumulatif selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045



Tabel V.2 Sasaran Pokok Pembangunan Daerah

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	Arah Pembangunan Daerah	No	Indikator Utama	Target Kinerja			
				2025	2045		
1	Terwujudnya Papua Sehat	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	69,2	76,15
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
				a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	343	47
				b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5
				3	Penanganan Tuberkulosis dan Malaria:		
				a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91	100
				b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	100
				c.	Cakupan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1,00	9
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5		
2	Terwujudnya Papua Cerdas	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:		
				a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					i) Literasi Membaca ii) Numerasi	9,09 – 11,09 0,00 – 2,00	69,66 – 71,66 61,50 – 63,50
				b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					i) Literasi Membaca ii) Numerasi	16,00 – 18,00 8,97 – 10,97	59,85 – 61,85 54,94 – 56,94
				c.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,60 – 7,62	9,52 – 9,67
				d.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,41 – 12,19	12,54 – 16,70
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,34	9,34 – 11,29				
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	55,47	75,00				
3		IE3		8	Tingkat Kemiskinan (%)	13,31-13,96	5,61-6,37

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	Arah Pembangunan Daerah	No	Indikator Utama	Target Kinerja		
				2025	2045	
Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial afirmatif terutama Bagi OAP		Perindungan Sosial yang Adaptif	9	Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,03 (2022)	72,55
			10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	45
4	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan Lokal :		
			a.	Kontribusi PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	14,30	30,67
			b.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,72 - 3,52	5,57 - 6,27
			12	Pengembangan Pariwisata		
			a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,15 - 1,24	1,72
			b.	Jumlah Tamu Wisatawan (ribu orang)*	8,1	16,2
			13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5,63 - 6,57	6,69 - 7,43
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a.	Proporsi Jumlah Industri Mikro dan Kecil terhadap jumlah pelaku industri (%)	99,59	99,64
			b.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,99	1,91
			c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,17	3,37
			d.	Deviden BUMD Terhadap PDRB (%)	0,11	0,82
			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,23	1,31
			16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,53	38,19
	17	Proporsi UMKM yang menggunakan aplikasi digital (%)	49,50	75,72		
	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	72,45	88,42		
	b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	22,34	66,46		
	IE6	Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,4	7
	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	9,50	5,48
			21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,56	40,44
			22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	45,68	51,38



Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	Arah Pembangunan Daerah	No	Indikator Utama	Target Kinerja			
				2025	2045		
5	Terwujudnya pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berimbang	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
				a.	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Jayapura (Ibukota Provinsi Papua) sebagai Hub terhadap PDB (%)	0,21	0,25
				b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	30,94	100
				c.	Indeks Desa Membangun (%)		
				d.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	130	100
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, adaptif dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	23,4	57,4
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,88	5,00
				26	Indeks Pelayanan Publik	3,25	5,00
				27	Indeks Integritas Nasional	67,13	80,86
				28	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan		
				a.	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	78,00	100
				b.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	93,00	100
7	Terwujudnya Stabilitas dan Kondusivitas wilayah Papua dalam Tata Otonomi Khusus Papua	IE10	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat	29	Tingkat kondusivitas wilayah		
				a.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	69,31	86,69
				b.	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi
		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	3,8	7,9
				31	Tingkat Inflasi (%)	3,1 - 4,4	1,0 - 3,6
				32	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
				a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	40,60	21,11
				b.	Proporsi Asuransi dan Dana Pensiun terhadap PDRB (%)	0,03	0,04
				c.	Total Kredit terhadap PDRB (%)	47,73	49,83
				33	Tabungan masyarakat setara uang giral (Ternak Babi) (Miliar Rp)	500,01	1.203,91
IE12		34	Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk OAP (Tahun)	46,28	60,00		

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	Arah Pembangunan Daerah	No	Indikator Utama	Target Kinerja			
				2025	2045		
		Otonomi Khusus Papua yang mensejahterakan Orang Asli Papua	35	Rerata Lama Sekolah penduduk OAP (Tahun)	7.44	15,00	
			36	Daya Beli Penduduk OAP (Rp.)	0,8	1,2	
8	Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Dalam keluarga, komunitas dan Masyarakat Papua	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	44,97 - 44,99	55,12 - 55,83
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,46 - 76,57	83,87 – 85,00
		IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39,38 – 39,51	43,43 – 44,36
				40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,48	0,23 – 0,22
		IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,389	0,624
				42	Kualitas Lingkungan Hidup		
				a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,31	80,08
				b.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7,00	50,00
				c.	Pengelolaan Sampah		
					i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	6,21	90
	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	27,11	100				
9	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial, ekonomi dan pelayanan publik secara berkelanjutan yang sejalan dengan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola	IE16	Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan		
				a.	Ketahanan Energi		
					i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	555,00	1190,00
					ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	90,00	60,00
					iii) Cakupan rumah tangga yang memiliki akses listrik (PLN dan nonPLN)	85,00	100,00
				b.	Ketahanan Pangan		
	i) Produktivitas Komoditi Padi (Ton/Ha)	3,85	4,00				



Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	Arah Pembangunan Daerah	No	Indikator Utama	Target Kinerja			
				2025	2045		
			ii) Produktivitas Komoditi Jagung (Ton/Ha)	4,70	5,00		
			iii) Produktivitas Komoditi Kedelai (Ton/Ha)	1,12	1,50		
			iv) Produktivitas Komoditi Ubi Kayu (Ton/Ha)	17,34	20,00		
			v) Produktivitas Komoditi Ubi Jalar (Ton/Ha)	13,01	15,00		
			vi) Produktivitas Komoditi Talas (Ton/Ha)	14,28	15,00		
			c. Ketahanan Air				
			i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0	2,12		
			ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	26,2	100		
10	Terwujudnya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan	IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	122,15	99,55 - 80,25
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
				a.	Kumulatif	23,19	57,86
				b.	Tahunan	39,01	97,35

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi pembangunan daerah Provinsi Papua menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh segenap stakeholder pembangunan daerah di Provinsi Papua dalam membawa Provinsi Papua pada satu titik perubahan yang drastis dan didasarkan pada konteks kekinian yang mempengaruhinya. Arah Kebijakan Transformasi juga mencakup langkah luar biasa dan mendasar yang membawa perubahan positif dan berkelanjutan, menciptakan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya terutama bagi manusia dan peradapan Papua di masa mendatang.

Secara teknis, Arah kebijakan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola dirumuskan dari berbagai analisis relevansi penyelesaian permasalahan pembangunan daerah Provinsi Papua terkini, baik dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, identifikasi dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua dan kajian-kajian tematik serta sektoral pembangunan daerah Provinsi Papua lainnya.



Tabel V.3 Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi				
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua	
Transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan inklusif	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui peningkatan komitmen/ dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	✓	✓	✓	✓										✓	✓	
	2	Peningkatan kualitas tata kelola serta pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP serta <i>telemedicine</i> , dan <i>mobile health services</i> (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau.	✓	✓	✓	✓										✓	✓	
	3	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan	✓	✓												✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	layanan kesehatan di wilayah sulit akses.																
4	Percepatan perbaikan gizi masyarakat, terutama penurunan prevalensi <i>stunting</i> dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.	✓	✓												✓	✓	
5	Percepatan pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk percepatan eliminasi malaria.	✓	✓	✓	✓										✓	✓	
6	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses dan perbatasan.	✓	✓	✓	✓										✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	7	Pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.	✓	✓											✓		
	8	Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata di semua wilayah, termasuk jaringan internet, listrik dan sarana prasarana penanganan limbah medis.	✓	✓											✓		
	9	Percepatan peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB);	✓	✓	✓	✓										✓	
	10	Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat, tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.	✓	✓	✓	✓										✓	
	11	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui sekolah berpola asrama.	✓	✓	✓	✓									✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	12	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	✓	✓											✓		
	13	Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (<i>STEAM</i>) yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.		✓	✓	✓									✓		
	14	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.	✓	✓	✓										✓		
	15	Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatkan kualitas dan	✓	✓	✓										✓	✓	



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.																
16	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.	✓	✓	✓	✓									✓			
17	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	✓	✓	✓	✓									✓			
18	Peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, penelitian dan inovasi	✓	✓	✓												✓	
19	Peningkatan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan	✓	✓	✓												✓	
20	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi	✓	✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	melalui perlindungan sosial adaptif.																
21	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	✓	✓	✓	✓									✓			
22	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	✓	✓											✓			
23	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi,	✓	✓	✓	✓									✓			



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	terutama melalui pemenuhan SPM sosial.																
24	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	✓	✓	✓	✓									✓			
25	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan	✓	✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	26	<p>penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.</p> <p>Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.</p>	✓	✓										✓			
	27	<p>Peningkatan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua</p>	✓	✓	✓	✓										✓	
Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan produktif	1	<p>Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, dan perikanan melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi</p>	✓	✓	✓									✓			



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	berbasis pariwisata, sentra kelautan dan perikanan terpadu, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan.																
	2 Peningkatan pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara melalui peningkatan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda.	✓	✓	✓	✓										✓		
	3 Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	✓	✓												✓		
	4 Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha		✓	✓	✓										✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	5	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi	✓	✓											✓		
	6	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	✓	✓	✓	✓									✓		
	7	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.			✓	✓									✓		
	8	Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.	✓	✓	✓										✓		
	9	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM	✓	✓	✓										✓		



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.																
10	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis bahari dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.		✓	✓	✓									✓			
11	Pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat.	✓	✓	✓	✓									✓			
12	Pengembangan ekonomi kreatif.		✓	✓	✓									✓			
13	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.			✓	✓									✓			
14	Pengembangan pusat riset antariksa.	✓	✓											✓			
15	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon	✓	✓											✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	<p>terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan</p>																



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.																
16	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu		✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).																
17	Peningkatan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik	✓	✓	✓												✓	
18	Peningkatan pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan start up;	✓	✓	✓	✓											✓	
19	Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor unggulan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan.	✓	✓	✓	✓											✓	
20	Penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	✓	✓													✓	



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	vokasi untuk Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal;																
21	Pembangunan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center)			✓	✓											✓	
22	Pengembangan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua	✓	✓	✓	✓											✓	
23	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta mengembangkan kemitraan usaha;	✓	✓													✓	
24	Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha	✓	✓													✓	
25	Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah	✓	✓	✓	✓											✓	
26	Pengembangan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru			✓	✓											✓	
27	Pembangunan destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif;	✓	✓	✓	✓											✓	

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	28	Pengembangan sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi	✓	✓												✓	
	29	Peningkatan peran Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global		✓	✓	✓										✓	
Transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi	1	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, pertanian, dan perkebunan.	✓	✓											✓		
	2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	✓	✓	✓	✓									✓		
	3	Penguatan Integritas Partai Politik.	✓	✓	✓	✓									✓		
	4	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	✓	✓	✓	✓									✓		



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	5	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	✓	✓											✓		
	6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	✓	✓	✓	✓									✓		
	7	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	✓	✓	✓	✓									✓		
	8	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	✓	✓	✓	✓									✓		
	9	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan	✓	✓											✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	pemanfaatan teknologi informasi.																
10	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	✓	✓	✓	✓									✓			
11	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	✓	✓											✓			
12	Percepatan Desain Penataan Daerah	✓	✓													✓	
13	Pengembangan Kelembagaan birokrasi yang efektif dan inklusif	✓	✓	✓												✓	
14	Pelayanan dan penegakkan hukum yang inklusif	✓	✓	✓	✓											✓	
15	Peningkatan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	✓	✓	✓	✓											✓	
16	Peningkatan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan	✓	✓	✓	✓											✓	



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi				
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua	
	17	Peningkatan pemenuhan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	✓	✓	✓	✓											✓	
	18	Peningkatan kepastian hukum, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat adat	✓	✓	✓	✓											✓	
Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	1	Peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi didukung oleh peningkatan konektivitas dan mobilitas pada kawasan perbatasan.	✓	✓	✓										✓			
	2	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat.	✓	✓											✓			
	3	Pengembangan komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan	✓	✓	✓	✓											✓	

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	keamanan dan ketertiban masyarakat																
4	Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓											✓	
5	Pengembangan proses pembangunan perdamaian peace building yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓											✓	
6	Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara.	✓	✓	✓	✓									✓			
7	Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 717 (berbatasan dengan perairan Palau).	✓	✓	✓										✓			
8	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	✓	✓	✓	✓									✓			



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi					
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua		
	9	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	✓	✓														✓	
	10	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	✓	✓	✓	✓													✓
Pembangunan masyarakat yang berketahanan dari sisi sosial budaya dan ekologi	1	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	✓	✓															✓
	2	Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan melibatkan tokoh adat dan agama.	✓	✓	✓	✓													✓

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	3	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.	✓	✓											✓		
	4	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	✓	✓	✓	✓									✓		
	5	Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua dalam kesatuan budaya bangsa dan pengembangan etos kerja	✓	✓												✓	
	6	Pengembangan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional		✓	✓	✓										✓	
	7	Penguatan moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	✓	✓												✓	
	8	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka	✓	✓											✓		



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.																
9	Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.	✓	✓	✓	✓									✓			
10	Penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana	✓	✓	✓	✓											✓	
11	Percepatan penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	✓	✓	✓	✓											✓	
12	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan,	✓	✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.																
	13 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.	✓	✓												✓		
	14 Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓										✓		
	15 Penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan.	✓	✓												✓		
	16 Peningkatan kapasitas pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih	✓	✓												✓		



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	adaptif terhadap risiko perubahan iklim.																
17	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat.	✓	✓	✓	✓										✓		
18	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	✓	✓	✓	✓										✓		
19	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	✓	✓	✓	✓										✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
20	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	✓	✓	✓	✓											✓	
21	Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat.	✓	✓											✓			
22	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	✓	✓											✓			
23	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.	✓	✓	✓	✓									✓			
24	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.	✓	✓	✓										✓			
25	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	✓	✓	✓	✓									✓			
26	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	✓	✓	✓	✓									✓			
27	Pengembangan masyarakat Papua yang berwawasan	✓	✓													✓	



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah;																
28	Melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi melalui penerapan ekonomi sirkular.	✓	✓	✓	✓											✓	
29	Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	✓	✓	✓	✓											✓	
30	Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan	✓	✓	✓	✓											✓	
31	Mengelola lanskap hutan yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓											✓	
32	Mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan	✓	✓	✓	✓											✓	

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	33	Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua	✓	✓												✓	
	34	upaya pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	✓	✓	✓	✓										✓	
Implementasi Transformasi	1	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan daerah untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	✓	✓	✓	✓									✓		
	2	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	✓	✓	✓										✓		
	3	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	✓	✓	✓	✓									✓		
	4	Penguatan kerja sama antardaerah dalam	✓	✓											✓		



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.																
5	Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.	✓	✓												✓		
6	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	✓	✓	✓	✓										✓		
7	Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai konektivitas dan hub ekspor ke kawasan Pasifik melalui pengembangan Pelabuhan Depapre.		✓	✓	✓										✓		
8	Pemanfaatan ALKI III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.			✓	✓										✓		
9	Pengembangan konektivitas <i>feeder</i> angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (<i>Roll-On/Roll-Off</i>) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.		✓	✓	✓										✓		
10	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua	✓	✓	✓											✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	melalui pengembangan bandara utama (Sentani di Jayapura), pembangunan dan standardisasi <i>airstrip</i> , pengembangan bandara perairan (<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.																
11	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	✓	✓											✓			
12	Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan yang terintegrasi;	✓	✓												✓		
13	Pembangunan dan Peningkatan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang		✓	✓	✓										✓		
14	Pembangunan dan peningkatan konektivitas	✓	✓												✓		



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	transportasi laut untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang																
15	Pembangunan dan Peningkatan konektivitas transportasi udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang	✓	✓													✓	
16	Pembangunan waduk multiguna untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, dan energi listrik.		✓	✓										✓			
17	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.		✓	✓	✓									✓			
18	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang di kota sedang seperti Jayapura.	✓	✓	✓										✓			
19	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.			✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	20	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	✓	✓											✓		
	21	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air.		✓	✓	✓									✓		
	22	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	✓	✓	✓										✓		
	23	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.		✓	✓	✓									✓		
	24	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	✓	✓											✓		
	25	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan	✓	✓	✓	✓									✓		



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).																
26	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	✓	✓	✓	✓									✓			
27	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	✓	✓	✓	✓									✓			
28	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	✓	✓											✓			
29	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	✓	✓	✓	✓									✓			
30	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.		✓	✓	✓									✓			
31	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang	✓	✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	berketahanan bencana dan iklim.																
32	Penyediaan rumah layak huni yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓											✓	
33	Penerapan bauran pendanaan dalam peningkatan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓									✓			
34	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah afirmasi	✓	✓	✓	✓									✓			
35	Peningkatan kolaborasi antarpemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	✓	✓	✓	✓									✓			
36	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.		✓	✓	✓									✓			
37	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	✓	✓	✓	✓									✓			



Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi							
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua				
	38	Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	✓	✓	✓	✓												✓			
	39	Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	✓	✓															✓		



BAB VI

Penutup

Bab ini memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



**Tarian
Kepala Panjang
oleh suku Draa,
Distrik Yaffi, Keerom**

*digunakan untuk ritual
penyembuhan untuk
menyerap energi negatif*



Kesinambungan Pembangunan Indonesia dan Provinsi Papua 2025-2045:

Pembangunan Indonesia dan Provinsi Papua 2025-2045 perlu dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan



KAIDAH PELAKSANAAN



Konsistensi perencanaan dan penganggaran



Sistem Insentif



Kerangka Pengendalian



Mekanisme perubahan



Komunikasi publik

Perlu adanya konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan turunan:



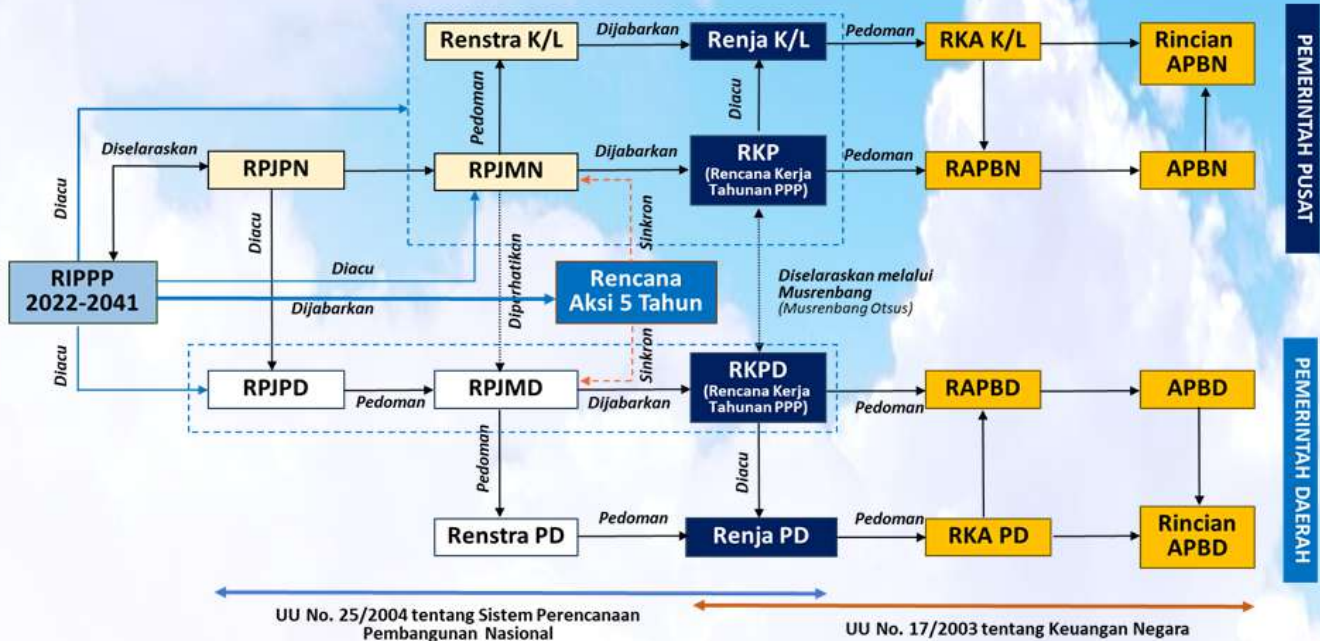
Sinkronisasi periodisasi dan substansi



Memuat upaya transformatif



Pedoman penentuan sasaran dan indikator prioritas pada dokumen perencanaan pembangunan turunan



PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN



Perluasan sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan



Manajemen investasi yang berkualitas



Optimalisasi peran sektor keuangan



BAB VI

Penutup



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai bentuk penjabaran dan/atau mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah

RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 memuat visi, sasaran visi, misi, arah (tujuan) pembangunan daerah, arah kebijakan transformasi dan sasaran pokok pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045. Masing-masing komponen tersebut diinisiasi dengan pendekatan perencanaan terpadu yang mengkonsolidasikan analisis permasalahan dan isu strategis Provinsi Papua dan juga arahan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat berupa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) di samping juga dilakukan proses penyesuaian dengan dokumen RPJPN.

6.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua, terutama dalam hal:

- a. Penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;



- b. Penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program dalam RPJMD, Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan RKPD, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Papua;
- c. Merumuskan indikator dan pengukuran kinerja pimpinan daerah sesuai dengan arsitektur kinerja perencanaan daerah yang telah ditetapkan;
- d. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; serta
- f. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- a. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka masyarakat yang mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, di setiap tahapannya harus memperhatikan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Visi dan Misi kepala daerah, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RPJMD Provinsi Papua;
- b. Lembaga eksekutif dan legislatif Provinsi Papua dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Papua dan masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045;
- c. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, diwajibkan menyebarluaskan dokumen RPJPD ini kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dan partai-partai politik di wilayah Provinsi Papua sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun dapat dilaksanakan secara berkesinambungan;
- d. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 dengan mengerahkan secara optimal semua potensi dan kekuatan sesuai sasaran pokok periode berkenaan;
- e. Dalam rangka implementasi RPJPD Provinsi Papua 2025-2045, Bappeda Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan penjabaran RPJPD ke dalam RPJMD.
- f. Bappeda wajib melakukan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJPD, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan RPJPD dengan pertimbangan bahwa: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Papua dalam mewujudkan visi Provinsi Papua 2025-2045 yaitu **“Provinsi Papua Maju dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan Ekonomi Kreatif”** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Papua; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

6.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.2.1 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RPJPD Provinsi

Tahapan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD Provinsi sebagaimana Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir E.1 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.20 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi.
- b. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada Gubernur.
- c. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- d. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
- e. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.2 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.22 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
- f. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
- g. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.



- h. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

6.2.2 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi

Tahapan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi sebagaimana Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi.
- b. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- c. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada gubernur.

6.2.3 Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah provinsi bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup provinsi baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi dilakukan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah provinsi. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Gubernur dalam mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah provinsi.
- b. Konsistensi antara RPJPD provinsi di wilayah provinsi dengan RPJPN dan RTRW nasional.
- c. Konsistensi antara RPJPD provinsi dengan RTRW dan RPJMD provinsi.
- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah provinsi dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan provinsi.

Adapun tahapan dalam evaluasi hasil RPJPD Provinsi sebagaimana Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.15 dengan mengganti/ menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.51 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi.
- b. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- c. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.51 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.

- d. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada Gubernur.
- e. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- f. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.16 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJPD Antar provinsi.
- g. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.
- h. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima



LAMPIRAN

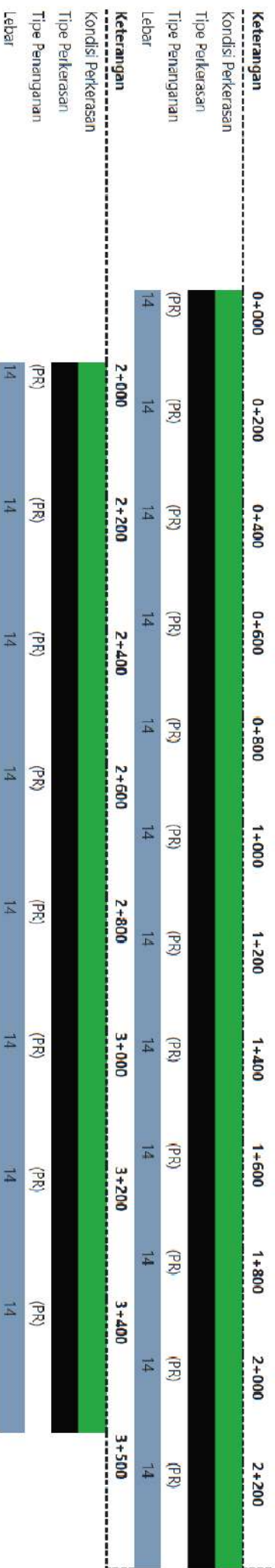
Kemantapan Jalan Provinsi Papua Tahun 2024

Nomor Ruas	NAMA RUAS JALAN	Kabupaten/Kota	DILALU	PANGU RUAHS	BAIK		SEDANG		RISAK RINGAN		RISAK TEBAT		MANTAP		TOTAL MANTAP		Rata2
					KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
100.K.1	Jln. Warena - Asvo V	Kota Jayapura	HERAM	38,94	21,60	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	44,53	21,60	55,47	17,34	44,53	
101.11.K.2	Jln Samudralangi-Angkasa-Base G-Dok II	Kota Jayapura	JAYAPURA UTARA	18,28	18,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	100,00	-	-	
102.18.K.3	Jln. Mitea Terenggara	Kota Jayapura	JAYAPURA UTARA	0,59	0,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	100,00	-	-	
103.21.K.4	Jln. KSUD Dok II	Kota Jayapura	JAYAPURA UTARA	0,37	0,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	100,00	-	-	
104.K.5	Jln. Hemandi - Entropo	Kota Jayapura	JAYAPURA SELATAN	1,23	1,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	100,00	-	-	
105.K.6	Jln. Kadijura	Kota Jayapura	JAYAPURA SELATAN	2,73	2,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	100,00	-	-	
106.K.7	Ring Road Jayapura	Kota Jayapura	JAYAPURA SELATAN	3,28	3,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	100,00	-	-	
107.K.8	Jln. Yimano - Tanah Hitam	Kota Jayapura	JAYAPURA SELATAN	2,82	2,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	100,00	-	-	
108.K.9	Jln. Alernahat Walikota	Kota Jayapura	JAYAPURA SELATAN	7,17	7,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	100,00	-	-	
109.K.10	Simpang Skawoy - Mosso - Bus Kab. Keerom	Kota Jayapura	MUARA TAMI	24,79	0,00	0,00	7,00	28,24	0,00	0,00	17,79	71,76	7,00	28,24	17,79	71,76	
110.K.11	Akses Pelabuhan Perikanan Hemandi	Kota Jayapura	JAYAPURA SELATAN	0,17	0,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00	-	-	
111.K.12	Jln. Kemprotker - Ruper - Telaga Ria	Kota Jayapura	HERAM	12,17	12,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	-	-	
112.1	Jln. Taja - SP V - Kworja	Kabupaten Jayapura	AIURU	64,10	21,00	32,76	6,00	9,36	16,40	25,59	20,70	32,29	27,00	42,12	37,10	57,88	
113.2	Jln. Keeruu - Besum - Genyem	Kabupaten Jayapura	KENTUK	11,48	11,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	100,00	-	-	
114.3	Jln. Ijud - Sawoy - Yaikba - Soab	Kabupaten Jayapura	KEMTUK	20,83	14,60	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	29,91	14,60	70,09	6,23	29,91	
115.4	Jln. Worumlaini - Berap - Demta	Kabupaten Jayapura	NUMORAN	30,36	9,60	31,62	4	13,18	1,56	5,14	15,20	50,07	13,60	44,80	16,76	55,20	
116.5	Jln. Berap-Nimborong-Lehen-Ferigoan-Yeto-Senggi-Mamberamo	Kabupaten Jayapura	NUMORAN	205,03	166,52	81,22	11,55	5,63	11,02	5,37	15,94	7,77	178,07	86,85	26,96	13,15	
117.6	Jln. Kemiri - Depare (Akses Masuk Pelabuhan)	Kabupaten Jayapura	SENTANI BARAT	22,53	22,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	100,00	-	-	
118.K.7	Jln. Welbon - Depare - (Akses Masuk Pelabuhan)	Kabupaten Jayapura	AIURU	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	100,00	0,00	0,00	48,90	100,00	
119.K.8	Jln. Yadauw - Sebum	Kabupaten Jayapura	AIURU	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	100,00	0,00	0,00	62,40	100,00	
121.K.10	Jln. Taja - Omom	Kabupaten Jayapura	SENTANI	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	100,00	0,00	0,00	14,69	100,00	
122.11	Jln. Nendati - Kombi	Kabupaten Keerom	ARSO	6,00	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	-	-	
123.1	Jln. Asvo XIV - Sawla - Kworja	Kabupaten Keerom	ARSO	38,98	11,00	28,22	8,40	21,55	3,80	9,75	15,78	40	19,40	48,77	19,58	50,23	
124.2	Simpang Ulu Kalsenar - Terponus	Kabupaten Keerom	SENGGI	61,28	11,48	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	81,27	11,48	18,73	49,80	81,27	
125.3	Jln. Asvo XIV - Simpang BTS Kota Jayapura/kab. Keerom	Kabupaten Keerom	ARSO	23,73	11,00	46,35	0,00	0,00	8,00	33,71	4,73	19,93	11,00	46,35	12,73	53,65	
126.K.119	Jln Asvo V - Asvo XIV	Kabupaten Keerom	ARSO BARAT	10,60	10,00	94,34	0,60	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	100,00	-	-	
127.K.5	Batas Kota Jayapura - Trans Woor	Kabupaten Keerom	TOWE	51,42	21,00	40,84	3,60	7,00	8,60	16,73	18,22	35,43	74,60	47,84	26,82	52,16	
128.K.6	Jln. Terponus - Simpang Towe Hitam Oksibil	Kabupaten Keerom	TOWE	17,85	7,30	40,90	0,00	5,60	0,00	0,00	9,55	53,50	8,30	46,50	9,55	53,50	
129.K.7	Simpang Asvo XIV Kworja - Simpang Senggi	Kabupaten Keerom	KAUSEHAR	78,55	0,80	1,02	0,00	0,00	29,75	37,67	48,00	61,11	0,80	1,02	77,75	98,98	
130.K.8	Jln Towe Hitam - Bis (Perbatasan Popua Pegunungan	Kabupaten Keerom	TOWE	11,34	0,00	0,84	0,00	7,41	1,00	8,82	9,50	83,77	0,84	7,41	10,50	92,59	
131.K.1	Jln. Sewan - Peam	Kabupaten Samri	SAWAI SELATAN	23,77	10,00	42,07	5,77	24,22	0,00	0,00	8,00	33,66	15,77	66,34	8,00	33,66	
132.K.2	Jln. Angkasa - Tamaja	Kabupaten Samri	SAWAI SELATAN	49,91	1,00	2,00	0,00	0,00	13,91	27,87	35,00	70,13	1,00	2,00	48,91	98,00	
133.K.3	Jln. Takar (Yhyabor) - Eiram	Kabupaten Mamberamo	MAMBERAMO TENGAH	71,13	6,00	8,41	36,00	50,61	5,00	7,03	24,13	33,92	42,00	59,05	29,13	40,95	
134.1	Jln. Burmeso - Gasa - Barapasi	Kabupaten Mamberamo	MAMBERAMO TENGAH	178,28	7,40	4,15	0,00	0,00	40,00	22,44	130,86	73,41	7,40	4,15	170,86	99,85	
135.2	Jln. Burmeso - Eri	Kabupaten Mamberamo	MAMBERAMO TENGAH	50,14	7,40	14,76	0,00	0,00	15,00	29,92	27,74	55,33	7,40	14,76	42,74	85,24	
136.K.3	Jln. Eri - Sikari	Kabupaten Mamberamo	MAMBERAMO TENGAH	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	38,21	24,26	61,79	0,00	0,00	39,26	100,00	
137.K.4	Jln. Tamaja - Kasanawaja - Burmeso	Kabupaten Mamberamo	MAMBERAMO TENGAH	57,14	0,00	0,00	2,00	3,50	14,25	24,94	40,89	71,56	2,00	3,50	55,14	96,50	
138.K.5	Simpang Kenari - Lingkar Danau Bira	Kabupaten Mamberamo	MAMBERAMO TENGAH	16,33	1,00	6,12	0,00	0,00	2,10	12,84	13,25	81,04	1,00	6,12	15,35	93,88	

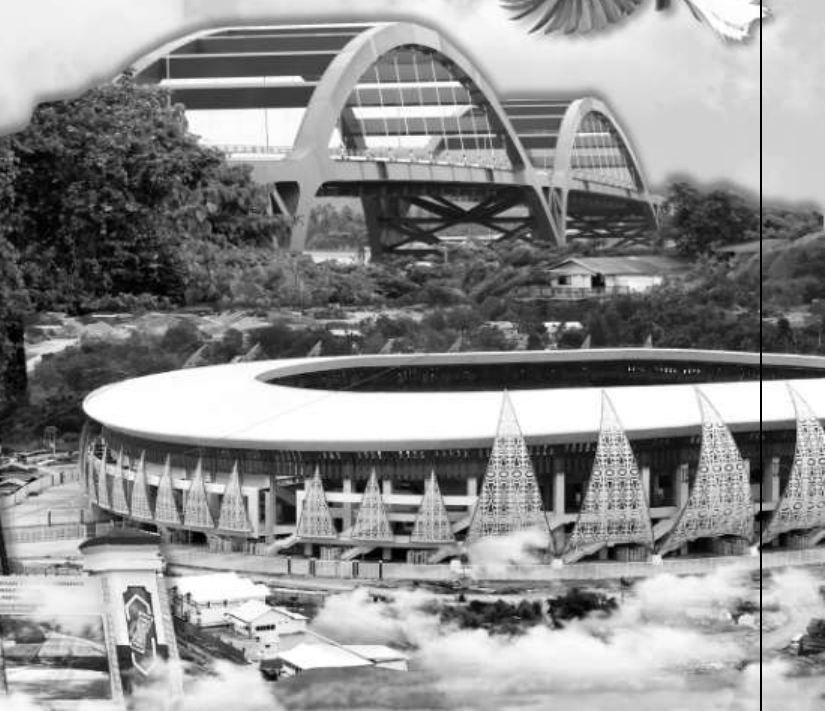
139.K.6	Ases Pelebaran Burmes Logpond	Kabupaten Mamberamo	MAMBERAMO TENGAH	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	37,62	1,99	62,38	0,00	0,00	3,19	100,00	
140.K.7	Simpang Eri Silar - Kodesi	Kabupaten Mamberamo	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	14,65	87,39	85,35	0,00	0,00	102,39	100,00		
141	Jln. Manawi - Jembatan Wamponipi	Kabupaten Kepulauan Yapen	ANGKASERA	22,79	22,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	100,00	-	-		
142	Jln. Serui - Kamanah (akses Masuk Bandara)	Kabupaten Kepulauan Yapen	YAPEN SELATAN	28,27	25,00	88,43	1,00	3,54	0,00	0,00	0,00	2,27	8,03	26,00	91,97	2,27	8,03		
143.K	Jln. Diponegoro	Kabupaten Kepulauan Yapen	YAPEN SELATAN	0,64	0,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	100,00	-	-	
144.K	Jln. M. Yamin	Kabupaten Kepulauan Yapen	YAPEN SELATAN	0,53	0,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	100,00	-	-	
145.K	Jln. Patimura	Kabupaten Kepulauan Yapen	YAPEN SELATAN	0,97	0,77	79,38	0,00	0,00	0,00	0,20	20,62	0,00	0,00	0,00	0,77	79,38	-	20,62	
146.K	Jln. Kamboja	Kabupaten Kepulauan Yapen	YAPEN SELATAN	0,62	0,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	-	-	
147.K	Jln. Mandari	Kabupaten Kepulauan Yapen	YAPEN SELATAN	0,18	0,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00	-	-	
148	Jln. Sumberba - Dawai	Kabupaten Kepulauan Yapen	YAPEN TIMUR	11,79	0,40	3,39	1,00	8,48	5,00	42,41	5,39	45,72	1,40	11,87	10,39	88,13	-	-	
149	Jln. Anus - WOO/Nelabul	Kabupaten Kepulauan Yapen	WINDESI	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	22,60	4,28	77,40	0,00	0,00	5,53	100,00	-	-	
150.K	Jln. Natarui - Kawari	Kabupaten Kepulauan Yapen	WINDESI	33,32	1,25	3,75	0,00	0,00	2,65	7,95	29,42	88,30	1,25	3,75	32,07	96,25	-	-	
151.K	Jln. Yapan Utara - Windesi	Kabupaten Kepulauan Yapen	WINDESI	32,31	27,20	84,18	2,35	7,27	1,00	3,10	1,76	5,45	29,55	91,46	2,76	8,54	-	-	
152.K	Jln. Weren - Borawa	Kabupaten Waropen	ODATE	39,28	9,60	24,44	10,20	25,97	7,68	19,55	11,80	30,04	19,80	50,41	19,48	49,59	-	-	
153.K	Jln. Borawa - Koweda - Barapasi	Kabupaten Waropen	ODATE	76,64	2,00	76,46	5,34	6,97	10,00	13,05	59,30	77,37	7,34	83,43	69,30	90,42	-	-	
154.K	Jln. Borawa - Sunianga - Wapoga Atas	Kabupaten Waropen	ODATE	84,99	7,80	9,18	5,00	5,88	2,19	2,88	70,00	82,36	12,80	15,06	72,19	84,94	-	-	
155.K	Jln. Inggurus - Siofri	Kabupaten Waropen	ODATE	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	100,00	0,00	0,00	76,70	100,00	-	-	
158	Jln. Juncen - Wardo	Kabupaten Birk Numfor	YENDORI	30,82	0,00	0,00	28,30	91,82	1,32	4,28	1,20	3,89	28,20	91,82	2,52	8,18	-	-	
157	Jln. Birk - Bosnik	Kabupaten Birk Numfor	BLAK TIMUR	17,60	15,60	88,64	1,80	10,23	0,20	1,14	0,00	0,00	0,00	17,40	98,86	0,20	1,14	-	
158.11.K	Jln. Birk - Bosnik	Kabupaten Birk Numfor	BLAK TIMUR	2,43	2,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	100,00	-	-		
159	Jln. Birk - Adibai - Marau/Bosnik	Kabupaten Birk Numfor	BLAK TIMUR	27,46	4,60	16,75	19,20	69,92	2,66	9,69	1,00	3,64	23,80	86,67	3,66	13,33	-	-	
160.11.K	Jln. Arah Ke Adibai	Kabupaten Birk Numfor	BLAK UTARA	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	39,52	1,50	60,48	0,00	0,00	2,48	100,00	-	-	
161.11.K	Jln. Koren - Doubo	Kabupaten Birk Numfor	BLAK BARAT	29,25	29,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	100,00	-	-		
162	Jln. Wardo - Duber	Kabupaten Birk Numfor	BLAK BARAT	43,91	29,10	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	33,73	29,10	66,27	14,81	33,73		
163	Akses Pelebaran Perikanan Fandol	Kabupaten Birk Numfor	BLAK KOTA	0,19	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	-	-		
164	Jln. Amroben - Iodsub - Etefo	Kabupaten Birk Numfor	BLAK TIMUR	13,33	13,10	98,27	0,23	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	100,00	-	-		
165	Jln. Lingkar Pulau Numfor	Kabupaten Birk Numfor	NUMFOR TIMUR	74,53	36,32	48,73	24,12	32,36	0,00	0,00	14,09	18,91	60,44	81,09	14,09	18,91	-	-	
166	Jln. Doubo - Sorendikweri - Anyas	Kabupaten Sapiro	SAPIORI TIMUR	16,20	13,30	82,10	0,00	0,00	2,90	17,90	0,00	0,00	0,00	13,30	82,10	2,90	17,90	-	-

Nama ruas : RING ROAD JAYAPURA - SENTANI (LINGKAR DALAM)

Nomor ruas : 104.K



Legenda - Kondisi Perkerasan		Legenda - Tipe Perkerasan		Legenda - Tipe Pemanggran	
■	Kondisi Baik	■	Beton (B)	■	Perbaikan Berkala / Rehabilitasi
■	Kondisi Sedang	■	Kerikil (K)	■	Pemeliharaan Rutin
■	Kondisi Rusak Ringan	■	Tanah (T)	■	Rekonstruksi/Perbaikan
■	Kondisi Rusak Berat	■	Aspal (A)	■	Pembangunan
				■	Long Segment





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA 2024

